

UPAYA PDI PERJUANGAN DALAM TRANSMISI IDEOLOGI
(Studi Terhadap Pendidikan Politik PDI Perjuangan Kota Semarang
2022-2024)

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

NurLailaFitriana

2106016126

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025

NOTA PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi/ Proposal Skripsi

Kepda.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi/ skripsi saudara/i:

Nama : Nur Laila Fitriana

NIM : 2106016126

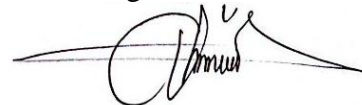
Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Upaya PDI Perjuangan Dalam Transmisi Ideologi (Studi Terhadap Pendidikan Politik PDI Perjuangan Kota Semarang 2022-2024)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Mei 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP :197809302003121001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

UPAYA PDI PERJUANGAN DALAM TRANSMISI IDEOLOGI

(Studi Terhadap Pendidikan Politik PDI Perjuangan Kota Semarang 2022-2024)

Disusun Oleh :

Nur Laila Fitriana

2106016126

Telah ditetapkan dan dipertahankan didepan majelis penguji skripsi
Pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

KEMENTERIAN Agama Sidang

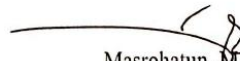
Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP. 197809302003121001

Penguji I



Solkhah Mufrikhah, M.Si
NIP: 198511182016011901

Sekretaris/Penguji II



Masrohatun, M.Si
NIP: 198806212018012001

Pembimbing



Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP : 197809302003121001

PERNYATAAN PENULIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya merupakan murni tidak terdapat karya tulisan orang lain yang pernah diujikan untuk memperoleh gelar sarjana atau yang lainnya disuatu instansi atau perguruan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan ini.

Semarang, 14 Mei 2025



Nur Laila Fitriana
NIM. 2106016126

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kami. Tak lupa shalawat dan salam selalu kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi sebagai Tugas Akhir dengan judul : **UPAYA PDI PERJUANGAN DALAM TRANSMISI IDEOLOGI (Studi Terhadap Pendidikan Politik PDI Perjuangan Kota Semarang 2022-2024).**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Studi S-1 pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Imam Yahya M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. M. Nuqlir Bariklana, M.Si., selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang dan dosen wali yang senantiasa membimbing serta memberikan arahan dari semester pertama hingga saat ini.
4. Masrohatun, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
5. Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag., selaku Pembimbing yang senantiasa membimbing, memberikan saran maupun masukan serta selalu mendorong selama proses penelitian dan penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu dan pengajaran dari awal masuk perkuliahan hingga akhir.
7. Segenap civitas akademik yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. Kadar Lusman, S.E, M.M., selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Semarang sekaligus Ketua DPRD Kota Semarang yang telah bersedia untuk diwawancarai dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

9. Staff DPC PDI Perjuangan yang telah bersedia diwawancarai dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Bapak Wahyono dan Ibu Siti Asriyah selaku orangtua penulis tersayang yang telah mendidik dan merawat dari kecil hingga sekarang serta selalu mendukung, membimbing dan mendoakan yang terbaik sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
11. M. Heri Setiawan selaku kakak tercinta yang juga selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi penulis.
12. M. Nuha Wibisono selaku adik tercinta yang selalu menemani dan mendukung penuh penulis.
13. Seluruh keluarga yang telah mendukung serta mendidik penulis hingga seperti sekarang.
14. Teman-teman angkatan 2021 yang telah mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi penulis.
15. Fuadin Abdu Salam yang telah menemani, mendukung, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi
16. Teman terbaik penulis Muqodimatul Ainia, Dian Novita Mashuroh, Ananda Salsabila Zahiya dan Ana Nur Khasanahyang selalu menemani penulis dalam keadaan apapun dan membantu serta mendoakan yang terbaik sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabati PMII Rayon FISIP Komisariat UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mendukung penulis

Semoga segala bantuan, pertolongan, dan kebaikan semua pihak mendapat berkah dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini dapat menjadi penelitian yang bermanfaat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis



Nur Laila Fitriana
NIM. 2106016126

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, saya persembahkan kepada kedua Orangtua tersayang dan keluarga tercinta yang selalu memberikan segalanya, motivasi, kasih sayang, kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pendidikan serta kepada Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

Man jadda wa jada

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ada jalan)

ABSTRAK

Pendidikan politik merupakan sebuah proses pemberian pengetahuan kepada masyarakat mengenai politik negara dan akhirnya mereka dapat mengimplementasikan pengetahuannya untuk membuat suatu produk kebijakan yang proposional. Dalam PDI Perjuangan pendidikan politik selalu diberikan dalam kegiatan baik formal maupun non formal. Dalam pendidikan politik PDI Perjuangan selalu ada transmisi ideologi yang diberikan kepada anggota atau kadernya. Transmisi ideologi diberikan melalui pendidikan politik baik secara formal maupun non formal dan disampaikan langsung oleh kader PDI Perjuangan yang telah menerima pendidikan lebih tinggi, atau biasanya disampaikan oleh kader dari DPP PDI Perjuangan.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan atau *field research* dengan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus pada transmisi ideologi PDI Perjuangan melalui pendidikan politik, baik pendidikan politik formal maupun non formal. Penelitian ini menggunakan teori pendidikan politik dari Kartono Kartini. Menurut Kartono Kartini, pendidikan politik adalah pengembangan karakter politik agar sadar dalam berpolitik dan bisa menjadi peserta yang memiliki tanggung jawab secara etis atau moral, dan berupaya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan negara. Pendidikan yang dilakukan secara sistematis guna membentuk manusia yang siap, mengingat beragamnya situasi masyarakat yang masih banyak berkembang dan bodohs e cara politik, maka pendidikan politik harus diteruskan kepada generasi muda.

Hasil dari penelitian ini adalah, PDI Perjuangan Kota Semarang dalam melaksanakan transmisi ideologi melalui pendidikan politik baik secara formal maupun non formal cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan beberapa temuan seperti pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan mulai dari konsolidasi, seminar, road show dan pendidikan politik berjenjang yaitu pratama, madya dan utama. Transmisi ideologi yang diberikan melalui pendidikan politik ini bertujuan agar kader, anggota bahkan masyarakat senantiasa mengingat perjuangan soekarno dalam memerdekakan bangsa Indonesia dan memiliki landasan berpikir sehingga PDI Perjuangan dianggap sebagai partainya *wong cilik*. Dalam hal ini PDI Perjuangan selalu menanamkan ideologi soekarno dan marhaenisme kepada kadernya didalam setiap pendidikan politik.

Kata Kunci : Transmisi Ideologi, Pendidikan Politik, PDI Perjuangan.

ABSTRACT

Political education is a process of providing knowledge to the public about state politics and finally they can implement their knowledge to create a proportional policy product. In the PDI Perjuangan, political education is always provided in both formal and non-formal activities. In PDI Perjuangan political education, there is always a transmission of ideology given to its members or cadres. The transmission of ideology is given through political education both formally and non-formally and is delivered directly by PDI Perjuangan cadres who have received higher education, or usually delivered by cadres from the PDI Perjuangan DPP.

This research is a field research with a qualitative method. This research focuses on the transmission of PDI Perjuangan ideology through political education, both formal and non-formal political education. This research uses Kartono Kartini's political education theory. According to Kartono Kartini, political education is the development of political character so that they are aware of politics and can become participants who have ethical or moral responsibilities, and strive to realize the aspirations of society and the state. Education that is carried out systematically in order to form ready humans, considering the diverse situations of society that are still developing and politically ignorant, political education must be continued to the younger generation.

The results of this study are that the PDI Perjuangan of Semarang City in implementing the transmission of ideology through political education both formally and non-formally is quite good. This is evidenced by several findings such as political education carried out by the PDI Perjuangan DPC starting from consolidation, seminars, road shows and tiered political education, namely pratama, madya and utama. The transmission of ideology provided through this political education aims for cadres, members and even the community to always remember Soekarno's struggle in liberating the Indonesian nation and have a basis for thinking so that PDI Perjuangan is considered the party of the little people. In this case, PDI Perjuangan always instills Soekarno's ideology and Marhaenism to its cadres in every political education.

Key word : *Transmission of Ideology, Political Education, PDI Perjuangan.*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR DIAGRAM	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
1. Pendidikan Politik	Error! Bookmark not defined.
2. Ideologi Politik	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Data primer	Error! Bookmark not defined.
3. Data Sekunder	Error! Bookmark not defined.
G. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
1. Wawancara	Error! Bookmark not defined.
2. Observasi	Error! Bookmark not defined.
3. Dokumentasi	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
KERANGKA TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Pendidikan Politik	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pendidikan Politik	Error! Bookmark not defined.
2. Konsep Pendidikan Politik	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Politik	Error! Bookmark not defined.
4. Pendidikan politik dalam lembaga politik	Error! Bookmark not defined.

5. Unsur-Unsur Pendidikan Politik	Error! Bookmark not defined.
B. Transmisi Ideologi Dalam Pendidikan Politik.....	Error! Bookmark not defined.
1. Definisi Ideologi	Error! Bookmark not defined.
2. Fungsi Ideologi	Error! Bookmark not defined.
3. Peran Ideologi Dalam Politik	Error! Bookmark not defined.
4. Transmisi Ideologi	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM	Error! Bookmark not defined.
A. Profil Kota Semarang	Error! Bookmark not defined.
1. Kondisi geografis	Error! Bookmark not defined.
2. Kondisi Demografis.	Error! Bookmark not defined.
3. Fraksi di DPRD Kota Semarang	Error! Bookmark not defined.
B. Profil PDI Perjuangan	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah PDI Perjuangan	Error! Bookmark not defined.
2. Ideologi PDI Perjuangan	Error! Bookmark not defined.
3. Visi – Misi	Error! Bookmark not defined.
5. Sejarah Politik PDI Perjuangan Kota Semarang.....	Error! Bookmark not defined.
6. Struktur Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
UPAYA PDI PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN POLITIK	Error! Bookmark not defined.
A. Pendidikan Politik di Kota Semarang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pendidikan Formal	Error! Bookmark not defined.
1. Kaderisasi Partai	Error! Bookmark not defined.
2. Sekolah Partai	Error! Bookmark not defined.
3. Konsolidasi	Error! Bookmark not defined.
C. Pendidikan Non Formal	Error! Bookmark not defined.
1. Road Show	Error! Bookmark not defined.
2. Penghijauan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Bersih Lingkungan	Error! Bookmark not defined.
D. Hambatan	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
TRANSMISI IDEOLOGI PDI PERJUANGAN	Error! Bookmark not defined.
A. Fokus Transmisi Ideologi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Proses Transmisi Ideologi	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Transmisi Ideologi	Error! Bookmark not defined.
1. Membangun Kesadaran Politik	Error! Bookmark not defined.
2. Mewujudkan Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Error! Bookmark not defined.
3. Mempertahankan Ajaran Soekarno	Error! Bookmark not defined.
D. Evaluasi.....	Error! Bookmark not defined.

BAB VI.....	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
Buku :	Error! Bookmark not defined.
Jurnal :	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	30
Tabel 3.2	32
Tabel 4.1	55
Tabel 4.2	60

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	29
Diagram 3.2	39
Diagram 3.3	41
Diagram 3.4	42
Diagram 3.5	43
Diagram 3.6	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan politik merupakan sebuah persoalan urgen untuk partai, karena banyak partai yang tidak sempat atau bahkan tidak melakukan kegiatan pendidikan politik partai sehingga banyak partai politik yang cenderung praktis dan mengakibatkan partai yang tidak solid. Pendidikan politik menjadi modal awal bagi mereka yang akan terjun langsung kepada masyarakat, memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya politik seperti yang ada di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). PDI Perjuangan menanamkan pendidikan politik kepada kadernya untuk menjadi kader yang loyal dan mampu menjadi penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Tanpa adanya pendidikan politik, akan terjadi penurunan partisipasi politik, partai politik yang kurang solid, bahkan akan susah untuk mencari masa. Melalui pendidikan politik ini akan, terjadi adanya transmisi ideology yang dimiliki oleh partai. Transmisi ideology terjadi karena adanya hegemoni budaya dari partai itu sendiri. Ideology yang ada di PDI Perjuangan merupakan Nasionalis-marhaen. Ideology tersebut disalurkan kepada anggota atau kader partai melalui pendidikan politik. Pengaruh dari transmisi ideology politik ini menjadikan anggota atau kader lebih memiliki jiwa nasionalisme dan loyal terhadap partai.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh (I Gede Wijaya Kusuma, dkk, 2020) yang mengatakan, partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik untuk masyarakat akan mengakibatkan menurunnya partisipasi politik dalam pemilihan umum, dan juga menimbulkan situasi politik yang tertekan tidak sehat dan terjadinya golput atau seseorang yang tidak memberikan kontribusi politiknya karena rendahnya tingkat partisipasi politik. Selain itu, studi yang dilakukan oleh (Recalliandra Marella, dkk, 2024) juga mengatakan bahwa, Pendidikan partai politik adalah sebuah hal yang sangat penting di negara-negara yang berbasis demokrasi, karena demokrasi dan proses demokratisasi memerlukan kondisi yang mutlak untuk pendidikan politik masyarakat.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau (PDI Perjuangan) di kota Semarang adalah partai terbesar dan partai yang konsisten, karena dapat mempertahankan suara dalam beberapa periode terakhir. Hal ini dapat dibuktikan dengan suara dan kursi jabatan

pemerintahan yang selalu mendominasi dalam pemilu. PDI Perjuangan selalu menanamkan jiwa loyalitas terhadap kadernya maupun anggota lainnya seperti relawan. Di Kota Semarang sendiri, kader dan relawan sangat antusias dalam mendukung PDI Perjuangan ketika kampanye pemilu agar memenangkan kontestasi politik ini.

Dominasi kekuasaan inilah yang mampu menarik perhatian agar semua yang tergabung dalam partai ini memiliki solidaritas yang tinggi dan loyalitas dalam mendukung partai. Selain itu, pendidikan politik juga ditanamkan oleh PDI Perjuangan kepada kader dan anggotanya agar memiliki pengetahuan politik, bukan hanya sekedar ikut dan loyal semata. Masyarakat yang berpengetahuan atau pun berpengalaman secara politik, tentu saja mereka sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga mereka dapat terlibat secara aktif maupun langsung dan tidak langsung di dalam semua proses pengambilan kebijakan, memantau proses pengambilan kebijakan publik, dan mereka dapat mewakili kepentingan mereka, dan merespon kebijakan terhadap kebijakan yang muncul di dalam bidang tersebut. Menggunakan pendidikan politik, masyarakat akan diberikan pemahaman sebagai akibatnya bisa terjadi proses transmisi nilai dan kebiasaan meskipun mereka tidak tergabung ke pada partai politik. Untuk mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran politik yang tinggi, maka perlu diselenggarakan pendidikan politik bagi rakyat yang harus dilaksanakan oleh PDI Perjuangan khususnya DPC PDI Perjuangan di Kota Semarang.

Dengan banyaknya kader PDI Perjuangan yang masuk sebagai anggota DPRD dan tiga kali menjadi Walikota Semarang, PDI Perjuangan memiliki peluang untuk terus melaksanakan program sosialisasi terkait pendidikan politik kepada masyarakat luas. Kita dapat melihat bagaimana penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) di Jawa Tengah pada tahun 2013 yang lalu, partisipasi masyarakat tercatat hanya mencapai di angka 58,53%. Meskipun demikian pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah, ditahun 2018 mengalami kenaikan sekitar 8,98% menjadi 67,51%. Perlunya dorongan bagi masyarakat untuk mempunyai kesadaran berpolitik (Recalliandra Marella Zanenci, Sunny Ummul Firdaus, dan Jadmiko Anom Husodo, 2024).

Bukti lain yaitu pada walikota semarang dan DPRD Kota Semarang yang di dominasi oleh PDI Perjuangan. Karena hal inilah PDI Perjuangan menjadi partai terbesar di Kota Semarang atau biasanya orang-orang menyebutnya Semarang sebagai “kandang banteng” karena partai ini menjadi yang terbesar daripada partai lain. Kita tahu bahwa PDI-P selalu menguasai kursi legislatif. Di Kota Semarang, pada periode 2014-2019 dan 2024-

2029 DPRD kota Semarang dipimpin oleh Kadarlusman kader dari PDI Perjuangan dan 21 kader PDI Perjuangan yang masuk sebagai anggota DPRD Kota Semarang dari 50 anggota. Selain itu, dalam tiga periode terakhir Walikota Semarang juga di pimpin oleh kader dari PDI Perjuangan (Recalliandra Marella Zanenci, Sunny Ummul Firdaus, dan Jadmiko Anom Husodo, 2024).

Menggunakan pendidikan politik, masyarakat diberikan pengetahuan agar proses tranmisi nilai dan norma terjadi meskipun mereka tidak terlibat kedalam partai politik. Guna mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran politik yang tinggi, maka perlu adanya pendidikan politik yang harus dilaksanakan oleh PDI Perjuangan khususnya DPC PDI Perjuangan di Kota Semarang. Pada akhir-akhir ini, menjelang pemilu 2024, banyak masyarakat kota Semarang banyak yang ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, khususnya pada saat kampanye bersama PDI Perjuangan. Hal ini dikarenakan adanya proses transfer atau transmisi ideologi adanya hegemoni budaya yang diberikan melalui pendidikan politik dan dari PDI Perjuangan Kota Semarang.

Selain itu, adanya perkembangan media sosial yang sangat cepat, menjadikan masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi. Hal tersebut juga mendi poin plus untuk para partai politik terkhusus PDI Perjuangan agar dapat memberikan pemahaman mengenai politik. Selain itu, PDI-Perjuangan juga memiliki ideologi yaitu nasionalis-marhaen (Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiyati Aisyah dan Deni Candra, 2022). Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada masyarakat dapat berupa penyampaian secara langsung maupun tidak langsung. Namun pada praktiknya, penyampaian materi lebih sering dilakukan secara tidak langsung misalnya dengan menggunakan media massa dan media sosial sebagai perantara (Yan Yan Yuliana, Adityawarman, dan Agus Nurul Syam, 2022).

Pada penelitian ini, akan mendeskripsikan bagaimana model pendidikan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau (PDI Perjuangan) di Kota Semarang dan akan mengungkapkan bagaimana transmisi ideologi melalui pendidikan poliik PDI Perjuangan Kota Semarang. Pendidikan politik memiliki peran yang penting bagi partai politik karena dapat memperkuat pondasi partai, legitimasi dan keberlanjutan partai dalam sistem demokrasi. Dengan pendidikan politik yang terarah, tidak hanya membuat kader yang kompeten, namun juga dapat turut serta dalam membangun demokrasi yang lebih baik. Maka untuk itu, tidak mengherankan jika kader PDI-Perjuangan Kota Semarang sangat memiliki solidaritas dan loyalitas yang tinggi kepada partai, bahkan juga PDI Perjuangan memiliki relawan yang cukup banyak di Kota Semarang, sehingga

dalam mencari dukungan dan suara bisa dibilang cukup mudah bagi PDI-P.

Transmisi ideologi PDI Perjuangan yang menggunakan ideologi Nasionalis-Marhaen kepada kader dan anggota partai memiliki pengaruh yang besar, sehingga para kader dan anggota dalam mendapatkan dukungan masa di setiap kontestasi politik yakni pemilu, selalu mendapatkan suara yang banyak. Pada penelitian ini akan menjadi pembeda dan pelengkap dari penelitian terdahulu, yaitu dengan mengungkap model pendidikan politik PDI Perjuangan Kota Semarang dan Transmisi Ideologi partai melalui pendidikan politik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini akan membahas mengenai dua permasalahan. Berikut rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana upaya PDI Perjuangan dalam melakukan pendidikan politik di Kota Semarang?
2. Bagaimana transmisi ideologi pendidikan politik PDI Perjuangan Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Dari cara penulis merumuskan permasalahan yang akan bahas dalam penelitian mengenai partai politik dan pendidikan politik.

1. Mengungkap upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam melakukan pendidikan politik di Kota Semarang.
2. Mengungkap transmisi ideologi pendidikan politik PDI Perjuangan Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritik

Manfaat dari adanya penelitian ini dapat dipahami menggunakan manfaat secara teoritik dan juga manfaat secara praktis. Adapun beberapa manfaat tersebut sebagaimana yang penulis uraikan dalam skripsi berikut ini :

- a. Secara teori, hasil penelitian ini dapat ditawarkan sebagai gambaran baru dalam bidang keilmuan dan mengembangkan wawasan bagi para pembaca mengenai model pendidikan politik dan transmisi ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kota Semarang.

- b. Penelitian ini mempunyai potensi untuk menyumbangkan manfaat kepada program studi Ilmu politik khususnya di UIN Walisongo Semarang pada partai politik dan pendidikan politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi praktis para penulis lain agar dapat memahami dalam melakukan penelitian yang serupa lebih komprehensif dan lebih mendalam.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman tentang bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan kota Semarang berperan dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan kader partai.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini, bukan merupakan penelitian yang pertama. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh banyak peneliti lain. Namun, pada penelitian kali ini akan menjadi pembeda dan pelengkap penelitian yang sebelumnya. Pada penelitian ini akan terbagi menjadi dua tema yaitu, pendidikan politik dan ideologi politik.

1. Pendidikan Politik

1. Penelitian yang dilakukan oleh (I Gede Wijaya Kusuma, Ida Ayu Putu Widiati, dan Luh Putu Suryani, 2020) dengan judul penelitian “Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Masyarakat”. Penelitian ini membahas mengenai fungsi partai politik dalam legislasi sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi politik. Partai politik wajib mensosialisasikan wacana politiknya kepada publik. Namun dalam implementasinya di lapangan, masih ada partai politik yang belum memaksimalkan fungsinya dalam melakukan pendidikan politik kepada publik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 salah satu fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat luas untuk menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya di depan umum. Pentingnya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik secara maksimal dan pada esensi aktualnya akan dapat memiliki dampak yang sangat baik terhadap masyarakat, yang berarti bahwa masyarakat mampu menjadi orang yang sadar akan kewajibannya dalam memberikan pilihan kepada partai politik atau kandidat yang benar dan tulus dalam hal kesejahteraan rakyat. Implikasi dari partai politik yang tidak melaksanakan pendidikan politik publik adalah untuk menyebabkan

penurunan partisipasi publik dalam pemilihan umum dan ini juga akan menyebabkan kondisi politik yang tampaknya tidak sehat dan memungkinkan abstain tinggi karena rendahnya tingkat partisipasi publik.

2. Penelitian dari (Ilmar Andi Achmad, Henra Saputra Tanjung, Florianus Aloysius Nay, dan Jimmy Charter Atty, 2022) dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pendidikan Politik Sebagai Program Pendidikan Non Formal (Studi di Partai Keadilan Sejahtera)”. Penelitian ini membahas bagaimana pendidikan politik menjadikannya bagi partai politik guna membenahi dan meningkatkan kualitas keanggotaannya. Partai politik adalah sarana untuk membenahi dan meningkatkan kualitas anggota partai. Seiring dengan kemajuan politik di Indonesia, kualitas pengurus partai semakin menurun, dan kebutuhan akan pendidikan politik disinyalir sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pengurus partai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan secara khusus oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Sinjai.

Hasil dari adanya penelitian ini menunjukkan bahwa diadakannya pendidikan politik oleh PKS di Kabupaten Sinjai dilaksanakan dengan banyak metode dan strategi seperti kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan. Pelaksanaannya ditentukan menurut kondisi, jadwal, dan rutinitas yang sesuai, namun tidak menutup kemungkinan adanya adaptasi kegiatan terhadap kondisi yang ada. Selain itu, pendidikan politik yang dilakukan PKS Kabupaten Sinjai selalumemuat tidak hanya muatan politik tetapi juga keagamaan dan tidak lepas dari PKS sebagai partai dakwah. Di sisi lain, pelaksanaan pendidikan politik tidak selalu berjalan dengan lancar, seringkali ada kendala-kendala, antara lain: a) adanya pandangan negatif masyarakat terhadap partai politik, b) komunikasi yang tidak terjalin antara DPC dan DPR yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan politik, c) sarana dan prasarana yang terbatas meliputi tempat dan sarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik, d) terbatasnya dana, dan e) kurangnya kader partai yang dapat menjadi narasumber atau pemateri dalam pelaksanaan pendidikan politik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Recalliandra Marella Zainenci, Sunny Ummul Firdaus, dan Jadmiko Anom Husodo, 2024) dengan judul penelitian “Implementasi Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kabupaten Purworejo Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Partai

Politik”. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana partai politik menjalankan fungsi pendidikan politik PDI Perjuangan. Partai politik adalah lembaga yang sangat dibutuhkan dalam negara demokrasi. Jika kita menggunakan sistem demokrasi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pembentukan partai politik merupakan alat demokrasi yang sangat penting.

Di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi, pendidikan politik merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan, karena demokrasi dan proses demokratisasi memerlukan kondisi mutlak untuk pendidikan politik masyarakat. Bagaimana fungsi pendidikan politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Purworejo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kajian tersebut mencantumkan tujuh kegiatan pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan Purworejo: pendidikan politik melalui sosialisasi, pendidikan politik dilakukan oleh masyarakat, pendidikan politik melalui seni hingga budaya, pendidikan politik melalui agama, dan pendidikan politik melalui pendidikan politik seminar, dan sekolah politik.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Krisna. Y.K. Lompoliuw, Agustinus B. Pati, Trintje Lambey, 2023) dengan judul penelitian “Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado”. Berdasarkan hasil dari adanya penelitian ini terdapat temuan dari PDI Perjuangan berupaya untuk memberikan pendidikan politik kepada pemuda di Kelurahan Tanjung Batu, terlihat jelas bahwa dengan adanya inisiatif berupa kegiatan pendidikan politik ini berjalan dengan baik ketika terdapat pemimpin umum dan pemimpin daerah yang berperan aktif dalam menginisiasi pendidikan politik ini.

Media massa kerap kali memberitakan mengenai agenda golongan putih (golput) yang sering diwarnai oleh wacana-wacana tersebut. Untuk generasi muda, ada faktor-faktor yang membuat mereka mempertanyakan diri mereka, mengapa harus terlibat dalam situasi politik nasional maupun daerah, sedangkan mereka memiliki kesibukan semisal sibuk bekerja, tetapi juga beberapa orang percaya bahwa orang yang memberikan suaranya dalam pemilu akan melakukan hal tersebut karena mereka beranggapan bahwa mereka ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan dengan memilih wakilnya nantinya, mempengaruhi kebijakan dalam pekerjaan mereka nantinya. Fenomena ini tentu menjadi tantangan bagi

partai politik, termasuk juga bagi pendidikan politik. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIPerjuangan) dalam memberikan pendidikan politik kepada generasi muda di kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado.

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah Hasyim dan Sharla Shafa Salsabila Azkia, 2023) dengan judul penelitian “Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024”. Penelitian ini membahas mengenai pedoman hukum bagi partai politik di Indonesia dari perspektif pendidikan politik, hingga dapat digunakan pemilih pemula dalam pemilihan umum sebagai dasar pemilu 2024. Pentingnya pendidikan politik bagi pemilih pemula di pemilu 2024 adalah menjadi pemilih yang cerdas dan memahami dinamika politik yang muncul. Partisipasi pemilih baru didorong oleh adanya pendidikan politik, pengaruh lingkungan, dan motivasi untuk mendapatkan pemahaman setelah pendidikan politik.

2. Ideologi Politik

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Galang Geraldy, 2019) yang berjudul “Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS”. Hasil dari penelitian ini yaitu persaingan partisan dalam pemilu dan sistem politik yang kompleks tampaknya hanya mengutamakan hal-hal yang bersifat simbolis dan artifisial. Kritik dari kalangan elite, pergerakan kaderisasi partai politik, dan matinya partai politik bukan sekadar pertarungan politik ideologis-filosofis. Politik telah merosot menjadi komersialisasi antara elit dan masyarakat. Untuk membongkar asumsi-asumsi di atas, peneliti mengangkat tiga partai politik sebagai objek penelitian yaitu PDIPerjuangan, PSI dan PKS karena ketiganya dianggap memiliki diferensiasi ide dan nilai serta gagasan politik yang khas, dari latar belakang sejarah terbentuknya sampai keputusan-keputusan politik di dalam ruang publik demokrasi. PDIPerjuangan yang memiliki landasan historisitas politik yang kuat dengan nasionalisme-marhaen memang di dalam naskah AD ART nya sangat eksplisit mengelaborasi ide-ide Soekarno tersebut. Namun seringkali secara riil, kebijakan politik PDIPerjuangan, terutama ketika di eksekutif nasional maupun lokal masih ada paradoks. PSI, karena partai baru berdiri, peneliti menyimpulkan bahwa secara teks AD ART juga sangat eksplisit menawarkan ide-ide politik demokrasi sosial

(sosialisme demokrasi), meskipun masih perlu pembuktian ketika di pemerintahan. PKS, partai yang mengalami transformasi ideologi secara transparan, yaitu dari latar belakang politik Islam Fundamentalisme menjadi Islam Moderat, di mana nilai-nilai nasionalisme-sekuler juga mulai tumbuh-kembang di partai ini pasca pemilu 2004.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Hasnu dan Firdaus Syam, 2021) dengan judul “Ideologi Dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDI Perjuangan Dan Islam Moderat PKB”. Penelitian ini menunjukkan bahwa PDIPerjuangan mempunyai landasanpolitik historis yang bersingungan dengan ideologi Markhaenisme dariwujudan ajaran Sukarno. Meski seperti itu, pengambilan keputusan kebijakan PDI Perjuangan di parlemen dan eksekutif seringkali tidak mencerminkan dukungannya terhadap kehidupanmasyarakatawam. Fenomenaserupa terjadi di tubu PKB,partaipolitik yang berideologi Islam moderat.

Platform ininampaknya tidakmenjawab permasalahan inti darimasing-masing kebijakan politik yang diambil. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwater dapat kontradiksi antara ideologi politik marhenisme PDI Perjuangan dan Islam moderatdi tubu PKB ditinjaudari platform politik dan ideologi politik yang tercermin dalam pengambilan sikap di legislatif atupun eksekutif. Pemicunyaadalah partai politik tidak menjalankan fungsi sosialisasi politiknyakepadapimpinanpartaisehinggamenyebabkanrendahnyakepercayaanmasyarakat terhadap keberadaandansifat partai politik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Danuwidjaja dan Manan, 2023) yang berjudul “Hubungan Antara Kaderisasi dan Ideologi dalam Partai Politik: StudiKasus Aktivitas Internal PDIP”. Hasil dari penelitian ini yaitu, terdapat perbedaan mendasar dari teori dan praktishubungan ideologi dan kaderisasi dalam sebuah partai politik. Perbedaan ini dapat dilihatdalam bagaimana partai politik modern seperti yang ditemukan dalam studi kasus di ataslebih berfokus pada persepsi publik terhadap citra partai politik tersebut dan ideologinyadibandingkan terhadap implementasi nilai-nilai dari ideologi itu sendiri.

Perbedaan ini dapatdiasumsikan sebagai perluasan dari motivasi partai politik modern untuk dapat meraihdukungan masyarakat umum demi mendapatkan bagian dalam pemerintahan. Hubunganantara kaderisasi dan ideologi dalam partai politik kemudian berubah menjadi lebih pragmatisdengan kader yang dianggap sebagai entitas yang dapat mengubah persepsi publik terhadappartai politik dan

ideologinya. Kaderisasi kemudian tidak lagi dilakukan untuk dapat memastikan bahwa anggota atau calon anggota memahami ideologi partai politik, namun agar mereka dapat merepresentasikan ideologi partai yang mereka naungi secara baik untuk menciptakan persepsi publik yang baik terhadap partai politik tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan menggunakan cara memperoleh data melalui penelitian langsung di lapangan mengenai “Partai Politik dan Pendidikan Politik Studi Program Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metodologi kualitatif menurut Sugiyono (Abdussamad 2021) mendefinisikan metode yang digunakan pada kondisi alamiah dan peneliti adalah sebagai instrumen. Studi Kasus menurut Hendriansyah (Dewi dan Hidayah 2019) menjelaskan bahwa studi kasus adalah sebuah rancangan penelitian yang sifatnya intens, rinci dan serta sebagai upaya untuk memecahkan masalah.

2. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan secara langsung dan hasil wawancara dengan orang yang bersangkutan serta meninjau terhadap kasus yang sedang dikaji, yang kemudian data tersebut dapat dimasukkan kedalam proses penulisan yaitu “Partai Politik dan Pendidikan Politik Studi Program Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang”.

3. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung, bukan dari informan sebagai pihak pertama subjek penelitian melainkan melalui sumber lain. Contoh dari data sekunder diantaranya ialah, data yang diperoleh menggunakan informasi media massa, arsip pemerintah, dan buku catatan. Data

sekunder pada penelitian ini melalui data yang diperoleh dari dokumen dan arsip desa sebagai informasi tambahan untuk melakukan pencocokan antara kondisi di lapangan dengan yang berada di pemerintahan. Data sekunder peneliti juga berasal dari data yang berasal dari media massa, papan pengumuman, laporan pembangunan atau arsip desa, serta buku catatan yang terkait dengan pembangunan desa.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses mengumpulkan data guna menjawab rumusan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Wawancara

Menurut Saroso (Yusra dkk. 2021) wawancara merupakan cara mendapatkan informasi dari narasumber secara langsung. Dengan menggunakan teknik wawancara, peneliti dapat juga mengajukan pertanyaan secara langsung dengan narasumber dan peneliti juga akan mendapatkan informasi dan jawaban lebih rinci dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti kepada narasumber.

Dalam proses wawancara penulis akan memberikan pertanyaan terkait bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Semarang berperan untuk memberikan dan model pendidikan politik untuk masyarakat dan kader partai serta bagaimana proses transmisi ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang melalui pendidikan politik di Kota Semarang. Pada tahap wawancara, penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi mendalam dari informan yaitu Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kota Semarang dan beberapa pihak terkait. Dengan begitu peneliti tidak akan mengarahkan wawancara pada hipotesis peneliti melainkan berusaha mendapatkan penemuan, persepsi, yang berasal dari informan.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode penelitian empiris itu yang mengandalkan informasi faktual, baik dari dokumen atau observasi lapangan, bergantung pada menggunakan manipulasi apapun informasi faktual, baik melalui dokumen maupun observasi lapangan, tanpa menggunakan manipulasi apapun (Hasanah 2017). Observasi menurut Morris dalam Hasanah (2017) ini adalah aktivitas penggunaan peralatan untuk mengamati dan menjelaskan bagaimana

fenomena untuk tujuan ilmiah atau tujuan lainnya. Tujuan dari adanya observasi dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan, dan observasi mengarah pada pembentukan teori dan hipotesis. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data melalui observasi cara langsung di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Pada proses observasi peneliti akan berusaha memahami apa yang ditemukan dilapangan dengan cara mendengar, melihat dan melakukan pengamatan. Seperti pengamatan terhadap informasi yang diberikan oleh informan tentang pendidikan politik dan transmisi ideologi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan mencatat laporan atau dokumen yang sudah ada (Maryani 2022). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa catatan baik dalam format hard file maupun softfile. Contoh buku, halaman web, informasi media massa, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Nantinya peneliti akan mencari buku, jurnal, maupun transkrip dokumen yang berkaitan dengan Partai Politik dan Pendidikan Politik PDI Perjuangan Kota Semarang. Peneliti akan mengumpulkan data pendukung melalui halaman web PDI Perjuangan Kota Semarang dan media masa maupun media sosial PDI-Perjuangan Kota Semarang.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Pengertian pendidikan politik bukan hanya penggabungan dari kata pendidikan dan politik, makna dari pendidikan politik sangat luas. Pendidikan politik didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, yang diarahkan untuk membina kemampuan seorang individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga negara (Eko Handoyo dan Puji Lestari, 2017). Tim MKDK IKIP Semarang dalam Eko Handoyo dan Puji Lestari, (2017) mendefinisikan (pendidikan sebagai proses dalam hal mana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup, proses sosial di mana orang diharapkan berada pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal). Khan (2010) mengartikan pendidikan sebagai proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.

Dalam definisi yang lain, Dudih Sutrisman menjelaskan pendidikan politik adalah upaya yang dilakukan seseorang atau lebih serta, dilakukan secara sadar dalam proses penyampaian budaya politik bangsa dengan memperhatikan nilai Pancasila. Jadi, pendidikan politik di sini dijelaskan secara ideal dan tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi Pancasila. Kesimpulan dari beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa, pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa yang bertujuan agar masyarakat bisa menjadi individu yang cerdas pengetahuannya tentang politik dan sadar akan hak berpolitiknya kemudian pendidikan politik juga bertujuan agar partai menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi dan memenangkan perjuangan politik partai (Sutrisman, 2020).

Dalam pengertian Bahasa Inggris, pendidikan politik sering disebut dengan Political Socialization. Istilah pendidikan politik mempunyai arti dan tujuan yang sangat berbeda dengan istilah pendidikan dan politik. Oleh karena itu, di dalam memahami pendidikan politik tentu harus mengerti arti dari, teori, dan tujuan dari pendidikan politik itu bagaimana. Meskipun pendidikan dan politik merupakan konsep yang

berbeda, namun keduanya saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, karena pemahaman pihak berwenang mengenai pendidikan kewarganegaraan berbeda dengan pemahaman masyarakat, maka timbul perdebatan mengenai penerapannya, dengan anggapan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana untuk membenarkan tindakan pihak berwenang (Kartono, 2009).

Politik dapat diartikan sebagai aktivitas, perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk mendapat peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku ditengah masyarakat. Oleh karena adanya kekuatan-kekuatan sosial yang bermacam-macam itu perlu ditegakkan tata tertib. Maka, politik merupakan proses untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan inti politik adalah penggunaan kekuasaan yang diarahkan pada pengambilan keputusan bagi segenap ikatan hidup suatu bangsa. Unsur pendidikan dalam pendidikan politik, pada hakekatnya merupakan aktivitas pendidikan diri (mendidik diri sendiri dengan sengaja) yang terus berproses didalam individu sehingga orang yang bersangkutan mampu memahami dirinya sendiri dan situasi kondisi disekitarnya. Melalui pendidikan, dalam hal ini ialah pendidikan politik, orang akan berusaha melihat permasalahan sosial politik yang ada disekitarnya dengan cara-cara lain, kemudian memperbincangkan, memikirkan dan ikut menangani dengan cara lain serta arah dan tujuan yang jelas (Kartono, 2009).

Dengan begitu, pendidikan politik merupakan proses belajar, bukan hanya untuk menambah informasi dan pengetahuan saja. Namun, lebih menekankan kemampuan mawas diri secara kritis, menentukan sikap yang benar dan melatih ketangkasan berpikir maupun perbuatan. Sebagai manusia, haruslah terus belajar hidup rukun bersama dalam suatu ikatan kemasyarakatan dari yang kecil sampai ke ikatan kebangsaan dan kenegaraan. Hal itulah diperlukan yang namanya Pendidikan Politik yang secara internasional mengarah pada peningkatan pemahaman status diri sendiri selaku warga negara yang baik ditengah pergaulan hidup bersama, serta menyadari fungsi politiknya selaku warga negara.

Dalam arti luas, pendidikan politik adalah pengembangan karakter politik agar sadar dalam berpolitik dan bisa menjadi peserta yang memiliki tanggung jawab secara etis atau moral, dan berupaya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan negara. Pendidikan yang dilakukan secara sistematis guna membentuk manusia yang siap, mengingat beragamnya situasi masyarakat yang masih banyak berkembang dan bodoh secara politik, maka pendidikan politik harus diteruskan kepada generasi muda. Pendidikan ini

diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan pembangunan negara.

2. Konsep Pendidikan Politik

Pendidikan politik juga dapat diartikan sebagai "*politische bildung ist bildungswissen, orientierungswissen, verhaltungswissen und aktionswissen*" Giesecke dalam (Kartono, 1989). Pendidikan politik merupakan pengetahuan pedagogi, dimana kemampuan mengetahui sosok dan citra masyarakat (*Mensveld*), serta perkembangannya dan citra budaya negaranya sendiri, sehingga mampu: (1) orang menyadari kelebihan diri sendiri, (2) mengenali karakter bangsanya dan negaranya sendiri, (3) mempunyai percaya diri yang besar, dan (4) hilangkan rasa rendah diri dan bergantung terhadap negara lain. Mereka sangat memahami karakter bangsa negaranya, nilai bangsanya, tujuan negara, falsafah hidup (hal ini tertuang dalam Pancasila) dijadikan tolak ukur dalam memperjuangkan tujuan berbangsanya, yaitu hidup secara sejahtera.

Pendidikan politik didalam pemahaman pengetahuan yang terarah, adalah mampu mengorientasikan diri kepada pemahaman humanistik yang dapat menyampaikan kesejahteraan dan kemanusiaan. Secara obyektif, masyarakat harus berani melihat kenyataan yang sebenarnya, terutama untuk mencari alternatif dengan solusi yang lebih baik, hingga masyarakat dapat keluar dari kebuntuan dan mengupayakan keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup bersama.

Pendidikan politik dalam arti positif berarti agar peserta didik memahami hukum, peraturan, dan ketentuan yang menjadi pedoman bagi segala perilaku politik sehingga mampu menyikapi situasi dan keadaan politik yang ada dengan lebih cermat dan bijaksana. Pendidikan politik dalam arti pengetahuan perilaku berarti (1) kemampuan bertindak secara tepat, hati-hati, dan baik karena memiliki prinsip kebenaran dan keadilan, (2) mempertimbangkan permasalahan secara objektif dan wawasan kritis, (3) memiliki prinsip kebenaran dan keadilan haruslah universal. Musyawarah melibatkan kemampuan untuk mempertimbangkan dan merenungkan secara cermat peristiwa-peristiwa politik. Hal ini mengarah pada observasi introspektif dan munculnya pemikiran dan bertindak secara tepat dan stabil untuk mengatasi segala kesulitan.

Pendidikan politik mempunyai beberapa ciri yang memungkinkan untuk pengembangan pribadi yang kondusif bagi partisipasi politik yang aktif. Ciri-cirinya

antara lain:

- a. Kegiatan pendidikan politik tidak hanya bertujuan guna membentuk dan berbagi pengetahuan politik eksklusif pada kalangan masyarakat, namun juga guna menciptakan dan berbagi pemahaman politik pada kalangan perseorangan saja.
- b. Pendidikan politik bukan bertujuan untuk menumbuhkan loyalitas pribadi pada pihak berwenang guna memberikan arahan yang benar disetiap tindakan individu, tetapi untuk mengembangkan semangat kritis, terlibat dalam dialog yang konstruktif, dan mendorong masyarakat untuk menghasilkan uang yang lebih baik masyarakat untuk mengambil tindakan untuk membawa perubahan.
- c. Pendidikan politik tidak dapat dicapai tanpa kebebasan berekspresi, mengkritik, berdialog dan pengawasan oleh penguasa.
- d. Pendidikan politik adalah proses yang terus-menerus akan dilaksanakan sepanjang masa.
- e. Pendidikan politik bukan hanya terpaku dengan kegiatan di sekolah dan di rumah, namun juga dalam menerapkan aspek termasuk kedalam lembaga formal dan informal seperti partai politik dan pers.
- f. Pendidikan politik memiliki dasar ideologis dan juga dasar sosial.

Berdasarkan hakikat pendidikan politik, ada tiga aspek dasar pendidikan politik, yaitu (1) aspek fundamental yang secara langsung dan tidak langsung membentuk budaya politik, (2) aspek obyektif adalah kesadaran politik, kepribadian politik, dan partisipasi politik, dan (3) aspek kelembagaan dan metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Politik

Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa, Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya (Budianto, 2017).

Tujuan dari adanya pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996) adalah:

- a. Menciptakan manusia (perorangan, kelompok, pelanggan, pelajar, anggota masyarakat), dengan kata lain:
 1. Dapat mengerti situasi sosial politik yang saling bertentangan.
 2. Berani menyampaikan kritik yang membangun terhadap kestabilan keadaan stabilitas masyarakat.
 3. Kegiatannya tidak hanya menasar pada proses demokratisasi individu atau kelompok, tetapi juga seluruh lembaga sosial dan negara.
 4. Dapat memperjuangkan kepentingan atau ideologi tertentu, terutama yang mempunyai kaitan dengan keamanan dan kesejahteraan hidup berdampingan.

Menurut Kartini Kartono (1996), fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap:

- a. Perkembangan demokrasi yang semakin baik bagi seluruh individu (masyarakat) dan komunitas/struktur sosialnya.
- b. Berprinsip realistis, lebih manusiawi, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan formal untuk memfasilitasi komunikasi politik modern.

Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan orang dewasa bagi generasi muda yang mempersiapkan kader-kader politik untuk berpolitik dan mencari solusi politik untuk menang dalam perjuangan politik. Ini adalah pemahaman sempit tentang pendidikan politik yang ditujukan kepada pengurus partai dan pemimpin politik. Dalam arti luas, pendidikan politik yang sadar politik dan mampu menjadi peserta yang bertanggung jawab secara etika atau moral dalam mewujudkan tujuan politik individu, negara, dan masyarakat upaya pendidikan yang sistematis untuk membentuk individu yang siap. Generasi muda memerlukan pendidikan politik yang mengingatkan mereka akan kondisi masyarakat yang beragam, yang masih banyak diantaranya mereka berada pada terbelakang dan bodoh secara politis, dan pendidikan ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam gerak pembangunan sumber daya manusia.

4. Pendidikan politik dalam lembaga politik

Pendidikan politik merupakan suatu proses pemberian pengetahuan kepada

masyarakat mengenai politik negara dan akhirnya mereka dapat mengimplementasikan pengetahuannya untuk membuat suatu produk kebijakan yang proposional. Pendidikan politik dapat ditawarkan di institusi pendidikan formal, seperti sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dalam pendidikan non-formal dan informal. Negara juga berfungsi dengan baik untuk mengajarkan politik kepada rakyatnya, seperti dalam penyelenggaraan pemilihan yang memilih wakil rakyat, dan hal lainnya. Sumber pendidikan politik yang paling penting adalah keluarga, sekolah, partai politik, dan media massa (Handoyo. E & Lestari. P, 2017)

Sukses atau tidaknya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada anggotanya cepet dilihat dari tingkat partisipasi anggota partai ketika diberikan amanah oleh masyarakat dan memberikan loyalitas juang mereka kepada partai politik yang mereka dukung. Mengingat karena hal ini merupakan pendidikan partai politik pada dasarnya adalah membentuk dan menumbuhkan orientasi politik individu yang tertuang dalam Undang-Undang pasal 31 nomor 2 tahun 2011 mengenai pendidikan politik.

Pendidikan politik harus dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang awam dengan istilah politik. Adapun beberapa kalangan masyarakat bahkan ada yang merasa takut untuk terjun ke dalam dunia politik, bukan karena apa atau kenapa hal ini terjadi karena kurang pemahaman dan kesadaran masyarakat akan politik itu sendiri. Pada dasarnya politik sendiri itu tidak seram dan tidak saling menjatuhkan, justru dengan keberadaan politik yang sebenarnya mampu menjadikan keadaan menjadi stabil baik itu dari sisi keamanan maupun dari pertahanan negara. Apabila politik digunakan sesuai dengan makna politik itu sendiri seakan memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi keberadaan paradigma di masyarakat menjadikan politik dianggap sebagai suatu yang menyeramkan dan jarang ada yang mau mengerti dan memahami akan politik itu sendiri (Wijayakusuma, dkk, 2020).

Adapun beberapa fungsi dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat ataupun anggota partai dapat dilakukan oleh partai politik itu sendiri atau dari lembaga lain seperti KPU maupun BAWASLU. Berikan politik akan dikatakan sukses apabila sebagian besar masyarakat di daerah ataupun di wilayah tertentu mampu untuk berpartisipasi dalam politik dan dapat ikut serta saat pengambilan keputusan atau kebijakan yang nantinya akan mereka gunakan bersama. Keikutsertaan masyarakat dalam politik, aslinya dapat dilihat saat pemilihan umum secara langsung,

baik itu dalam pemilihan umum ataupun saat pengambilan kebijakan berlangsung. Semakin tinggi angka partisipasi dan semakin rendahnya angka golput dalam kegiatan pemilihan umum maka menunjukkan bahwa partai politik ataupun lembaga politik lainnya berhasil dalam menjalankan fungsinya dalam memberikan petikan politik kepada masyarakat, dan untuk anggota partai sendiri mereka loyal dan mampu untuk menyalurkan sisi dan misi partai mereka ke dalam sebuah kebijakan.

Pendidikan politik dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, dapat berupa kegiatan formal maupun non formal. Harapan bentuk-bentuk kegiatan yang sering dilakukan semisal seminar, lokakarya, pelatihan, jambore ataupun kegiatan positif lainnya. Arti politik diharuskan mampu untuk memberikan belikan politik kepada semua golongan, mau itu generasi muda hingga generasi tua, pada setiap lini masyarakat semua tercukup dalam kaderisasi yang telah dibentuk oleh partai politik. Dengan adanya hal ini negara menjadi lebih baik dan tidak menimbulkan keberadaan rasa ketidakadilan kepada masyarakat. Terlebih ketika berada di posisi yang kurang baik apabila masyarakat telah mampu memaknai tentang politik bukan sikap saling menyalahkan yang akan tercipta tetapi justru sikap saling mendukung dan tidak menyalahkan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah ataupun stakeholder terkait (Wijayakusuma, dkk, 2020).

Lembaga-lembaga ini dapat melakukan pendidikan politik sebagai berikut:

a. Partai politik dan kelompok penekan (*Pressure Group*)

Kultur politik dibentuk dan diubah secara signifikan oleh partai-partai politik, terutama di negara berkembang. Partai politik sampai batas tertentu memainkan peranannya dalam pendidikan politik melalui, *pertama*, pengajaran politik yang berkualitas. *kedua*, pemberian kesempatan untuk partisipasi politik secara teratur dan dalam bentuk yang lebih kontinu. Huntington menegaskan bahwa sarana institusional yang utama untuk mengatur keluasan partisipasi politik adalah partai politik. Ia dapat memberi bingkai yang lebih penting dan serasi, untuk mewujudkan partisipasi politik. *ketiga*, kehidupan partai termasuk media penyiapan bagi individu untuk berani mengambil keputusan dan berpikir independen mengenai berbagai masalah umum, serta kemampuan untuk bersikap kritis, dan menentukan pilihan

b. Media informasi dan komunikasi

Media informasi yang dimaksud adalah radio, televisi, pers, buku, lembaga ilmiah, gelanggang budaya, lembaga pendidikan, asosiasi-asosiasi moral dan sebagainya. Media informasi ini melakukan fungsi politiknya pada masyarakat dalam bentuk berikut.

1. Kontrol sosial, berupa pemaparan berita dan informasi tentang berbagai peristiwa yang terjadi dan meletakkannya sebagai fokus perhatian. Ini merupakan fungsi politis, karena inilah yang menentukan mana peristiwa yang tidak harus dipublikasikan dan mana yang dibiarkan saja untuk dikonsumsi.
2. Interpretasi berbagai peristiwa, menempatkannya pada konteks umum dan menganalisis dampaknya. Ini berpengaruh terhadap pengarahannya perilaku politik sebagai reaksi terhadap peristiwa-peristiwa tersebut.
3. Sosialisasi politik. Maksudnya adalah proses membentuk, mengokohkan atau mengubah kultur politik. Media informasi dapat dikategorikan sebagai agen-agen internasional pendidikan politik melalui berbagai fakta, nilai, contoh-contoh perilaku dan pengetahuan tentang karakter dunia politik yang disajikannya.

5. Unsur-Unsur Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan bagian tak terpisahkan dari sosialisasi politik, baik secara konseptual maupun dalam prakteknya, sebab unsur-unsur yang terdapat didalam pendidikan politik dapat diasumsikan sama dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam sosialisasi politik (Budianto, 2017). Unsur-unsur itu mencakup :

- a. Nilai-nilai politik
- b. Pengetahuan politik. Pengetahuan politik berarti segala yang diketahui berkenaan dengan macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik, yang meliputi pengetahuan tentang tujuan negara, lembaga-lembaga negara dan lain-lain.
- c. Sikap politik. Menurut Alfian (2009), sikap dan tingkah laku politik adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak (diam juga merupakan sikap) terhadap suatu keadaan. Kalau seseorang merasa terdorong untuk merubah

suasana lingkungan yang sudah jauh dari demokratis menjadi lebih demokratis, itupun akan mencerminkan sikap dan tingkah laku politiknya

B. Transmisi Ideologi Dalam Pendidikan Politik

1. Definisi Ideologi

Ideologi adalah sistem gagasan, nilai, dan keyakinan yang membentuk pandangan dan perilaku seseorang atau kelompok. Ideologi memiliki beberapa fungsi, antara lain: Membentuk identitas: Ideologi membentuk identitas seseorang atau kelompok, mengatur perilaku, Mempengaruhi kebijakan publik. Terdapat beberapa jenis ideologi, antara lain, Ideologi politik: Ideologi yang berhubungan dengan politik dan pemerintahan, Ideologi sosial: Ideologi yang berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan, Ideologi ekonomi: Ideologi yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan (Sulistiyo, 2013).

a. Karl Mannheim

Karl Mannheim dalam Hamka (2020) berpandangan bahwa seluruh pengetahuan yang dimiliki manusia telah terkondisikan secara sosial. Dia beranggapan bahwa setiap tahapan sejarah kehidupan manusia terdapat ide-ide representatif. Ide representasi yang dimaksud merupakan ide yang memperlihatkan iklim sosial yang berlaku saat itu (Hamka, 2020). Menurut Mannheim, ideologi mengarah pada tindakan yang efektif oleh kelompok untuk mendefinisikan peristiwa dengan cara tertentu dan untuk mengkonsolidasikan situasinya. Ideologi tidak hanya berfungsi untuk membenarkan dan membela kepentingan kelompok dominan. Lebih lanjut, ideologi dapat mengimplikasikan jenis klaim yang berbeda terhadap keumuman dan inklusivitas. Ini dianggap sebagai kondisi khusus perkembangan ideologis, dan bukan yang biasa seperti yang dinyatakan banyak kaum Marxis ketika mereka menyebarkan gagasan ideologi dominan.

b. Karl Marx dan Friedrich Engels

Konsep ideologi yang dimiliki oleh Marx memiliki beberapa ciri salah satunya ialah, Ideologi adalah mengenai *delusi* dan *mistifikasi* yang artinya ideologi mempunyai arti yang salah ataupun palsu mengenai dunia, yang pada akhirnya disebut oleh Engels “**Kesadaran Palsu**”. Dengan demikian, Marx menggunakan konsep kritis sebagai ideologinya, yang pada

akhirnya konsep ini digunakan untuk membongkar dari adanya kedok mistifikasi yang tersistematis. Ide-idenya sendiri kemudian dikelompokkan sebagai ilmiah karena hal itu dirancang untuk dapat mengungkap secara akurat bagaimana cara kerja sejarah dan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan antara ideologi dan sains, antara kepalsuan dan kebenaran itu sangat penting bagi Marx untuk menggunakan istilah “ideologi” (Heywood, 2016).

c. Lenin

Kristeva (2010) mendeskripsikan mengenai ide-ide yang dimiliki oleh kaum proletariat adalah “ideologi sosialis” atau “ideologi Marxis”, frasa-frasa yang jelas dirasa absurd oleh Marx. Untuk Lenin dan kaum Marxis lainnya, ideologi merujuk pada ide-ide yang berbeda yang dimiliki oleh setiap kelas sosial, dan yang jelas ide-ide ini menjadi berlaku ketika dapat memajukan posisi kelas masing-masing. Meskipun demikian, semua kelas secara keseluruhan memiliki sebuah ideologi, entah proletar ataupun borjuis, ada istilah yang mempunyai makna negatifnya. Ada saatnya ideologi memiliki titik yang tidak mengandung kekeliruan, kepalsuan, dan mistifikasi, dan tidak perlu lagi dikaitkan dengan sains. Bahkan “sosialisme ilmiah” (Marxisme) dikenal dengan ideologi proletariat (Kristeva, 2010).

d. Antonio Gramsci

Antonio Gramsci dalam bukunya *Hegemoni* (1971) berpendapat bahwa sistem kelas kapitalis masih bisa terus bertahan terus menerus karena diuntungkan oleh tidak setaraan ekonomi dan politik, tetapi apa yang dimaksud dengan “**hegemoni**” adalah ide-ide dan teori-teori dari kaum borjuis. Hegemoni mempunyai makna kepemimpinan atau dominansi, dan di dalam ranah hegemoni ideologi hal ini merujuk kepada kapitalisme ide-ide borjuis untuk dapat bisa mengalahkan pandangan-pandangan lawannya sehingga dapat menjadi akal sehat zaman (Setiawan, 2023). Gramsci tertarik pada hegemoni ideologi ini dari setiap jenjang, area masyarakat, seni, sastra, sistem pendidikan, media masa, bahasa sehari-hari, dan dalam budaya pop. Hegemoni borjuis ini sangat tegas dikatakan oleh Gramsci hanya bisa dilawan menggunakan sistem politik dan intelektual, yang mempunyai arti mulai kembali membentuk “hegemoni proletariat” sebagai lawannya, berdasarkan prinsip, nilai dan teori sosial.

e. David McLellan

Mengutip komentar dari David McLellan berpendapat bahwa ideologi merupakan konsep paling khayal dan sulit dimengerti dari keseluruhan konsep yang berapada pada ilmu-ilmu sosial. Ada beberapa istilah politik yang masih menjadi topik kontroversi yang panas dan mendalam. *Pertama*, karena konsep ideologi mengakui adanya hubungan antara teori dan praktik, konsep ideologi pun mengungkap perbedaan yang harus menggugah kewaspadaan tinggi tentang peran ide-ide dalam politik dengan hubungannya dengan keyakinan teori, dan kehidupan material atau perilaku politik di sisi lain. *Kedua*, mengenai konsep ideologi yang tidak mampu untuk didisiplinkan dari pergulatan yang tengah berlangsung di antara dan di dalam ide ideologi politik itu sendiri. Didalamnya banyak bagian dari sejarah itu sendiri, istilah “ideologi” telah lama digunakan sebagai senjata politik, sebuah perangkat yang digunakan untuk mengkritik dan mengutuki perangkat ide atau sistem keyakinan lawanya (Hakim, 2016).

2. Fungsi Ideologi

Fungsi sosial ideologi terutama terwujud sebagai fungsi sosial ideologi, fungsi kritis ideologi, dan fungsi pemandu ideologi. Dalam suatu masyarakat, setiap individu mempunyai nilai-nilai yang berbeda, dan karena itu setiap orang mengejar tujuan yang berbeda-beda, yang berujung pada konflik antar individu. Ideologi dapat berperan dalam mengintegrasikan pemikiran suatu masyarakat, memastikan bahwa mayoritas masyarakat mengakui ideologi yang dominan dan tidak melupakan berbagai nilai dalam mengejar nilai mereka sendiri. Ideologi dapat memainkan peran pemersatu, lebih jauh lagi ideologi berperan penting sebagai kekuatan spiritual yang besar dalam masyarakat, mencegah keterpecahan keberagaman masyarakat modern yang dapat menimbulkan konflik dan menjerumuskannya ke dalam kekacauan.

Ideologi yang tersistematis, ideologi juga memiliki kekuatan kohesif yang kuat, secara ideologis dapat menyatukan seluruh bangsa, kelas, kelompok, dan dapat secara efektif membimbing praktik sosial. Ideologi sangat penting di era globalisasi, koeksistensi berbagai ideologi merupakan fenomena yang tak terelakkan. Konflik antara ideologi yang berbeda juga umum terjadi. Masing-masing dari negara harus terus mempromosikan ideologi mereka sendiri di dunia

untuk memajukan pembangunan mereka sendiri. Agar sebuah ideologi dapat menunjukkan rasionalitas ilmiah dalam perdebatan, ia harus terus-menerus menyerap partikel kebenaran yang terkandung dalam ideologi lain, berkembang dan meluas sehingga menarik perhatian masyarakat, dan menjadi bagian dari inisiatif masyarakat itu sendiri (Qin, 2017).

Ideologi kurang memiliki daya tarik dan kohesi, padahal masyarakat membutuhkan ideologi unik yang sulit diterima untuk dapat berkembang. Fungsi penuntun ideologi terutama diwujudkan dalam kritiknya terhadap realitas sosial dan berfungsi sebagai penuntun bagi pengembangan cita-cita dan keyakinan masyarakat. Hal ini bertujuan, sebagai cita-cita sosial atau cita-cita kemanusiaan, untuk menentukan arah nilai-nilai dari praktik sosial suatu masyarakat, untuk mengarahkan masyarakat pada terwujudnya visi sosial yang lebih baik, dan dengan demikian mendorong perjuangan sosial Masu. Ideologi tanpa cita-cita sosial tidaklah menarik (Qin, 2017).

Ideologi, dapat mengandung berbagai macam keyakinan tentang keumuman dan inklusif. Ini dianggap sebagai kondisi khusus perkembangan ideologis. Tidak seperti yang dikatakan banyak kaum Marxis ketika mereka menyebarkan ideologi dominan, ini dianggap sebagai kondisi khusus. Oleh karena itu, ideologi berfungsi sebagai pedoman bagi penganutnya untuk melakukan tindakan praktis dan strategi untuk mewujudkan kehendak dan cita-cita yang terkandung di dalamnya (Kristeva, 2010). Dalam keyakinan ini. Salah satu fungsi teologi adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Etis, yaitu sebagai panduan dan sikap serta perilaku kelompok masyarakat dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.
- b. Fungsi Integrasi, yaitu nilai yang menjadi pengikat suatu bangsa atau masyarakat.
- c. Fungsi Kritis, yaitu sebagai ukuran nilai yang dapat digunakan untuk melakukan kritik terhadap nilai atau keadaan tertentu.
- d. Fungsi Praxis, yaitu sebagai acuan dalam memecahkan masalah-masalah kongkrit.
- e. Fungsi Justifikasi, yaitu ideologi sebagai nilai pembenar atas suatu tindakan atau kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh suatu kelompok tertentu.

3. Peran Ideologi Dalam Politik

Peran ideologi dalam politik menjadi sangat penting di Indonesia, mengingat adanya perubahan-perubahan mendasar pasca reformasi. Persaingan politik menjadi semakin intens dewasa ini. Sementara itu, masing-masing partai politik memiliki keterbatasan sumberdaya dan infrastruktur, sehingga positioning menjadi keniscayaan. Tidak semua hal dapat diselesaikan oleh satu partai politik. Sehingga masing-masing partai politik perlu memikirkan strategi untuk memperkuat identitas mereka. Identitas ini berperan penting sekali dalam era kompetisi. Adanya identitas politik yang tegas akan semakin memudahkan para pemilih untuk mengidentifikasi keberpihakan dalam isu politik suatu partai dan kebijakan publik yang akan dibuatnya.

Salah satu faktor yang mendorong orang untuk mendukung suatu partai politik adalah kesamaan budaya, agama, dan kedaerahan. Namun, ke depan, para elit politik juga harus mempertimbangkan bagaimana memposisikan partai politik mereka berdasarkan program kerja dan isu politik yang telah dibuat. Dalam persaingan politik saat ini yang semakin terbuka, posisi politik sangatlah penting. Dalam hal ini, ideologi merupakan metode dan tujuan akhir yang ingin diperjuangkan oleh partai politik. Struktur ideologi pemilih sangat menentukan apa yang diinginkan oleh pendukung. Fenomena kedekatan ideologi antara pendukung dengan partai politik sebagai sistem keyakinan yang sudah tertanam pada masing-masing individu. Mereka cenderung lebih memilih kesamaan ideologi daripada yang berbeda. Selain itu, partai politik dalam memilih ideologi juga agar meyakinkan dan memperkenalkan kepada masyarakat.

Ideologi berperan penting bagi partai politik yaitu, *pertama*, memperkuat (*strenght*) identitas massa melalui ritual politik simbolik seperti rapat akbar, kampanye dan lain-lain. *Kedua*, memperluas (*enlargement*) identitas ideologi partai ke massa atau masyarakat dan partisan partai lain melalui rapat akbar dan liputan media. Maka dari itu, ini akan mempermudah masyarakat dalam memilih dan mengidentifikasi ideologi suatu partai sekaligus mengundang partai lain. Ideologi politik perlu dilihat lebih serius lagi dan termanifestasikan pada hal-hal yang bersifat riil (Firmanzah, 2008).

4. Transmisi Ideologi

Transmisi ideologi adalah proses penyampaian ideologi dari satu orang ke orang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Ideologi yang dimaksud mencakup ide-ide politik, agama, kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik-praktik terkaitnya (Benjamin Lee & Kim Knot, 2018). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transmisi ideologi, yaitu, Bagaimana ideologi disampaikan, Kapan ideologi disampaikan, Di mana ideologi disampaikan, Peran keluarga dalam transmisi ideologi, Peran kelompok politik dalam transmisi ideologi. Namun, transmisi ideologi juga dapat memiliki beberapa tantangan, seperti: Perubahan sosial: Perubahan sosial dapat membuat ideologi menjadi kurang relevan. Kritik dan oposisi: Ideologi dapat menghadapi kritik dan oposisi dari kelompok lain. Kesulitan dalam menyebarkan ideologi: Ideologi dapat sulit untuk disebarkan, terutama jika ideologi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Alfian, 2009).

Transmisi ideologi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

- a. Pendidikan: Melalui sistem pendidikan formal dan non-formal, ideologi dapat disampaikan kepada generasi muda.
- b. Media: Media massa, seperti televisi, radio, koran, dan internet, dapat digunakan untuk menyebarkan ideologi.
- c. Organisasi: Organisasi politik, sosial, dan keagamaan dapat menjadi sarana untuk menyebarkan ideologi.
- d. Kaderisasi: Proses kaderisasi dapat digunakan untuk mempersiapkan kader yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ideologi.
- e. Simbol dan ritual: Simbol dan ritual dapat digunakan untuk memperkuat ideologi dan membuatnya lebih mudah diingat.

Tujuan Transmisi ideologi

- a. Mempertahankan ideologi: Transmisi ideologi dapat membantu mempertahankan ideologi dan mencegahnya menjadi usang.
- b. Mengembangkan ideologi: Transmisi ideologi dapat membantu mengembangkan ideologi dan membuatnya lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Menerapkan ideologi: Transmisi ideologi dapat membantu menerapkan ideologi dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Kota Semarang

1. Kondisi geografis

Secara geografis, lokasi Kota Semarang berada di antara 6 50' – 7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35' – 110 50' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Kendal di barat, dan Kabupaten Semarang di selatan. Kota Semarang memiliki luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha dan dibagi menjadi 16 kecamatan serta 117 kelurahan (semarangkota.go.id, 2018). Kota Semarang, yang menjadi Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah memiliki letak geografi yang sangat strategis. Kota Semarang yang menjadi jalur lintas perekonomian dan mobilitas penduduk di Pulau Jawa yang nantinya dapat menjadi kota Metropolitan yang berbasis perdagangan dan jasa. Berdasarkan bentuk morfologinya, wilayah Kota Semarang secara umum bisa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Kota Semarang Bawah merupakan dataran rendah dan Kota Semarang Atas merupakan perbukitan. Geologi pada dataran rendah tersusun atas batuan endap (alluvium) yang berasal dari sedimentasi sungai yang mengandung pasir dan lempung. Berbeda dengan daerah perbukitan sebagian besar memiliki susunan geologi berupa batuan beku (semarangkota.bps.go.id, 2020).

Kota Semarang memiliki karakteristik topografi yang unik, dengan wilayah daratan yang rendah dan sempit serta wilayah perbukitan yang memanjang dari sisi barat hingga sisi timur kota. Kota Semarang memiliki ketinggian yang bervariasi, mulai dari 2 meter dibawah permukaan air laut, hingga 340 mdpl dengan kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga 45%. Secara umum, topografi Kota Semarang dapat dibagi menjadi dua wilayah utama yaitu :

- a. Kota Bawah : wilayah dataran rendah yang sempit dan berbatasan langsung dengan laut jawa. Wilayah ini memiliki ketinggian yang relatif rendah dan kemiringan lereng yang landai.
- b. Kota Atas : wilayah perbukitan yang memanjang dari sisi barat hingga sisi timur kota, yang mana wilayah ini memiliki ketinggian yang lebih tinggi dan kemiringan lereng yang curam.

Perbedaan topografi kota bawah dan kota atas juga mempengaruhi cuaca dan suhu

udara yang berbeda. Kota bawah memiliki cuaca yang relatif panas sedangkan kota atas memiliki cuaca yang cenderung lebih sejuk (semarangkota.go.id, 2018)

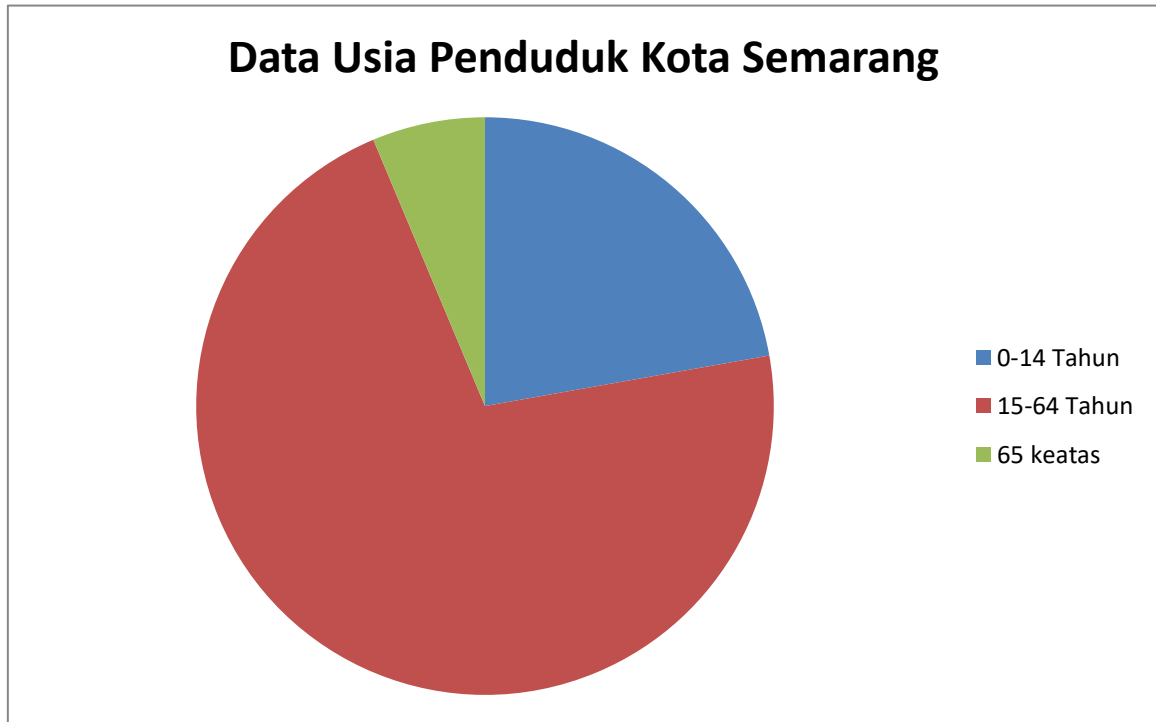
2. Kondisi Demografis.

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data kependudukan dari Badan Pusat Statistika Kota Semarang memiliki total penduduk 3.388.720 jiwa dengan laki-laki 1.676.378 dan perempuan 1.712.342. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari tiga juta jiwa menjadikan Kota Semarang kota yang padat penduduk. Kota Semarang, mendapat urutan kelima di Jawa Tengah sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, adapun persebaran penduduk yang tidak merata, yang terbukti dari hasil sensus terakhir (2020) yang mengemukakan bahwa Kecamatan Candisari merupakan wilayah terpadat dengan total kepadatan penduduk 11.538 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Tugu memiliki kepadatan terendah yaitu 1.033 jiwa/km². Menurut usia, 1,18 juta (71,48%) penduduk Kota Semarang merupakan usia produktif (15-64 tahun). Kelompok usia tidak produktif sebanyak 471,51 ribu orang (28,52%). Kemudian terdapat 367,02 ribu (22,2%) penduduk Kota Semarang pada kelompok usia tidak produktif (0-14 tahun) dan 104,5 ribu (6,32%) pada kelompok usia tidak produktif (65 tahun ke atas). Berikut data jumlah penduduk Kota Semarang:

Diagram 3. 1

Usia Penduduk Kota Semarang



Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah Penduduk	
	Laki-Laki	Perempuan
Mijen	44.876	45.072
Gunungpati	50.310	50.442
Banyumanik	70.675	72.758
Gajah Mungkur	27.602	28.748
Semarang Selatan	30.215	31.694
Candisari	37.302	38.312
Tembalang	98.833	100.029
Pedurungan	97.167	99.359
Genuk	66.946	65.527
Gayamsari	34.998	35.411
Semarang Timur	31.729	34.220
Semarang Utara	58.194	59.693
Semarang tengah	26.438	28.775
Semarang Barat	73.311	76.015
Tugu	16.906	16.889
Ngaliyan	72.403	73.092
Kota Semarang	838.473	856.306
Jumlah	1.676.378	1.712.342

Sumber : BPS Kota Semarang

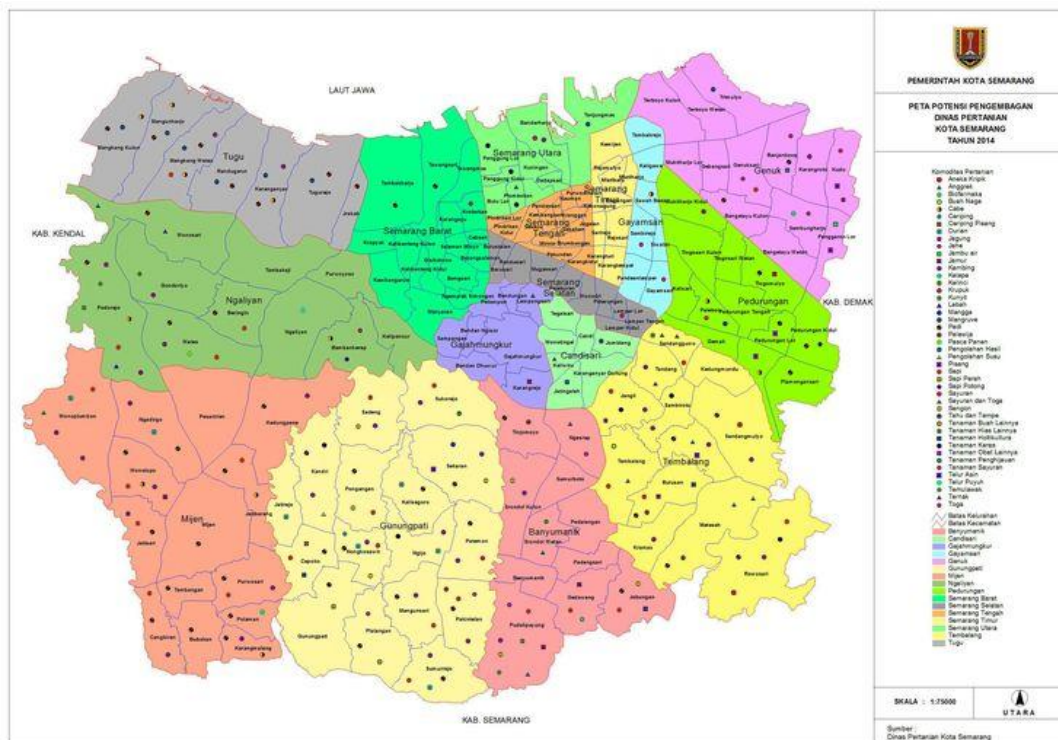
b. Peta Kota Semarang

Kota Semarang memiliki wilayah yang tergolong kecil, namun padat penduduk. Hal ini dikarenakan banyaknya pendatang dari luar kota yang merantau untuk bekerja maupun menempuh pendidikan. Kota Semarang dibagi menjadi dua bagian yaitu, Semarang atas yang meliputi Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Tembalang, Ngaliyan dan Semarang Bawah yang meliputi, Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Candisari, Pedurungan, Genuk, Tugu, Semarang Timur, Semarang Utara, dan Semarang Kota.

Kota Semarang secara administratif terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Diantaranya adalah Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Candisari, Pedurungan, Genuk, Tembalang, Gayamsari,

Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Utara, Tugu, dan Ngaliyan adalah kecamatan di Kota Semarang. Tercatat Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Mijen dan Gunungpati, masing-masing memiliki luas wilayah 57,55 km² dan 54,11 km². Sementara itu luas wilayah terkecil terletak di Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Semarang Tengah, masing-masing memiliki luas wilayah 5,93 km² dan 6,14 km² (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang).

Gambar 3.1 Peta wilayah Kota Semarang



Sumber : semarangkota.go.id

3. Fraksi di DPRD Kota Semarang

Dari data DPRD Kota Semarang yang dapat diakses melalui website dprd.semarangkota.go.id terdapat 7 fraksi partai politik dan ada 50 anggota DPRD. Masing-masing fraksi ini memiliki beberapa anggota yang menjabat sebagai DPRD di Kota Semarang. Anggota paling banyak menduduki kursi DPRD Kota Semarang adalah dari PDI Perjuangan dan paling sedikit dari fraksi Partai Golkar (Golongan Karya). Berikut merupakan data anggota fraksi di DPRD Kota Semarang :

Tabel 3.2 Anggota DPRD Kota Semarang

No.	Fraksi	Anggota
1	Fraksi PDI Perjuangan	14
2	Fraksi Gerindra	10
3	Fraksi Demokrat	6
4	Fraksi PKS	6
5	Fraksi PKB	5
6	Fraksi PSI	5
7	Fraksi Golkar	4

Sumber : dprd.semarangkota.go.id

B. Profil PDI Perjuangan

1. Sejarah PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Jika kita berbicara mengenai sejarah PDIPerjuangan maka tidak dapat lepas dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Sukarno pada 4 Juli 1927. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan gabungan dari PNI yang memilih untuk bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik, pada 10 Januari 1973. Sejak awal terbentuk, konflik di dalam internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah. Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua dari Ir Sukarno, Megawati Sukarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI (AD/ART PDI Perjuangan, 2019-2024).

Namun rezim yang saat itu sedang berkuasa (Suharto) tidak menyetujui dengan adanya dukungan tersebut, kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Sukarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Larangan tersebut justru berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, kemudian secara *de facto* Megawati Sukarnoputri dinobatkan sebagai ketua DPP PDI periode 1993-1998. Sehingga pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Sukarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara *de jure*. Tidak hanya sampai di situ konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Pada 20 Juni 1996 para simpatisan Megawati Sukarno Putri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres

(AD/ART PDI Perjuangan, 2019-2024).

Pemerintah Suharto pada tanggal 5 Juli 1996 mengukuhkan Suryadi menjadi Ketum DPP PDI. Sampai akhirnya pada tanggal 27 Juli 1996 pendukung Megawati Sukarnoputri menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat. Bersamaan dengan itu muncul rombongan berkaus merah kubu Suryadi, kemudian terjadi bentrok dengan kubu Megawati Sukarnoputri. Peristiwa tersebut dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli. Sesudah peristiwa itu, PDI yang berada di bawah pimpinan Suryadi hanya memperoleh 11 kursi DPR. Karena pemerintahan Suharto lengser pada reformasi 1998, sedangkan PDI yang berada di bawah pimpinan Megawati Sukarnoputri semakin kuat, dan ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.

Setelah peristiwa tersebut, Megawati Sukarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu. Notaris Rahmat Syamsul Rizal yang akhirnya mengesahkan nama tersebut, kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. PDI Perjuangan (PDIPerjuangan) melakukan Kongres I pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati Sukarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP periode 2000-2005. Pada Kongres IV PDIPerjuangan di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati Sukarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDIPerjuangan periode 2015-2020 (AD/ART PDI Perjuangan, 2019-2024).

2. Ideologi PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIPerjuangan) dalam proses berdirinya melewati beberapa peristiwa sejarah penting. Sebagai cita-cita bersama, perwujudan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, makmur, beradab, dan ber-Ketuhanan adalah hak sekaligus tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Karena hal tersebut dibutuhkan sinergitas bangsa, baik secara perseorangan ataupun yang terorganisir di dalam organisasi kerakyatan yang demokratis serta universal untuk semua warga negara, tanpa harus membedakan suku, agama, gender, keturunan dan kedudukan sosial (Syam, 2021).

Adanya dorongan semangat untuk bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita

luhur tersebut, serta untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang semakin pesat ini, maka dari itu Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik, pada tanggal 9 Maret 1970 membentuk sebuah kelompok demokrasi pembangunan, yang akhirnya disahkan dengan pernyataan bersama kelima partai politik tersebut pada tanggal 28 Oktober 1971. Akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 melakukan langkah strategis memfusikan diri menjadi satu wadah perjuangan politik bagi rakyat berdasarkan Pancasila dengan nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Untuk dapat mewujudkan cita-cita nasional, PDI Perjuangan menganut prinsip demokrasi yang menempatkan kepemimpinan pusat partai sebagai sentral gerakan, suatu kepemimpinan yang dipimpin oleh ideologi Pancasila 1 Juni 1945, kepemimpinan yang mengandung manajemen satu arah dan satu tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur, dan suatu kepemimpinan yang sesuai dengan kepribadian bangsa yaitu gotong royong (AD/ART PDI Perjuangan 2019-2024).

Ideologi Marhaenisme merupakan representasi dari sebuah identitas dari ide atau gagasan, narasi dan perilaku laku politik Soekarno. Konsep ideologi marhaenisme sendiri, sebagai gambaran dari personifikasi rakyat kecil yang memiliki sebidang tanah kemudian menggarap sendiri, alatnya dimilikinya sendiri dan hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan keluarganya. Marhaenisme sendiri diambil dari teori dialektika yang dikembangkan oleh Hegel, kemudian didukung oleh Karl Marx dan F. Engels. Marx melihat bahwa para pemilik modal memiliki dominasi yang sangat besar dalam sistem sosial-ekonomi. Dengan kontrol mereka terhadap alat produksi, para pemilik modal dapat dengan mudah mengendalikan dan bahkan menundukkan kelompok sosial lainnya (Pujiono. dkk, 2024)

Marx merumuskan teori tentang kelas sosial, yang membagi masyarakat ke dalam dua golongan utama: kelas *borjuis* dan *proletar*. Dalam pemikiran Marx, borjuis adalah kelas yang memiliki modal dan mengendalikan alat produksi, sementara proletar adalah kelas pekerja yang tidak memiliki akses terhadap alat produksi dan hanya dapat bertahan hidup dengan menjual tenaga kerja mereka kepada kaum borjuis (Prayogi. A, dkk, 2025). Menurut Marx dalam Hart (1992), ketimpangan yang semakin parah akan mendorong kaum proletar untuk menyadari posisi mereka sebagai kelompok tertindas, yang pada akhirnya akan melahirkan revolusi sosial.

Revolusi ini bertujuan untuk menggulingkan sistem kapitalisme dan menggantikannya dengan sistem sosialisme, dimana prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dapat

terwujud. Marx membayangkan bahwa melalui revolusi sosialisme, masyarakat akan bersatu dalam skala global dan menciptakan tatanan dunia baru yang lebih adil (A. Prayogi, 2025). Dalam perkembangan wacana intelektual saat ini, gagasan-gagasan Marx sering kali dijadikan sebagai suatu idealisme. Namun, jika hanya dijadikan sebagai idealisme belaka, pemikiran Marx justru kehilangan esensi kritisnya.

Maka dari itu analisa marxisme menjadi kunci utama, guna membedah lebih dalam marhaenisme Soekarno. PDI Perjuangan dianggap sebagai partai politik yang mempunyai keterikatan dan kaitan yang kuat dengan ideologi Marhaenisme (Syam, 2021). Menjadi landasan perjuangan untuk rakyat Indonesia, Marhaenisme menerapkan susunan masyarakat sosio-nasionalisme dan sosio-demokratis. Sosio-nasionalisme merupakan nasionalismeyang berdasar pada kemasyarakatan. Nasionalisme juga sering disebut sebagai faham kebangsaan, karena persamaan nasib dan sejarah serta persamaan kepentingan hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Marhaenisme mengandung asas sosio-demokratis, adalah demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial (Syam, 2021).

Marhaenisme sendiri, juga dapat dikatakan ada dari alam berpikir Bung Karno yang progresif dan revolusioner. Hal tersenut juga tidak akan pernah lepas dari latar belakang Bung Karno yang memang darikecil sudah memiliki ketertarikan terhadap politik dan senang berorasi. Jiwa kepemimpinan dan kharismanya juga tidak diragukan lagi, karena dapat dilihat di beberapa kesempatan, Sukarno bisa mengorganisir massa dan membakar semangat mereka, melalui cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Bung Karno. Dengan kepribadian yang dimiliki Sukarno tersebut, maka tidak membutuhkan waktu yang lama bagi seorang Sukarno untuk dapat menjadi salah satu tokoh pergerakan yang sangat penting. Pemikiran pemikiran radikal-revolusionernya banyak dipengaruhi oleh para tokoh nasional, salah satunya yaitu Tjokroaminoto yang menjadi guru politiknya. Melalui Tjokroaminoto Bung Karno belajar mengenai fungsi politik sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat, dari Tjokroaminoto juga Bung Karno belajar mengenai pergerakan modern dan bagaimana untuk memanfaatkan media massa guna menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan (Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiyati Aisyah dan Deni Candra, 2022).

Marhaenisme sebagai suatu konsep pemikiran perjuangan bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan,tentunya tidak akan bisa dilepaskan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu asas-asas yang akan menjadi satu kesatuan sistem ideologi marhaenisme. Adapun asas-asas pembentuk tersebut

meliputi: *radikal-revolusioner*, *machtvorming*, massa-aksi, nonkooperasi, *self-help & self-reliance*. Radikal-revolusioner yaitu perubahan yang berdasarkan kehendak zaman yang cepat.

Radikal-revolusioner dalam konteks perjuangan dapat diartikan sebagai perubahan secara instan yang menginginkan selesainya masa imperialisme dan hal-hal yang berkaitan dengan penindasan serta perampasan hak secara paksa. Radikalisme sangat penting sekali, dalam konteks kekuatan perjuangan bangsa. Radikal diartikan sebagai hal yang tidak boleh dilakukan setengah-setengah, harus dilakukan dengan keseriusan dan kesungguhan. Maka dari itu, Sukarno selalu menegaskan tentang pentingnya rakyat yang radikal revolusioner, karena tanpa adanya perjuangan yang radikal-revolusioner, penjajahan di atas tanah Indonesia ini tidak akan pernah hilang, tanpa mereka yang benar-benar memiliki pemikiran dan sikap yang radikal revolusioner (Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiyati Aisyah dan Deni Candra, 2022).

Istilah Marhaenisme dan Marhaen disebut-sebut dalam pidato Soekarno sebagai ketua PNI yang didirikan pada bulan Juli 1927, tetapi bisa dikatakan secara resmi istilah Marhaen itu memperoleh definisi dalam pidato pembelaan Soekarno, "Indonesia Menggugat", di hadapan Pengadilan Kolonial Belanda di Bandung pada tahun 1930. Soekarno menyatakan bahwa pergaulan hidup merk Marhaen; adalah pergaulan hidup yang sebagian besar sekali adalah terdiri dari kaum tani kecil, kaum buruh kecil, kaum pedagang kecil, kaum pelayar kecil, kaum Marhaen yang apa-apanya semua kecil. Di sini Soekarno mencoba membedakan secara tajam antara konsep Marhaennya itu dengan konsep proletarian dari kaum sosialis Barat, terutama komunis.

Sebenarnya Marhaenisme dan Marhaen yang dirumuskan Soekarno bisa ditafsirkan sebagai ikhtiar melawan ideologi saingannya, yang mana Marhaenisme menolak analisis kelas dari PNI baru (Hatta-Syahrir) dan lebih menyukai perjuangan ras dan menggantikan citra ekonomi sosialis berdasarkan kolektivisme dengan konsep kebahagiaan dan keadilan sosial untuk marhaen, rakyat kecil yang berjumlah 95% dari rakyat Indonesia. Marhaen tidak hanya mengacu pada petani miskin, namun mencakup kaum proletar dan kaum melarat lainnya. Oleh karena itu, marhaenisme lebih luas dari proletar karena mencakup kaum miskin lainnya dan marhaenisme adalah cara yang menghendaki hilangnya kapitalisme dan imperialisme serta semua masyarakat Indonesia adalah kaum marhaenis yang menjalankan marhaenisme.

3. Visi – Misi

Visi

Partai adalah:

- a. alat perjuangan guna membentuk dan membangunkarakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.
- b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila)
- c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila)
- d. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara.
- e. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Misi

- a. mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.
- c. membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial.
- d. membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik

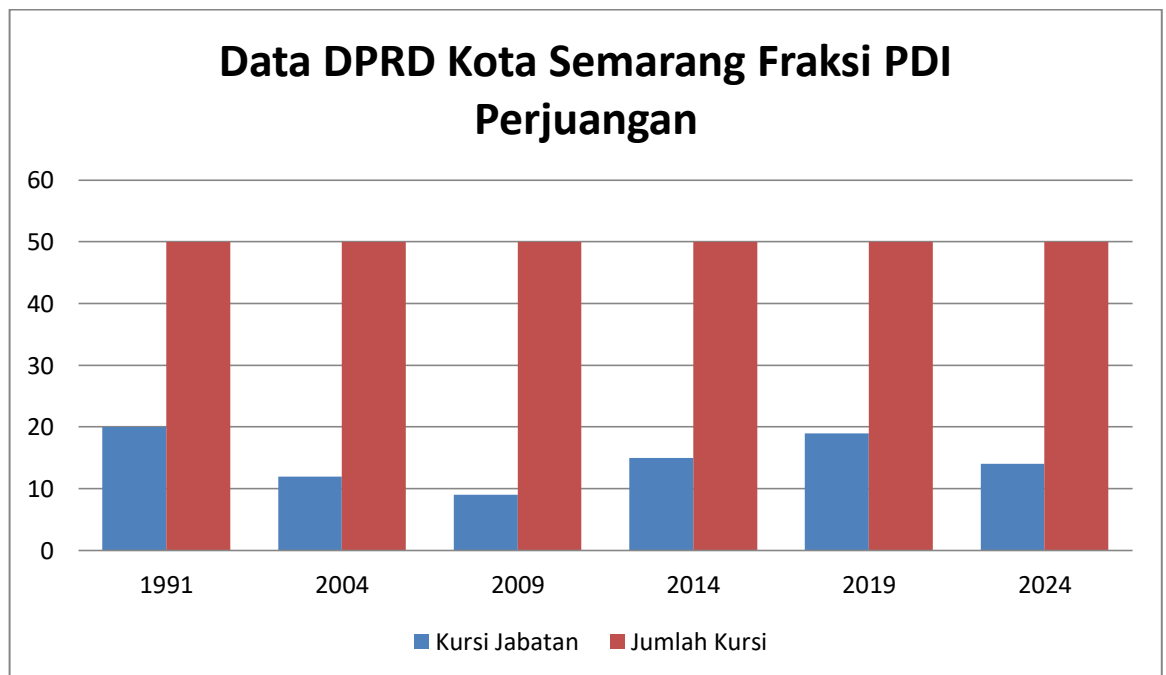
dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi.

- e. memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.
- f. berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

1. Sejarah Politik PDI Perjuangan Kota Semarang

PDI Perjuangan Kota Semarang pertama kali mengikuti pemilu pada tahun 1999 mendapatkan separuh kursi jabatan yaitu, 20 kursi jabatan dari 45 kursi. Kemudian pada tahun 2004 turun dari yang awalnya mendapatkan 20 kursi menjadi 12 kursi dan pada tahun 2009 turun lagi hanya mendapatkan 9 kursi. Dalam tiga kali pemilu, PDI Perjuangan mengalami penurunan suara dan pada pemilu tahun 2014 mulai meningkat lagi dengan mendapatkan 15 kursi jabatan tahun 2019 juga naik lagi menjadi 19 kursi dan pada tahun 2024 mengalami penurunan kursi jabatan menjadi 14 kursi jabatan. Hal tersebut terjadi perubahan pada tahun 1999 ke 2004 yaitu banyak sekali konflik dan gejolak politik yang terjadi seperti peralihan kekuasaan, beberapa kader kader partai yang pindah haluan, perpecahan partai dan lain-lain, yang mengakibatkan penurunan kursi jabatan. Namun, meskipun mengalami penurunan kursi, PDI Perjuangan Kota Semarang tetap bisa dikatakan mendominasi, hal tersebut dikarenakan setengah kursi jabatan yang ada diisi oleh beberapa partai lain yang mana, PDI Perjuangan Kota Semarang bisa dikatakan mendominasi kursi jabatan.

Diagram 3.2 Data DPRD Kota Semarang Fraksi PDI Perjuangan



2. Struktur Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

Setiap partai politik mempunyai banyak kepengurusan dan cabang untuk dapat menjalankan fungsi dan tujuan partai hingga ke tingkat yang minimum. Partai PDI Perjuangan tidak terkecuali dengan kekuatan bawah partai saat ini memiliki pengikut terbanyak di Indonesia. Tentu saja, PDI Perjuangan juga memiliki kepengurusan di tingkat lokal. Salah satunya adalah dewan perwakilan cabang Kota Semarang. Perwakilan dari Dewan perwakilan cabang (DPC) Kota Semarang sendiri merupakan suatu organisasi yang berada dibawah naungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan kekuasaan pimpinan di tingkat daerah khususnya Kota Semarang. PDI Perjuangan kota Semarang tidak lepas dari sejarah PDI Perjuangan Pusat, yang mana PDI Perjuangan berdiri pada 10 Januari tahun 1973. Setelah itu berdirilah DPW dan DPC PDI Perjuangan termasuk Kota Semarang yang awalnya PNI, Murba dan Parkindo berubah menjadi PDI di Kota Semarang. PDI Perjuangan sendiri mengikuti pemilu pada tahun 1999 setelah orde baru dan keluar sebagai pemenang, namun tidak disebutkan siapa ketua pertama DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Tujuan pembentukan DPC adalah untuk menjalankan fungsi partai dan ada tujuan partai sebagaimana yang ada didalam AD-ART partai, PDI Perjuangan untuk wilayah Kota Semarang. DPC PDI Perjuangan Kota Semarang membawahi 16 PAC (Pengurus Anak Cabang) karena Kota Semarang

memiliki 16 Kecamatan, 177 Ranting, dan kurang lebih 5.400 Anak Ranting.

Berdasarkan surat keputusan dewan pimpinan pusat (DPP) partai PDI Perjuangan, struktur dan komposisi dewan pimpinan cabang (DPW) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang masa bakti 2019-2024:

1. Ketua: Hendrar Prihadi, S.E., M.M.

Bidang Internal

2. Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai: Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos
3. Wakil Ketua Bidang Pemenengan Pemilu: Paulus Sudaryanto, S.E
4. Wakil Ketua Bidang Idologi dan Kaderisasi: I Gede Ananta Wijaya Putra, S.T., M.M
5. Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Dyah Ratna Harimurti, S.Sos

Bidang Pemerintahan

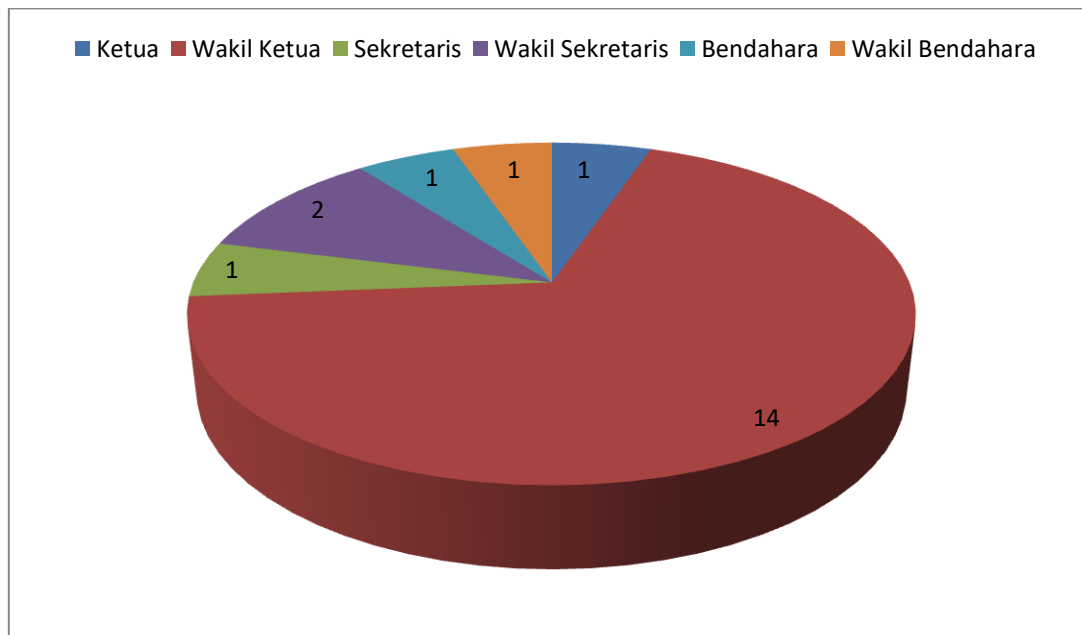
1. Wakil Ketua Bidang Politik: Fajar Aji Pamungkas, S.H
2. Wakil Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan: Fajar Rinawan Sirotus, S.H
3. Wakil Ketua Bidang Perekonomian: Michael, S.Kom
4. Wakil Ketua Bidang Kebudayaan: Martinus Dwi Septianto, S.E

Bidang Kerakyatan

1. Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan, dan Anak: Lely Purwandari
2. Wakil Ketua Bidang Industri, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Koperasi, dan UKM: Endang Retnawati, S.E
3. Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: Chaterine Anggraeny, S.E., Ak., CA., ACPA
4. Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: H. Supriyadi, S.Sos
5. Wakil Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan: R. Yuwanto
6. Sekretaris: Kadarlusman
7. Wakil Sekretaris Bidang Internal: Wisda Pridatoo
8. Wakil Sekretaris Bidang Program: Margono
9. Bendahara: M. Rukiyanto A.B., S.H., M.A.

10. Wakil Bendahara: Kristiani, S.Sos

Diagram 3.3 Jumlah Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

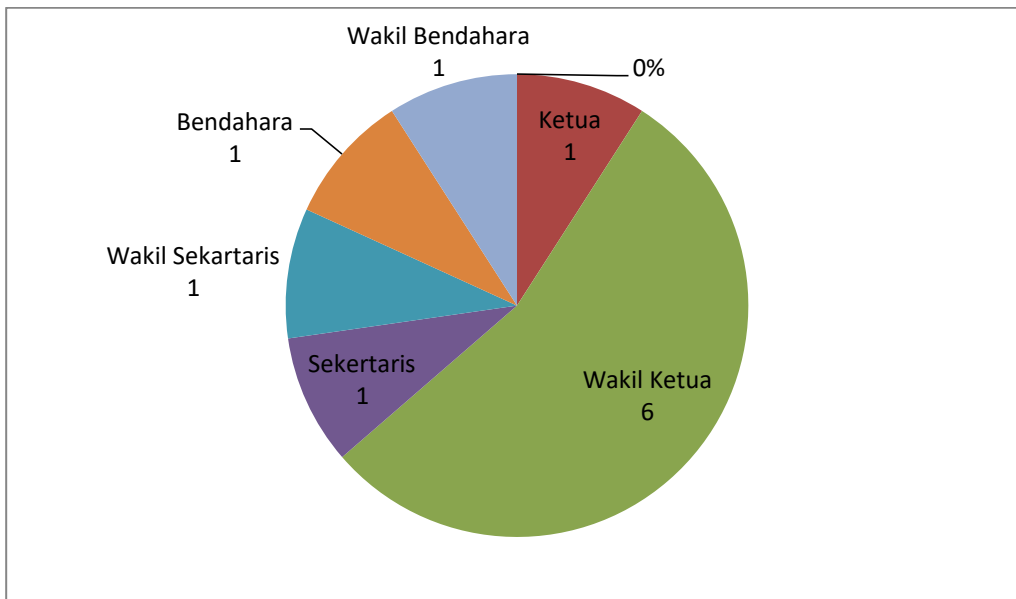


Ketua DPC PDI Perjuangan bertugas sebagai penanggung jawab atas eksistensi program dan kinerja partai ke dalam dan keluar di tingkat kabupaten kota. Wakil ketua terbagi menjadi 14 yaitu wakil ketua bidang internal yang membawahi 4 bidang kehormatan partai, kemenangan pemilu, ideologi dan kaderisasi, keanggotaan dan organisasi. Adapun wakil ketua bidang pemerintahan membawahi empat bidang membawahi bidang politik, hukum dan perundang-undangan, perekonomian koperasi dan UMKM dan kebudayaan, adapun wakil ketua bidang kerakyatan yang terdiri dari 7 bidang yaitu penanggulangan bencana industri, tenaga kerja dan jaminan sosial, kesehatan, perempuan dan anak pariwisata, pemuda dan olahraga keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ekonomi kreatif dan ekonomi digital, pangan pertanian dan kehutanan kelautan dan perikanan di lingkungan hidup.

Mengenai tugas wakil ketua bidang DPC partai sama dengan tugas-tugas ketua bidang di DPP partai sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 18 dan 19 AD/ART. Wakil sekretaris DPC terdiri dari dua yaitu wakil sekretaris bidang internal dan wakil sekretaris bidang program yang meliputi bidang pemerintahan dan kerakyatan. Mengenai tugas sekretaris dan wakil sekretaris DPC partai yang sama dengan tugas-tugas sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal sebagaimana yang

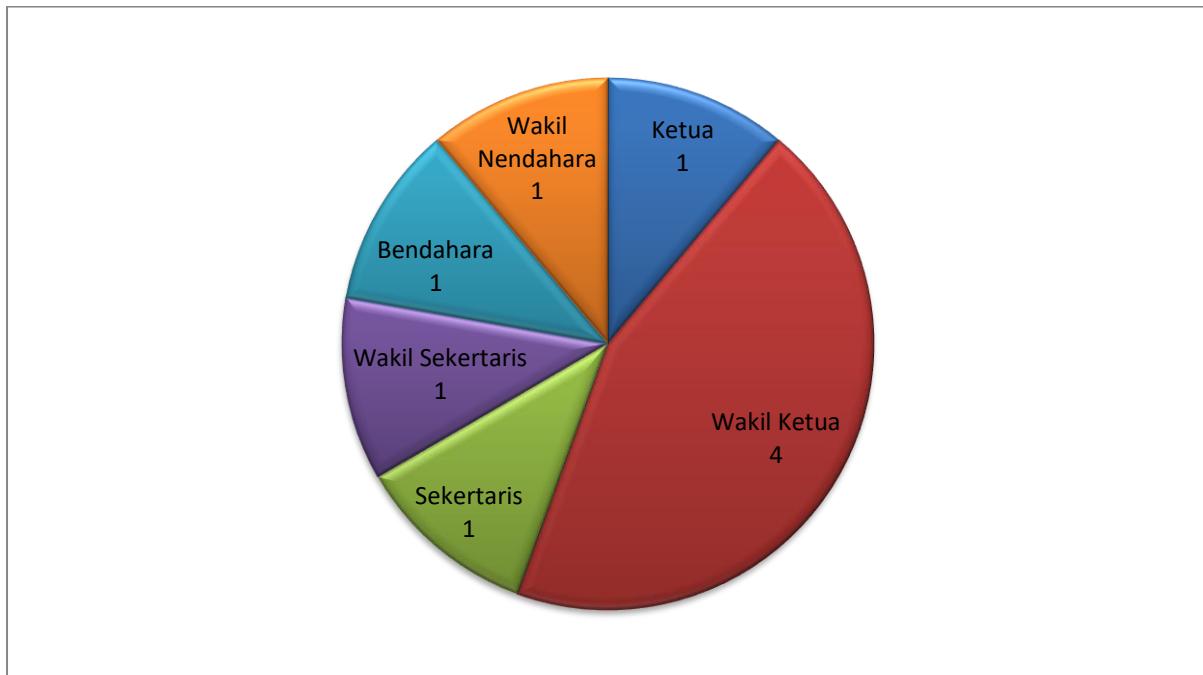
diatur dalam pasal 20 dan 21 anggaran rumah tangga partai. Di dalam tubuh DPC bendahara bertugas dan bertanggung jawab mengelola keuangan dan perbendaharaan DPC partai, dengan wakil bendahara DPC bertugas membantu bendahara menjalankan tugasnya.

Diagram 3.4Pengurus PAC PDI Perjuangan



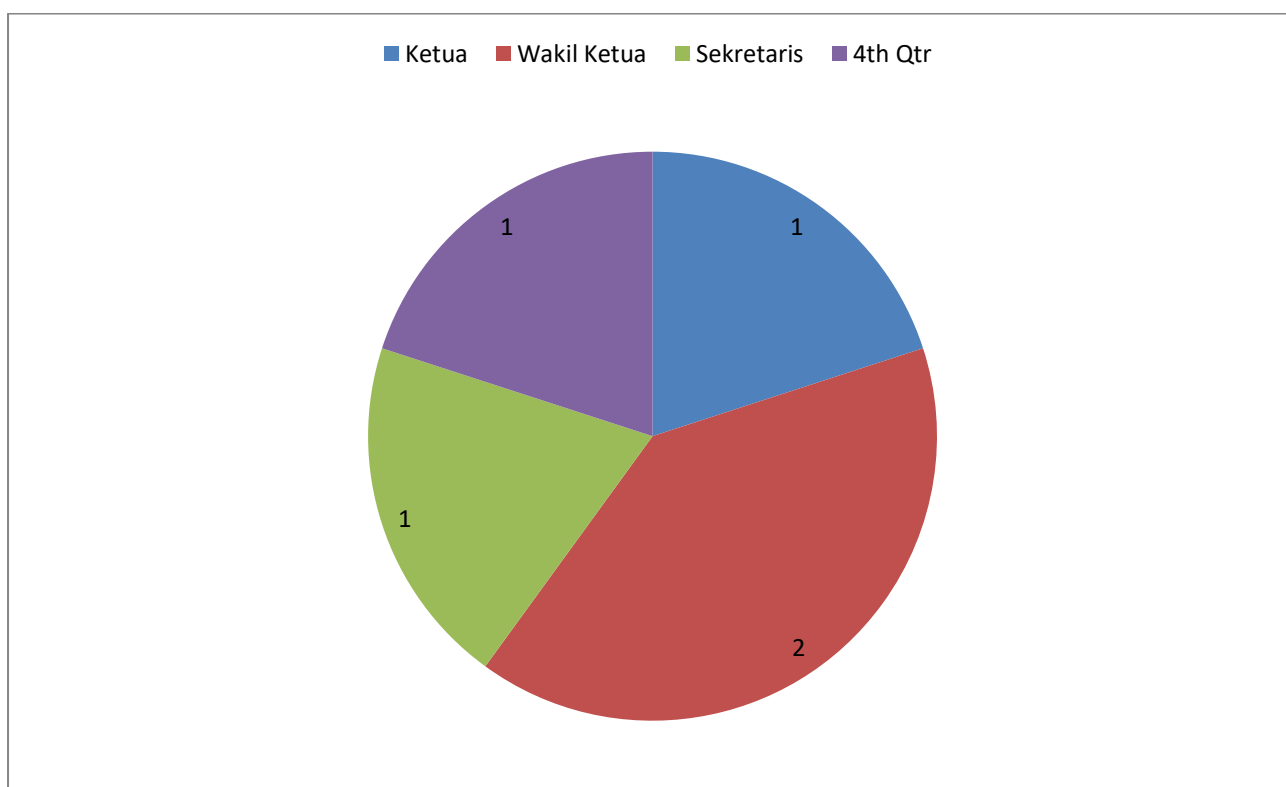
Pengurus anak cabang atau sering disingkat sebagai pac dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh wakil-wakil ketua seorang sekretaris dan seorang bendahara. Wakil ketua dalam PAC partai biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan per bidangnya di dalam kondisi dan wilayah geografis. Tidak menutup kemungkinan wakil ketua juga hanya satu atau bisa lebih, karena melihat kondisi dan kebutuhan PAC dalam wilayah tersebut. Hal itu dibenarkan dalam AD/ART karena didalamnya tidak dijelaskan secara eksplisit berapapun jumlah wakil ketua bidang yang harus ada.

Diagram 3.5*Pengurus Ranting*



Pengurusan di tingkat ranting partai dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh wakil-wakil ketua seorang sekretaris dan seorang bendahara wakil-wakil dari ketua ranting partai biasanya membidangi tupoksi yang disesuaikan dengan kebutuhan karakter dan kondisi geografi di suatu ranting tersebut. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa ranting yang memiliki wakil ketua yang lebih dari dua karena menyesuaikan dengan kebutuhan nya. Tail jika kita menemukan ada beberapa ranting yang memiliki ketua lebih dari itu dan di dalam tugu PDI Perjuangan hal itu dianggap sah-sah saja karena tidak menyalahi aturan AD ART partai.

Diagram 3.6Pengurus Anak Ranting



Terakhiradalah pengurus anak ranting partai yang dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh wakil-wakil ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara-wakil ketua dari anak ranting partai mempunyai tupoksi dalam bidangnya sesuai dengan kebutuhan, karakter dan kondisi di wilayah geografis anak ranting tersebut.

BAB IV

UPAYA PDI PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN POLITIK

A. Pendidikan Politik di Kota Semarang

Pendidikan politik di kota Semarang sendiri dilakukan dengan mengikuti PDI Perjuangan secara keseluruhan dimulai setelah berdirinya PDI Perjuangan pada tahun 1973. Artinya, pendidikan politik ini tidak bisa dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri di wilayah masing-masing dengan kata lain, pendidikan politik kepada masyarakat memang sudah terkonsep dengan jelas dari pusat. Pada awalnya pendidikan politik ini hanya berbicara mengenai bagaimana menjadi kader atau anggota yang baik, masyarakat yang nasionalis dan sebagainya. Kemudian pada era reformasi pembahasan dalam pendidikan politik sudah berubah, bukan hanya bagaimana menjadi masyarakat yang nasionalis, sebagai anggota partai yang baik namun, arah daripada pendidikan politik ini menjadikan semangat reformasi, masyarakat yang melek terhadap politik, sosial, budaya maupun agama. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pak Untung ketika wawancara. Terkait kepentingan internal partai politik, pendidikan politik dapat diartikan sebagai upaya untuk menyadarkan dan sistematis guna mengubah segala sesuatu dalam kaitannya dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massa partai agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.

Pendidikan politik merupakan sebuah tanggung jawab yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Partai Politik. Undang-undang tersebut menjelaskan pendidikan politik sebagai suatu proses di mana individu belajar dan memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait hal ini, Sunarso pada tahun 2007 menyebutkan bahwa pendidikan politik berperan penting dalam mendukung fungsi sistem pemerintahan, dengan catatan bahwa warga negara telah mengembangkan sikap politik. Sikap politik ini diartikan sebagai kemampuan individu untuk memahami inti serta dasar-dasar kekuasaan, sehingga dapat menjaga kelangsungan sistem demokrasi yang telah diterapkan.

Pendidikan politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Didalam Undang-undang tersebut mendefinisikan mengenai pendidikan politik sebagai sebuah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan

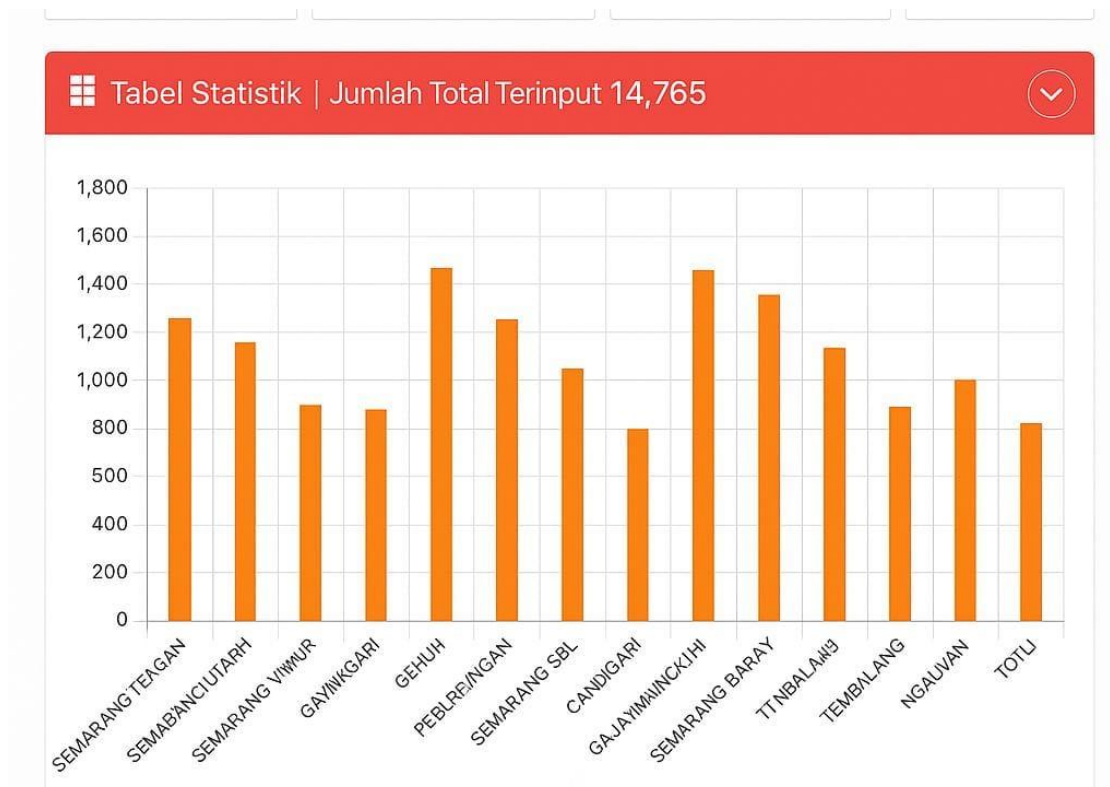
bernegara (Arkan Aziz Mubarak dan Sunny Umul Firdaus, 2020). pendidikan politik tersebut berfungsi sebagai pendukung berfungsinya sistem pemerintahan karena warga negara telah memiliki sikap politik. Sikap politik disini dapat dianggap sebagai kemampuan warga negara untuk memahami esensi serta pilar-pilar kekuasaan, sehingga dapat menjaga keberlangsungan sistem demokrasi yang telah berjalan. Tujuan utama dari pendidikan politik ini yaitu bagaimana menjadi masyarakat yang mengerti dan paham terhadap pentingnya berpolitik dan memahami apa itu politik yang sebenarnya.

PDI Perjuangan bisa dikatakan partai yang paling tertib dan taat peraturan AD/ART PDI Perjuangan. Misal dalam pemilihan ketua partai mulai dari ranting, PAC, DPC sampai pusat dilakukan pemilihan, artinya pemilihan ketua ini tidak ditunjuk langsung oleh siapapun melainkan melalui pemilihan kandidat. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan atau kecemburuan di dalam partai. Pak Kadarlusman atau Pak Pilus selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan kota Semarang mengatakan :

“kalau kita berbicara pendidikan politik ada yang namanya Pandu Juang dan Komunitas Juang yang dibentuk oleh DPD Provinsi yang di ikuti oleh DPC PDI Perjuangan. Kalau di kota semarang ada beberapa macam kita kumpulkan diberi pemahaman dan pengetahuan mengenai perpolitikan, bagaimana cara mempengaruhi masyarakat mengajak dengan cara yang baik, memberikan solusi bagi masyarakat ketika terjadi permasalahan, jadi ketika menjadi kader atau anggota tidak boleh diam, kita harus melihat secara langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini secara tidak langsung merupakan sebuah pendidikan politik”.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan berbagai macam model secara tidak langsung memberikan pengaruh kuat terhadap masyarakat. Tidak hanya melalui pendidikan-pendidikan formal namun melalui kegiatan-kegiatan sosial, diskusi dan lain-lain. Namun sebelum itu kader dan anggota diberi pemahaman tentang politik dan pemahaman agar ketika terjun langsung kepada masyarakat agar ketika terjadi permasalahan didalam masyarakat anggota yang ditugaskan untuk terjun kepada masyarakat paham ketika ada pertanyaan atau ada keluhan dari masyarakat.

Gambar 4.1 Data Kader DPC PDI Perjuangan Kota Semarang



Data diatas adalah data anggota DPC PDI Perjuangan kota Semarang dalam 2 tahun terakhir yaitu mencapai 14.765 anggota dan nilai ini sangat terpaut jauh dengan anggota yang sudah mengikuti pendidikan politik di tingkat DPC ataupun di tingkat Pratama karena hanya mencapai angka 1725. Angka ini sangat terpaut jauh apabila kita melihat jumlah kader PDI Perjuangan di Kota Semarang yang notabenenya sangat banyak dengan capaian tersebut terdapat ketimpangan kader dalam pendidikan politik yang diselenggarakan oleh DPC PDIP Perjuangan kota Semarang. Seharusnya dari pihak DPC mempunyai terobosan untuk menarik minat para anggotanya supaya dapat mengikuti pendidikan politik yang diselenggarakan oleh DPC agar kader yang nantinya turun ke masyarakat mempunyai bekal yang cukup supaya dapat menyampaikan visi misi PDI Perjuangan kepada masyarakat dan dapat menjadi representasi dari PDI perjuangan itu sendiri.

Dengan menjalin konsolidasi di berbagai level, mulai dari DPC ranting hingga anak ranting, melaksanakan diskusi politik, kampanye politik, seminar politik, serta pendidikan politik PDI Perjuangan, hal ini disampaikan kepada organisasi profesi, baik yang sudah tertata maupun yang belum tertata, dari golongan masyarakat, pedagang kecil, pengrajin di sektor informal, dan lainnya. Proses pengajaran dan

pembelajaran dilakukan secara teratur, namun ini juga adalah elemen dari pendidikan politik ketika mendekati pemilihan umum. PDI Perjuangan secara berkala memberikan pelatihan politik kepada anggotanya. Anggota ini nantinya akan berinteraksi langsung kepedamasyarakat. Keinginan partai supaya tetap menjalankan salah satu fungsi dari pembentukan partai politik untuk menjalankan pelatihan politik, dan hal ini telah terbukti. Hasil dari pendidikan politik yang dapat dilihat secara langsung adalah bahwa PDI Perjuangan tetap masih menjadi partai yang dipercaya oleh masyarakat.

Upaya PDI Perjuangan saat menjelaskan kepada rakyatnya guna menjadi masyarakat yang memiliki semangat juang dan berpikir kritis terhadap partai dan isu-isu bangsa ini pasti melibatkan strategi serta usaha yang telah dilaksanakan demi mencapai visi dan misi partai. Inisiatif untuk memberi pemahaman atau mengubah nilai-nilai menjadi bagian dari partai tentunya bertujuan agar masyarakat memiliki semangat juang, ketekunan, dan loyalitas yang tinggi. Selain itu, pendidikan politik itu digunakan untuk meningkatkan pemahaman perpolitikan dan pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, peran PDI Perjuangan Kota Semarang ini sebagai alat untuk penyambung atau menjadi jembatan kepentingan masyarakat untuk memberikan pemahaman khususnya kondisi sosial politik di Kota Semarang maupun di Indonesia. Didik Sugeng, salah satu anggota BMI (Banteng Muda Indonesia) sayap PDI Perjuangan Kota Semarang mengatakan :

“banyak upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota Semarang dalam hal pendidikan politik salah satunya sekolah kader, seminar-seminar, kami juga pernah mengadakan seminar gratis pemahaman politik di kecamatan atau anak ranting yang ada di Kota Semarang.”

Upaya pendidikan politik di Kota Semarang tidak hanya memberikan pemahaman-pemahaman saja, namun bagaimana aksinya atau penerapannya dalam kehidupan kita. Pendidikan politik juga tidak hanya dilakukan melalui forum ada banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Adelia Azahra salah satu staff DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, ia mengatakan :

“pendidikan politik yang pasti memberikan ilmu dan pemahaman mengenai perpolitikan di Indonesia itu bagaimana, tapi disini tidak hanya membahas mengenai politik saja, ada banyak hal, dan disini mempunyai tugasnya masing-masing, ada yang fokus dalam hal ekonomu, sosial, dan lain-lain. tapi yang paling utama itu ya pemahaman politik”.

Sebelum pendidikan politik ini disampaikan kepada masyarakat, anggota dan kader partai harus paham terlebih dahulu mengenai politik yang berada di Indonesia, bagaimana berpolitik yang baik dan apa pentingnya politik dan peduli terhadap kondisi sosial politik yang berada di Indonesia. Dalam menyampaikan pendidikan politik PDI Perjuangan menggunakan metode dan penyampaian sebagai berikut :

1. Materi pendidikan politik

Materi yang dipaparkan dalam pendidikan politik kepada para kader dan pengurus partai lebih fokus pada penguatan dan pengembangan program-program partai itu sendiri, penguatan komitmen serta dedikasi para kader, serta meningkatkan kualitas dan kemampuan mereka untuk berpikir jauh ke depan. Namun, di dalam kegiatan pendidikan politik juga membahas mengenai posisi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap orang sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan konstitusi negara. Hal ini disampaikan oleh pak Untung Sudjarno pada saat wawancara di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Selain itu, beliau juga mengatakan :

“kami sebagai sebagai anggota dan kader PDI Perjuangan dididik agar menjadi kader yang baik dan berpolitik dengan baik agar masyarakat percaya kepada kita, bagaimana masyarakat mau percaya kalau yang ada di dalam sistem saja tidak berperilaku dengan baik. Tidak munafik memang yang namanya partai itu butuh yang namanya kekuasaan, namun dalam mendapatkan kekuasaan tersebut dengan menggunakan cara yang baik dan benar sesuai dengan konstitusi.”

PDI Perjuangan dalam memberikan materi itu berbasis dengan kurikulum partai, hal tersebut ditekankan kepada kader-kader mudan dan sayap partai. Untuk muatan materinya antara lain materi Ideologi Partai yang mana memuat bagaimana ideologi marhaenisme, sosialisme dan pancasila sebagai ideologi bangsa, sejarah kemerdekaan, kemudian materi tentang lembaga pemerintahan entah itu lembaga eksekutif, yudikatif dan lain-lain. terkait hal tersebut kegiatan itu ada agenda rutin entah sabulan sekali atau dua bulan sekali tergantung yang mengisi materi. Biasanya yang mengisi materi itu sendiri kader yang menjadi anggota dewan atau kader yang sudah senior.

Pendidikan politik ini dimulai dari anggota dan kader partai terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada masyarakat dan sebelum dilakukan penyampaian kepada masyarakat pengurus atau anggota partai yang ada di masing-masing wilayah termasuk Kota Semarang melakukan konsolidasi terlebih dahulu sebelum terjun ke masyarakat. Aksinya adalah partai mengunjungi masyarakat atau memberikan ruang kepada masyarakat. Partai mengarahkan kepada kader untuk lebih peka terhadap situasi yang terjadi didalam masyarakat dan terjun langsung kepada masyarakat. Pendidikan politik bagi kader PDI Perjuangan ada beberapa jenis yaitu formal dan non formal. Vio Lita Angelina salah satu kader PDI Perjuangan Kota Semarang mengatakan

“waktu kita memberikan materi seperti seminar, talk show kita berikan materi power point agar sebelum mereka menerima materi sudah ada gambaran terlebih dahulu dan biasanya kita mengundang narasumber dibidangnya.”

Jadi dalam memberikan materi, PDI Perjuangan Kota Semarang benar-benar dilaksanakan secara terstruktur dan narasumber yang menyampaikan materi benar-benar paham dibidangnya. Materi kaderisasi yang diberikan dibagi menjadi dua, yang mana berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan, yakni yang pertama adalah materi yang membahas khusus mengenai ideologi, hal itu bersifat pokok atau utama terdiri dari Indonesia Menggugat Tahun 1930, Mencapai Indonesia Merdeka Tahun 1933, Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, Membangun Dunia Kembali 1960, Nawaksara Tahun 1966, dan Pidato Ketua Umum Pada Kongres. Kedua adalah mengenai Materi Pengajaran Khusus Ideologi yang bersifat pendukung terdiri dari Kapitalisme Bangsa sendiri Tahun 1932, Amanat Presiden Soekarno Tahun 1959, Amanat Presiden Soekarno Tahun 1960, Deklarasi Ekonomi Tahun 1963, dan Marhenisme adalah Teori Perjuangan Tahun 1965.

2. Metode pendidikan

Metode pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuang adalah dengan menggunakan pendidikan formal dan pendidikan non formal. Metode pendidikan ini didalam forum dilakukan berbagai macam, yaitu diskusi,

outbond, ceramah, tugas serta praktik penyampaian pendidikan politik kepada masyarakat. Sedangkan pendidikan non formal yaitu pendidikan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat maupun kader, misal secara langsung dengan mengadakan forum diskusi atau yang lainnya, secara tidak langsung bisa melalui media sosial atau artikel.

3. Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan dari partai politik dalam memberikan pelajaran mengenai politik bagi anggotanya dan pengurusnya adalah untuk memperkuat solidaritas politik yang berfungsi untuk menjaga dan merawat keutuhan bangsa, memberikan pengetahuan mengenai peran, tugas, hak, dan kewajiban partai politik, serta meningkatkan kemampuan anggotanya dan pengurus. Tujuan dari partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada publik adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam berinteraksi di masyarakat, serta dalam konteks berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan diadakannya pendidikan politik ini akan meningkatkan keterlibatan politik dari anggota, pengurus partai, dan masyarakat luas. Tujuan utama dari pendidikan politik ini yaitu bagaimana menjadi masyarakat yang mengerti dan paham terhadap pentingnya berpolitik dan memahami apa itu politik yang sebenarnya.

Tujuan utama pendidikan politik PDI Perjuangan yaitu jangan sampai mati tetap harus ada kadernya sehingga PDI Perjuangan menjadi alat perjuangan dengan cara harus memberikan pemahaman politik serta memberikan ajaran ideologi partai agar tetap mampu bersaing, ketika mampu bersaing dengan partai lain, akan lebih mudah mendapatkan kekuasaan dan otomatis akan memiliki pengaruh dan perjuangan tadi tidak sia-sia. Hal tersebut disampaikan oleh Yosi Yonardo dalam wawancara.

“untuk tujuan utama pendidikan politik di Kota Semarang sudah sering saya sampaikan, bahwa pendidikan politik ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang luas agar ketika mereka bertemu atau datang kepada masyarakat itu tidak kosong, jadi mereka itu sudah siap dengan membawa nilai dan harapan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Kota Semarang”. Kata Rifki salah satu staff PDI Perjuangan Kota Semarang.

Pendidikan politik ini memang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap partai, Hal tersebut disampaikan oleh salah satu staf DPC PDI Perjuangan Kota Semarang saat wawancara. Dalam wawancara, Pak Untung mengatakan :

“Tanpa adanya pendidikan politik baik bagi internal partai maupun kepada masyarakat maka perpolitikan di Indonesia akan kacau, bagaimana tidak orang internalnya saja nggak paham bagaimana dengan masyarakatnya. Maka dari itu, pendidikan politik ini penting saya sampaikan agar mereka ini paham apa itu politik, tujuannya apa dan sebagainya. Bagi kami hal itu sangat besar pengaruhnya, karena dengan pendidikan politik kami dapat mensosialisasikan pentingnya pengetahuan mengenai situasi dan kondisi politik.”

Artinya pendidikan politik ini memang sangat penting bagi partai maupun bagi masyarakat. Tanpa adanya pendidikan politik, seperti yang disampaikan oleh Pak Untung, kondisi politik ini akan kacau karena tidak ada pemahaman terhadap masyarakat, maka ketika hal itu terjadi tidak ada yang mengawasi. Salah satu peran masyarakat adalah sebagai pengawas secara tidak langsung bagi kondisi politik di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya pendidikan politik baik bagi kader partai maupun bagi masyarakat. Selain itu, partai melaksanakan pendidikan politik sesuai dengan perintah Undang-undang No. 2 tahun 2011 dan AD/ART PDI Perjuangan.

Pendidikan politik Partai dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penanaman dan penyebaran ajaran Bung Karno
- b. pendalaman pemahaman terhadap Pancasila, UUD NKRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik
- d. pendidikan kaderisasi anggota Partai secara berjenjang dan berkelanjutan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Yosi Yonardo dalam wawancara, ia mengatakan bahwa

“pendidikan politik di Kota Semarang melalui beberapa kegiatan diantaranya melalui sekolah kader dan partai, seminar, konsolidasi dan secara non formal, misal kegiatan sosial, penanaman pohon atau penghijauan, kegiatan bersih-bersih lingkungan dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk pendidikan yang ada.”

Konsep pendidikan politik di Kota Semarang ada beberapa macam, hal ini

dilakukan untuk mempermudah dan agar tidak monoton. Pak Kadarlusman atau yang biasa disapa dengan Pak Pilus selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Semarang dan sekaligus sebagai ketua DPRD Kota Semarang mengatakan :

“di Kota Semarang (PDI Perjuangan) pendidikan politik ini hampir mirip DPC di kota lain ada yang namanya sekolah partai, diklat, seminar. Tidak hanya itu saja kami juga ada yang namanya pendidikan politik non formal seperti pertemuan-pertemuan, kegiatan sosial dan sebagainya.”

Didalam pendidikan politik, PDI Perjuangan Kota Semarang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai politik saja, namun didalamnya diberi pemahaman mengenai ideologi partai agar mereka paham dan memiliki pedoman kebangsaan, hal tersebut disampaikan oleh Pak Pilus saat wawancara.

“pendidikan politik PDI Perjuangan selalu memberikan pemahaman ideologi partai yaitu pancasila, dengan berlandaskan pemikiran dari bung karno yang berwawasan kebangsaan. Ini penting apalagi bagi generasi muda sekarang agar mereka paham seperti apa pancasila itu, perjuangan pemikiran Soekarno terhadap bangsa dan negara, dan memiliki pemikiran yang kritis terhadap bangsa ini.”

Berdasarkan uraian diatas, PDI Perjuangan Kota Semarang memberikan upaya yang sedemikian rupa agar dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap pendidikan politik itu sendiri. Pendidikan politik dilakukan tidak hanya melalui forum formal namun juga dilakukan secara non formal. Artinya dalam memberikan pemahaman bisa dilakukan dimana saja dan dalam bentuk kegiatan yang beragam. Selain itu, partai juga melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU No. 2 tahun 2011 dan sesuai tujuan partai dalam AD/ART PDI Perjuangan. Hal ini juga sesuai dengan teori pendidikan politik yang mana pendidikan politik adalah proses untuk belajar, tidak hanya untuk menambah informasi dan wawasan saja. Namun, lebih dalam untuk kemampuan mawas diri secara kritis, menentukan bagaimana sikap yang benar dan melatih kelincahan berpikir maupun perbuatan. Sebagai manusia, tugas utama kita adalah terus belajar, dalam hal apapun contohnya hidup rukun bersama dalam suatu ikatan kemasyarakatan dari yang kecil sampai ke ikatan kebangsaan dan kenegaraan (Kartono, 2009).

B. Pendidikan Formal

Pendidikan politik Partai berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penanaman dan penyebarluasan ajaran Bung Karno
- b. pendalaman pemahaman terhadap Pancasila, UUD NKRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pendidikan kaderisasi anggota Partai secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pendidikan politik kepada pengurus partai tersebut guna meningkatkan kapasitas pengurus dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang dengan beberapa cara, yang mana pendidikan politik tersebut disesuaikan dengan beberapa metode yang di rasa mampu maksimal serta lebih mengefisiensikan pengeluaran pendanaan dari dilaksanakannya pendidikan politik tersebut. Yosi Yonardo mengatakan

*“jadi kalau ngomong soal konsep pendidikan politik seperti didalam partai setelah rekrutmen diberikan pemahaman mengenai partai, ideologi partai, pemahaman politik, baru setelah tahap selanjutnya berbicara mengenai pendidikan politik yang biasanya lebih ke pendidikan politik untuk pemilu, yang mana kader-kader tersebut siap untuk bersaing didalam pemilu atau biasanya ada pembekalan.”*Hal yang sama juga disampaikan oleh Vio Lita Angelina, Kader PDI Perjuangan Kota Semarang :

“untuk konsep pendidikan disini kita mulai dari awal struktural kita kuatkan mindset dan ideologinya terlebih dahulu, baru nanti kita terjun langsung kepada masyarakat, jadi konsepnya top down dari atas kebawah, karena tidak mungkin belum dibekali apa-apa kita terjun langsung kan.”

Jadi konsep pendidikan ini dimulai dari paling dasar, pemahaman partai, ideologi dan sebagainya. Karena memang hal tersebut sangat penting bagi anggota dan kader seblum terjun langsung kepada masyarakat. Setelah itu baru diberi pemahaman bagaimana kondisi sosial politik, menjadi kader yang baik ketika ada yang mencalonkan untuk menjadi anggota legislatif dan sebagainya. Pendidikan politik PDI Perjuangan dibagi menjadi dua yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal.

1. Kaderisasi Partai

Kaderisasi merupakan pendidikan jangka panjang untuk memaksimalkan potensi kader dengan cara mentransmisikan nilai-nilai dan ideologi yang ada didalam partai. Kaderisasi adalah suatu keharusan yang ada didalam organisasi agar tetap eksis meskipun banyak organisasi baru yang muncul. Kaderisasi partai adalah pendidikan politik yang paling mendasar dan paling penting untuk dilaksanakan. Kaderisasi dilaksanakan secara berjenjang dan terpadu di bawah pengawasan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melaksanakan pengkaderan sebagai metode untuk merekrut anggota, demi kesinambungan perjuangan regenerasi yang tentu akan berdampak pada regenerasi kepemimpinan di suatu negara.

Tidak berhasilnya partai politik dalam melakukan pengkaderan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap partai tersebut, dan salah satu tandanya adalah meningkatnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya (golput) saat pemilu. Kaderisasi tersebut tidak hanya sebatas pada pengurus partai, namun juga dilaksanakan kepada setiap anggota partai khususnya para calon legislatif yang ditawarkan oleh partai kepada rakyat untuk mewakili di badan legislatif. Kaderisasi di PDI Perjuangan memiliki tingkatannya masing-masing yaitu, Kaderisasi tingkat Pratama, Kaderisasi tingkat madya dan Kaderisasi tingkat Utama

Tabel 4.1 Pendidikan Politik

Pendidikan Politik			
Kategori	DPC	DPD	DPP
Formal	Pratama	Madya	Utama
Non Formal	Bersih Lingkungan	Penanaman Pohon	Sekolah Kader Partai
Insidental	Road show	Konsolidasi	Konsolidasi Nasional

a. Kaderisasi Tingkat Pratama

Kaderisasi tingkat pratama merupakan pendidikan politik yang dilakukan secara formal. Kaderisasi ini diselenggarakan bagi anggota baru atau kader yang bergabung dengan PDI Perjuangan tingkat DPC. Kegiatan ini dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan yang dirancang serta diawasi langsung oleh DPD PDI Perjuangan. Kaderisasi merupakan langkah awal dalam proses kaderisasi

berjenjang di PDI Perjuangan. Tujuan diadakan kegiatan kaderisasi ini memberikan pemahaman dasar tentang ideologi partai, struktur organisasi, program kerja, serta mempersiapkan untuk menjadi kader yang lebih aktif dan lebih loyal kepada partai. Untung Sudjarno pada saat wawancara di DPC PDI Perjuangan mengatakan :

“kami sebagai sebagai anggota dan kader PDI Perjuangan dididik agar menjadi kader yang baik dan berpolitik dengan baik agar masyarakat percaya kepada kita, bagaimana masyarakat mau percaya kalau yang ada di dalam sistem saja tidak berperilaku dengan baik. Tidak munafik memang yang namanya partai itu butuh yang namanya kekuasaan, namun dalam mendapatkan kekuasaan tersebut dengan menggunakan cara yang baik dan benar sesuai dengan konstitusi.”

Penyampaian materi kepada kader yang ikuti dalam pendidikan kader pratama lebih berfokus kepada pemantapan dan pengembangan program partai, meningkatkan loyalitas kepada partai dan peningkatan kualitas kader serta kemampuan berpikir secara kritis. Namun didalam materi tersebut anggota atau kader yang mengikuti pendidikan ini juga diberikan materi pemahaman ideologi partai, yang mana ideologi tersebut merupakan ideologi pancasila, soekarno dan marhaenisme. Hal tersebut bertujuan agar kembali lagi menjadi kader yang berwawasan nasionalis dan memiliki wawasan kebangsaan serta setia kepada NKRI.

Pendidikan politik melalui kaderisasi ini menjadikan kader lebih loyal kepada partai dan memiliki jiwa nasionalis. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa PDI Perjuangan memiliki basis masa yang cukup banyak dan menjadi partai terbesar di Indonesia terlepas dari sejarah pembentukan partai dan ketua umum PDI Perjuangan. Maka pendidikan semacam ini menjadi penting bagi partai agar memiliki anggota dan kader yang setia dan loyal serta memiliki jiwa nasionalis.

Pendidikan Kader Pratama yang dilakukan di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman ideologi, kesadaran terhadap organisasi, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta meningkatkan kesadaran politik demi mencapai tujuan bersama. Selain itu, diharapkan setiap kader partai dapat menjalankan ideologi perjuangan untuk

melindungi diri dari praktik-praktik pragmatisme baik dalam politik maupun dalam aspek kehidupan lainnya.

Gambar 4.2 Kaderisasi Pratama



b. Kaderisasi Tingkat Madya

Kaderisasi madya PDI Perjuangan, atau Pendidikan Kader Madya (PKM), adalah bagian dari sistem kaderisasi internal partai yang bertujuan untuk membangun kesadaran ideologi, organisasi, dan politik pada kader. PKM juga berfungsi sebagai penanaman ideologi dan nilai-nilai partai untuk mencegah pragmatisme politik dan membentengi kader dari berbagai pengaruh negatif. Kaderisasi tingkat madya ini diselenggarakan oleh PDI Perjuangan tingkat DPD Provinsi dan diikuti oleh kader DPD PDI Perjuangan yang diawasi oleh DPP PDI Perjuangan.

Pada tahap ini, peserta program kaderisasi akan memperoleh pelatihan tentang komunikasi politik, interaksi pribadi yang terkait dengan mobilisasi massa, taktik kampanye, serta pengembangan kebijakan. Berbeda dengan fase kaderisasi awal yang lebih menekankan pada penguatan ideologi partai dan konsolidasi partai, tingkat ini lebih fokus pada aspek yang lebih luas, seperti manajemen untuk meraih kemenangan dalam pemilu. Inti dari tahap madya dalam kaderisasi adalah untuk menguasai tata kelola partai politik di level provinsi, memahami proses pembuatan kebijakan di tingkat provinsi,

kemampuan untuk melakukan lobbying, serta menguasai berbagai aspek pemilihan dan strategi kemenangan di provinsi (Yulianto, 2024).

Materi yang disampaikan pada kaderisasi madya sangat berbeda dengan kaderisasi pratama. Pada tingkat ini materi yang disampaikan lebih kompleks dan lebih berfokus pada manajemen partai dan proses berjalannya partai serta bagaimana menjadi partai yang tetap berfokus pada orientasi partai dan strategi partai dalam pemenangan pemilu. Tidak hanya itu saja, mengutip dari komentar Djarot Syaiful Hidayat (Ketua DPP bidang ideologi) pada saat pengarahan Kaderisasi Madya Jawa Barat, beliau mengatakan

“Jadi pada tingkat madya ini fokusnya lebih ke penguatan ideologis, kedisiplinan. Karena sebagai partai pelopor, PDI Perjuangan merupakan partai yang ideologis dan dikelola secara modern. Sebagai partai pelopor juga, PDI Perjuangan menekankan pada disiplin, disiplin ideologis, organisasi, dan gerakan”

Kaderisasi ini tidak hanya diikuti oleh kader saja namun juga diikuti oleh kader yang mencalonkan sebagai anggota legislatif. Maka dari itu, pendidikan kader madya ini menjadi pendidikan yang sangat penting, inti dari pendidikan ini adalah berfokus pada penguatan ideologi, kedisiplinan kader dan strategi pemenangan partai didalam pemilu.

c. Kaderisasi Tingkat Utama

Kaderisasi Utama PDI Perjuangan merupakan jenjang pendidikan politik tingkat akhir atau pendidikan politik kader yang berada di DPP PDI Perjuangan. Didalam kaderisasi utama materi yang disampaikan sudah tidak hanya mengenai ideologi partai saja, namun lebih kompleks daripada kaderisasi yang sebelumnya. Kaderisasi tingkat utama ini berfokus pada penguatan basis masa, kemampuan kepemimpinan dan bagaimana untuk menggerakkan massa. Selain itu, juga didalam kaderisasi utama ini memberikan materi sistem politik yang berjalan di Indonesia, kondisi sosial politik, ekonomi di Indonesia, konsolidasi dan sebagainya. Pak Untung Sudjarno, kader DPC PDI Perjuangan Kota Semarang mengatakan :

“Kaderisasi utama ini sudah berbeda lagi pembahasannya, disana materi yang disampaikan lebih rinci, ada materi sistem politik, jadi bagaimana perpolitikan di Indonesia berjalan, kondisi sosial ekonomi politik dan sebagainya, bagaimana cara menggerakkan

massa, strategi menjadi pemimpin yang baik dan sebagainya. Jadi itu disana lebih luas lagi pembahasannya, tapi tetap mau pendidikan politik tingkat apapun, PDI Perjuangan selalu menyampaikan ideologi partai.”

Kader utama diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ideologi partai, memiliki jiwa kepemimpinan, dan memiliki kemampuan mengorganisir massa. Selain itu, kader utama juga memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan partai serta dapat mengimplementasikan program-program kebijakan partai ditingkat pusat maupun daerah. Artinya pembahasan disini menjadi lebih luas, karena nantinya yang akan menjadi penerus kepemimpinan dan mencakup seluruh Indonesia.

Pendidikan politik yang dilakukan melalui kaderisasi partai dengan target masyarakat luas bersifat audiensial. Aktivitas ini dilakukan dengan cara mengumpulkan masa, melakukan interaksi politik, menyampaikan materi yang berkaitan dengan metode pemikiran Bung Karno, serta membahas tupoksi dalam berpolitik di dalam masyarakat, dan juga tujuan kemenangan partai dalam pemilihan umum melalui seminar, diskusi maupun kegiatan formal lainnya. Sekolah Kader Partai mempunyai tujuan guna membentuk kesadaran kader Partai yang berkarakter, ideologi, organisasi, politik, dan kesadaran lingkungan, serta pemahaman terhadap aspek-aspek sosial ekonomi kemasyarakatan, mendidik, mencerdaskan, dan menyiapkan calon pemimpin Partai, bangsa, dan negara dan menanamkan ajaran-ajaran Bung Karno.

Tabel 4.2 Pendidikan Politik Formal

Kaderisasi PDI Perjuangan				
Kategori	Orientasi	Bahan Ajar	Pelaksana	Objek
Pratama	pemahaman dasar tentang ideologi partai struktur organisasi, program kerja, serta mempersiapkan untuk menjadi kader yang lebih aktif dan lebih loyal kepada partai	Materi, Buku saku, Pemateri	DPC PDI Perjuangan	Anggota DPC PDI Perjuangan
Madya	berfokus pada penguatan ideologi, kedisiplinan kader dan strategi kemenangan partai didalam pemilu.	Materi, Buku saku, Pemateri	DPD PDI Perjuangan	Kader DPC dan DPD
Utama	penguatan basis masa, kemampuan kepemimpinan dan bagaimana untuk menggerakkan massa	Materi, Buku saku, Pemateri	DPP PDI Perjuangan	Kader PDI Perjuangan Yang Sudah mengikuti Pendidikan Politik Madya

2. Sekolah Partai

Dalam konteks kebutuhan politik partai di samping pelatihan kader, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang juga mendirikan Sekolah Partai. Sekolah Partai berfungsi untuk menyelenggarakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan guna menanamkan ideologi partai kepada kader yang akan diberi tanggung jawab sebagai pejabat politik partai. Ketika menjelang pemilu, para calon pejabat khususnya di kota Semarang mereka menggunakan slogan “Mewujudkan Semarang Hebat”. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu staff DPC PDI Perjuangan Kota Semarang saat wawancara. Sekolah Partai merupakan komponen dari proses rekrutmen terbuka untuk kepemimpinan eksekutif wilayah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, dengan penetapan rekomendasi dari DPP Partai. Ideologi partai diwujudkan dalam pelaksanaan Sekolah Partai untuk calon pemimpin daerah.

Kepentingan sekolah partai memiliki peranan yang signifikan, terutama untuk para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan bertanding dalam Pilkada. Seorang calon kepala daerah serta calon wakilnya perlu diingatkan kembali mengenai tujuan mereka dalam menjadi pemimpin daerah, meskipun mereka adalah kader yang sudah lama terlibat dalam partai. Sebagai individu yang telah lama berkiprah di dunia politik, tidak hanya teori yang perlu dikuasai, tetapi juga penerapan dan pelaksanaan kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan agar ketika dibutuhkan oleh masyarakat kader atau anggota ini sudah siap untuk terjun langsung ke masyarakat. Perencanaan sekolah partai sebagai institusi pendidikan politik yang diadakan oleh DPP PDI Perjuangan, berfungsi sebagai langkah strategis untuk mencetak kepemimpinan eksekutif di tingkat daerah, dimulai dengan proses rekomendasi dari DPP Partai untuk calon eksekutif daerah yang diusung ataupun yang mendapatkan dukungan. Setelah rekomendasi tersebut, semua calon kepala daerah harus menjalani pendidikan di sekolah partai.

Dalam AD/ART disebutkan bahwa Sekolah Partai menyelenggarakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan yang ditujukan untuk:

- a. Anggota Partai
- b. Kader Partai
- c. Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD
- d. Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah
- e. Calon pejabat politik dan calon pejabat publik lainnya.

Dalam hal ini, sekolah partai yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan bisa diikuti oleh seluruh anggota dan kader partai. Namun, ketika menjelang pemilu para calon anggota legislatif, pejabat daerah dan lainnya diwajibkan untuk mengikuti sekolah partai. Karena didalam sekolah partai, para calon peserta pemilu dari fraksi PDI Perjuangan akan dibekali ilmu dan materi-materi berkaitan dengan kepemimpinan didalam birokrasi. Hal ini disampaikan oleh Untung Sudjarno saat wawancara, beliau mengatakan :

“semua calon anggota legislatif atau peserta pemilu PDI Perjuangan diwajibkan untuk mengikuti sekolah partai. Karena mereka akan dibekali ilmu dan arahan dari partai, agar menjadi pemimpin yang selalu memntingkan masyarakat, pemimpin yang baik dan selalu setia kepada partai.”

Penjelasan diatas bahwa sekolah partai memang diadakan oleh PDI Perjuangan

yang bisa diikuti oleh semua anggota dan kader. Namun diwajibkan dan mengharuskan kader PDI Perjuangan yang menjadi calon peserta pemilu untuk ikut sekolah partai tersebut. Karena disana akan dibekali dan mendapat arahan dari partai bagi semua calon. Artinya pendidikan politik PDI Perjuangan memang sangat terorganisir. Hal ini bisa dilihat dari sistem pendidikan politik yang ada didalam partai.

Gambar 4.3 Sekolah Partai



3. Konsolidasi

Konsolidasi yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Semarang untuk para kader dan anggota partai berlangsung dalam bentuk konsultasi dan/atau rapat DPC, Pimpinan Anak Cabang (PAC), Ranting, serta Anak Ranting. Selain itu, juga diadakan pertemuan dengan melibatkan petugas partai yang bekerja di legislatif maupun eksekutif. Kegiatan konsolidasi untuk kader dan anggota partai diselenggarakan secara rutin, sekitar tiga hingga empat kali sebulan, atau dapat dilakukan dengan cara yang lebih informal sesuai kondisi masyarakat umum. Sementara itu, materi dari konsolidasi untuk masyarakat umum berfokus pada isu-isu kebijakan publik, pembangunan publik, dan pengumpulan aspirasi dari masyarakat (Dokumen Kegiatan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang).

Kegiatan ini dilaksanakan di Gor Jatidiri Semarang pada tanggal 25 agustus 2024. Hasil dari konsolidasi ini yaitu

- a. mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera
- b. mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan negara yang dihormati oleh dunia
- c. solid dalam memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Materi pendidikan yang diberikan biasanya berkaitan dengan penguatan pemahaman nilai-nilai dasar dan ideologi partai, serta konstitusi negara dan pemerintahan secara umum. Pemberian materi biasanya dilakukan oleh ketua DPC maupun pengurus DPC yang memiliki sertifikat guru kader. Guru Kader sendiri merupakan sekolah politik khusus di PDI-P yang menghasilkan kader utama yang memiliki kualifikasi mengajar kepada kader-kader lainnya. Pendidikan yang didapat dari pertemuan konsolidasi tersebut oleh tiap pengurus ranting untuk kemudian dibagikan kepada anggota pengurus lain di tingkat struktur ranting serta disampaikan juga kepada pengurus anak ranting melalui pertemuan non-formal pengurus ranting dan anak ranting.

Gambar 4.4 Konsolidasi



C. Pendidikan Non Formal

Pendidikan nonformal merupakan metode pembelajaran di luar sistem pendidikan resmi yang bisa diorganisasikan dengan cara yang sistematis dan berjenjang, contohnya seperti kursus, pelatihan, serta kelompok belajar. Tujuan dari jenis pendidikan ini adalah untuk melengkapi atau bahkan mengisi kekosongan dari pendidikan formal, sekaligus memberikan keahlian dan pengetahuan praktis yang sesuai dengan kebutuhan tertentu. Didalam PDI Perjuangan Kota Semarang pendidikan politik juga diselenggarakan secara non formal. Pendidikan politik non formal tidak hanya ditujukan kepada anggota maupun kader, tetapi juga bagi masyarakat. Hal ini dilakukan oleh PDI Perjuangan guna memberikan pemahaman bagi masyarakat dan melatih kader yang baru saja menerima pendidikan politik formal untuk turun langsung kepada masyarakat. Dalam pendidikan politik ini tidak hanya membahas mengenai politik saja, namun kondisi sosial ekonomi, budaya dan sebagainya. Berikut merupakan pendidikan non formal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan.

1. Road Show

Road show ini adalah anggota PDI Perjuangan Kota Semarang mendatangi masyarakat dengan bertanya kepada masyarakat secara langsung, bagaimana kondisi saat ini. Didalam road show ini PDI Perjuangan juga mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, misalnya kondisi ekonomi yang kurang baik yang nantinya akan dibantu oleh PDI Perjuangan Kota Semarang. Selain itu, program ini juga sebagai forum diskusi antara partai dengan masyarakat setempat dalam melaksanakan pendidikan politik.

Didalam hasil Road Show pada tahun 2022, Pak Kadar Lusman selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Semarang mengatakan bahwa PDI Perjuangan harus tegak lurus menjalankan intruksi partai dan mematuhi AD/ART partai, bagaimana caranya PDI Perjuangan tetap eksis dan bisa bersaing dengan partai lain agar PDI Perjuangan menjadi partai yang kuat dengan cara-cara yang bersih. Hal tersebut disampaikan pada saat acara road show di gedung Graha Sari, Kecamatan Gayamsari.

Kegiatan ini salah satu bentuk pendidikan politik non formal yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan Kota Semarang sebagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat. Kegiatan road show ini dengan mendatangi masyarakat di setiap daerah di Kota Semarang yang dapat diikuti oleh masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi di masyarakat kota Semarang. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik. Artinya kegiatan ini sebagai salah satu kegiatan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat dan menjadi kegiatan diskusi antara kader partai dengan masyarakat. Kader akan menanyakan bagaimana kondisinya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan kepada partai. Kegiatan ini bisa menjadikan partai dan masyarakat menjadi lebih dekat tanpa adanya batasan.

Gambar 4.5 Road show



2. Penghijauan

Kegiatan penghijauan ini dilaksanakan di Kelurahan Mangkang, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Kegiatan ini dihadiri oleh :

- a. Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang,
- b. KSB PAC Se Kota Semarang,
- c. Pengurus PAC dan Ranting Kecamatan Tugu,
- d. Pengurus PAC Kecamatan Ngaliyan

e. masyarakat Umum.

Dr. H. Hendrar Prihadi, SE, MM selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang mengatakan tujuan diadakannya kegiatan Pendidikan Politik bagi Struktural dan Kader Tentang Arti Pentingnya Penghijauan dan Kebersihan, Untuk Terciptanya Lingkungan Hidup Yang Lestari adalah sarana yang digunakan untuk melestarikan lingkungan, supaya lingkungan kembali asri dan sehat tanpa adanya pencemaran (Dokumen kegiatan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang).

Dengan diadakanya penghijauan diharapkan supaya dapat menurunkan suhu suatu tempat, banyaknya oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang akan membuat lingkungan lebih segar, teduh, nyaman, dan asri. Dengan diadakanya penghijauan sebagai sarana yang diupayakan guna pencegahan terhadap terjadinya bencana banjir dan erosi tanah. Dengan banyaknya pohon besar dan tinggi, maka terciptanya serapan-serapan untuk menampung air hujan. Kemudian air hujan tersebut mampu untuk diubah menjadi air tanah yang bisa memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk lainnya. Kita sebagai kader juga harus ikut merawat dan menjaga lingkungan agar terlihat bersih dan nyaman supaya terciptanya lingkungan hidup yang lestari.

Gambar 4.6*Penghijauan*



3. Bersih Lingkungan

Kegiatan bersih lingkungan yang diadakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Semarang ini dilaksanakan di Manyaran, Semarang Barat. Hal ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Konversi Sampah Nasional 2024. Dalam kegiatan ini, dihadiri oleh seluruh anggota dan kader DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, Pimpinan dan Anggota Fraksi, pengurus PAC dan Ranting Kecamatan Semarang Barat, dan KSB PAC Kota Semarang dan masyarakat sekitar. Kadar Lusman, SE, MM selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menyimpulkan hasil kegiatan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) DPC PDI Perjuangan Kota Semarang mengadakan kegiatan bersih-bersih sampah;
- b. Kegiatan ini melibatkan Pengurus DPC, Anggota Fraksi, Pengurus PAC, Pengurus Ranting Kecamatan Semarang Barat, dan Komandan Te Bintang Dua;
- c. Kita sebagai kader PDI Perjuangan harus bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan Sumber Daya Alam, termasuk hutan, air, udara, dan keanekaragaman hayati.

Kegiatan bersih lingkungan ini selain untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, juga sebagai bentuk kepedulian PDI Perjuangan Kota Semarang terhadap lingkungan sekitar. Dalam kegiatan bersih lingkungan ini, PDI Perjuangan Kota Semarang mengajak masyarakat kota semarang untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Tidak hanya itu saja, PDI Perjuangan Kota Semarang juga mengadakan briefing bagi kader dan masyarakat terkait pendidikan politik.

Artinya pendidikan politik ini penting agar mereka paham dengan bagaimana politik itu berjalan, tujuan dari politik dan sebagainya. Pendidikan politik juga tidak hanya membahas mengenai perpolitikan atau pemerintahan saja, namun didalam pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan khususnya Kota Semarang mengajak masyarakat untuk memahami dan melihat bagaimana kondisi sosial politik maupun ekonomi sekarang dan bagaimana sikap kita sebagai masyarakat. Selain itu, disetiap pendidikan politik, PDI Perjuangan selalu menyampaikan ajaran dan ideologi yang digunakan yaitu ideologi soekarno dan pancasila, yang mana ajaran tersebut secara tidak langsung mengajarkan kita untuk saling membantu dan saling gotong royong.

Pendidikan politik PDI Perjuangan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memiliki visi dan misi yang tegas. Tanpa adanya visi dan misi yang tegas, usaha partai akan menjadi tidak berarti. Saat ini, fokus dari pendidikan politik PDI Perjuangan hanya untuk menguatkan pemahaman masyarakat mengenai kondisi politik di sekitar mereka. Pengetahuan yang lebih mendalam tentang situasi politik yang telah disampaikan akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik. Pendidikan politik PDI Perjuangan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, mempunyai tujuan dan janji yang jelas. Tanpa tujuan dan janji yang jelas, upaya partai akan kehilangan makna. Saat ini, perhatian utama dalam pendidikan politik PDI Perjuangan adalah untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang keadaan

politik di sekeliling mereka. Pemahaman yang lebih baik mengenai keadaan politik yang telah dijelaskan akan berdampak pada tingkat keterlibatan politik. Maka dari itu, PDI Perjuangan Kota Semarang terus berupaya memberikan pemahaman terkait kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya kepada masyarakat salah satunya melalui pendidikan politik. Hal tersebut sesuai dengan AD/ART PDI Perjuangan yang ikut serta mencerdaskan bangsa dan bernegara kepada masyarakat.

Melalui pengajaran tentang politik, diharapkan warga komunitas dapat mengenali dan memahami prinsip-prinsip serta ideologi yang ada dalam sistem politik suatu partai agar mereka bisa terlibat. Secara umum, pengajaran politik adalah kegiatan yang dirancang untuk menanamkan nilai politik dengan tujuan yang jelas dan terstruktur, baik secara resmi maupun tidak resmi, secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya agar masyarakat memiliki wawasan, sikap, dan kemampuan dalam bidang politik. Pendidikan politik dapat dipandang sebagai sarana untuk menyebarkan ide-ide politik dengan tujuan akhir membangun kesadaran politik di kalangan warga negara. Warga negara yang memiliki kesadaran politik adalah individu yang memahami hak dan kewajibannya, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap tahap pembangunan bangsa.

Keberadaan pendidikan politik sangat penting, yang utama adalah untuk mengedukasi generasi muda saat ini yang akan menjadi penerus bangsa, baik sebagai pemilih yang bijak dalam pemilihan umum maupun sebagai individu yang akan terpilih untuk memimpin negara (Kartono, 2009). Pendidikan politik merupakan pengetahuan dimana kemampuan mengetahui sosok dan citra masyarakat, serta perkembangannya dan citra budayanya sendiri, sehingga mampu:

- a. orang menyadari kelebihan diri sendiri
- b. mengenali karakter bangsanya dan negaranya sendiri
- c. mempunyai percaya diri yang besar
- d. hilangkan rasa rendah diri dan bergantung terhadap negara lain.

Mereka sangat memahami karakter bangsa negaranya, nilai bangsanya, tujuan negara, falsafah hidup (hal ini tertuang dalam Pancasila) dijadikan tolak ukur dalam memperjuangkan tujuan berbangsanya, yaitu hidup secara sejahtera.

Gambar 4.7 Bersih Lingkungan



D. Hambatan

PDI Perjuangan Kota Semarang dalam melaksanakan pendidikan politik tidak selalu berjalan lancar, ada beberapa hal menjadi hambatan dalam melakukan pendidikan politik yaitu keterbatasan waktu dan kurangnya partisipasi masyarakat. Waktu yang dilaksanakan terkadang bertabrakan dengan agenda lain atau bertepatan dengan hari-hari besar. Pelaksanaan pendidikan politik memang dilaksanakan dengan waktu yang kurang pas atau waktu yang terbatas hal tersebut terkadang menjadi kendala bagi kader yang akan mengikuti pendidikan politik karena memang mereka juga punya jadwal lain. Untuk partisipasi masyarakat biasanya dalam pendidikan politik non formal, karena masyarakat yang kurang paham dengan acara atau kegiatan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, terkadang masyarakat mengira kegiatan tersebut adalah sebuah kampanye politik. Selain itu, waktu yang menjadi kendala partisipasi masyarakat untuk turut ikut serta dalam kegiatan pendidikan politik karena mereka yang bekerja, atau ada kegiatan lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, PDI Perjuangan Kota Semarang menyesuaikan waktu pelaksanaan pendidikan politik agar berjalan sebagaimana mestinya dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran yang mudah bagi masyarakat seperti melalui instagram, facebook dan melalui website. PDI Perjuangan Kota Semarang senantiasa melakukan evaluasi terhadap kadernya, bagaimana mereka melaksanakan tugasnya setelah menerima pendidikan politik dari PDI Perjuangan.

Tidak hanya bagi kader yang baru saja, namun semua kader akan di evaluasi melalui pertemuan-pertemuan.

Evaluasi tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari DPP akan mengevaluasi DPW dan DPC, bagaimana kinerjanya, program-program yang dibangun atau dibuat dilaksanakan atau tidak, jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan teguran langsung dari pimpinan pusat. Begitupun DPC akan melihat kinerja dari anak cabang dan pengurus ranting. Selain itu PDI Perjuangan juga mengevaluai anggota dan kadernya yang menjabat di pemerintahan. Di Kota Semarang sendiri setiap satu bulan sekali mengadakan pertemuan dengan PAC, pengurus ranting, dan anggota legislatif yang menjadi kader PDI Perjuangan.

BAB V

TRANSMISI IDEOLOGI PDI PERJUANGAN

A. Fokus Transmisi Ideologi

PDI Perjuangan memiliki ideologi atau landasan dasar dari Soekarno yaitu Marhaenisme. Dalam merangka wujudkan cita-cita nasional, PDI Perjuangan mempunyai prinsip bahwa demokrasi yang akan menempatkan kepemimpinan pusat partai sebagai gerakan sentral, yaitu suatu kepemimpinan yang dipimpin oleh ideologi Pancasila 1 Juni 1945, kepemimpinan yang mengandung komando satu arah dan satu tujuan yaitu masyarakat yang adil dan makmur, dan suatu kepemimpinan yang sesuai dengan kepribadian bangsa yaitu gotong royong. Ideologi marhaenisme merupakan sebuah jati diri dari sebuah ide atau gagasan, narasi dan tingkah laku politik Soekarno. Konsep marhaenisme sendiri yang interpretasi dari personifikasi rakyat proletar yang hanya memiliki sebidang tanah kemudian menggarap sendiri, alatnya punya dia sendiri dan hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarganya. Kedua, marhaenisme diambil dari teori dialektika yang dikembangkan oleh Hegel dan didukung oleh Karl Marx dan F. Engels, maka analisa marxisme menjadi kunci utama untuk masuk dan membedah lebih dalam mengenai marhaenisme Soekarno. PDI Perjuangan di anggap sebagai partai politik yang memiliki kaitan dan keterkaitan yang kuat dengan ideologi marhaenisme (Syam, 2021).

Marhaenisme dapat dikatakan ada dari alam berpikir Bung Karno yang progresif dan revolusioner. Hal ini tidak akan lepas dari latar belakang Bung Karno yang memang dari kecil sudah memiliki ketertarikan terhadap politik dan suka berorasi. Jiwa kepemimpinan dan kharismanya juga tidak bisa diragukan lagi, karena di beberapa kesempatan, Sukarno bisa memobilisasi massa dan membakar semangat juang mereka yang memiliki cita-cita, yang ingin diwujudkan oleh Bung Karno. Dengan kepribadian yang dimiliki oleh Sukarno tersebut, maka tidak membutuhkan waktu yang lama bagi seorang Sukarno untuk dapat menjadi salah satu tokoh pergerakan yang sangat penting. Pemikiran pemikiran Sukarno yang bernuansa radikal-revolusionernya banyak dipengaruhi oleh para tokoh nasional, salah satunya adalah Tjokroaminoto yang menjadi guru sekaligus mentornya saat berpolitik. Dari sosok Tjokroaminoto Bung Karno belajar mengenai fungsi politik sebagai alat guna mensejahterakan rakyat, dan dari Tjokroaminoto juga Bung Karno mempelajari mengenai pergerakan modern dan bagaimana guna dapat memanfaatkan media massa

untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan (Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiyati Aisyah dan Deni Candra, 2022).

Marhaenisme sebagai yang menjadi salah satu konsep pemikiran perjuangan bangsa dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat untuk dapat mencapai kebahagiaan tentunya tidak bisa dipisahkan dari unsur-unsur komponennya, yaitu asas-asas yang kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sistem ideologi marhaenisme. Adapun asas-asas unsur tersebut meliputi: *radikal-revolusioner*, *machtvorming*, massa-aksi, non-kooperasi, *self-help & self-reliance*. Radikal-revolusioner yaitu perubahan berdasarkan kehendak zaman yang begitu cepat.

Dalam konteks perjuangan, maka radikal revolusioner merupakan perubahan yang mendesak, ingin mengakhiri masa imperialismedan dasalah yang ada kaitanya dengan penindasan dan mempertimbangkann hak-hak masyarakat. Radikalismedalam kekuatan perjuangan suatu bangsa memang sangat penting. Radikal ditafsirkan untuk tidak diukur, dan hal yang diukur setengahnya harus dianggap serius dan tulus. Jadi Sukarno selalu menekankan mengenaipentingnya orang-orang yang radikal-revolusioner. Karena tidak ada perjuangan di negara-negara Indonesia yang mempunyai kolonialisem tanpa adanya orang-orang yang memiliki sikap radikal-revolusioner.

Didalam AD/ART PDIPerjuangan, yang benar-benar mencakup beberapa poin, yaitu di dalam Bab III Pasal 9 huruf c yang berbunyi "*mencetak kader Partai yang memiliki semangat pelopor, serta memahami dan mampu menguraikan serta menerapkan ajaran Bung Karno dalam konteks kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.*"Kemudian pada keempat Pasal 10 huruf c yang berbunyi "*menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*" Huruf d yang berbunyi "*menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai*". Huruf g yang berbunyi, mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa." Serta secara eksplisit tugas dan fungsi partai di bab VII Pasal 86 huruf a yang berbunyi "*menanamkan dan menyebarluaskan ajaran Bung*

Karno.”

Pemahaman mengenai ideologi partai di PDI Perjuangan selalu dilakukan didalam pendidikan politik. Pemahaman ideologi partai dilakukan agar anggota dan kader paham terhadap apa itu ideologi, konsep dan penerapannya didalam kehidupan sehari-hari. Pak Kadarlusman atau pak pilus mengatakan :

“PDI Perjuangan itu menganut ideologi Pancasila dengan berlandaskan pemikiran dari Soekarno, kami selalu menerapkan pemikiran tersebut dan memberikan pemahaman bagi kader dan anggota didalam pendidikan politik, karena PDI Perjuangan itu kan partainya wong cilik (partai yang merakyat). Hal tersebut lahir dari pemikiran Soekarno yaitu Marhaenisme, Marhaenisme itu kan artinya wong cilik atau rakyat biasa, maka dari itu ini penting kita berikan kepada kader agar kita bisa merakyat tanpa ada batas meskipun kita sudah menjadi anggota dewan atau menjadi pejabat pemerintah dan wajib kita memperjuangkan rakyat.” Hal yang sama juga dikatakan oleh Pak Untung salah satu kader DPC PDI Perjuangan, beliau mengatakan :

“ideologi yang ada didalam PDI Perjuangan selalui kita sampaikan kepada anggota dan kader PDI, selalu disampaikan ketika didalam pendidikan politik, agar apa, agar kita tidak lupa dengan perjuangan dari Soekarno yang mencetuskan gagasan Pancasila dan konsep Marhaen. Karena negara kita adalah negara demokrasi, Pancasila sebagai landasan negara sekaligus landasan PDI Perjuangan dan konsep Marhaen dari Soekarno itu kan berusaha memperjuangkan kepentingan masyarakat, konsep Marhaen sebagai wong cilik, menjadikan pemikiran ini memiliki konsep gotong royong bersama membangun bangsa dan negara.”

Bagi PDI Perjuangan transmisi ideologi ini penting dilakukan agar kita selalu menjadi anggota dan kader yang merakyat senantiasa memperjuangkan masyarakat kritis terhadap bangsa dan negara. Selain itu konsep ideologi dari pemikiran Soekarno yang berlandaskan Ideologi Pancasila bertujuan membangun dan mencapai cita-cita bangsa sesuai dengan isi dari UUD dan Pancasila dan bergotong royong bersatu seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun sebuah negara. Hal tersebut merupakan tujuan dari adanya transmisi ideologi didalam pendidikan politik.

PDI Perjuangan selalu memberikan pengetahuan ideologi partai, selain untuk memberikan pemahaman, ideologi ini menjadi sebuah landasan berpikir bagi masyarakat, untuk kader menjadi sebuah landasan perjuangan dan agar selalu ingat terhadap sejarah bangsa Indonesia, bagaimana negara ini dibentuk, perjuangan para

pahlawan dan sebagainya. Transmisi ideologi adalah proses penyampaian ideologi dari satu orang ke orang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Ideologi yang dimaksud mencakup ide-ide politik, agama, kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik-praktik terkaitnya. Hal itu disampaikan oleh Pak Pilus saat wawancara.

“pendidikan politik PDI Perjuangan selalu memberikan pemahaman ideologi partai yaitu Pancasila, dengan berlandaskan pemikiran dari Bung Karno yang berwawasan kebangsaan. Ini penting apalagi bagi generasi muda sekarang agar mereka paham seperti apa Pancasila itu, perjuangan pemikiran Soekarno terhadap bangsa dan negara, dan memiliki pemikiran yang kritis terhadap bangsa ini.”

Pemahaman mengenai marhaenisme untuk landasan perjuangan yang dimiliki oleh seluruh kader dan para anggota, di mana setiap individu sadar bahwa nilai-nilai marhaenisme menjadi pedoman partai untuk dapat menjadi arah gerak dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ini menjelaskan tentang pemahaman kognitif para kader dan anggota. Masing-masing kader dan para anggota pagambetul bahwa asas partai yang tertuang di dalam AD/ART merupakan Pancasila 1 Juni 1945, dengan nilai-nilai marhaenisme sebagai inti dari lima prinsip dasar dalam Pancasila 1 Juni 1945. Inti tersebut terdapat dalam prinsip marhaenisme, yang mencakup sosionasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan yang Maha Esa.

Transmisi ideologi partai kepada kader dan anggotanya agar mereka memiliki kesadaran dalam berpolitik dan pentingnya politik. Dalam hal ini anggota dan kader partai diharapkan memiliki pemahaman dan dapat menyampaikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya berpolitik. Didalam ideologi PDI Perjuangan yang menganut Marhaenisme Soekarno memiliki pelajaran bahwa dalam memerdekakan Indonesia tidak hanya melalui berperang, namun juga melalui berpolitik, seperti jalur diplomasi dan sebagainya. Belajar dari sejarah perjuangan Soekarno dalam membantu untuk memerdekakan bangsa Indonesia tidak mudah harus melalui serangkaian kejadian yang sangat rumit.

Penyampaian ideologi ini dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui beberapa cara, diantaranya melalui pendidikan politik kader, sekolah partai, konsolidasi, road show dan lainnya. Hal ini dilakukan oleh PDI Perjuangan agar para kader dan anggota memiliki pemahaman mengenai ideologi yang dianut oleh PDI Perjuangan, dan mereka nantinya akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa dari ideologi ini kita bisa belajar dan tahu bahwa pentingnya berpartisipasi dalam politik. Saat ini banyak sekali khususnya yang muda bahwa mereka kurang sadar akan pentingnya partisipasi

politik. Hal ini menjadi PR bagi partai untuk memberikan pemahaman bagi generasi muda saat ini akan pentingnya partisipasi politik. Maka dari itu, melalui transmisi ideologi ini yang disampaikan melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh partai untuk memberikan pemahaman kesadaran politik di Indonesia.

Bentuk transmisi yang diberikan oleh PDI Perjuangan kepada kader anggota maupun masyarakat juga bermacam-macam. Ada beberapa macam bentuk transmisi yang diberikan, pertama, nilai-nilai dari ajaran soekarno dan marhaenisme yang mana dari ideologi tersebut memberikan sebuah nilai yang sangat penting, mulai dari semangat perjuangan, prihatin terhadap kondisi bangsa, sampai pentingnya politik sebagai bentuk perjuangan. Nilai-nilai ideologi ini mengingatkan bahwa marhaenisme lahir dari pemikiran soekarno yang melihat rakyat jelata yang susah payah untuk menghidupi keluarganya. Maka dari itu PDI Perjuangan sering disebutkan dengan partainya *wong cilik*, karena memang lahir dari situ. Yang kedua, sikap atau perilaku yang mencontohkan segala macam perjuangan dan hak-hak masyarakat serta menentang ketidakadilan. Yang ketiga, pemahaman dasar yang diberikan ketika pendidikan kader pratama, sebagai pengingat untuk senantiasa mengingat perjuangan soekarno untuk membangun sebuah bangsa tidak hanya melalui perang angkat senjata, namun melalui jalur diplomasi politik antar negara.

B. Proses Transmisi Ideologi

Proses penyampaian ideologi PDI Perjuangan dilakukan melalui berbagai cara. Hal ini dilakukan agar kader atau anggota PDI Perjuangan paham dengan ideologi dari PDI Perjuangan. Tidak hanya itu saja, penyampaian ideologi ini menjadikan kader partai memiliki jiwa nasionalis, berbangsa dan bernegara, serta tidak lupa dengan sejarah. Hal tersebut juga tercantum didalam AD/ART PDI Perjuangan yang mana disebutkan penyampaian ideologi partai dilakukan dalam beberapa bentuk pendidikan politik yaitu didalam kaderisasi, sekolah politik dan sekolah partai, konsolidasi partai dan bentuk-bentuk pendidikan politik partai yang lainnya baik secara formal maupun non formal. Didalam pendidikan politik disebutkan bahwa materi pokok yang diberikan harus memuat ideologi partai dari gagasan dan pemikiran Soekarno, karena memang ideologi PDI Perjuangan adalah pancasila dan marhaenisme soekarno. Transmisi ideologi didalam PDI Perjuangan dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

1. Pendidikan

Melalui sistem pendidikan formal dan non-formal, ideologi dapat disampaikan kepada generasi muda. PDI Perjuangan Kota Semarang dalam menerapkan dan memberikan pemahaman ideologi politik disampaikan melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh partai, baik pendidikan politik secara formal maupun non formal. Proses transmisi ideologi dengan melalui pendidikan formal partai yaitu antara lain :

- a. Kaderisasi, kaderisasi partai juga dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan tingkatannya. Mulai dari paling dasar sampai pendidikan paling tinggi. Kaderisasi PDI Perjuangan ada 3 yaitu,
 1. Kaderisasi Pratama, merupakan pendidikan politik tingkat paling dasar yang diselenggarakan dan diikuti oleh anggota baru DPC PDI Perjuangan.
 2. Kaderisasi Madya, kaderisasi ini merupakan pendidikan politik tingkat menengah, yang dilaksanakan oleh DPD PDI Perjuangan
 3. Kaderisasi Utama, kaderisasi ini merupakan pendidikan politik jenjang akhir atau tingkat atas. Pelaksanaan kaderisasi utama diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan, biasanya diikuti oleh kader-kader yang sudah lama berada di pengurusan PDI Perjuangan dan para calon legislatif.

Ideologi partai yang dijadikan landasan utama berpolitik diterapkan di dalam materi pendidikan itu sendiri. Proses pendidikan dalam kelas ini tidak terbatas pada tingkat kabupaten, melainkan juga mencapai ditingkatan padukuhan di desa. Adanya cabang di tingkat bawah yang bertujuan guna mengefektifkan proses pengkaderan, sehingga akan membuat potensi untuk membentuk mesin partai yang sangat efektif.

2. Sekolah Partai, sekolah partai yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan bisa diikuti oleh seluruh anggota dan kader partai. Namun, ketika menjelang pemilu para calon anggota legislatif, pejabat daerah dan lainnya diwajibkan untuk mengikuti sekolah partai. Karena didalam sekolah partai, para calon peserta pemilu dari fraksi PDI Perjuangan akan dibekali ilmu dan materi-materi berkaitan dengan kepemimpinan didalam birokrasi.

3. Konsolidasi, Konsolidasi yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Semarang untuk para kader dan anggota partainya, berlangsung dalam bentuk konsultasi dan/atau rapat DPC, Pimpinan Anak Cabang (PAC), Ranting, serta Anak Ranting. Selain itu, juga diadakan pertemuan dengan melibatkan petugas partai yang bekerja di legislatif maupun eksekutif.

Uraian diatas merupakan pendidikan secara formal, berikut merupakan pendidikan dilakukan secara non formal,

1. Road Show, didalam road show ini PDI Perjuangan juga mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, misalnya kondisi ekonomi yang kurang baik yang nantinya akan dibantu oleh PDI Perjuangan Kota Semarang. Selain itu, program ini juga sebagai forum diskusi antara partai dengan masyarakat setempat dalam melaksanakan pendidikan politik.
2. Penghijauan, tujuan diadakannya kegiatan Pendidikan Politik Bagi Struktural dan Kader Tentang Arti Pentingnya Penghijauan dan Kebersihan, Untuk Terciptanya Lingkungan Hidup Yang Lestari adalah sebuah sarana guna melestarikan lingkungan, supaya lingkungan kembali asri dan sehat tanpa adanya pencemaran lingkungan. Dengan diadakanya penghijauan diharapkan dapat menurunkan suhu di suatu suatu tempat yang karena sudah berkurangnya ruang terbuka hijau, banyaknya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan akan membuat lingkungan lebih segar, teduh, nyaman, dan asri. Penghijauan juga digunakan sebagai sarana untuk pencegahan terhadap terjadinya bencana banjir dan erosi tanah.
3. Bersih Lingkungan, sebagai kader PDI Perjuangan harus bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan Sumber Daya Alam, termasuk hutan, air, udara, dan keanekaragaman hayati.
4. Media, selain melalui pendidikan politik, PDI Perjuangan juga memberikan pemahaman ideologi partai melalui media yaitu menggunakan media sosial seperti instagram, facebook dan melalui website

5. Organisasi, PDI Perjuangan juga memiliki badan-badan atau sayap partai seperti Pemuda Juang, Kader penggerak dan lain-lain. Didalam lembaga tersebut juga selalu diberikan pemahaman atau penyampaian kepada kader terutama bagi pemudanya, agar selalu menerapkan bagaimana ideologi itu berjalan dan penerapannya dalam kehidupan.

Proses transmisi ideologi juga tercantum didalam AD/ART PDI Perjuangan yang mana disebutkan penyampaian ideologi partai dilakukan dalam beberapa bentuk pendidikan politik yaitu didalam kaderisasi, sekolah politik dan sekolah partai, konsolidasi partai dan bentuk-bentuk pendidikan politik partai yang lainnya baik secara formal maupun non formal. Didalam pendidikan politik disebutkan bahwa materi pokok yang diberikan harus memuat ideologi partai dari gagasan dan pemikiran Soekarno, karena memang ideologi PDI Perjuangan adalah pancasila dan marhaenisme soekarno.

Andi sebagai anggota RAPDEM organisasi sayap PDI Perjuangan mengatakan *“Kalau soal ideologi soekarnoisme marhaenisme dan sosialisme yang menjadi ideologi PDI Perjuangan, kita biasanya ajarkan soal definisi umum itu dulu. Tapi karena memang kader-kader kita kan bervariasi tidak hanya SI, tapi ada yang SMA, bahkan ada dari tukang ojek juga dan lain-lain. Biasanya kita ceritakan perjalanan soekarno dari masih muda kemudian sampai lahirnya ideologi ini sebagai bentuk perjuangan sampai bangsa ini merdeka. Sehingga ini akan menjadi semangat perjuangan bagi kader-kader khususnya kader muda untuk melanjutkan cita-cita bangsa.”*

Artinya dalam memberikan pemahaman ideologi bagi kader tidak langsung bagaimana ideologi itu berjalan sesuai dengan tujuan partai, namun pemahaman tersebut dimulai dari sejarah terciptanya ideologi tersebut. Perjalanan awal terbentuknya ideologi pemikiran soekarno sampai ideologi sebagai perjuangan dan landasan partai dan penerapannya bagi kehidupan yang menjadi semangat perjuangan dan ikut serta dalam membangun cita-cita bangsa.

Vio Lita Angelina mengatakan *“kalau konsep ideologi PDI Perjuangan yang pasti kita memberikannya salah satunya melalui pendidikan politik yang menyediakan materi-materi terkait ideologi PDI Perjuangan, soekarnoisme, marhaenisme itu memang salah satu yang diajarkan dan sumbernya dari tingkatan yang atas seperti DPD dan DPP untuk diberikan kepada yang dibawahnya.”*

Marhenismedapat muncul dari semangat progresif dan revolusioner Bung Karno. Ini tidak dapat dipisahkan dari latar belakang Bung Karno, seorang anak yang sangat antusias terhadap politik dan senang memberikan pidato. Semangat kepemimpinan dan karisma tidak diragukan lagi juga ketika Soukarno mengatur massa beberapa kali dan dapat memicu antusiasme untuk mengikuti mimpi-minpi dari Sukarno. Karena kepribadian Sukarno tersebut, tidak butuh waktu lama bagi Sukarno untuk menjadi salah satu tokoh gerakan terpenting. Pemikiran revolusioner radikalnya sangat dipengaruhi oleh kepribadian nasional di mana Tjocroaminoto adalah guru politiknya. Melalui Tjokroaminoto, Bung Karno belajar fungsi politik sebagai alat untuk mengsejaterakan orang, dan dari Tjokroaminoto, Bung Karno juga belajar mengenai gerakan modern dan cara menggunakan media massa untuk mengekspresikan ide –ide serta gagasannya secara tertulis (Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiyati Aisyah dan Deni Candra, 2022).

Jadi, transmisi ideologi PDI Perjuangan memang sudah diatur didalam peraturan AD/ART PDI Perjuangan yang mewajibkan setiap kegiatan pendidikan politik harus memberikan materi tentang ideologi partai yang sudah jelas dan digagas oleh pemikiran soekarno, karena PDI Perjuangan sendiri lahir dari beberapa partai nasionalis yang memiliki ideologi soekarno. Hal ini sesuai dengan teori bahwa Transmisi ideologi adalah proses penyampaian ideologi dari satu orang ke orang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Ideologi yang dimaksud mencakup ide-ide politik, agama, kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik-praktik terkaitnya. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan didalam AD/ART mengenai kewajiban setiap kader didalam pendidikan politik harus mencakup materi ideologi partai baik pendidikan secara formal maupun nonformal.

C. Tujuan Transmisi Ideologi

Penyampaian ideologi atau transmisi ideologi PDI Perjuangan tidak hanya sebatas penyampaian dan pemahaman bagi anggota dan kader. Namun transmisi ideologi disampaikan agar para kader dan anggotanya dapat menerapkan dalam kehidupan. Transmisi ideologi PDI Perjuangan memiliki tujuannya sendiri.

1. Membangun Kesadaran Politik

Transmisi ideologi partai kepada kader dan anggotanya agar mereka memiliki kesadaran dalam berpolitik dan pentingnya politik. Dalam hal ini anggota dan kader partai diharapkan memiliki pemahaman dan dapat menyampaikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya berpolitik. Didalam ideologi PDI Perjuangan yang menganut Marhaenisme Soekarno memiliki pelajaran bahwa dalam memerdekakan Indonesia tidak hanya melalui berperang, namun juga melalui berpolitik, seperti jalur diplomasi dan sebagainya. Belajar dari sejarah perjuangan soekarno dalam membantu untuk memerdekakan bangsa Indonesia tidak mudah harus melalui serangkaian kejadian yang sangat rumit. Hal ini juga sudah tercantum dalam tujuan AD/ART PDI Perjuangan. Marhaenisme sebagai salah satu konsep ideologi perjuangan bangsa guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat agar mencapai kebahagiaan tentunya tidak bisa dipisahkan dari unsur-unsur penyusunnya, yaitu asas-asas yang kemudian menjadi satu kesatuan sistem ideologi marhaenisme.

Penyampaian ideologi ini dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui beberapa cara, diantaranya melalui pendidikan politik kader, sekolah partai, konsolidasi, road show dan lainnya. Hal ini dilakukan oleh PDI Perjuangan agar para kader dan anggota memiliki pemahaman mengenai ideologi yang dianut oleh PDI Perjuangan, dan mereka nantinya akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa dari ideologi ini kita bisa belajar dan tahu bahwa pentingnya berpartisipasi dalam politik. Saat ini banyak sekali khususnya yang muda bahwa mereka kurang sadar akan pentingnya partisipasi politik. Hal ini menjadi PR bagi partai untuk memberikan pemahaman bagi generasi muda saat ini akan pentingnya partisipasi politik. Maka dari itu, melalui transmisi ideologi ini yang disampaikan melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh partai untuk memberikan pemahaman kesadaran politik di Indonesia.

2. Mewujudkan Masyarakat Yang Adil dan Makmur

PDI Perjuangan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur salah satunya melalui transmisi ideologi. PDI Perjuangan merupakan partai nasionalis yang menganut ideologi marhaenisme soekarno yang mana ideologi tersebut lahir dari sejarah yang tidak mudah bagi soekarno untuk

memerdekakan bangsa Indonesia agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Karena ideologi marhaenisme ini lahir dari sebuah perjuangan rakyat biasa agar dapat mendapatkan kehidupan yang adil dan makmur. Selain itu, konsep dari ideologi marhaenisme ini yaitu gotong royong. Maka dalam penerapannya, PDI Perjuangan ingin mengimplementasikan konsep ini didalam kehidupan masyarakat, agar dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Konsep gotong royong ini karena dari sejarah marhaenisme soekarno yang mana agar dapat mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat yang makmur harus bekerja sama dan bergotong royong sesama masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. Konsep gotong royong ini dianut oleh PDI Perjuangan sampai sekarang dan menganggap bahwa PDI Perjuangan merupakan partainya *wong cilik* yang artinya PDI Perjuangan merupakan partai milik masyarakat Indonesia yang siapapun boleh masuk menjadi anggota dan kader PDI Perjuangan. Maka dari itu, salah satu tujuan transmisi ideologi ini adalah menjadikan masyarakat yang adil dan makmur menggunakan konsep gotong royong sesama masyarakat Indonesia. Hal ini juga sudah tercantum dalam tujuan AD/ART PDI Perjuangan. Marhaenisme sebagai suatu konsep ideologi perjuangan bangsa dalam merealisasikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat supaya tercapainya kebahagiaan, tentunya tidak dilepaskan dari adanya unsur-unsur penyusunnya, yaitu asas-asas yang kemudian menjadi satu kesatuan sistem ideologi marhaenisme.

Bagi PDI Perjuangan transmisi ideologi ini penting dilakukan agar kita selalu menjadi anggota dan kader yang merakyat senantiasa memperjuangkan masyarakat kritis terhadap bangsa dan negara. Selain itu konsep ideologi dari pemikiran Soekarno yang berlandaskan Ideologi Pancasila bertujuan membangun dan mencapai cita-cita bangsa sesuai dengan isi dari UUD dan Pancasila dan bergotong royong bersatu seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun sebuah negara. Hal tersebut merupakan tujuan dari adanya transmisi ideologi didalam pendidikan politik. Artinya dalam memberikan pemahaman ideologi bagi kader tidak langsung bagaimana ideologi itu berjalan sesuai dengan tujuan partai, namun pemahaman tersebut dimulai dari sejarah terciptanya ideologi tersebut. Perjalanan awal terbentuknya ideologi pemikiran soekarno sampai ideologi sebagai perjuangan dan landasan partai dan penerpannya bagi kehidupan yang

menjadi semangat perjuangan dan ikut serta dalam membangun cita-cita bangsa.

3. Mempertahankan Ajaran Soekarno

Marhaenisme dapat dikatakan ada dari semangat berpikir yang progresif dan revolusioner dari Bung Karno. Ini tidak dapat lepas dari latar belakang Bung Karno yang seorang anak kecil yang sudah memiliki ketertarikan terhadap politik dan suka berorasi. Tidak ada keraguan dalam benak Bung Karno karena mempunyai jiwa kepemimpinan dan kharismanya yang tidak usah diragukan lagi, karena di beberapa peristiwa, Sukarno bisa mengkondisikan massa dan membakar semangat aksi yang menjadikannya bisa menyalurkan cita-cita mereka yang ingin diwujudkan oleh Bung Karno.

Didalam AD/ART PDI Perjuangan juga menyebutkan bahwa yaitu :

- a. Bab III Pasal 9 huruf c yang berbunyi *“mencetak kader Partai yang memiliki semangat pelopor, serta memahami dan mampu menguraikan serta menerapkan ajaran Bung Karno dalam konteks kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.”*
- b. Bagian Keempat Pasal 10 huruf c yang berbunyi *“menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”*
- c. Huruf d yang berbunyi *“menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai”.*
- d. Huruf g yang berbunyi, *“mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa.”*
- e. tugas dan fungsi partai di Bab VII Pasal 86 huruf a yang berbunyi *“menanamkan dan menyebarluaskan ajaran Bung Karno.”*

Jadi, salah satu tujuan transmisi ideologi jelas, juga sudah ada didalam

AD/ART PDI Perjuangan. Memang ajaran soekarno ini terlihat jelas memiliki tujuan yang baik, dengan konsepnya yaitu gotong royong, yang sekarang diusung oleh PDI Perjuangan. Hal tersebut menjadi landasan PDI Perjuangan untuk menjadi partai yang nasionalis dan dekat dengan masyarakat.

Transmisi ideologi PDI Perjuangan memang sudah diatur didalam peraturan AD/ART PDI Perjuangan yang mewajibkan setiap kegiatan pendidikan politik harus memberikan materi tentang ideologi partai yang sudah jelas dan digagas oleh pemikiran soekarno, karena PDI Perjuangan sendiri lahir dari beberapa partai nasionalis yang memiliki ideologi soekarno. Hal ini sesuai dengan teori bahwa Transmisi ideologi adalah proses penyampaian ideologi dari satu orang ke orang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Ideologi yang dimaksud mencakup ide-ide politik, agama, kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik-praktik terkaitnya. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan didalam AD/ART mengenai kewajiban setiap kader didalam pendidikan politik harus mencakup materi ideologi partai baik pendidikan secara formal maupun non formal.

Transmisi ideologi memang partai mewajibkan untuk selalu menyampaikan didalam setiap kegiatan, khususnya pendidikan politik baik secara formal maupun non formal yang termuat didalam materi pendidikan politik. Penyampaian ideologi harus jelas dan yang menyampaikan materi ideologi biasanya dari kader yang sudah lebih diatas tingkatannya atau kader yang menjadi seorang akademisi, namun tidak menutup kemungkinan kader yang baru bisa menjadi seorang pemateri jika mereka sudah benar-benar paham apa yang akan disampaikan, dalam konteks ini adalah penyampaian materi ideologi marhaenisme soekarno dan pancasila bagi PDI Perjuangan.

D. Evaluasi

PDI Perjuangan Kota Semarang senantiasa melakukan evaluasi terhadap kadernya, bagaimana mereka melaksanakan tugasnya setelah menerima pendidikan politik dari PDI Perjuangan. Tidak hanya bagi kader yang baru saja, namun semua kader akan di evaluasi melalui pertemuan-pertemuan. Evaluasi tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari DPP akan mengevaluasi DPW dan DPC, bagaimana kinerjanya, program-program yang dibangun atau dibuat dilaksanakan atau tidak, jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan teguran langsung dari pimpinan pusat. Begitupun DPC akan melihat kinerja dari anak cabang dan pengurus ranting. Selain

itu PDI Perjuangan juga mengevaluai anggota dan kadernya yang menjabat di pemerintahan. Di Kota Semarang sendiri setiap satu bulan sekali mengadakan pertemuan dengan PAC, pengurus ranting, dan anggota legislatif yang menjadi kader PDI Perjuangan. PDI Perjuangan Kota Semarang dalam melaksanakan pendidikan politik tidak selalu berjalan lancar, ada beberapa hal menjadi hambatan dalam melakukan pendidikan politik yaitu keterbatasan waktu dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, PDI Perjuangan Kota Semarang menyesuaikan waktu pelaksanaan pendidikan politik agar berjalan sebagaimana mestinya dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran yang mudah bagi masyarakat seperti melalui instagram, facebook dan melalui website.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik PDI Perjuangan Kota Semarang sesuai dengan peraturan yang ada didalam kongres PDI Perjuangan yang menghasilkan AD/ART PDI Perjuangan. Yang mana didalam AD/ART tersebut sudah dijelaskan bahwa pendidikan politik harus memuat materi ideologi partai yaitu ideologi pancasila dan marhaenisme seokarno. Ideologi tersebut disampaikan didalam pendidikan politik partai baik secara formal maupun non formal. Pendidikan politik juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Didalam Undang-undang tersebut memberikan definisi pendidikan politik sebagai sebuah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan dari partai politik dalam memberikan pelajaran mengenai politik bagi anggotanya dan pengurusnya adalah untuk memperkuat solidaritas politik yang berfungsi untuk menjaga dan merawat keutuhan bangsa, memberikan pengetahuan mengenai peran, tugas, hak, dan kewajiban partai politik, serta meningkatkan kemampuan anggotanya dan pengurus. Tujuan dari partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada publik adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam berinteraksi di masyarakat, serta dalam konteks berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan diadakannya pendidikan politik ini akan meningkatkan keterlibatan politik dari anggota, pengurus partai, dan masyarakat luas. Tujuan utama dari pendidikan politik ini yaitu bagaimana menjadi masyarakat yang mengerti dan paham terhadap pentingnya berpolitik dan memahami apa itu politik yang sebenarnya. Selain itu PDI Perjuangan juga mengevaluasi anggota dan kadernya yang menjabat di pemerintahan. Di Kota Semarang sendiri setiap satu bulan sekali mengadakan pertemuan dengan PAC, pengurus ranting, dan anggota legislatif yang menjadi kader PDI Perjuangan. PDI Perjuangan Kota Semarang dalam melaksanakan pendidikan politik tidak selalu berjalan lancar, ada beberapa hal menjadi hambatan dalam melakukan pendidikan politik yaitu keterbatasan waktu dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, PDI Perjuangan Kota Semarang menyesuaikan waktu

pelaksanaan pendidikan politik agar berjalan sebagaimana mestinya dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran yang mudah bagi masyarakat seperti melalui instagram, facebook dan melalui website.

Jadi, salah satu tujuan transmisi ideologi jelas, juga sudah ada didalam AD/ART PDI Perjuangan. Memang ajaran soekarno ini terlihat jelas memiliki tujuan yang baik, dengan konsepnya yaitu gotong royong, yang sekarang diusung oleh PDI Perjuangan. Hal tersebut menjadi landasan PDI Perjuangan untuk menjadi partai yang nasionalis dan dekat dengan masyarakat. Penyampaian ideologi ini dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui beberapa cara, diantaranya melalui pendidikan politik kader, sekolah partai, konsolidasi, road show dan lainnya. Hal ini dilakukan oleh PDI Perjuangan agar para kader dan anggota memiliki pemahaman mengenai ideologi yang dianut oleh PDI Perjuangan, dan mereka nantinya akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa dari ideologi ini kita bisa belajar dan tahu bahwa pentingnya berpartisipasi dalam politik.

PDI Perjuangan selalu memberikan pengetahuan ideologi partai, selain untuk memberikan pemahaman, ideologi ini menjadi sebuah landasan berpikir bagi masyarakat, untuk kader menjadi sebuah landasan perjuangan dan agar selalu ingat terhadap sejarah bangsa Indonesia, bagaimana negara ini dibentuk, perjuangan para pahlawan dan sebagainya. Transmisi ideologi adalah proses penyampaian ideologi dari satu orang ke orang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Ideologi yang dimaksud mencakup ide-ide politik, agama, kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik-praktik terkaitnya yang disampaikan didalam pendidikan politik baik secara formal maupun non formal. Memang dalam memberikan pemahaman atau pendidikan politik PDI Perjuangan dilakukan secara terstruktur mulai dari atas sampai bawah (*top down*) dan sesuai dengan AD/ART PDI Perjuangan yang ada.

jadi pendidikan politik memang benar-benar dilakukan oleh PDI Perjuangan secara berjenjang, namun pada kenyataannya transmisi ideologi yang dilakukan belum dilakukan secara serius pada prakteknya. hal ini dibuktikan dengan temuan peneliti bahwa seperti pengarsipan data, materi pendidikan politik kurang diperhatikan. pendidikan politik PDI Perjuangan memang dilakukan secara rutin dan berjenjang, namun transmisi ideologi yang diberikan masih kurang, karena hanya sebatas pengetahuan dan pembekalan umum. jadi tidak benar-benar memberikan materi secara mendalam mengenai ideologi partai itu sendiri, bukan pendidikan yang sifatnya ketat dalam memberikan pemahaman mengenai ideologi itu sendiri. artinya transmisi

ideologi dalam pendidikan politik PDI Perjuangan memang hanya sebatas pengetahuan umum mengenai ideologi partai.

UPAYA PDI PERJUANGAN DALAM TRANSMISI IDEOLOGI
(Studi Terhadap Pendidikan Politik PDI Perjuangan Kota Semarang
2022-2024)

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

NurLailaFitriana

2106016126

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025

NOTA PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi/ Proposal Skripsi

Kepda.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi/ skripsi saudara/i:

Nama : Nur Laila Fitriana

NIM : 2106016126

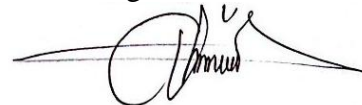
Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Upaya PDI Perjuangan Dalam Transmisi Ideologi (Studi Terhadap Pendidikan Politik PDI Perjuangan Kota Semarang 2022-2024)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Mei 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP :197809302003121001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

UPAYA PDI PERJUANGAN DALAM TRANSMISI IDEOLOGI

(Studi Terhadap Pendidikan Politik PDI Perjuangan Kota Semarang 2022-2024)

Disusun Oleh :

Nur Laila Fitriana

2106016126

Telah ditetapkan dan dipertahankan didepan majelis penguji skripsi
Pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

KEMENTERIAN Agama Sidang

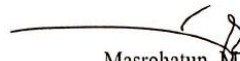
Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP. : 197809302003121001

Penguji I



Solkhah Mufrikhah, M.Si
NIP: 198511182016011901

Sekretaris/Penguji II



Masrohatun, M.Si
NIP: 198806212018012001

Pembimbing



Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP : 197809302003121001

PERNYATAAN PENULIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya merupakan murni tidak terdapat karya tulisan orang lain yang pernah diujikan untuk memperoleh gelar sarjana atau yang lainnya disuatu instansi atau perguruan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan ini.

Semarang, 14 Mei 2025



Nur Laila Fitriana
NIM. 2106016126

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kami. Tak lupa shalawat dan salam selalu kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi sebagai Tugas Akhir dengan judul : **UPAYA PDI PERJUANGAN DALAM TRANSMISI IDEOLOGI (Studi Terhadap Pendidikan Politik PDI Perjuangan Kota Semarang 2022-2024).**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Studi S-1 pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Imam Yahya M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. M. Nuqlir Bariklana, M.Si., selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang dan dosen wali yang senantiasa membimbing serta memberikan arahan dari semester pertama hingga saat ini.
4. Masrohatun, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
5. Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag., selaku Pembimbing yang senantiasa membimbing, memberikan saran maupun masukan serta selalu mendorong selama proses penelitian dan penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu dan pengajaran dari awal masuk perkuliahan hingga akhir.
7. Segenap civitas akademik yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. Kadar Lusman, S.E, M.M., selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Semarang sekaligus Ketua DPRD Kota Semarang yang telah bersedia untuk diwawancarai dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

9. Staff DPC PDI Perjuangan yang telah bersedia diwawancarai dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Bapak Wahyono dan Ibu Siti Asriyah selaku orangtua penulis tersayang yang telah mendidik dan merawat dari kecil hingga sekarang serta selalu mendukung, membimbing dan mendoakan yang terbaik sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
11. M. Heri Setiawan selaku kakak tercinta yang juga selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi penulis.
12. M. Nuha Wibisono selaku adik tercinta yang selalu menemani dan mendukung penuh penulis.
13. Seluruh keluarga yang telah mendukung serta mendidik penulis hingga seperti sekarang.
14. Teman-teman angkatan 2021 yang telah mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi penulis.
15. Fuadin Abdu Salam yang telah menemani, mendukung, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi
16. Teman terbaik penulis Muqodimatul Ainia, Dian Novita Mashuroh, Ananda Salsabila Zahiya dan Ana Nur Khasanahyang selalu menemani penulis dalam keadaan apapun dan membantu serta mendoakan yang terbaik sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabati PMII Rayon FISIP Komisariat UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mendukung penulis

Semoga segala bantuan, pertolongan, dan kebaikan semua pihak mendapat berkah dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini dapat menjadi penelitian yang bermanfaat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis



Nur Laila Fitriana
NIM. 2106016126

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, saya persembahkan kepada kedua Orangtua tersayang dan keluarga tercinta yang selalu memberikan segalanya, motivasi, kasih sayang, kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pendidikan serta kepada Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

Man jadda wa jada

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ada jalan)

ABSTRAK

Pendidikan politik merupakan sebuah proses pemberian pengetahuan kepada masyarakat mengenai politik negara dan akhirnya mereka dapat mengimplementasikan pengetahuannya untuk membuat suatu produk kebijakan yang proposional. Dalam PDI Perjuangan pendidikan politik selalu diberikan dalam kegiatan baik formal maupun non formal. Dalam pendidikan politik PDI Perjuangan selalu ada transmisi ideologi yang diberikan kepada anggota atau kadernya. Transmisi ideologi diberikan melalui pendidikan politik baik secara formal maupun non formal dan disampaikan langsung oleh kader PDI Perjuangan yang telah menerima pendidikan lebih tinggi, atau biasanya disampaikan oleh kader dari DPP PDI Perjuangan.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan atau *field research* dengan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus pada transmisi ideologi PDI Perjuangan melalui pendidikan politik, baik pendidikan politik formal maupun non formal. Penelitian ini menggunakan teori pendidikan politik dari Kartono Kartini. Menurut Kartono Kartini, pendidikan politik adalah pengembangan karakter politik agar sadar dalam berpolitik dan bisa menjadi peserta yang memiliki tanggung jawab secara etis atau moral, dan berupaya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan negara. Pendidikan yang dilakukan secara sistematis guna membentuk manusia yang siap, mengingat beragamnya situasi masyarakat yang masih banyak berkembang dan bodohs e cara politik, maka pendidikan politik harus diteruskan kepada generasi muda.

Hasil dari penelitian ini adalah, PDI Perjuangan Kota Semarang dalam melaksanakan transmisi ideologi melalui pendidikan politik baik secara formal maupun non formal cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan beberapa temuan seperti pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan mulai dari konsolidasi, seminar, road show dan pendidikan politik berjenjang yaitu pratama, madya dan utama. Transmisi ideologi yang diberikan melalui pendidikan politik ini bertujuan agar kader, anggota bahkan masyarakat senantiasa mengingat perjuangan soekarno dalam memerdekakan bangsa Indonesia dan memiliki landasan berpikir sehingga PDI Perjuangan dianggap sebagai partainya *wong cilik*. Dalam hal ini PDI Perjuangan selalu menanamkan ideologi soekarno dan marhaenisme kepada kadernya didalam setiap pendidikan politik.

Kata Kunci : Transmisi Ideologi, Pendidikan Politik, PDI Perjuangan.

ABSTRACT

Political education is a process of providing knowledge to the public about state politics and finally they can implement their knowledge to create a proportional policy product. In the PDI Perjuangan, political education is always provided in both formal and non-formal activities. In PDI Perjuangan political education, there is always a transmission of ideology given to its members or cadres. The transmission of ideology is given through political education both formally and non-formally and is delivered directly by PDI Perjuangan cadres who have received higher education, or usually delivered by cadres from the PDI Perjuangan DPP.

This research is a field research with a qualitative method. This research focuses on the transmission of PDI Perjuangan ideology through political education, both formal and non-formal political education. This research uses Kartono Kartini's political education theory. According to Kartono Kartini, political education is the development of political character so that they are aware of politics and can become participants who have ethical or moral responsibilities, and strive to realize the aspirations of society and the state. Education that is carried out systematically in order to form ready humans, considering the diverse situations of society that are still developing and politically ignorant, political education must be continued to the younger generation.

The results of this study are that the PDI Perjuangan of Semarang City in implementing the transmission of ideology through political education both formally and non-formally is quite good. This is evidenced by several findings such as political education carried out by the PDI Perjuangan DPC starting from consolidation, seminars, road shows and tiered political education, namely pratama, madya and utama. The transmission of ideology provided through this political education aims for cadres, members and even the community to always remember Soekarno's struggle in liberating the Indonesian nation and have a basis for thinking so that PDI Perjuangan is considered the party of the little people. In this case, PDI Perjuangan always instills Soekarno's ideology and Marhaenism to its cadres in every political education.

Key word : *Transmission of Ideology, Political Education, PDI Perjuangan.*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR DIAGRAM	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
1. Pendidikan Politik	Error! Bookmark not defined.
2. Ideologi Politik	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Data primer	Error! Bookmark not defined.
3. Data Sekunder	Error! Bookmark not defined.
G. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
1. Wawancara	Error! Bookmark not defined.
2. Observasi	Error! Bookmark not defined.
3. Dokumentasi	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
KERANGKA TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Pendidikan Politik	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pendidikan Politik	Error! Bookmark not defined.
2. Konsep Pendidikan Politik	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Politik	Error! Bookmark not defined.
4. Pendidikan politik dalam lembaga politik	Error! Bookmark not defined.

5. Unsur-Unsur Pendidikan Politik	Error! Bookmark not defined.
B. Transmisi Ideologi Dalam Pendidikan Politik.....	Error! Bookmark not defined.
1. Definisi Ideologi	Error! Bookmark not defined.
2. Fungsi Ideologi	Error! Bookmark not defined.
3. Peran Ideologi Dalam Politik	Error! Bookmark not defined.
4. Transmisi Ideologi	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM	Error! Bookmark not defined.
A. Profil Kota Semarang	Error! Bookmark not defined.
1. Kondisi geografis	Error! Bookmark not defined.
2. Kondisi Demografis.	Error! Bookmark not defined.
3. Fraksi di DPRD Kota Semarang	Error! Bookmark not defined.
B. Profil PDI Perjuangan	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah PDI Perjuangan	Error! Bookmark not defined.
2. Ideologi PDI Perjuangan	Error! Bookmark not defined.
3. Visi – Misi	Error! Bookmark not defined.
5. Sejarah Politik PDI Perjuangan Kota Semarang.....	Error! Bookmark not defined.
6. Struktur Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
UPAYA PDI PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN POLITIK	Error! Bookmark not defined.
A. Pendidikan Politik di Kota Semarang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pendidikan Formal	Error! Bookmark not defined.
1. Kaderisasi Partai	Error! Bookmark not defined.
2. Sekolah Partai	Error! Bookmark not defined.
3. Konsolidasi	Error! Bookmark not defined.
C. Pendidikan Non Formal	Error! Bookmark not defined.
1. Road Show	Error! Bookmark not defined.
2. Penghijauan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Bersih Lingkungan	Error! Bookmark not defined.
D. Hambatan	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
TRANSMISI IDEOLOGI PDI PERJUANGAN	Error! Bookmark not defined.
A. Fokus Transmisi Ideologi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Proses Transmisi Ideologi	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Transmisi Ideologi	Error! Bookmark not defined.
1. Membangun Kesadaran Politik	Error! Bookmark not defined.
2. Mewujudkan Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Error! Bookmark not defined.
3. Mempertahankan Ajaran Soekarno	Error! Bookmark not defined.
D. Evaluasi.....	Error! Bookmark not defined.

BAB VI.....	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
Buku :	Error! Bookmark not defined.
Jurnal :	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	30
Tabel 3.2	32
Tabel 4.1	55
Tabel 4.2	60

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	29
Diagram 3.2	39
Diagram 3.3	41
Diagram 3.4	42
Diagram 3.5	43
Diagram 3.6	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan politik merupakan sebuah persoalan urgen untuk partai, karena banyak partai yang tidak sempat atau bahkan tidak melakukan kegiatan pendidikan politik partai sehingga banyak partai politik yang cenderung praktis dan mengakibatkan partai yang tidak solid. Pendidikan politik menjadi modal awal bagi mereka yang akan terjun langsung kepada masyarakat, memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya politik seperti yang ada di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). PDI Perjuangan menanamkan pendidikan politik kepada kadernya untuk menjadi kader yang loyal dan mampu menjadi penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Tanpa adanya pendidikan politik, akan terjadi penurunan partisipasi politik, partai politik yang kurang solid, bahkan akan susah untuk mencari masa. Melalui pendidikan politik ini akan, terjadi adanya transmisi ideology yang dimiliki oleh partai. Transmisi ideology terjadi karena adanya hegemoni budaya dari partai itu sendiri. Ideology yang ada di PDI Perjuangan merupakan Nasionalis-marhaen. Ideology tersebut disalurkan kepada anggota atau kader partai melalui pendidikan politik. Pengaruh dari transmisi ideology politik ini menjadikan anggota atau kader lebih memiliki jiwa nasionalisme dan loyal terhadap partai.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh (I Gede Wijaya Kusuma, dkk, 2020) yang mengatakan, partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik untuk masyarakat akan mengakibatkan menurunnya partisipasi politik dalam pemilihan umum, dan juga menimbulkan situasi politik yang tertekan tidak sehat dan terjadinya golput atau seseorang yang tidak memberikan kontribusi politiknya karena rendahnya tingkat partisipasi politik. Selain itu, studi yang dilakukan oleh (Recalliandra Marella, dkk, 2024) juga mengatakan bahwa, Pendidikan partai politik adalah sebuah hal yang sangat penting di negara-negara yang berbasis demokrasi, karena demokrasi dan proses demokratisasi memerlukan kondisi yang mutlak untuk pendidikan politik masyarakat.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau (PDI Perjuangan) di kota Semarang adalah partai terbesar dan partai yang konsisten, karena dapat mempertahankan suara dalam beberapa periode terakhir. Hal ini dapat dibuktikan dengan suara dan kursi jabatan

pemerintahan yang selalu mendominasi dalam pemilu. PDI Perjuangan selalu menanamkan jiwa loyalitas terhadap kadernya maupun anggota lainnya seperti relawan. Di Kota Semarang sendiri, kader dan relawan sangat antusias dalam mendukung PDI Perjuangan ketika kampanye pemilu agar memenangkan kontestasi politik ini.

Dominasi kekuasaan inilah yang mampu menarik perhatian agar semua yang tergabung dalam partai ini memiliki solidaritas yang tinggi dan loyalitas dalam mendukung partai. Selain itu, pendidikan politik juga ditanamkan oleh PDI Perjuangan kepada kader dan anggotanya agar memiliki pengetahuan politik, bukan hanya sekedar ikut dan loyal semata. Masyarakat yang berpengetahuan atau pun berpengalaman secara politik, tentu saja mereka sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga mereka dapat terlibat secara aktif maupun langsung dan tidak langsung di dalam semua proses pengambilan kebijakan, memantau proses pengambilan kebijakan publik, dan mereka dapat mewakili kepentingan mereka, dan merespon kebijakan terhadap kebijakan yang muncul di dalam bidang tersebut. Menggunakan pendidikan politik, masyarakat akan diberikan pemahaman sebagai akibatnya bisa terjadi proses transmisi nilai dan kebiasaan meskipun mereka tidak tergabung ke pada partai politik. Untuk mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran politik yang tinggi, maka perlu diselenggarakan pendidikan politik bagi rakyat yang harus dilaksanakan oleh PDI Perjuangan khususnya DPC PDI Perjuangan di Kota Semarang.

Dengan banyaknya kader PDI Perjuangan yang masuk sebagai anggota DPRD dan tiga kali menjadi Walikota Semarang, PDI Perjuangan memiliki peluang untuk terus melaksanakan program sosialisasi terkait pendidikan politik kepada masyarakat luas. Kita dapat melihat bagaimana penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) di Jawa Tengah pada tahun 2013 yang lalu, partisipasi masyarakat tercatat hanya mencapai di angka 58,53%. Meskipun demikian pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah, ditahun 2018 mengalami kenaikan sekitar 8,98% menjadi 67,51%. Perlunya dorongan bagi masyarakat untuk mempunyai kesadaran berpolitik (Recalliandra Marella Zanenci, Sunny Ummul Firdaus, dan Jadmiko Anom Husodo, 2024).

Bukti lain yaitu pada walikota semarang dan DPRD Kota Semarang yang di dominasi oleh PDI Perjuangan. Karena hal inilah PDI Perjuangan menjadi partai terbesar di Kota Semarang atau biasanya orang-orang menyebutnya Semarang sebagai “kandang banteng” karena partai ini menjadi yang terbesar daripada partai lain. Kita tahu bahwa PDI-P selalu menguasai kursi legislatif. Di Kota Semarang, pada periode 2014-2019 dan 2024-

2029 DPRD kota Semarang dipimpin oleh Kadarlusman kader dari PDI Perjuangan dan 21 kader PDI Perjuangan yang masuk sebagai anggota DPRD Kota Semarang dari 50 anggota. Selain itu, dalam tiga periode terakhir Walikota Semarang juga di pimpin oleh kader dari PDI Perjuangan (Recalliandra Marella Zanenci, Sunny Ummul Firdaus, dan Jadmiko Anom Husodo, 2024).

Menggunakan pendidikan politik, masyarakat diberikan pengetahuan agar proses tranmisi nilai dan norma terjadi meskipun mereka tidak terlibat kedalam partai politik. Guna mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran politik yang tinggi, maka perlu adanya pendidikan politik yang harus dilaksanakan oleh PDI Perjuangan khususnya DPC PDI Perjuangan di Kota Semarang. Pada akhir-akhir ini, menjelang pemilu 2024, banyak masyarakat kota Semarang banyak yang ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, khususnya pada saat kampanye bersama PDI Perjuangan. Hal ini dikarenakan adanya proses transfer atau transmisi ideologi adanya hegemoni budaya yang diberikan melalui pendidikan politik dan dari PDI Perjuangan Kota Semarang.

Selain itu, adanya perkembangan media sosial yang sangat cepat, menjadikan masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi. Hal tersebut juga mendi poin plus untuk para partai politik terkhusus PDI Perjuangan agar dapat memberikan pemahaman mengenai politik. Selain itu, PDI-Perjuangan juga memiliki ideologi yaitu nasionalis-marhaen (Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiyati Aisyah dan Deni Candra, 2022). Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada masyarakat dapat berupa penyampaian secara langsung maupun tidak langsung. Namun pada praktiknya, penyampaian materi lebih sering dilakukan secara tidak langsung misalnya dengan menggunakan media massa dan media sosial sebagai perantara (Yan Yan Yuliana, Adityawarman, dan Agus Nurul Syam, 2022).

Pada penelitian ini, akan mendeskripsikan bagaimana model pendidikan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau (PDI Perjuangan) di Kota Semarang dan akan mengungkapkan bagaimana transmisi ideologi melalui pendidikan poliik PDI Perjuangan Kota Semarang. Pendidikan politik memiliki peran yang penting bagi partai politik karena dapat memperkuat pondasi partai, legitimasi dan keberlanjutan partai dalam sistem demokrasi. Dengan pendidikan politik yang terarah, tidak hanya membuat kader yang kompeten, namun juga dapat turut serta dalam membangun demokrasi yang lebih baik. Maka untuk itu, tidak mengherankan jika kader PDI-Perjuangan Kota Semarang sangat memiliki solidaritas dan loyalitas yang tinggi kepada partai, bahkan juga PDI Perjuangan memiliki relawan yang cukup banyak di Kota Semarang, sehingga

dalam mencari dukungan dan suara bisa dibilang cukup mudah bagi PDI-P.

Transmisi ideologi PDI Perjuangan yang menggunakan ideologi Nasionalis-Marhaen kepada kader dan anggota partai memiliki pengaruh yang besar, sehingga para kader dan anggota dalam mendapatkan dukungan masa di setiap kontestasi politik yakni pemilu, selalu mendapatkan suara yang banyak. Pada penelitian ini akan menjadi pembeda dan pelengkap dari penelitian terdahulu, yaitu dengan mengungkap model pendidikan politik PDI Perjuangan Kota Semarang dan Transmisi Ideologi partai melalui pendidikan politik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini akan membahas mengenai dua permasalahan. Berikut rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana upaya PDI Perjuangan dalam melakukan pendidikan politik di Kota Semarang?
2. Bagaimana transmisi ideologi pendidikan politik PDI Perjuangan Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Dari cara penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian mengenai partai politik dan pendidikan politik.

1. Mengungkap upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam melakukan pendidikan politik di Kota Semarang.
2. Mengungkap transmisi ideologi pendidikan politik PDI Perjuangan Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritik

Manfaat dari adanya penelitian ini dapat dipahami menggunakan manfaat secara teoritik dan juga manfaat secara praktis. Adapun beberapa manfaat tersebut sebagaimana yang penulis uraikan dalam skripsi berikut ini :

- a. Secara teori, hasil penelitian ini dapat ditawarkan sebagai gambaran baru dalam bidang keilmuan dan mengembangkan wawasan bagi para pembaca mengenai model pendidikan politik dan transmisi ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kota Semarang.

- b. Penelitian ini mempunyai potensi untuk menyumbangkan manfaat kepada program studi Ilmu politik khususnya di UIN Walisongo Semarang pada partai politik dan pendidikan politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi praktis para penulis lain agar dapat memahami dalam melakukan penelitian yang serupa lebih komprehensif dan lebih mendalam.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman tentang bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan kota Semarang berperan dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan kader partai.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini, bukan merupakan penelitian yang pertama. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh banyak peneliti lain. Namun, pada penelitian kali ini akan menjadi pembeda dan pelengkap penelitian yang sebelumnya. Pada penelitian ini akan terbagi menjadi dua tema yaitu, pendidikan politik dan ideologi politik.

1. Pendidikan Politik

1. Penelitian yang dilakukan oleh (I Gede Wijaya Kusuma, Ida Ayu Putu Widiati, dan Luh Putu Suryani, 2020) dengan judul penelitian “Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Masyarakat”. Penelitian ini membahas mengenai fungsi partai politik dalam legislasi sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi politik. Partai politik wajib mensosialisasikan wacana politiknya kepada publik. Namun dalam implementasinya di lapangan, masih ada partai politik yang belum memaksimalkan fungsinya dalam melakukan pendidikan politik kepada publik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 salah satu fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat luas untuk menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya di depan umum. Pentingnya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik secara maksimal dan pada esensi aktualnya akan dapat memiliki dampak yang sangat baik terhadap masyarakat, yang berarti bahwa masyarakat mampu menjadi orang yang sadar akan kewajibannya dalam memberikan pilihan kepada partai politik atau kandidat yang benar dan tulus dalam hal kesejahteraan rakyat. Implikasi dari partai politik yang tidak melaksanakan pendidikan politik publik adalah untuk menyebabkan

penurunan partisipasi publik dalam pemilihan umum dan ini juga akan menyebabkan kondisi politik yang tampaknya tidak sehat dan memungkinkan abstain tinggi karena rendahnya tingkat partisipasi publik.

2. Penelitian dari (Ilmar Andi Achmad, Henra Saputra Tanjung, Florianus Aloysius Nay, dan Jimmy Charter Atty, 2022) dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pendidikan Politik Sebagai Program Pendidikan Non Formal (Studi di Partai Keadilan Sejahtera)”. Penelitian ini membahas bagaimana pendidikan politik menjadikannya bagi partai politik guna membenahi dan meningkatkan kualitas keanggotaannya. Partai politik adalah sarana untuk membenahi dan meningkatkan kualitas anggota partai. Seiring dengan kemajuan politik di Indonesia, kualitas pengurus partai semakin menurun, dan kebutuhan akan pendidikan politik disinyalir sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pengurus partai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan secara khusus oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Sinjai.

Hasil dari adanya penelitian ini menunjukkan bahwa diadakannya pendidikan politik oleh PKS di Kabupaten Sinjai dilaksanakan dengan banyak metode dan strategi seperti kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan. Pelaksanaannya ditentukan menurut kondisi, jadwal, dan rutinitas yang sesuai, namun tidak menutup kemungkinan adanya adaptasi kegiatan terhadap kondisi yang ada. Selain itu, pendidikan politik yang dilakukan PKS Kabupaten Sinjai selalumemuat tidak hanya muatan politik tetapi juga keagamaan dan tidak lepas dari PKS sebagai partai dakwah. Di sisi lain, pelaksanaan pendidikan politik tidak selalu berjalan dengan lancar, seringkali ada kendala-kendala, antara lain: a) adanya pandangan negatif masyarakat terhadap partai politik, b) komunikasi yang tidak terjalin antara DPC dan DPR yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan politik, c) sarana dan prasarana yang terbatas meliputi tempat dan sarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik, d) terbatasnya dana, dan e) kurangnya kader partai yang dapat menjadi narasumber atau pemateri dalam pelaksanaan pendidikan politik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Recalliandra Marella Zainenci, Sunny Ummul Firdaus, dan Jadmiko Anom Husodo, 2024) dengan judul penelitian “Implementasi Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kabupaten Purworejo Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Partai

Politik”. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana partai politik menjalankan fungsi pendidikan politik PDI Perjuangan. Partai politik adalah lembaga yang sangat dibutuhkan dalam negara demokrasi. Jika kita menggunakan sistem demokrasi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pembentukan partai politik merupakan alat demokrasi yang sangat penting.

Di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi, pendidikan politik merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan, karena demokrasi dan proses demokratisasi memerlukan kondisi mutlak untuk pendidikan politik masyarakat. Bagaimana fungsi pendidikan politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Purworejo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kajian tersebut mencantumkan tujuh kegiatan pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan Purworejo: pendidikan politik melalui sosialisasi, pendidikan politik dilakukan oleh masyarakat, pendidikan politik melalui seni hingga budaya, pendidikan politik melalui agama, dan pendidikan politik melalui pendidikan politik seminar, dan sekolah politik.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Krisna. Y.K. Lompoliuw, Agustinus B. Pati, Trintje Lambey, 2023) dengan judul penelitian “Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado”. Berdasarkan hasil dari adanya penelitian ini terdapat temuan dari PDI Perjuangan berupaya untuk memberikan pendidikan politik kepada pemuda di Kelurahan Tanjung Batu, terlihat jelas bahwa dengan adanya inisiatif berupa kegiatan pendidikan politik ini berjalan dengan baik ketika terdapat pemimpin umum dan pemimpin daerah yang berperan aktif dalam menginisiasi pendidikan politik ini.

Media massa kerap kali memberitakan mengenai agenda golongan putih (golput) yang sering diwarnai oleh wacana-wacana tersebut. Untuk generasi muda, ada faktor-faktor yang membuat mereka mempertanyakan diri mereka, mengapa harus terlibat dalam situasi politik nasional maupun daerah, sedangkan mereka memiliki kesibukan semisal sibuk bekerja, tetapi juga beberapa orang percaya bahwa orang yang memberikan suaranya dalam pemilu akan melakukan hal tersebut karena mereka beranggapan bahwa mereka ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan dengan memilih wakilnya nantinya, mempengaruhi kebijakan dalam pekerjaan mereka nantinya. Fenomena ini tentu menjadi tantangan bagi

partai politik, termasuk juga bagi pendidikan politik. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIPerjuangan) dalam memberikan pendidikan politik kepada generasi muda di kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado.

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah Hasyim dan Sharla Shafa Salsabila Azkia, 2023) dengan judul penelitian “Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024”. Penelitian ini membahas mengenai pedoman hukum bagi partai politik di Indonesia dari perspektif pendidikan politik, hingga dapat digunakan pemilih pemula dalam pemilihan umum sebagai dasar pemilu 2024. Pentingnya pendidikan politik bagi pemilih pemula di pemilu 2024 adalah menjadi pemilih yang cerdas dan memahami dinamika politik yang muncul. Partisipasi pemilih baru didorong oleh adanya pendidikan politik, pengaruh lingkungan, dan motivasi untuk mendapatkan pemahaman setelah pendidikan politik.

2. Ideologi Politik

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Galang Geraldy, 2019) yang berjudul “Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS”. Hasil dari penelitian ini yaitu persaingan partisan dalam pemilihan sistem politik yang kompleks tampaknya hanya mengutamakan hal-hal yang bersifat simbolis dan artifisial. Kritik dari kalangan elite, pergerakan kaderisasi partai politik, dan matinya partai politik bukan sekadar pertarungan politik ideologis-filosofis. Politik telah merosot menjadi komersialisasi antara elit dan masyarakat. Untuk membongkar asumsi-asumsi di atas, peneliti mengangkat tiga partai politik sebagai objek penelitian yaitu PDIPerjuangan, PSI dan PKS karena ketiganya dianggap memiliki diferensiasi ide dan nilai serta gagasan politik yang khas, dari latar belakang sejarah terbentuknya sampai keputusan-keputusan politik di dalam ruang publik demokrasi. PDIPerjuangan yang memiliki landasan historisitas politik yang kuat dengan nasionalisme-marhaen memang di dalam naskah AD ART nya sangat eksplisit mengelaborasi ide-ide Soekarno tersebut. Namun seringkali secara riil, kebijakan politik PDIPerjuangan, terutama ketika di eksekutif nasional maupun lokal masih ada paradoks. PSI, karena partai baru berdiri, peneliti menyimpulkan bahwa secara teks AD ART juga sangat eksplisit menawarkan ide-ide politik demokrasi sosial

(sosialisme demokrasi), meskipun masih perlu pembuktian ketika di pemerintahan. PKS, partai yang mengalami transformasi ideologi secara transparan, yaitu dari latar belakang politik Islam Fundamentalisme menjadi Islam Moderat, di mana nilai-nilai nasionalisme-sekuler juga mulai tumbuh-kembang di partai ini pasca pemilu 2004.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Hasnu dan Firdaus Syam, 2021) dengan judul “Ideologi Dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDI Perjuangan Dan Islam Moderat PKB”. Penelitian ini menunjukkan bahwa PDIPerjuangan mempunyai landasanpolitik historis yang bersingungan dengan ideologi Markhaenisme dariwujudan ajaran Sukarno. Meski seperti itu, pengambilan keputusan kebijakan PDI Perjuangan di parlemen dan eksekutif seringkali tidak mencerminkan dukungannya terhadap kehidupanmasyarakatawam. Fenomenaserupa terjadi di tubu PKB,partaipolitik yang berideologi Islam moderat.

Platform ininampaknya tidakmenjawab permasalahan inti darimasing-masing kebijakan politik yang diambil. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwater dapat kontradiksi antara ideologi politik marhenisme PDI Perjuangan dan Islam moderatdi tubu PKB ditinjaudari platform politik dan ideologi politik yang tercermin dalam pengambilan sikap di legislatif atupun eksekutif. Pemicunyaadalah partai politik tidak menjalankan fungsi sosialisasi politiknyakepadapimpinanpartaisehinggamenyebabkanrendahnyakepercayaanmasyarakat terhadap keberadaandansifat partai politik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Danuwidjaja dan Manan, 2023) yang berjudul “Hubungan Antara Kaderisasi dan Ideologi dalam Partai Politik: StudiKasus Aktivitas Internal PDIP”. Hasil dari penelitian ini yaitu, terdapat perbedaan mendasar dari teori dan praktishubungan ideologi dan kaderisasi dalam sebuah partai politik. Perbedaan ini dapat dilihatdalam bagaimana partai politik modern seperti yang ditemukan dalam studi kasus di ataslebih berfokus pada persepsi publik terhadap citra partai politik tersebut dan ideologinyadibandingkan terhadap implementasi nilai-nilai dari ideologi itu sendiri.

Perbedaan ini dapatdiasumsikan sebagai perluasan dari motivasi partai politik modern untuk dapat meraihdukungan masyarakat umum demi mendapatkan bagian dalam pemerintahan. Hubunganantara kaderisasi dan ideologi dalam partai politik kemudian berubah menjadi lebih pragmatisdengan kader yang dianggap sebagai entitas yang dapat mengubah persepsi publik terhadappartai politik dan

ideologinya. Kaderisasi kemudian tidak lagi dilakukan untuk dapat memastikan bahwa anggota atau calon anggota memahami ideologi partai politik, namun agar mereka dapat merepresentasikan ideologi partai yang mereka naungi secara baik untuk menciptakan persepsi publik yang baik terhadap partai politik tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan menggunakan cara memperoleh data melalui penelitian langsung di lapangan mengenai “Partai Politik dan Pendidikan Politik Studi Program Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metodologi kualitatif menurut Sugiyono (Abdussamad 2021) mendefinisikan metode yang digunakan pada kondisi alamiah dan peneliti adalah sebagai instrumen. Studi Kasus menurut Hendriansyah (Dewi dan Hidayah 2019) menjelaskan bahwa studi kasus adalah sebuah rancangan penelitian yang sifatnya intens, rinci dan serta sebagai upaya untuk memecahkan masalah.

2. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan secara langsung dan hasil wawancara dengan orang yang bersangkutan serta meninjau terhadap kasus yang sedang dikaji, yang kemudian data tersebut dapat dimasukkan kedalam proses penulisan yaitu “Partai Politik dan Pendidikan Politik Studi Program Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang”.

3. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung, bukan dari informan sebagai pihak pertama subjek penelitian melainkan melalui sumber lain. Contoh dari data sekunder diantaranya ialah, data yang diperoleh menggunakan informasi media massa, arsip pemerintah, dan buku catatan. Data

sekunder pada penelitian ini melalui data yang diperoleh dari dokumen dan arsip desa sebagai informasi tambahan untuk melakukan pencocokan antara kondisi di lapangan dengan yang berada di pemerintahan. Data sekunder peneliti juga berasal dari data yang berasal dari media massa, papan pengumuman, laporan pembangunan atau arsip desa, serta buku catatan yang terkait dengan pembangunan desa.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses mengumpulkan data guna menjawab rumusan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Wawancara

Menurut Saroso (Yusra dkk. 2021) wawancara merupakan cara mendapatkan informasi dari narasumber secara langsung. Dengan menggunakan teknik wawancara, peneliti dapat juga mengajukan pertanyaan secara langsung dengan narasumber dan peneliti juga akan mendapatkan informasi dan jawaban lebih rinci dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti kepada narasumber.

Dalam proses wawancara penulis akan memberikan pertanyaan terkait bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Semarang berperan untuk memberikan dan model pendidikan politik untuk masyarakat dan kader partai serta bagaimana proses transmisi ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang melalui pendidikan politik di Kota Semarang. Pada tahap wawancara, penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi mendalam dari informan yaitu Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kota Semarang dan beberapa pihak terkait. Dengan begitu peneliti tidak akan mengarahkan wawancara pada hipotesis peneliti melainkan berusaha mendapatkan penemuan, persepsi, yang berasal dari informan.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode penelitian empiris itu yang mengandalkan informasi faktual, baik dari dokumen atau observasi lapangan, bergantung pada menggunakan manipulasi apapun informasi faktual, baik melalui dokumen maupun observasi lapangan, tanpa menggunakan manipulasi apapun (Hasanah 2017). Observasi menurut Morris dalam Hasanah (2017) ini adalah aktivitas penggunaan peralatan untuk mengamati dan menjelaskan bagaimana

fenomena untuk tujuan ilmiah atau tujuan lainnya. Tujuan dari adanya observasi dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan, dan observasi mengarah pada pembentukan teori dan hipotesis. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data melalui observasi cara langsung di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Pada proses observasi peneliti akan berusaha memahami apa yang ditemukan dilapangan dengan cara mendengar, melihat dan melakukan pengamatan. Seperti pengamatan terhadap informasi yang diberikan oleh informan tentang pendidikan politik dan transmisi ideologi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan mencatat laporan atau dokumen yang sudah ada (Maryani 2022). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa catatan baik dalam format hard file maupun softfile. Contoh buku, halaman web, informasi media massa, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Nantinya peneliti akan mencari buku, jurnal, maupun transkrip dokumen yang berkaitan dengan Partai Politik dan Pendidikan Politik PDI Perjuangan Kota Semarang. Peneliti akan mengumpulkan data pendukung melalui halaman web PDI Perjuangan Kota Semarang dan media masa maupun media sosial PDI-Perjuangan Kota Semarang.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Pengertian pendidikan politik bukan hanya penggabungan dari kata pendidikan dan politik, makna dari pendidikan politik sangat luas. Pendidikan politik didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, yang diarahkan untuk membina kemampuan seorang individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga negara (Eko Handoyo dan Puji Lestari, 2017). Tim MKDK IKIP Semarang dalam Eko Handoyo dan Puji Lestari, (2017) mendefinisikan (pendidikan sebagai proses dalam hal mana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup, proses sosial di mana orang diharapkan berada pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal). Khan (2010) mengartikan pendidikan sebagai proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.

Dalam definisi yang lain, Dudih Sutrisman menjelaskan pendidikan politik adalah upaya yang dilakukan seseorang atau lebih serta, dilakukan secara sadar dalam proses penyampaian budaya politik bangsa dengan memperhatikan nilai Pancasila. Jadi, pendidikan politik di sini dijelaskan secara ideal dan tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi Pancasila. Kesimpulan dari beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa, pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa yang bertujuan agar masyarakat bisa menjadi individu yang cerdas pengetahuannya tentang politik dan sadar akan hak berpolitiknya kemudian pendidikan politik juga bertujuan agar partai menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi dan memenangkan perjuangan politik partai (Sutrisman, 2020).

Dalam pengertian Bahasa Inggris, pendidikan politik sering disebut dengan Political Socialization. Istilah pendidikan politik mempunyai arti dan tujuan yang sangat berbeda dengan istilah pendidikan dan politik. Oleh karena itu, di dalam memahami pendidikan politik tentu harus mengerti arti dari, teori, dan tujuan dari pendidikan politik itu bagaimana. Meskipun pendidikan dan politik merupakan konsep yang

berbeda, namun keduanya saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, karena pemahaman pihak berwenang mengenai pendidikan kewarganegaraan berbeda dengan pemahaman masyarakat, maka timbul perdebatan mengenai penerapannya, dengan anggapan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana untuk membenarkan tindakan pihak berwenang (Kartono, 2009).

Politik dapat diartikan sebagai aktivitas, perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk mendapat peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku ditengah masyarakat. Oleh karena adanya kekuatan-kekuatan sosial yang bermacam-macam itu perlu ditegakkan tata tertib. Maka, politik merupakan proses untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan inti politik adalah penggunaan kekuasaan yang diarahkan pada pengambilan keputusan bagi segenap ikatan hidup suatu bangsa. Unsur pendidikan dalam pendidikan politik, pada hakekatnya merupakan aktivitas pendidikan diri (mendidik diri sendiri dengan sengaja) yang terus berproses didalam individu sehingga orang yang bersangkutan mampu memahami dirinya sendiri dan situasi kondisi disekitarnya. Melalui pendidikan, dalam hal ini ialah pendidikan politik, orang akan berusaha melihat permasalahan sosial politik yang ada disekitarnya dengan cara-cara lain, kemudian memperbincangkan, memikirkan dan ikut menangani dengan cara lain serta arah dan tujuan yang jelas (Kartono, 2009).

Dengan begitu, pendidikan politik merupakan proses belajar, bukan hanya untuk menambah informasi dan pengetahuan saja. Namun, lebih menekankan kemampuan mawas diri secara kritis, menentukan sikap yang benar dan melatih ketangkasan berpikir maupun perbuatan. Sebagai manusia, haruslah terus belajar hidup rukun bersama dalam suatu ikatan kemasyarakatan dari yang kecil sampai ke ikatan kebangsaan dan kenegaraan. Hal itulah diperlukan yang namanya Pendidikan Politik yang secara internasional mengarah pada peningkatan pemahaman status diri sendiri selaku warga negara yang baik ditengah pergaulan hidup bersama, serta menyadari fungsi politiknya selaku warga negara.

Dalam arti luas, pendidikan politik adalah pengembangan karakter politik agar sadar dalam berpolitik dan bisa menjadi peserta yang memiliki tanggung jawab secara etis atau moral, dan berupaya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan negara. Pendidikan yang dilakukan secara sistematis guna membentuk manusia yang siap, mengingat beragamnya situasi masyarakat yang masih banyak berkembang dan bodoh secara politik, maka pendidikan politik harus diteruskan kepada generasi muda. Pendidikan ini

diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan pembangunan negara.

2. Konsep Pendidikan Politik

Pendidikan politik juga dapat diartikan sebagai "*politische bildung ist bildungswissen, orientierungswissen, verhaltungswissen und aktionswissen*" Giesecke dalam (Kartono, 1989). Pendidikan politik merupakan pengetahuan pedagogi, dimana kemampuan mengetahui sosok dan citra masyarakat (*Mensveld*), serta perkembangannya dan citra budaya negaranya sendiri, sehingga mampu: (1) orang menyadari kelebihan diri sendiri, (2) mengenali karakter bangsanya dan negaranya sendiri, (3) mempunyai percaya diri yang besar, dan (4) hilangkan rasa rendah diri dan bergantung terhadap negara lain. Mereka sangat memahami karakter bangsa negaranya, nilai bangsanya, tujuan negara, falsafah hidup (hal ini tertuang dalam Pancasila) dijadikan tolak ukur dalam memperjuangkan tujuan berbangsanya, yaitu hidup secara sejahtera.

Pendidikan politik didalam pemahaman pengetahuan yang terarah, adalah mampu mengorientasikan diri kepada pemahaman humanistik yang dapat menyampaikan kesejahteraan dan kemanusiaan. Secara obyektif, masyarakat harus berani melihat kenyataan yang sebenarnya, terutama untuk mencari alternatif dengan solusi yang lebih baik, hingga masyarakat dapat keluar dari kebuntuan dan mengupayakan keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup bersama.

Pendidikan politik dalam arti positif berarti agar peserta didik memahami hukum, peraturan, dan ketentuan yang menjadi pedoman bagi segala perilaku politik sehingga mampu menyikapi situasi dan keadaan politik yang ada dengan lebih cermat dan bijaksana. Pendidikan politik dalam arti pengetahuan perilaku berarti (1) kemampuan bertindak secara tepat, hati-hati, dan baik karena memiliki prinsip kebenaran dan keadilan, (2) mempertimbangkan permasalahan secara objektif dan wawasan kritis, (3) memiliki prinsip kebenaran dan keadilan haruslah universal. Musyawarah melibatkan kemampuan untuk mempertimbangkan dan merenungkan secara cermat peristiwa-peristiwa politik. Hal ini mengarah pada observasi introspektif dan munculnya pemikiran dan bertindak secara tepat dan stabil untuk mengatasi segala kesulitan.

Pendidikan politik mempunyai beberapa ciri yang memungkinkan untuk pengembangan pribadi yang kondusif bagi partisipasi politik yang aktif. Ciri-cirinya

antara lain:

- a. Kegiatan pendidikan politik tidak hanya bertujuan guna membentuk dan berbagi pengetahuan politik eksklusif pada kalangan masyarakat, namun juga guna menciptakan dan berbagi pemahaman politik pada kalangan perseorangan saja.
- b. Pendidikan politik bukan bertujuan untuk menumbuhkan loyalitas pribadi pada pihak berwenang guna memberikan arahan yang benar disetiap tindakan individu, tetapi untuk mengembangkan semangat kritis, terlibat dalam dialog yang konstruktif, dan mendorong masyarakat untuk menghasilkan uang yang lebih baik masyarakat untuk mengambil tindakan untuk membawa perubahan.
- c. Pendidikan politik tidak dapat dicapai tanpa kebebasan berekspresi, mengkritik, berdialog dan pengawasan oleh penguasa.
- d. Pendidikan politik adalah proses yang terus-menerus akan dilaksanakan sepanjang masa.
- e. Pendidikan politik bukan hanya terpaku dengan kegiatan di sekolah dan di rumah, namun juga dalam menerapkan aspek termasuk kedalam lembaga formal dan informal seperti partai politik dan pers.
- f. Pendidikan politik memiliki dasar ideologis dan juga dasar sosial.

Berdasarkan hakikat pendidikan politik, ada tiga aspek dasar pendidikan politik, yaitu (1) aspek fundamental yang secara langsung dan tidak langsung membentuk budaya politik, (2) aspek obyektif adalah kesadaran politik, kepribadian politik, dan partisipasi politik, dan (3) aspek kelembagaan dan metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Politik

Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa, Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya (Budianto, 2017).

Tujuan dari adanya pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996) adalah:

- a. Menciptakan manusia (perorangan, kelompok, pelanggan, pelajar, anggota masyarakat), dengan kata lain:
 1. Dapat mengerti situasi sosial politik yang saling bertentangan.
 2. Berani menyampaikan kritik yang membangun terhadap kestabilan keadaan stabilitas masyarakat.
 3. Kegiatannya tidak hanya menasar pada proses demokratisasi individu atau kelompok, tetapi juga seluruh lembaga sosial dan negara.
 4. Dapat memperjuangkan kepentingan atau ideologi tertentu, terutama yang mempunyai kaitan dengan keamanan dan kesejahteraan hidup berdampingan.

Menurut Kartini Kartono (1996), fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap:

- a. Perkembangan demokrasi yang semakin baik bagi seluruh individu (masyarakat) dan komunitas/struktur sosialnya.
- b. Berprinsip realistis, lebih manusiawi, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan formal untuk memfasilitasi komunikasi politik modern.

Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan orang dewasa bagi generasi muda yang mempersiapkan kader-kader politik untuk berpolitik dan mencari solusi politik untuk menang dalam perjuangan politik. Ini adalah pemahaman sempit tentang pendidikan politik yang ditujukan kepada pengurus partai dan pemimpin politik. Dalam arti luas, pendidikan politik yang sadar politik dan mampu menjadi peserta yang bertanggung jawab secara etika atau moral dalam mewujudkan tujuan politik individu, negara, dan masyarakat upaya pendidikan yang sistematis untuk membentuk individu yang siap. Generasi muda memerlukan pendidikan politik yang mengingatkan mereka akan kondisi masyarakat yang beragam, yang masih banyak diantaranya mereka berada pada terbelakang dan bodoh secara politis, dan pendidikan ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam gerak pembangunan sumber daya manusia.

4. Pendidikan politik dalam lembaga politik

Pendidikan politik merupakan suatu proses pemberian pengetahuan kepada

masyarakat mengenai politik negara dan akhirnya mereka dapat mengimplementasikan pengetahuannya untuk membuat suatu produk kebijakan yang proposional. Pendidikan politik dapat ditawarkan di institusi pendidikan formal, seperti sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dalam pendidikan non-formal dan informal. Negara juga berfungsi dengan baik untuk mengajarkan politik kepada rakyatnya, seperti dalam penyelenggaraan pemilihan yang memilih wakil rakyat, dan hal lainnya. Sumber pendidikan politik yang paling penting adalah keluarga, sekolah, partai politik, dan media massa (Handoyo. E & Lestari. P, 2017)

Sukses atau tidaknya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada anggotanya cepet dilihat dari tingkat partisipasi anggota partai ketika diberikan amanah oleh masyarakat dan memberikan loyalitas juang mereka kepada partai politik yang mereka dukung. Mengingat karena hal ini merupakan pendidikan partai politik pada dasarnya adalah membentuk dan menumbuhkan orientasi politik individu yang tertuang dalam Undang-Undang pasal 31 nomor 2 tahun 2011 mengenai pendidikan politik.

Pendidikan politik harus dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang awam dengan istilah politik. Adapun beberapa kalangan masyarakat bahkan ada yang merasa takut untuk terjun ke dalam dunia politik, bukan karena apa atau kenapa hal ini terjadi karena kurang pemahaman dan kesadaran masyarakat akan politik itu sendiri. Pada dasarnya politik sendiri itu tidak seram dan tidak saling menjatuhkan, justru dengan keberadaan politik yang sebenarnya mampu menjadikan keadaan menjadi stabil baik itu dari sisi keamanan maupun dari pertahanan negara. Apabila politik digunakan sesuai dengan makna politik itu sendiri seakan memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi keberadaan paradigma di masyarakat menjadikan politik dianggap sebagai suatu yang menyeramkan dan jarang ada yang mau mengerti dan memahami akan politik itu sendiri (Wijayakusuma, dkk, 2020).

Adapun beberapa fungsi dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat ataupun anggota partai dapat dilakukan oleh partai politik itu sendiri atau dari lembaga lain seperti KPU maupun BAWASLU. Berikan politik akan dikatakan sukses apabila sebagian besar masyarakat di daerah ataupun di wilayah tertentu mampu untuk berpartisipasi dalam politik dan dapat ikut serta saat pengambilan keputusan atau kebijakan yang nantinya akan mereka gunakan bersama. Keikutsertaan masyarakat dalam politik, aslinya dapat dilihat saat pemilihan umum secara langsung,

baik itu dalam pemilihan umum ataupun saat pengambilan kebijakan berlangsung. Semakin tinggi angka partisipasi dan semakin rendahnya angka golput dalam kegiatan pemilihan umum maka menunjukkan bahwa partai politik ataupun lembaga politik lainnya berhasil dalam menjalankan fungsinya dalam memberikan petikan politik kepada masyarakat, dan untuk anggota partai sendiri mereka loyal dan mampu untuk menyalurkan sisi dan misi partai mereka ke dalam sebuah kebijakan.

Pendidikan politik dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, dapat berupa kegiatan formal maupun non formal. Harapan bentuk-bentuk kegiatan yang sering dilakukan semisal seminar, lokakarya, pelatihan, jambore ataupun kegiatan positif lainnya. Arti politik diharuskan mampu untuk memberikan belikan politik kepada semua golongan, mau itu generasi muda hingga generasi tua, pada setiap lini masyarakat semua tercukup dalam kaderisasi yang telah dibentuk oleh partai politik. Dengan adanya hal ini negara menjadi lebih baik dan tidak menimbulkan keberadaan rasa ketidakadilan kepada masyarakat. Terlebih ketika berada di posisi yang kurang baik apabila masyarakat telah mampu memaknai tentang politik bukan sikap saling menyalahkan yang akan tercipta tetapi justru sikap saling mendukung dan tidak menyalahkan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah ataupun stakeholder terkait (Wijayakusuma, dkk, 2020).

Lembaga-lembaga ini dapat melakukan pendidikan politik sebagai berikut:

a. Partai politik dan kelompok penekan (*Pressure Group*)

Kultur politik dibentuk dan diubah secara signifikan oleh partai-partai politik, terutama di negara berkembang. Partai politik sampai batas tertentu memainkan peranannya dalam pendidikan politik melalui, *pertama*, pengajaran politik yang berkualitas. *kedua*, pemberian kesempatan untuk partisipasi politik secara teratur dan dalam bentuk yang lebih kontinu. Huntington menegaskan bahwa sarana institusional yang utama untuk mengatur keluasan partisipasi politik adalah partai politik. Ia dapat memberi bingkai yang lebih penting dan serasi, untuk mewujudkan partisipasi politik. *ketiga*, kehidupan partai termasuk media penyiapan bagi individu untuk berani mengambil keputusan dan berpikir independen mengenai berbagai masalah umum, serta kemampuan untuk bersikap kritis, dan menentukan pilihan

b. Media informasi dan komunikasi

Media informasi yang dimaksud adalah radio, televisi, pers, buku, lembaga ilmiah, gelanggang budaya, lembaga pendidikan, asosiasi-asosiasi moral dan sebagainya. Media informasi ini melakukan fungsi politiknya pada masyarakat dalam bentuk berikut.

1. Kontrol sosial, berupa pemaparan berita dan informasi tentang berbagai peristiwa yang terjadi dan meletakkannya sebagai fokus perhatian. Ini merupakan fungsi politis, karena inilah yang menentukan mana peristiwa yang tidak harus dipublikasikan dan mana yang dibiarkan saja untuk dikonsumsi.
2. Interpretasi berbagai peristiwa, menempatkannya pada konteks umum dan menganalisis dampaknya. Ini berpengaruh terhadap pengarahannya perilaku politik sebagai reaksi terhadap peristiwa-peristiwa tersebut.
3. Sosialisasi politik. Maksudnya adalah proses membentuk, mengokohkan atau mengubah kultur politik. Media informasi dapat dikategorikan sebagai agen-agen internasional pendidikan politik melalui berbagai fakta, nilai, contoh-contoh perilaku dan pengetahuan tentang karakter dunia politik yang disajikannya.

5. Unsur-Unsur Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan bagian tak terpisahkan dari sosialisasi politik, baik secara konseptual maupun dalam prakteknya, sebab unsur-unsur yang terdapat didalam pendidikan politik dapat diasumsikan sama dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam sosialisasi politik (Budianto, 2017). Unsur-unsur itu mencakup :

- a. Nilai-nilai politik
- b. Pengetahuan politik. Pengetahuan politik berarti segala yang diketahui berkenaan dengan macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik, yang meliputi pengetahuan tentang tujuan negara, lembaga-lembaga negara dan lain-lain.
- c. Sikap politik. Menurut Alfian (2009), sikap dan tingkah laku politik adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak (diam juga merupakan sikap) terhadap suatu keadaan. Kalau seseorang merasa terdorong untuk merubah

suasana lingkungan yang sudah jauh dari demokratis menjadi lebih demokratis, itupun akan mencerminkan sikap dan tingkah laku politiknya

B. Transmisi Ideologi Dalam Pendidikan Politik

1. Definisi Ideologi

Ideologi adalah sistem gagasan, nilai, dan keyakinan yang membentuk pandangan dan perilaku seseorang atau kelompok. Ideologi memiliki beberapa fungsi, antara lain: Membentuk identitas: Ideologi membentuk identitas seseorang atau kelompok, mengatur perilaku, Mempengaruhi kebijakan publik. Terdapat beberapa jenis ideologi, antara lain, Ideologi politik: Ideologi yang berhubungan dengan politik dan pemerintahan, Ideologi sosial: Ideologi yang berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan, Ideologi ekonomi: Ideologi yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan (Sulistiyo, 2013).

a. Karl Mannheim

Karl Mannheim dalam Hamka (2020) berpandangan bahwa seluruh pengetahuan yang dimiliki manusia telah terkondisikan secara sosial. Dia beranggapan bahwa setiap tahapan sejarah kehidupan manusia terdapat ide-ide representatif. Ide representasi yang dimaksud merupakan ide yang memperlihatkan iklim sosial yang berlaku saat itu (Hamka, 2020). Menurut Mannheim, ideologi mengarah pada tindakan yang efektif oleh kelompok untuk mendefinisikan peristiwa dengan cara tertentu dan untuk mengkonsolidasikan situasinya. Ideologi tidak hanya berfungsi untuk membenarkan dan membela kepentingan kelompok dominan. Lebih lanjut, ideologi dapat mengimplikasikan jenis klaim yang berbeda terhadap keumuman dan inklusivitas. Ini dianggap sebagai kondisi khusus perkembangan ideologis, dan bukan yang biasa seperti yang dinyatakan banyak kaum Marxis ketika mereka menyebarkan gagasan ideologi dominan.

b. Karl Marx dan Friedrich Engels

Konsep ideologi yang dimiliki oleh Marx memiliki beberapa ciri salah satunya ialah, Ideologi adalah mengenai *delusi* dan *mistifikasi* yang artinya ideologi mempunyai arti yang salah ataupun palsu mengenai dunia, yang pada akhirnya disebut oleh Engels “**Kesadaran Palsu**”. Dengan demikian, Marx menggunakan konsep kritis sebagai ideologinya, yang pada

akhirnya konsep ini digunakan untuk membongkar dari adanya kedok mistifikasi yang tersistematis. Ide-idenya sendiri kemudian dikelompokkan sebagai ilmiah karena hal itu dirancang untuk dapat mengungkap secara akurat bagaimana cara kerja sejarah dan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan antara ideologi dan sains, antara kepalsuan dan kebenaran itu sangat penting bagi Marx untuk menggunakan istilah “ideologi” (Heywood, 2016).

c. Lenin

Kristeva (2010) mendeskripsikan mengenai ide-ide yang dimiliki oleh kaum proletariat adalah “ideologi sosialis” atau “ideologi Marxis”, frasa-frasa yang jelas dirasa absurd oleh Marx. Untuk Lenin dan kaum Marxis lainnya, ideologi merujuk pada ide-ide yang berbeda yang dimiliki oleh setiap kelas sosial, dan yang jelas ide-ide ini menjadi berlaku ketika dapat memajukan posisi kelas masing-masing. Meskipun demikian, semua kelas secara keseluruhan memiliki sebuah ideologi, entah proletar ataupun borjuis, ada istilah yang mempunyai makna negatifnya. Ada saatnya ideologi memiliki titik yang tidak mengandung kekeliruan, kepalsuan, dan mistifikasi, dan tidak perlu lagi dikaitkan dengan sains. Bahkan “sosialisme ilmiah” (Marxisme) dikenal dengan ideologi proletariat (Kristeva, 2010).

d. Antonio Gramsci

Antonio Gramsci dalam bukunya *Hegemoni* (1971) berpendapat bahwa sistem kelas kapitalis masih bisa terus bertahan terus menerus karena diuntungkan oleh tidak setaraan ekonomi dan politik, tetapi apa yang dimaksud dengan “**hegemoni**” adalah ide-ide dan teori-teori dari kaum borjuis. Hegemoni mempunyai makna kepemimpinan atau dominansi, dan di dalam ranah hegemoni ideologi hal ini merujuk kepada kapitalisme ide-ide borjuis untuk dapat bisa mengalahkan pandangan-pandangan lawannya sehingga dapat menjadi akal sehat zaman (Setiawan, 2023). Gramsci tertarik pada hegemoni ideologi ini dari setiap jenjang, area masyarakat, seni, sastra, sistem pendidikan, media masa, bahasa sehari-hari, dan dalam budaya pop. Hegemoni borjuis ini sangat tegas dikatakan oleh Gramsci hanya bisa dilawan menggunakan sistem politik dan intelektual, yang mempunyai arti mulai kembali membentuk “hegemoni proletariat” sebagai lawannya, berdasarkan prinsip, nilai dan teori sosial.

e. David McLellan

Mengutip komentar dari David McLellan berpendapat bahwa ideologi merupakan konsep paling khayal dan sulit dimengerti dari keseluruhan konsep yang berapada pada ilmu-ilmu sosial. Ada beberapa istilah politik yang masih menjadi topik kontroversi yang panas dan mendalam. *Pertama*, karena konsep ideologi mengakui adanya hubungan antara teori dan praktik, konsep ideologi pun mengungkap perbedaan yang harus menggugah kewaspadaan tinggi tentang peran ide-ide dalam politik dengan hubungannya dengan keyakinan teori, dan kehidupan material atau perilaku politik di sisi lain. *Kedua*, mengenai konsep ideologi yang tidak mampu untuk didisiplinkan dari pergulatan yang tengah berlangsung di antara dan di dalam ide ideologi politik itu sendiri. Didalamnya banyak bagian dari sejarah itu sendiri, istilah “ideologi” telah lama digunakan sebagai senjata politik, sebuah perangkat yang digunakan untuk mengkritik dan mengutuki perangkat ide atau sistem keyakinan lawanya (Hakim, 2016).

2. Fungsi Ideologi

Fungsi sosial ideologi terutama terwujud sebagai fungsi sosial ideologi, fungsi kritis ideologi, dan fungsi pemandu ideologi. Dalam suatu masyarakat, setiap individu mempunyai nilai-nilai yang berbeda, dan karena itu setiap orang mengejar tujuan yang berbeda-beda, yang berujung pada konflik antar individu. Ideologi dapat berperan dalam mengintegrasikan pemikiran suatu masyarakat, memastikan bahwa mayoritas masyarakat mengakui ideologi yang dominan dan tidak melupakan berbagai nilai dalam mengejar nilai mereka sendiri. Ideologi dapat memainkan peran pemersatu, lebih jauh lagi ideologi berperan penting sebagai kekuatan spiritual yang besar dalam masyarakat, mencegah keterpecahan keberagaman masyarakat modern yang dapat menimbulkan konflik dan menjerumuskannya ke dalam kekacauan.

Ideologi yang tersistematis, ideologi juga memiliki kekuatan kohesif yang kuat, secara ideologis dapat menyatukan seluruh bangsa, kelas, kelompok, dan dapat secara efektif membimbing praktik sosial. Ideologi sangat penting di era globalisasi, koeksistensi berbagai ideologi merupakan fenomena yang tak terelakkan. Konflik antara ideologi yang berbeda juga umum terjadi. Masing-masing dari negara harus terus mempromosikan ideologi mereka sendiri di dunia

untuk memajukan pembangunan mereka sendiri. Agar sebuah ideologi dapat menunjukkan rasionalitas ilmiah dalam perdebatan, ia harus terus-menerus menyerap partikel kebenaran yang terkandung dalam ideologi lain, berkembang dan meluas sehingga menarik perhatian masyarakat, dan menjadi bagian dari inisiatif masyarakat itu sendiri (Qin, 2017).

Ideologi kurang memiliki daya tarik dan kohesi, padahal masyarakat membutuhkan ideologi unik yang sulit diterima untuk dapat berkembang. Fungsi penuntun ideologi terutama diwujudkan dalam kritiknya terhadap realitas sosial dan berfungsi sebagai penuntun bagi pengembangan cita-cita dan keyakinan masyarakat. Hal ini bertujuan, sebagai cita-cita sosial atau cita-cita kemanusiaan, untuk menentukan arah nilai-nilai dari praktik sosial suatu masyarakat, untuk mengarahkan masyarakat pada terwujudnya visi sosial yang lebih baik, dan dengan demikian mendorong perjuangan sosial Masu. Ideologi tanpa cita-cita sosial tidaklah menarik (Qin, 2017).

Ideologi, dapat mengandung berbagai macam keyakinan tentang keumuman dan inklusif. Ini dianggap sebagai kondisi khusus perkembangan ideologis. Tidak seperti yang dikatakan banyak kaum Marxis ketika mereka menyebarkan ideologi dominan, ini dianggap sebagai kondisi khusus. Oleh karena itu, ideologi berfungsi sebagai pedoman bagi penganutnya untuk melakukan tindakan praktis dan strategi untuk mewujudkan kehendak dan cita-cita yang terkandung di dalamnya (Kristeva, 2010). Dalam keyakinan ini. Salah satu fungsi teologi adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Etis, yaitu sebagai panduan dan sikap serta perilaku kelompok masyarakat dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.
- b. Fungsi Integrasi, yaitu nilai yang menjadi pengikat suatu bangsa atau masyarakat.
- c. Fungsi Kritis, yaitu sebagai ukuran nilai yang dapat digunakan untuk melakukan kritik terhadap nilai atau keadaan tertentu.
- d. Fungsi Praxis, yaitu sebagai acuan dalam memecahkan masalah-masalah kongkrit.
- e. Fungsi Justifikasi, yaitu ideologi sebagai nilai pembenar atas suatu tindakan atau kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh suatu kelompok tertentu.

3. Peran Ideologi Dalam Politik

Peran ideologi dalam politik menjadi sangat penting di Indonesia, mengingat adanya perubahan-perubahan mendasar pasca reformasi. Persaingan politik menjadi semakin intens dewasa ini. Sementara itu, masing-masing partai politik memiliki keterbatasan sumberdaya dan infrastruktur, sehingga positioning menjadi keniscayaan. Tidak semua hal dapat diselesaikan oleh satu partai politik. Sehingga masing-masing partai politik perlu memikirkan strategi untuk memperkuat identitas mereka. Identitas ini berperan penting sekali dalam era kompetisi. Adanya identitas politik yang tegas akan semakin memudahkan para pemilih untuk mengidentifikasi keberpihakan dalam isu politik suatu partai dan kebijakan publik yang akan dibuatnya.

Salah satu faktor yang mendorong orang untuk mendukung suatu partai politik adalah kesamaan budaya, agama, dan kedaerahan. Namun, ke depan, para elit politik juga harus mempertimbangkan bagaimana memposisikan partai politik mereka berdasarkan program kerja dan isu politik yang telah dibuat. Dalam persaingan politik saat ini yang semakin terbuka, posisi politik sangatlah penting. Dalam hal ini, ideologi merupakan metode dan tujuan akhir yang ingin diperjuangkan oleh partai politik. Struktur ideologi pemilih sangat menentukan apa yang diinginkan oleh pendukung. Fenomena kedekatan ideologi antara pendukung dengan partai politik sebagai sistem keyakinan yang sudah tertanam pada masing-masing individu. Mereka cenderung lebih memilih kesamaan ideologi daripada yang berbeda. Selain itu, partai politik dalam memilih ideologi juga agar meyakinkan dan memperkenalkan kepada masyarakat.

Ideologi berperan penting bagi partai politik yaitu, *pertama*, memperkuat (*strenght*) identitas massa melalui ritual politik simbolik seperti rapat akbar, kampanye dan lain-lain. *Kedua*, memperluas (*enlargement*) identitas ideologi partai ke massa atau masyarakat dan partisan partai lain melalui rapat akbar dan liputan media. Maka dari itu, ini akan mempermudah masyarakat dalam memilih dan mengidentifikasi ideologi suatu partai sekaligus mengundang partai lain. Ideologi politik perlu dilihat lebih serius lagi dan termanifestasikan pada hal-hal yang bersifat riil (Firmanzah, 2008).

4. Transmisi Ideologi

Transmisi ideologi adalah proses penyampaian ideologi dari satu orang ke orang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Ideologi yang dimaksud mencakup ide-ide politik, agama, kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik-praktik terkaitnya (Benjamin Lee & Kim Knot, 2018). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transmisi ideologi, yaitu, Bagaimana ideologi disampaikan, Kapan ideologi disampaikan, Di mana ideologi disampaikan, Peran keluarga dalam transmisi ideologi, Peran kelompok politik dalam transmisi ideologi. Namun, transmisi ideologi juga dapat memiliki beberapa tantangan, seperti: Perubahan sosial: Perubahan sosial dapat membuat ideologi menjadi kurang relevan. Kritik dan oposisi: Ideologi dapat menghadapi kritik dan oposisi dari kelompok lain. Kesulitan dalam menyebarkan ideologi: Ideologi dapat sulit untuk disebarkan, terutama jika ideologi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Alfian, 2009).

Transmisi ideologi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

- a. Pendidikan: Melalui sistem pendidikan formal dan non-formal, ideologi dapat disampaikan kepada generasi muda.
- b. Media: Media massa, seperti televisi, radio, koran, dan internet, dapat digunakan untuk menyebarkan ideologi.
- c. Organisasi: Organisasi politik, sosial, dan keagamaan dapat menjadi sarana untuk menyebarkan ideologi.
- d. Kaderisasi: Proses kaderisasi dapat digunakan untuk mempersiapkan kader yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ideologi.
- e. Simbol dan ritual: Simbol dan ritual dapat digunakan untuk memperkuat ideologi dan membuatnya lebih mudah diingat.

Tujuan Transmisi ideologi

- a. Mempertahankan ideologi: Transmisi ideologi dapat membantu mempertahankan ideologi dan mencegahnya menjadi usang.
- b. Mengembangkan ideologi: Transmisi ideologi dapat membantu mengembangkan ideologi dan membuatnya lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Menerapkan ideologi: Transmisi ideologi dapat membantu menerapkan ideologi dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Kota Semarang

1. Kondisi geografis

Secara geografis, lokasi Kota Semarang berada di antara 6 50' – 7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35' – 110 50' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Kendal di barat, dan Kabupaten Semarang di selatan. Kota Semarang memiliki luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha dan dibagi menjadi 16 kecamatan serta 117 kelurahan (semarangkota.go.id, 2018). Kota Semarang, yang menjadi Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah memiliki letak geografi yang sangat strategis. Kota Semarang yang menjadi jalur lintas perekonomian dan mobilitas penduduk di Pulau Jawa yang nantinya dapat menjadi kota Metropolitan yang berbasis perdagangan dan jasa. Berdasarkan bentuk morfologinya, wilayah Kota Semarang secara umum bisa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Kota Semarang Bawah merupakan dataran rendah dan Kota Semarang Atas merupakan perbukitan. Geologi pada dataran rendah tersusun atas batuan endap (alluvium) yang berasal dari sedimentasi sungai yang mengandung pasir dan lempung. Berbeda dengan daerah perbukitan sebagian besar memiliki susunan geologi berupa batuan beku (semarangkota.bps.go.id, 2020).

Kota Semarang memiliki karakteristik topografi yang unik, dengan wilayah daratan yang rendah dan sempit serta wilayah perbukitan yang memanjang dari sisi barat hingga sisi timur kota. Kota Semarang memiliki ketinggian yang bervariasi, mulai dari 2 meter dibawah permukaan air laut, hingga 340 mdpl dengan kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga 45%. Secara umum, topografi Kota Semarang dapat dibagi menjadi dua wilayah utama yaitu :

- a. Kota Bawah : wilayah dataran rendah yang sempit dan berbatasan langsung dengan laut jawa. Wilayah ini memiliki ketinggian yang relatif rendah dan kemiringan lereng yang landai.
- b. Kota Atas : wilayah perbukitan yang memanjang dari sisi barat hingga sisi timur kota, yang mana wilayah ini memiliki ketinggian yang lebih tinggi dan kemiringan lereng yang curam.

Perbedaan topografi kota bawah dan kota atas juga mempengaruhi cuaca dan suhu

udara yang berbeda. Kota bawah memiliki cuaca yang relatif panas sedangkan kota atas memiliki cuaca yang cenderung lebih sejuk (semarangkota.go.id, 2018)

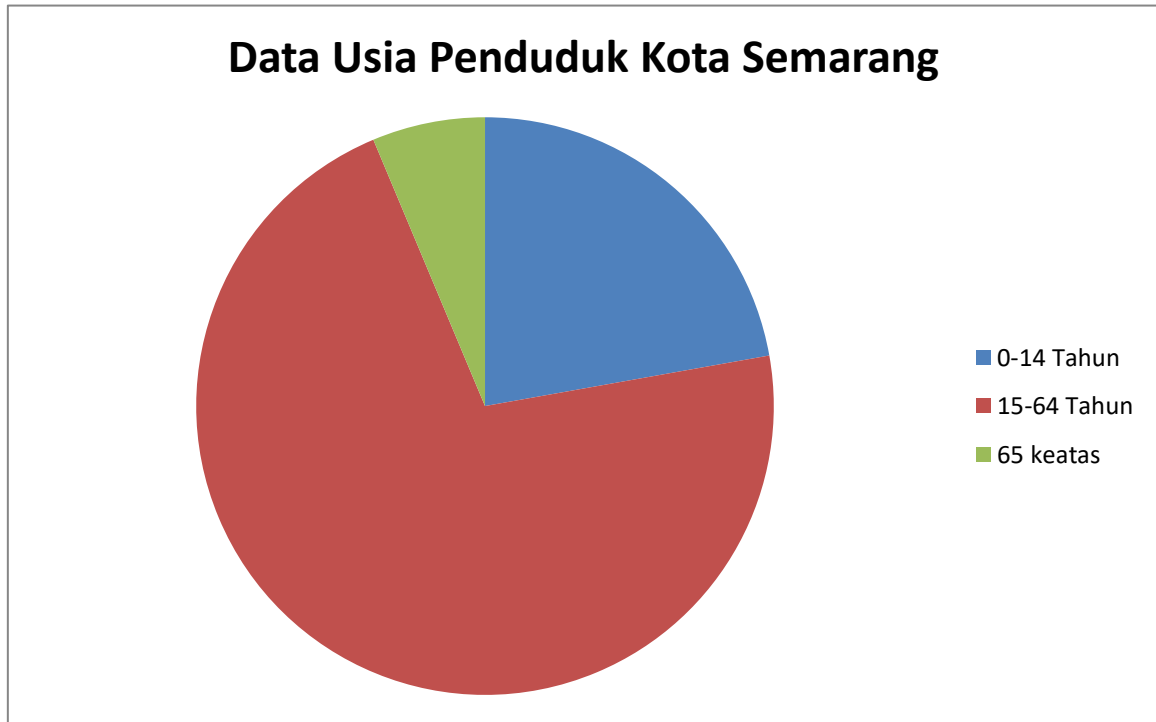
2. Kondisi Demografis.

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data kependudukan dari Badan Pusat Statistika Kota Semarang memiliki total penduduk 3.388.720 jiwa dengan laki-laki 1.676.378 dan perempuan 1.712.342. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari tiga juta jiwa menjadikan Kota Semarang kota yang padat penduduk. Kota Semarang, mendapat urutan kelima di Jawa Tengah sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, adapun persebaran penduduk yang tidak merata, yang terbukti dari hasil sensus terakhir (2020) yang mengemukakan bahwa Kecamatan Candisari merupakan wilayah terpadat dengan total kepadatan penduduk 11.538 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Tugu memiliki kepadatan terendah yaitu 1.033 jiwa/km². Menurut usia, 1,18 juta (71,48%) penduduk Kota Semarang merupakan usia produktif (15-64 tahun). Kelompok usia tidak produktif sebanyak 471,51 ribu orang (28,52%). Kemudian terdapat 367,02 ribu (22,2%) penduduk Kota Semarang pada kelompok usia tidak produktif (0-14 tahun) dan 104,5 ribu (6,32%) pada kelompok usia tidak produktif (65 tahun ke atas). Berikut data jumlah penduduk Kota Semarang:

Diagram 3. 1

Usia Penduduk Kota Semarang



Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah Penduduk	
	Laki-Laki	Perempuan
Mijen	44.876	45.072
Gunungpati	50.310	50.442
Banyumanik	70.675	72.758
Gajah Mungkur	27.602	28.748
Semarang Selatan	30.215	31.694
Candisari	37.302	38.312
Tembalang	98.833	100.029
Pedurungan	97.167	99.359
Genuk	66.946	65.527
Gayamsari	34.998	35.411
Semarang Timur	31.729	34.220
Semarang Utara	58.194	59.693
Semarang tengah	26.438	28.775
Semarang Barat	73.311	76.015
Tugu	16.906	16.889
Ngaliyan	72.403	73.092
Kota Semarang	838.473	856.306
Jumlah	1.676.378	1.712.342

Sumber : BPS Kota Semarang

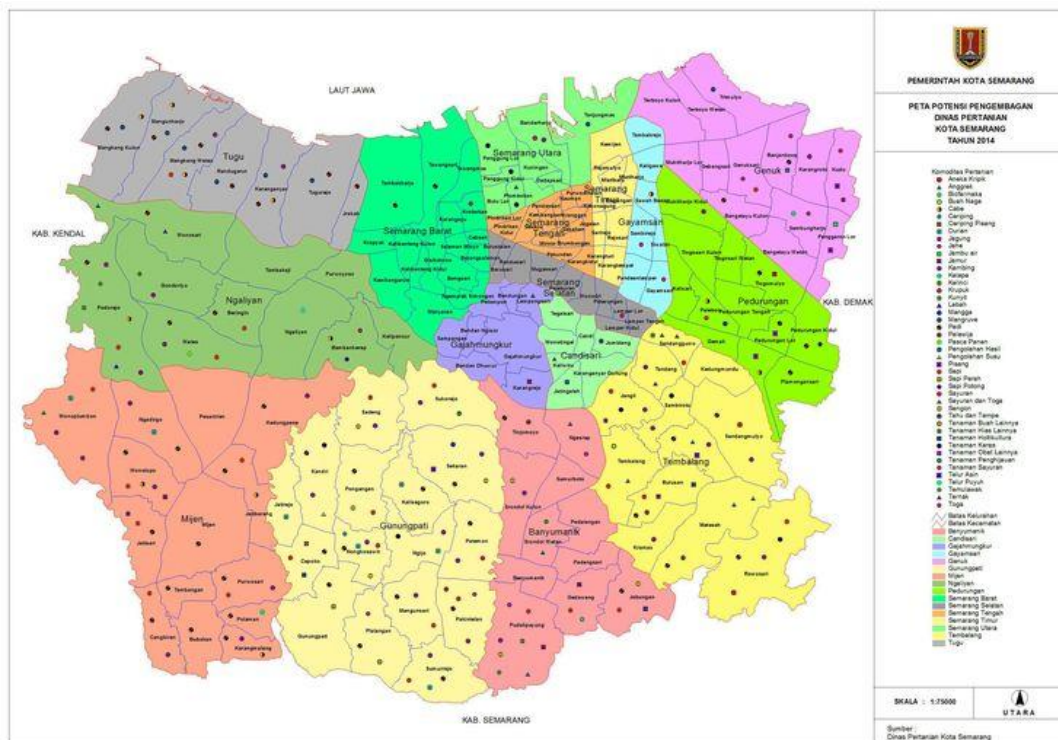
b. Peta Kota Semarang

Kota Semarang memiliki wilayah yang tergolong kecil, namun padat penduduk. Hal ini dikarenakan banyaknya pendatang dari luar kota yang merantau untuk bekerja maupun menempuh pendidikan. Kota Semarang dibagi menjadi dua bagian yaitu, Semarang atas yang meliputi Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Tembalang, Ngaliyan dan Semarang Bawah yang meliputi, Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Candisari, Pedurungan, Genuk, Tugu, Semarang Timur, Semarang Utara, dan Semarang Kota.

Kota Semarang secara administratif terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Diantaranya adalah Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Candisari, Pedurungan, Genuk, Tembalang, Gayamsari,

Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Utara, Tugu, dan Ngaliyan adalah kecamatan di Kota Semarang. Tercatat Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Mijen dan Gunungpati, masing-masing memiliki luas wilayah 57,55 km² dan 54,11 km². Sementara itu luas wilayah terkecil terletak di Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Semarang Tengah, masing-masing memiliki luas wilayah 5,93 km² dan 6,14 km² (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang).

Gambar 3.1 Peta wilayah Kota Semarang



Sumber : semarangkota.go.id

3. Fraksi di DPRD Kota Semarang

Dari data DPRD Kota Semarang yang dapat diakses melalui website dprd.semarangkota.go.id terdapat 7 fraksi partai politik dan ada 50 anggota DPRD. Masing-masing fraksi ini memiliki beberapa anggota yang menjabat sebagai DPRD di Kota Semarang. Anggota paling banyak menduduki kursi DPRD Kota Semarang adalah dari PDI Perjuangan dan paling sedikit dari fraksi Partai Golkar (Golongan Karya). Berikut merupakan data anggota fraksi di DPRD Kota Semarang :

Tabel 3.2 Anggota DPRD Kota Semarang

No.	Fraksi	Anggota
1	Fraksi PDI Perjuangan	14
2	Fraksi Gerindra	10
3	Fraksi Demokrat	6
4	Fraksi PKS	6
5	Fraksi PKB	5
6	Fraksi PSI	5
7	Fraksi Golkar	4

Sumber : dprd.semarangkota.go.id

B. Profil PDI Perjuangan

1. Sejarah PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Jika kita berbicara mengenai sejarah PDIPerjuangan maka tidak dapat lepas dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Sukarno pada 4 Juli 1927. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan gabungan dari PNI yang memilih untuk bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik, pada 10 Januari 1973. Sejak awal terbentuk, konflik di dalam internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah. Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua dari Ir Sukarno, Megawati Sukarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI (AD/ART PDI Perjuangan, 2019-2024).

Namun rezim yang saat itu sedang berkuasa (Suharto) tidak menyetujui dengan adanya dukungan tersebut, kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Sukarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Larangan tersebut justru berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, kemudian secara *de facto* Megawati Sukarnoputri dinobatkan sebagai ketua DPP PDI periode 1993-1998. Sehingga pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Sukarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara *de jure*. Tidak hanya sampai di situ konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Pada 20 Juni 1996 para simpatisan Megawati Sukarno Putri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres

(AD/ART PDI Perjuangan, 2019-2024).

Pemerintah Suharto pada tanggal 5 Juli 1996 mengukuhkan Suryadi menjadi Ketum DPP PDI. Sampai akhirnya pada tanggal 27 Juli 1996 pendukung Megawati Sukarnoputri menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat. Bersamaan dengan itu muncul rombongan berkaus merah kubu Suryadi, kemudian terjadi bentrok dengan kubu Megawati Sukarnoputri. Peristiwa tersebut dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli. Sesudah peristiwa itu, PDI yang berada di bawah pimpinan Suryadi hanya memperoleh 11 kursi DPR. Karena pemerintahan Suharto lengser pada reformasi 1998, sedangkan PDI yang berada di bawah pimpinan Megawati Sukarnoputri semakin kuat, dan ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.

Setelah peristiwa tersebut, Megawati Sukarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu. Notaris Rahmat Syamsul Rizal yang akhirnya mengesahkan nama tersebut, kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. PDI Perjuangan (PDIPerjuangan) melakukan Kongres I pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati Sukarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP periode 2000-2005. Pada Kongres IV PDIPerjuangan di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati Sukarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDIPerjuangan periode 2015-2020 (AD/ART PDI Perjuangan, 2019-2024).

2. Ideologi PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIPerjuangan) dalam proses berdirinya melewati beberapa peristiwa sejarah penting. Sebagai cita-cita bersama, perwujudan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, makmur, beradab, dan ber-Ketuhanan adalah hak sekaligus tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Karena hal tersebut dibutuhkan sinergitas bangsa, baik secara perseorangan ataupun yang terorganisir di dalam organisasi kerakyatan yang demokratis serta universal untuk semua warga negara, tanpa harus membedakan suku, agama, gender, keturunan dan kedudukan sosial (Syam, 2021).

Adanya dorongan semangat untuk bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita

luhur tersebut, serta untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang semakin pesat ini, maka dari itu Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik, pada tanggal 9 Maret 1970 membentuk sebuah kelompok demokrasi pembangunan, yang akhirnya disahkan dengan pernyataan bersama kelima partai politik tersebut pada tanggal 28 Oktober 1971. Akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 melakukan langkah strategis memfusikan diri menjadi satu wadah perjuangan politik bagi rakyat berdasarkan Pancasila dengan nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Untuk dapat mewujudkan cita-cita nasional, PDI Perjuangan menganut prinsip demokrasi yang menempatkan kepemimpinan pusat partai sebagai sentral gerakan, suatu kepemimpinan yang dipimpin oleh ideologi Pancasila 1 Juni 1945, kepemimpinan yang mengandung manajemen satu arah dan satu tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur, dan suatu kepemimpinan yang sesuai dengan kepribadian bangsa yaitu gotong royong (AD/ART PDI Perjuangan 2019-2024).

Ideologi Marhaenisme merupakan representasi dari sebuah identitas dari ide atau gagasan, narasi dan perilaku laku politik Soekarno. Konsep ideologi marhaenisme sendiri, sebagai gambaran dari personifikasi rakyat kecil yang memiliki sebidang tanah kemudian menggarap sendiri, alatnya dimilikinya sendiri dan hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan keluarganya. Marhaenisme sendiri diambil dari teori dialektika yang dikembangkan oleh Hegel, kemudian didukung oleh Karl Marx dan F. Engels. Marx melihat bahwa para pemilik modal memiliki dominasi yang sangat besar dalam sistem sosial-ekonomi. Dengan kontrol mereka terhadap alat produksi, para pemilik modal dapat dengan mudah mengendalikan dan bahkan menundukkan kelompok sosial lainnya (Pujiono. dkk, 2024)

Marx merumuskan teori tentang kelas sosial, yang membagi masyarakat ke dalam dua golongan utama: kelas *borjuis* dan *proletar*. Dalam pemikiran Marx, borjuis adalah kelas yang memiliki modal dan mengendalikan alat produksi, sementara proletar adalah kelas pekerja yang tidak memiliki akses terhadap alat produksi dan hanya dapat bertahan hidup dengan menjual tenaga kerja mereka kepada kaum borjuis (Prayogi. A, dkk, 2025). Menurut Marx dalam Hart (1992), ketimpangan yang semakin parah akan mendorong kaum proletar untuk menyadari posisi mereka sebagai kelompok tertindas, yang pada akhirnya akan melahirkan revolusi sosial.

Revolusi ini bertujuan untuk menggulingkan sistem kapitalisme dan menggantikannya dengan sistem sosialisme, dimana prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dapat

terwujud. Marx membayangkan bahwa melalui revolusi sosialisme, masyarakat akan bersatu dalam skala global dan menciptakan tatanan dunia baru yang lebih adil (A. Prayogi, 2025). Dalam perkembangan wacana intelektual saat ini, gagasan-gagasan Marx sering kali dijadikan sebagai suatu idealisme. Namun, jika hanya dijadikan sebagai idealisme belaka, pemikiran Marx justru kehilangan esensi kritisnya.

Maka dari itu analisa marxisme menjadi kunci utama, guna membedah lebih dalam marhaenisme Soekarno. PDI Perjuangan dianggap sebagai partai politik yang mempunyai keterikatan dan kaitan yang kuat dengan ideologi Marhaenisme (Syam, 2021). Menjadi landasan perjuangan untuk rakyat Indonesia, Marhaenisme menerapkan susunan masyarakat sosio-nasionalisme dan sosio-demokratis. Sosio-nasionalisme merupakan nasionalismeyang berdasar pada kemasyarakatan. Nasionalisme juga sering disebut sebagai faham kebangsaan, karena persamaan nasib dan sejarah serta persamaan kepentingan hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Marhaenisme mengandung asas sosio-demokratis, adalah demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial (Syam, 2021).

Marhaenisme sendiri, juga dapat dikatakan ada dari alam berpikir Bung Karno yang progresif dan revolusioner. Hal tersenut juga tidak akan pernah lepas dari latar belakang Bung Karno yang memang darikecil sudah memiliki ketertarikan terhadap politik dan senang berorasi. Jiwa kepemimpinan dan kharismanya juga tidak diragukan lagi, karena dapat dilihat di beberapa kesempatan, Sukarno bisa mengorganisir massa dan membakar semangat mereka, melalui cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Bung Karno. Dengan kepribadian yang dimiliki Sukarno tersebut, maka tidak membutuhkan waktu yang lama bagi seorang Sukarno untuk dapat menjadi salah satu tokoh pergerakan yang sangat penting. Pemikiran pemikiran radikal-revolusionernya banyak dipengaruhi oleh para tokoh nasional, salah satunya yaitu Tjokroaminoto yang menjadi guru politiknya. Melalui Tjokroaminoto Bung Karno belajar mengenai fungsi politik sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat, dari Tjokroaminoto juga Bung Karno belajar mengenai pergerakan modern dan bagaimana untuk memanfaatkan media massa guna menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan (Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiyati Aisyah dan Deni Candra, 2022).

Marhaenisme sebagai suatu konsep pemikiran perjuangan bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan, tentunya tidak akan bisa dilepaskan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu asas-asas yang akan menjadi satu kesatuan sistem ideologi marhaenisme. Adapun asas-asas pembentuk tersebut

meliputi: *radikal-revolusioner*, *machtvorming*, massa-aksi, nonkooperasi, *self-help & self-reliance*. Radikal-revolusioner yaitu perubahan yang berdasarkan kehendak zaman yang cepat.

Radikal-revolusioner dalam konteks perjuangan dapat diartikan sebagai perubahan secara instan yang menginginkan selesainya masa imperialisme dan hal-hal yang berkaitan dengan penindasan serta perampasan hak secara paksa. Radikalisme sangat penting sekali, dalam konteks kekuatan perjuangan bangsa. Radikal diartikan sebagai hal yang tidak boleh dilakukan setengah-setengah, harus dilakukan dengan keseriusan dan kesungguhan. Maka dari itu, Sukarno selalu menegaskan tentang pentingnya rakyat yang radikal revolusioner, karena tanpa adanya perjuangan yang radikal-revolusioner, penjajahan di atas tanah Indonesia ini tidak akan pernah hilang, tanpa mereka yang benar-benar memiliki pemikiran dan sikap yang radikal revolusioner (Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiyati Aisyah dan Deni Candra, 2022).

Istilah Marhaenisme dan Marhaen disebut-sebut dalam pidato Soekarno sebagai ketua PNI yang didirikan pada bulan Juli 1927, tetapi bisa dikatakan secara resmi istilah Marhaen itu memperoleh definisi dalam pidato pembelaan Soekarno, "Indonesia Menggugat", di hadapan Pengadilan Kolonial Belanda di Bandung pada tahun 1930. Soekarno menyatakan bahwa pergaulan hidup merk Marhaen; adalah pergaulan hidup yang sebagian besar sekali adalah terdiri dari kaum tani kecil, kaum buruh kecil, kaum pedagang kecil, kaum pelayar kecil, kaum Marhaen yang apa-apanya semua kecil. Di sini Soekarno mencoba membedakan secara tajam antara konsep Marhaennya itu dengan konsep proletarian dari kaum sosialis Barat, terutama komunis.

Sebenarnya Marhaenisme dan Marhaen yang dirumuskan Soekarno bisa ditafsirkan sebagai ikhtiar melawan ideologi saingannya, yang mana Marhaenisme menolak analisis kelas dari PNI baru (Hatta-Syahrir) dan lebih menyukai perjuangan ras dan menggantikan citra ekonomi sosialis berdasarkan kolektivisme dengan konsep kebahagiaan dan keadilan sosial untuk marhaen, rakyat kecil yang berjumlah 95% dari rakyat Indonesia. Marhaen tidak hanya mengacu pada petani miskin, namun mencakup kaum proletar dan kaum melarat lainnya. Oleh karena itu, marhaenisme lebih luas dari proletar karena mencakup kaum miskin lainnya dan marhaenisme adalah cara yang menghendaki hilangnya kapitalisme dan imperialisme serta semua masyarakat Indonesia adalah kaum marhaenis yang menjalankan marhaenisme.

3. Visi – Misi

Visi

Partai adalah:

- a. alat perjuangan guna membentuk dan membangunkarakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.
- b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila)
- c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila)
- d. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara.
- e. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Misi

- a. mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.
- c. membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial.
- d. membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik

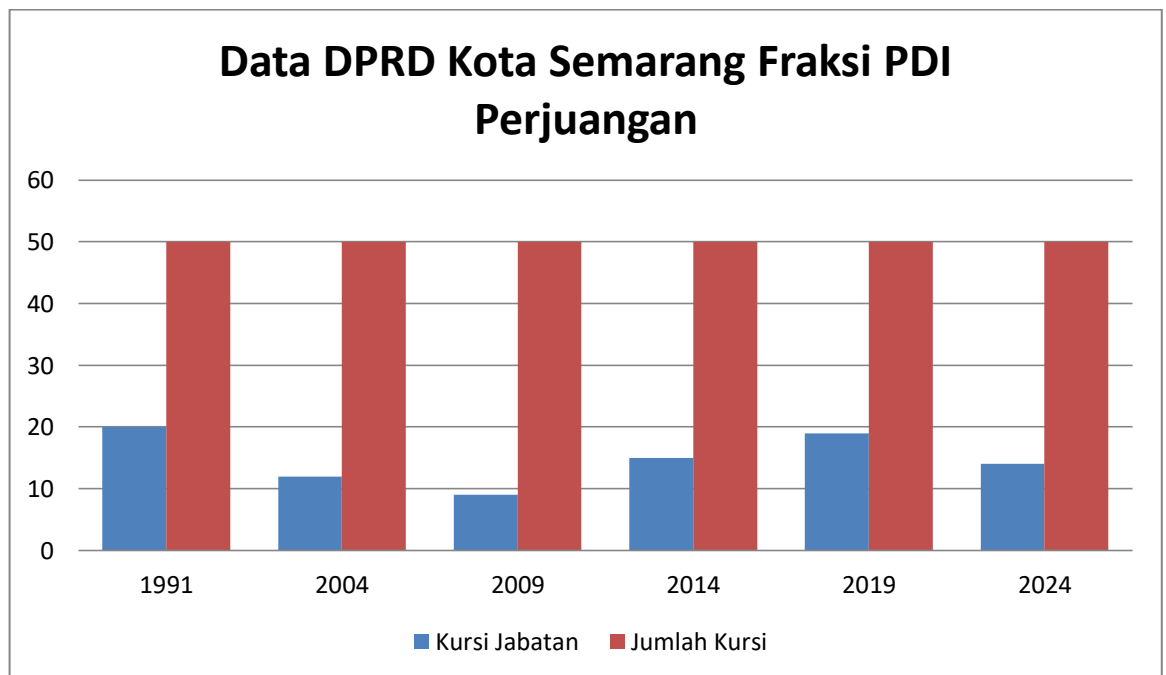
dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi.

- e. memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.
- f. berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

1. Sejarah Politik PDI Perjuangan Kota Semarang

PDI Perjuangan Kota Semarang pertama kali mengikuti pemilu pada tahun 1999 mendapatkan separuh kursi jabatan yaitu, 20 kursi jabatan dari 45 kursi. Kemudian pada tahun 2004 turun dari yang awalnya mendapatkan 20 kursi menjadi 12 kursi dan pada tahun 2009 turun lagi hanya mendapatkan 9 kursi. Dalam tiga kali pemilu, PDI Perjuangan mengalami penurunan suara dan pada pemilu tahun 2014 mulai meningkat lagi dengan mendapatkan 15 kursi jabatan tahun 2019 juga naik lagi menjadi 19 kursi dan pada tahun 2024 mengalami penurunan kursi jabatan menjadi 14 kursi jabatan. Hal tersebut terjadi perubahan pada tahun 1999 ke 2004 yaitu banyak sekali konflik dan gejolak politik yang terjadi seperti peralihan kekuasaan, beberapa kader partai yang pindah haluan, perpecahan partai dan lain-lain, yang mengakibatkan penurunan kursi jabatan. Namun, meskipun mengalami penurunan kursi, PDI Perjuangan Kota Semarang tetap bisa dikatakan mendominasi, hal tersebut dikarenakan setengah kursi jabatan yang ada diisi oleh beberapa partai lain yang mana, PDI Perjuangan Kota Semarang bisa dikatakan mendominasi kursi jabatan.

Diagram 3.2 Data DPRD Kota Semarang Fraksi PDI Perjuangan



2. Struktur Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

Setiap partai politik mempunyai banyak kepengurusan dan cabang untuk dapat menjalankan fungsi dan tujuan partai hingga ke tingkat yang minimum. Partai PDI Perjuangan tidak terkecuali dengan kekuatan bawah partai saat ini memiliki pengikut terbanyak di Indonesia. Tentu saja, PDI Perjuangan juga memiliki kepengurusan di tingkat lokal. Salah satunya adalah dewan perwakilan cabang Kota Semarang. Perwakilan dari Dewan perwakilan cabang (DPC) Kota Semarang sendiri merupakan suatu organisasi yang berada dibawah naungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan kekuasaan pimpinan di tingkat daerah khususnya Kota Semarang. PDI Perjuangan kota Semarang tidak lepas dari sejarah PDI Perjuangan Pusat, yang mana PDI Perjuangan berdiri pada 10 Januari tahun 1973. Setelah itu berdirilah DPW dan DPC PDI Perjuangan termasuk Kota Semarang yang awalnya PNI, Murba dan Parkindo berubah menjadi PDI di Kota Semarang. PDI Perjuangan sendiri mengikuti pemilu pada tahun 1999 setelah orde baru dan keluar sebagai pemenang, namun tidak disebutkan siapa ketua pertama DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Tujuan pembentukan DPC adalah untuk menjalankan fungsi partai dan ada tujuan partai sebagaimana yang ada didalam AD-ART partai, PDI Perjuangan untuk wilayah Kota Semarang. DPC PDI Perjuangan Kota Semarang membawahi 16 PAC (Pengurus Anak Cabang) karena Kota Semarang

memiliki 16 Kecamatan, 177 Ranting, dan kurang lebih 5.400 Anak Ranting.

Berdasarkan surat keputusan dewan pimpinan pusat (DPP) partai PDI Perjuangan, struktur dan komposisi dewan pimpinan cabang (DPW) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang masa bakti 2019-2024:

1. Ketua: Hendrar Prihadi, S.E., M.M.

Bidang Internal

2. Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai: Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos
3. Wakil Ketua Bidang Pemenengan Pemilu: Paulus Sudaryanto, S.E
4. Wakil Ketua Bidang Idologi dan Kaderisasi: I Gede Ananta Wijaya Putra, S.T., M.M
5. Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Dyah Ratna Harimurti, S.Sos

Bidang Pemerintahan

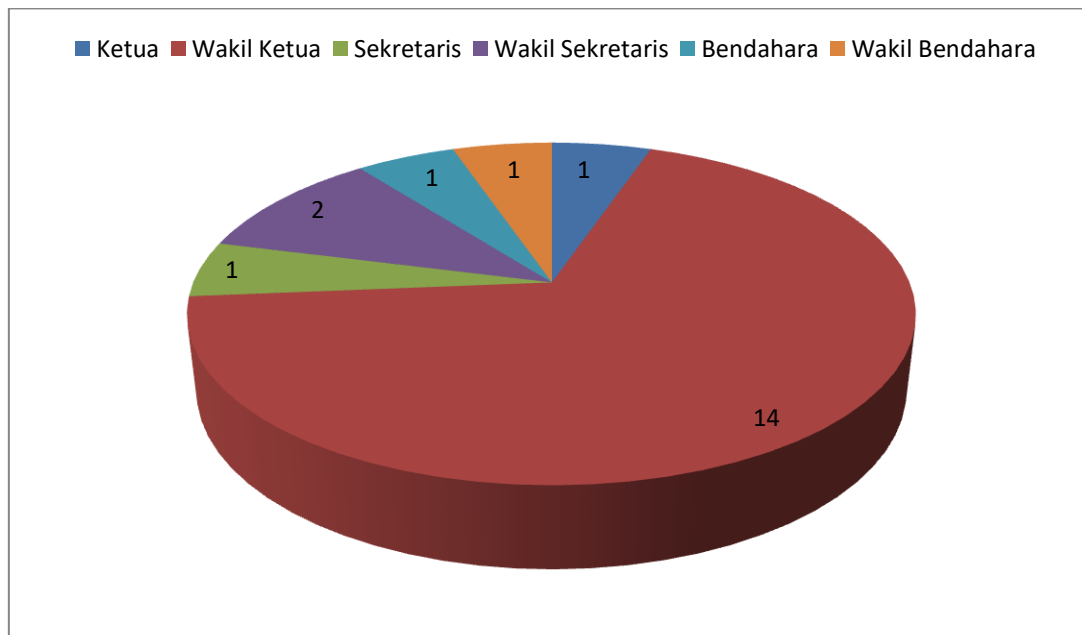
1. Wakil Ketua Bidang Politik: Fajar Aji Pamungkas, S.H
2. Wakil Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan: Fajar Rinawan Sirotus, S.H
3. Wakil Ketua Bidang Perekonomian: Michael, S.Kom
4. Wakil Ketua Bidang Kebudayaan: Martinus Dwi Septianto, S.E

Bidang Kerakyatan

1. Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan, dan Anak: Lely Purwandari
2. Wakil Ketua Bidang Industri, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Koperasi, dan UKM: Endang Retnawati, S.E
3. Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: Chaterine Anggraeny, S.E., Ak., CA., ACPA
4. Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: H. Supriyadi, S.Sos
5. Wakil Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan: R. Yuwanto
6. Sekretaris: Kadarlusman
7. Wakil Sekretaris Bidang Internal: Wisda Pridatoo
8. Wakil Sekretaris Bidang Program: Margono
9. Bendahara: M. Rukiyanto A.B., S.H., M.A.

10. Wakil Bendahara: Kristiani, S.Sos

Diagram 3.3 Jumlah Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

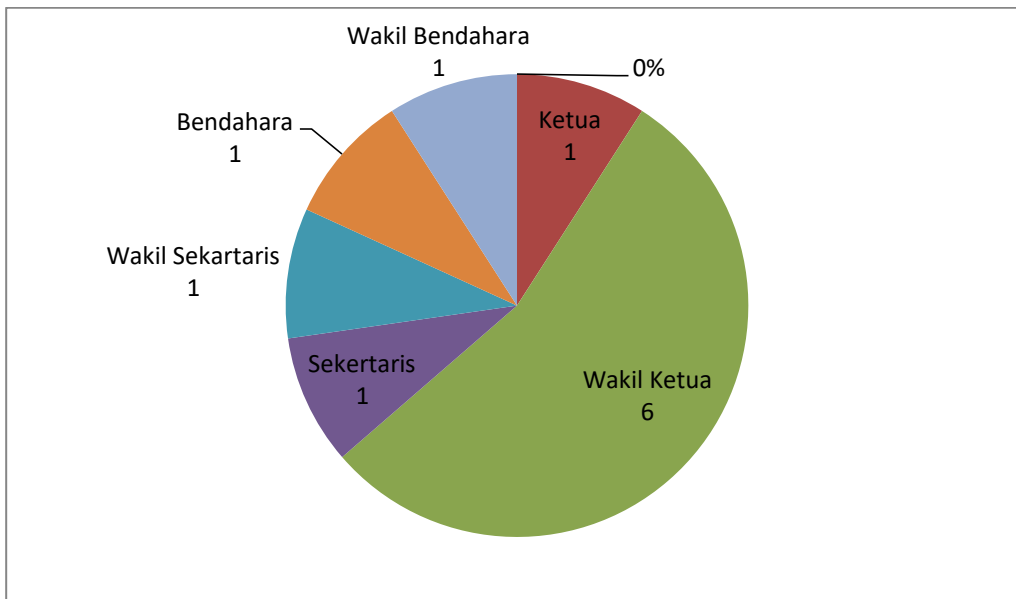


Ketua DPC PDI Perjuangan bertugas sebagai penanggung jawab atas eksistensi program dan kinerja partai ke dalam dan keluar di tingkat kabupaten kota. Wakil ketua terbagi menjadi 14 yaitu wakil ketua bidang internal yang membawahi 4 bidang kehormatan partai, kemenangan pemilu, ideologi dan kaderisasi, keanggotaan dan organisasi. Adapun wakil ketua bidang pemerintahan membawahi empat bidang membawahi bidang politik, hukum dan perundang-undangan, perekonomian koperasi dan UMKM dan kebudayaan, adapun wakil ketua bidang kerakyatan yang terdiri dari 7 bidang yaitu penanggulangan bencana industri, tenaga kerja dan jaminan sosial, kesehatan, perempuan dan anak pariwisata, pemuda dan olahraga keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ekonomi kreatif dan ekonomi digital, pangan pertanian dan kehutanan kelautan dan perikanan di lingkungan hidup.

Mengenai tugas wakil ketua bidang DPC partai sama dengan tugas-tugas ketua bidang di DPP partai sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 18 dan 19 AD/ART. Wakil sekretaris DPC terdiri dari dua yaitu wakil sekretaris bidang internal dan wakil sekretaris bidang program yang meliputi bidang pemerintahan dan kerakyatan. Mengenai tugas sekretaris dan wakil sekretaris DPC partai yang sama dengan tugas-tugas sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal sebagaimana yang

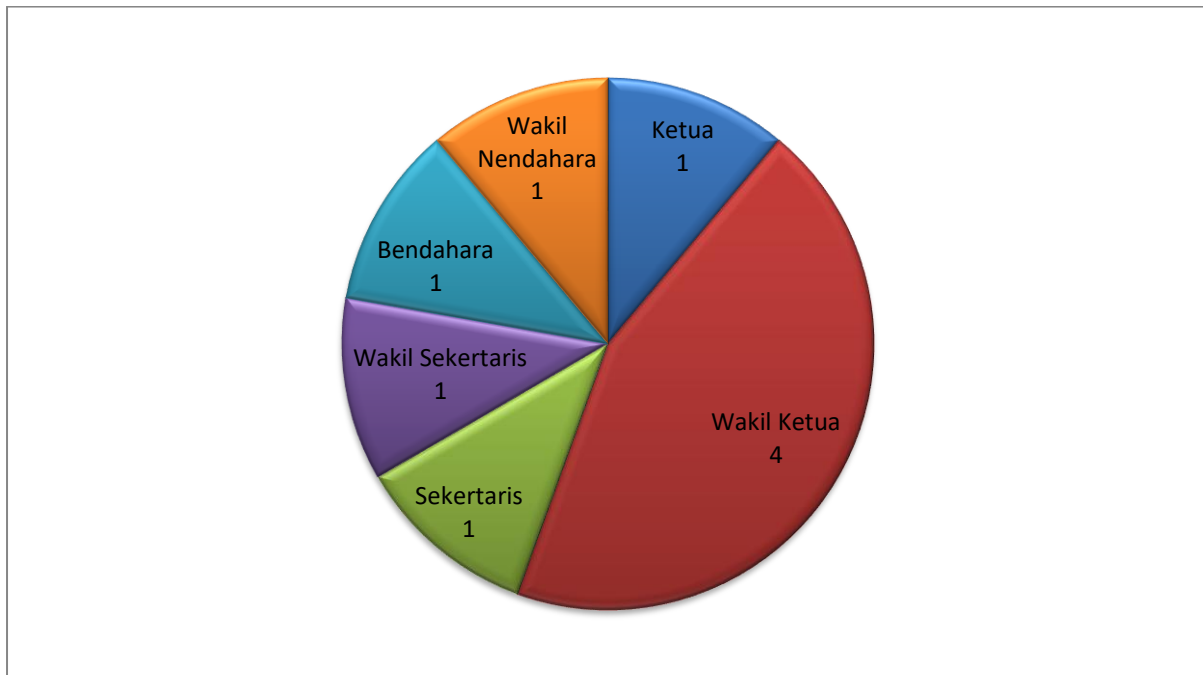
diatur dalam pasal 20 dan 21 anggaran rumah tangga partai. Di dalam tubuh DPC bendahara bertugas dan bertanggung jawab mengelola keuangan dan perbendaharaan DPC partai, dengan wakil bendahara DPC bertugas membantu bendahara menjalankan tugasnya.

Diagram 3.4Pengurus PAC PDI Perjuangan



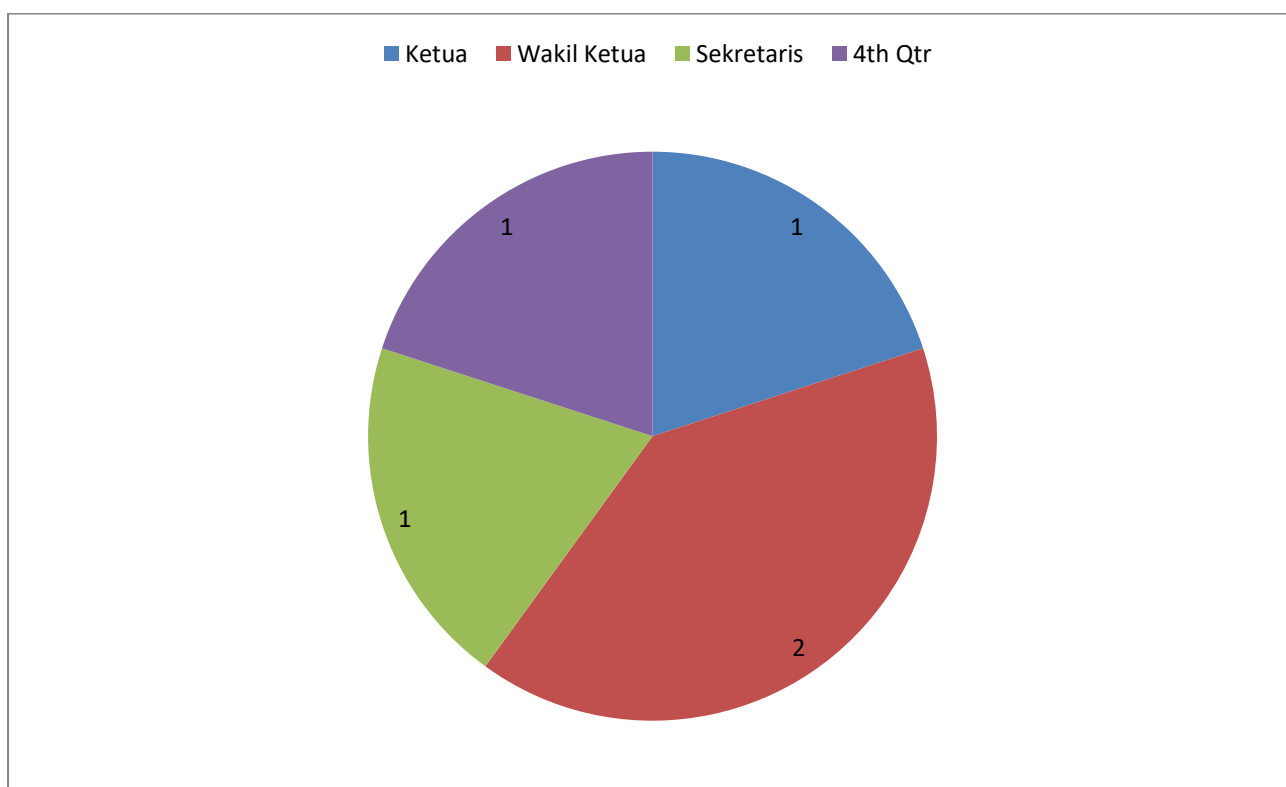
Pengurus anak cabang atau sering disingkat sebagai pac dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh wakil-wakil ketua seorang sekretaris dan seorang bendahara. Wakil ketua dalam PAC partai biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan per bidangnya di dalam kondisi dan wilayah geografis. Tidak menutup kemungkinan wakil ketua juga hanya satu atau bisa lebih, karena melihat kondisi dan kebutuhan PAC dalam wilayah tersebut. Hal itu dibenarkan dalam AD/ART karena didalamnya tidak dijelaskan secara eksplisit berapapun jumlah wakil ketua bidang yang harus ada.

Diagram 3.5*Pengurus Ranting*



Pengurusan di tingkat ranting partai dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh wakil-wakil ketua seorang sekretaris dan seorang bendahara wakil-wakil dari ketua ranting partai biasanya membidangi tupoksi yang disesuaikan dengan kebutuhan karakter dan kondisi geografi di suatu ranting tersebut. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa ranting yang memiliki wakil ketua yang lebih dari dua karena menyesuaikan dengan kebutuhan nya. Tail jika kita menemukan ada beberapa ranting yang memiliki ketua lebih dari itu dan di dalam tugu PDI Perjuangan hal itu dianggap sah-sah saja karena tidak menyalahi aturan AD ART partai.

Diagram 3.6Pengurus Anak Ranting



Terakhiradalah pengurus anak ranting partai yang dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh wakil-wakil ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara-wakil ketua dari anak ranting partai mempunyai tupoksi dalam bidangnya sesuai dengan kebutuhan, karakter dan kondisi di wilayah geografis anak ranting tersebut.

BAB IV

UPAYA PDI PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN POLITIK

A. Pendidikan Politik di Kota Semarang

Pendidikan politik di kota Semarang sendiri dilakukan dengan mengikuti PDI Perjuangan secara keseluruhan dimulai setelah berdirinya PDI Perjuangan pada tahun 1973. Artinya, pendidikan politik ini tidak bisa dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri di wilayah masing-masing dengan kata lain, pendidikan politik kepada masyarakat memang sudah terkonsep dengan jelas dari pusat. Pada awalnya pendidikan politik ini hanya berbicara mengenai bagaimana menjadi kader atau anggota yang baik, masyarakat yang nasionalis dan sebagainya. Kemudian pada era reformasi pembahasan dalam pendidikan politik sudah berubah, bukan hanya bagaimana menjadi masyarakat yang nasionalis, sebagai anggota partai yang baik namun, arah daripada pendidikan politik ini menjadikan semangat reformasi, masyarakat yang melek terhadap politik, sosial, budaya maupun agama. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pak Untung ketika wawancara. Terkait kepentingan internal partai politik, pendidikan politik dapat diartikan sebagai upaya untuk menyadarkan dan sistematis guna mengubah segala sesuatu dalam kaitannya dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massa partai agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.

Pendidikan politik merupakan sebuah tanggung jawab yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Partai Politik. Undang-undang tersebut menjelaskan pendidikan politik sebagai suatu proses di mana individu belajar dan memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait hal ini, Sunarso pada tahun 2007 menyebutkan bahwa pendidikan politik berperan penting dalam mendukung fungsi sistem pemerintahan, dengan catatan bahwa warga negara telah mengembangkan sikap politik. Sikap politik ini diartikan sebagai kemampuan individu untuk memahami inti serta dasar-dasar kekuasaan, sehingga dapat menjaga kelangsungan sistem demokrasi yang telah diterapkan.

Pendidikan politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Didalam Undang-undang tersebut mendefinisikan mengenai pendidikan politik sebagai sebuah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan

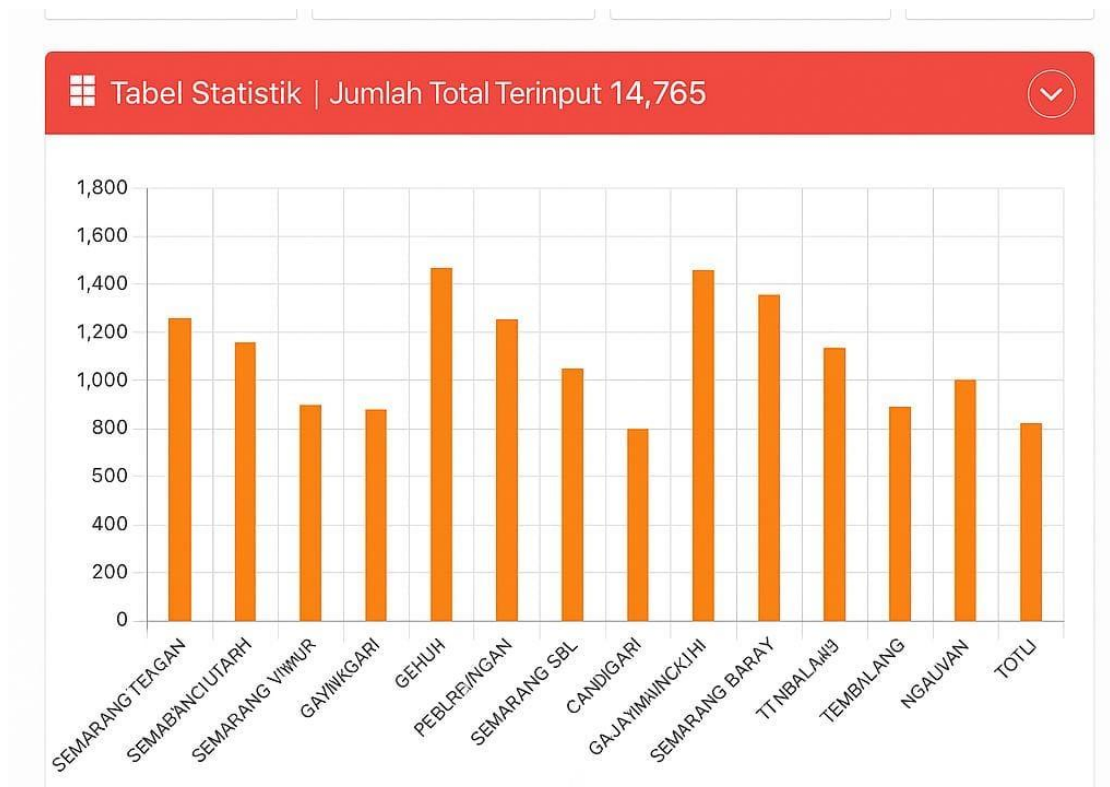
bernegara (Arkan Aziz Mubarak dan Sunny Umul Firdaus, 2020). pendidikan politik tersebut berfungsi sebagai pendukung berfungsinya sistem pemerintahan karena warga negara telah memiliki sikap politik. Sikap politik disini dapat dianggap sebagai kemampuan warga negara untuk memahami esensi serta pilar-pilar kekuasaan, sehingga dapat menjaga keberlangsungan sistem demokrasi yang telah berjalan. Tujuan utama dari pendidikan politik ini yaitu bagaimana menjadi masyarakat yang mengerti dan paham terhadap pentingnya berpolitik dan memahami apa itu politik yang sebenarnya.

PDI Perjuangan bisa dikatakan partai yang paling tertib dan taat peraturan AD/ART PDI Perjuangan. Misal dalam pemilihan ketua partai mulai dari ranting, PAC, DPC sampai pusat dilakukan pemilihan, artinya pemilihan ketua ini tidak ditunjuk langsung oleh siapapun melainkan melalui pemilihan kandidat. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan atau kecemburuan di dalam partai. Pak Kadarlusman atau Pak Pilus selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan kota Semarang mengatakan :

“kalau kita berbicara pendidikan politik ada yang namanya Pandu Juang dan Komunitas Juang yang dibentuk oleh DPD Provinsi yang di ikuti oleh DPC PDI Perjuangan. Kalau di kota semarang ada beberapa macam kita kumpulkan diberi pemahaman dan pengetahuan mengenai perpolitikan, bagaimana cara mempengaruhi masyarakat mengajak dengan cara yang baik, memberikan solusi bagi masyarakat ketika terjadi permasalahan, jadi ketika menjadi kader atau anggota tidak boleh diam, kita harus melihat secara langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini secara tidak langsung merupakan sebuah pendidikan politik”.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan berbagai macam model secara tidak langsung memberikan pengaruh kuat terhadap masyarakat. Tidak hanya melalui pendidikan-pendidikan formal namun melalui kegiatan-kegiatan sosial, diskusi dan lain-lain. Namun sebelum itu kader dan anggota diberi pemahaman tentang politik dan pemahaman agar ketika terjun langsung kepada masyarakat agar ketika terjadi permasalahan didalam masyarakat anggota yang ditugaskan untuk terjun kepada masyarakat paham ketika ada pertanyaan atau ada keluhan dari masyarakat.

Gambar 4.1 Data Kader DPC PDI Perjuangan Kota Semarang



Data diatas adalah data anggota DPC PDI Perjuangan kota Semarang dalam 2 tahun terakhir yaitu mencapai 14.765 anggota dan nilai ini sangat terpaut jauh dengan anggota yang sudah mengikuti pendidikan politik di tingkat DPC ataupun di tingkat Pratama karena hanya mencapai angka 1725. Angka ini sangat terpaut jauh apabila kita melihat jumlah kader PDI Perjuangan di Kota Semarang yang notabenenya sangat banyak dengan capaian tersebut terdapat ketimpangan kader dalam pendidikan politik yang diselenggarakan oleh DPC PDIP Perjuangan kota Semarang. Seharusnya dari pihak DPC mempunyai terobosan untuk menarik minat para anggotanya supaya dapat mengikuti pendidikan politik yang diselenggarakan oleh DPC agar kader yang nantinya turun ke masyarakat mempunyai bekal yang cukup supaya dapat menyampaikan visi misi PDI Perjuangan kepada masyarakat dan dapat menjadi representasi dari PDI perjuangan itu sendiri.

Dengan menjalin konsolidasi di berbagai level, mulai dari DPC ranting hingga anak ranting, melaksanakan diskusi politik, kampanye politik, seminar politik, serta pendidikan politik PDI Perjuangan, hal ini disampaikan kepada organisasi profesi, baik yang sudah tertata maupun yang belum tertata, dari golongan masyarakat, pedagang kecil, pengrajin di sektor informal, dan lainnya. Proses pengajaran dan

pembelajaran dilakukan secara teratur, namun ini juga adalah elemen dari pendidikan politik ketika mendekati pemilihan umum. PDI Perjuangan secara berkala memberikan pelatihan politik kepada anggotanya. Anggota ini nantinya akan berinteraksi langsung kepedamasyarakat. Keinginan partai supaya tetap menjalankan salah satu fungsi dari pembentukan partai politik untuk menjalankan pelatihan politik, dan hal ini telah terbukti. Hasil dari pendidikan politik yang dapat dilihat secara langsung adalah bahwa PDI Perjuangan tetap masih menjadi partai yang dipercaya oleh masyarakat.

Upaya PDI Perjuangan saat menjelaskan kepada rakyatnya guna menjadi masyarakat yang memiliki semangat juang dan berpikir kritis terhadap partai dan isu-isu bangsa ini pasti melibatkan strategi serta usaha yang telah dilaksanakan demi mencapai visi dan misi partai. Inisiatif untuk memberi pemahaman atau mengubah nilai-nilai menjadi bagian dari partai tentunya bertujuan agar masyarakat memiliki semangat juang, ketekunan, dan loyalitas yang tinggi. Selain itu, pendidikan politik itu digunakan untuk meningkatkan pemahaman perpolitikan dan pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, peran PDI Perjuangan Kota Semarang ini sebagai alat untuk penyambung atau menjadi jembatan kepentingan masyarakat untuk memberikan pemahaman khususnya kondisi sosial politik di Kota Semarang maupun di Indonesia. Didik Sugeng, salah satu anggota BMI (Banteng Muda Indonesia) sayap PDI Perjuangan Kota Semarang mengatakan :

“banyak upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota Semarang dalam hal pendidikan politik salah satunya sekolah kader, seminar-seminar, kami juga pernah mengadakan seminar gratis pemahaman politik di kecamatan atau anak ranting yang ada di Kota Semarang.”

Upaya pendidikan politik di Kota Semarang tidak hanya memberikan pemahaman-pemahaman saja, namun bagaimana aksinya atau penerapannya dalam kehidupan kita. Pendidikan politik juga tidak hanya dilakukan melalui forum ada banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Adelia Azahra salah satu staff DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, ia mengatakan :

“pendidikan politik yang pasti memberikan ilmu dan pemahaman mengenai perpolitikan di Indonesia itu bagaimana, tapi disini tidak hanya membahas mengenai politik saja, ada banyak hal, dan disini mempunyai tugasnya masing-masing, ada yang fokus dalam hal ekonomu, sosial, dan lain-lain. tapi yang paling utama itu ya pemahaman politik”.

Sebelum pendidikan politik ini disampaikan kepada masyarakat, anggota dan kader partai harus paham terlebih dahulu mengenai politik yang berada di Indonesia, bagaimana berpolitik yang baik dan apa pentingnya politik dan peduli terhadap kondisi sosial politik yang berada di Indonesia. Dalam menyampaikan pendidikan politik PDI Perjuangan menggunakan metode dan penyampaian sebagai berikut :

1. Materi pendidikan politik

Materi yang dipaparkan dalam pendidikan politik kepada para kader dan pengurus partai lebih fokus pada penguatan dan pengembangan program-program partai itu sendiri, penguatan komitmen serta dedikasi para kader, serta meningkatkan kualitas dan kemampuan mereka untuk berpikir jauh ke depan. Namun, di dalam kegiatan pendidikan politik juga membahas mengenai posisi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap orang sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan konstitusi negara. Hal ini disampaikan oleh pak Untung Sudjarno pada saat wawancara di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Selain itu, beliau juga mengatakan :

“kami sebagai sebagai anggota dan kader PDI Perjuangan dididik agar menjadi kader yang baik dan berpolitik dengan baik agar masyarakat percaya kepada kita, bagaimana masyarakat mau percaya kalau yang ada di dalam sistem saja tidak berperilaku dengan baik. Tidak munafik memang yang namanya partai itu butuh yang namanya kekuasaan, namun dalam mendapatkan kekuasaan tersebut dengan menggunakan cara yang baik dan benar sesuai dengan konstitusi.”

PDI Perjuangan dalam memberikan materi itu berbasis dengan kurikulum partai, hal tersebut ditekankan kepada kader-kader mudan dan sayap partai. Untuk muatan materinya antara lain materi Ideologi Partai yang mana memuat bagaimana ideologi marhaenisme, sosialisme dan pancasila sebagai ideologi bangsa, sejarah kemerdekaan, kemudian materi tentang lembaga pemerintahan entah itu lembaga eksekutif, yudikatif dan lain-lain. terkait hal tersebut kegiatan itu ada agenda rutin entah sabulan sekali atau dua bulan sekali tergantung yang mengisi materi. Biasanya yang mengisi materi itu sendiri kader yang menjadi anggota dewan atau kader yang sudah senior.

Pendidikan politik ini dimulai dari anggota dan kader partai terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada masyarakat dan sebelum dilakukan penyampaian kepada masyarakat pengurus atau anggota partai yang ada di masing-masing wilayah termasuk Kota Semarang melakukan konsolidasi terlebih dahulu sebelum terjun ke masyarakat. Aksinya adalah partai mengunjungi masyarakat atau memberikan ruang kepada masyarakat. Partai mengarahkan kepada kader untuk lebih peka terhadap situasi yang terjadi didalam masyarakat dan terjun langsung kepada masyarakat. Pendidikan politik bagi kader PDI Perjuangan ada beberapa jenis yaitu formal dan non formal. Vio Lita Angelina salah satu kader PDI Perjuangan Kota Semarang mengatakan

“waktu kita memberikan materi seperti seminar, talk show kita berikan materi power point agar sebelum mereka menerima materi sudah ada gambaran terlebih dahulu dan biasanya kita mengundang narasumber dibidangnya.”

Jadi dalam memberikan materi, PDI Perjuangan Kota Semarang benar-benar dilaksanakan secara terstruktur dan narasumber yang menyampaikan materi benar-benar paham dibidangnya. Materi kaderisasi yang diberikan dibagi menjadi dua, yang mana berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan, yakni yang pertama adalah materi yang membahas khusus mengenai ideologi, hal itu bersifat pokok atau utama terdiri dari Indonesia Menggugat Tahun 1930, Mencapai Indonesia Merdeka Tahun 1933, Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, Membangun Dunia Kembali 1960, Nawaksara Tahun 1966, dan Pidato Ketua Umum Pada Kongres. Kedua adalah mengenai Materi Pengajaran Khusus Ideologi yang bersifat pendukung terdiri dari Kapitalisme Bangsa sendiri Tahun 1932, Amanat Presiden Soekarno Tahun 1959, Amanat Presiden Soekarno Tahun 1960, Deklarasi Ekonomi Tahun 1963, dan Marhenisme adalah Teori Perjuangan Tahun 1965.

2. Metode pendidikan

Metode pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuang adalah dengan menggunakan pendidikan formal dan pendidikan non formal. Metode pendidikan ini didalam forum dilakukan berbagai macam, yaitu diskusi,

outbond, ceramah, tugas serta praktik penyampaian pendidikan politik kepada masyarakat. Sedangkan pendidikan non formal yaitu pendidikan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat maupun kader, misal secara langsung dengan mengadakan forum diskusi atau yang lainnya, secara tidak langsung bisa melalui media sosial atau artikel.

3. Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan dari partai politik dalam memberikan pelajaran mengenai politik bagi anggotanya dan pengurusnya adalah untuk memperkuat solidaritas politik yang berfungsi untuk menjaga dan merawat keutuhan bangsa, memberikan pengetahuan mengenai peran, tugas, hak, dan kewajiban partai politik, serta meningkatkan kemampuan anggotanya dan pengurus. Tujuan dari partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada publik adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam berinteraksi di masyarakat, serta dalam konteks berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan diadakannya pendidikan politik ini akan meningkatkan keterlibatan politik dari anggota, pengurus partai, dan masyarakat luas. Tujuan utama dari pendidikan politik ini yaitu bagaimana menjadi masyarakat yang mengerti dan paham terhadap pentingnya berpolitik dan memahami apa itu politik yang sebenarnya.

Tujuan utama pendidikan politik PDI Perjuangan yaitu jangan sampai mati tetap harus ada kadernya sehingga PDI Perjuangan menjadi alat perjuangan dengan cara harus memberikan pemahaman politik serta memberikan ajaran ideologi partai agar tetap mampu bersaing, ketika mampu bersaing dengan partai lain, akan lebih mudah mendapatkan kekuasaan dan otomatis akan memiliki pengaruh dan perjuangan tadi tidak sia-sia. Hal tersebut disampaikan oleh Yosi Yonardo dalam wawancara.

“untuk tujuan utama pendidikan politik di Kota Semarang sudah sering saya sampaikan, bahwa pendidikan politik ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang luas agar ketika mereka bertemu atau datang kepada masyarakat itu tidak kosong, jadi mereka itu sudah siap dengan membawa nilai dan harapan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Kota Semarang”. Kata Rifki salah satu staff PDI Perjuangan Kota Semarang.

Pendidikan politik ini memang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap partai, Hal tersebut disampaikan oleh salah satu staf DPC PDI Perjuangan Kota Semarang saat wawancara. Dalam wawancara, Pak Untung mengatakan :

“Tanpa adanya pendidikan politik baik bagi internal partai maupun kepada masyarakat maka perpolitikan di Indonesia akan kacau, bagaimana tidak orang internalnya saja nggak paham bagaimana dengan masyarakatnya. Maka dari itu, pendidikan politik ini penting saya sampaikan agar mereka ini paham apa itu politik, tujuannya apa dan sebagainya. Bagi kami hal itu sangat besar pengaruhnya, karena dengan pendidikan politik kami dapat mensosialisasikan pentingnya pengetahuan mengenai situasi dan kondisi politik.”

Artinya pendidikan politik ini memang sangat penting bagi partai maupun bagi masyarakat. Tanpa adanya pendidikan politik, seperti yang disampaikan oleh Pak Untung, kondisi politik ini akan kacau karena tidak ada pemahaman terhadap masyarakat, maka ketika hal itu terjadi tidak ada yang mengawasi. Salah satu peran masyarakat adalah sebagai pengawas secara tidak langsung bagi kondisi politik di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya pendidikan politik baik bagi kader partai maupun bagi masyarakat. Selain itu, partai melaksanakan pendidikan politik sesuai dengan perintah Undang-undang No. 2 tahun 2011 dan AD/ART PDI Perjuangan.

Pendidikan politik Partai dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penanaman dan penyebaran ajaran Bung Karno
- b. pendalaman pemahaman terhadap Pancasila, UUD NKRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik
- d. pendidikan kaderisasi anggota Partai secara berjenjang dan berkelanjutan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Yosi Yonardo dalam wawancara, ia mengatakan bahwa

“pendidikan politik di Kota Semarang melalui beberapa kegiatan diantaranya melalui sekolah kader dan partai, seminar, konsolidasi dan secara non formal, misal kegiatan sosial, penanaman pohon atau penghijauan, kegiatan bersih-bersih lingkungan dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk pendidikan yang ada.”

Konsep pendidikan politik di Kota Semarang ada beberapa macam, hal ini

dilakukan untuk mempermudah dan agar tidak monoton. Pak Kadarlusman atau yang biasa disapa dengan Pak Pilus selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Semarang dan sekaligus sebagai ketua DPRD Kota Semarang mengatakan :

“di Kota Semarang (PDI Perjuangan) pendidikan politik ini hampir mirip DPC di kota lain ada yang namanya sekolah partai, diklat, seminar. Tidak hanya itu saja kami juga ada yang namanya pendidikan politik non formal seperti pertemuan-pertemuan, kegiatan sosial dan sebagainya.”

Didalam pendidikan politik, PDI Perjuangan Kota Semarang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai politik saja, namun didalamnya diberi pemahaman mengenai ideologi partai agar mereka paham dan memiliki pedoman kebangsaan, hal tersebut disampaikan oleh Pak Pilus saat wawancara.

“pendidikan politik PDI Perjuangan selalu memberikan pemahaman ideologi partai yaitu pancasila, dengan berlandaskan pemikiran dari bung karno yang berwawasan kebangsaan. Ini penting apalagi bagi generasi muda sekarang agar mereka paham seperti apa pancasila itu, perjuangan pemikiran Soekarno terhadap bangsa dan negara, dan memiliki pemikiran yang kritis terhadap bangsa ini.”

Berdasarkan uraian diatas, PDI Perjuangan Kota Semarang memberikan upaya yang sedemikian rupa agar dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap pendidikan politik itu sendiri. Pendidikan politik dilakukan tidak hanya melalui forum formal namun juga dilakukan secara non formal. Artinya dalam memberikan pemahaman bisa dilakukan dimana saja dan dalam bentuk kegiatan yang beragam. Selain itu, partai juga melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU No. 2 tahun 2011 dan sesuai tujuan partai dalam AD/ART PDI Perjuangan. Hal ini juga sesuai dengan teori pendidikan politik yang mana pendidikan politik adalah proses untuk belajar, tidak hanya untuk menambah informasi dan wawasan saja. Namun, lebih dalam untuk kemampuan mawas diri secara kritis, menentukan bagaimana sikap yang benar dan melatih kelincahan berpikir maupun perbuatan. Sebagai manusia, tugas utama kita adalah terus belajar, dalam hal apapun contohnya hidup rukun bersama dalam suatu ikatan kemasyarakatan dari yang kecil sampai ke ikatan kebangsaan dan kenegaraan (Kartono, 2009).

B. Pendidikan Formal

Pendidikan politik Partai berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penanaman dan penyebarluasan ajaran Bung Karno
- b. pendalaman pemahaman terhadap Pancasila, UUD NKRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pendidikan kaderisasi anggota Partai secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pendidikan politik kepada pengurus partai tersebut guna meningkatkan kapasitas pengurus dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang dengan beberapa cara, yang mana pendidikan politik tersebut disesuaikan dengan beberapa metode yang di rasa mampu maksimal serta lebih mengefisiensikan pengeluaran pendanaan dari dilaksanakannya pendidikan politik tersebut. Yosi Yonardo mengatakan

*“jadi kalau ngomong soal konsep pendidikan politik seperti didalam partai setelah rekrutmen diberikan pemahaman mengenai partai, ideologi partai, pemahaman politik, baru setelah tahap selanjutnya berbicara mengenai pendidikan politik yang biasanya lebih ke pendidikan politik untuk pemilu, yang mana kader-kader tersebut siap untuk bersaing didalam pemilu atau biasanya ada pembekalan.”*Hal yang sama juga disampaikan oleh Vio Lita Angelina, Kader PDI Perjuangan Kota Semarang :

“untuk konsep pendidikan disini kita mulai dari awal struktural kita kuatkan mindset dan ideologinya terlebih dahulu, baru nanti kita terjun langsung kepada masyarakat, jadi konsepnya top down dari atas kebawah, karena tidak mungkin belum dibekali apa-apa kita terjun langsung kan.”

Jadi konsep pendidikan ini dimulai dari paling dasar, pemahaman partai, ideologi dan sebagainya. Karena memang hal tersebut sangat penting bagi anggota dan kader seblum terjun langsung kepada masyarakat. Setelah itu baru diberi pemahaman bagaimana kondisi sosial politik, menjadi kader yang baik ketika ada yang mencalonkan untuk menjadi anggota legislatif dan sebagainya. Pendidikan politik PDI Perjuangan dibagi menjadi dua yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal.

1. Kaderisasi Partai

Kaderisasi merupakan pendidikan jangka panjang untuk memaksimalkan potensi kader dengan cara mentransmisikan nilai-nilai dan ideologi yang ada didalam partai. Kaderisasi adalah suatu keharusan yang ada didalam organisasi agar tetap eksis meskipun banyak organisasi baru yang muncul. Kaderisasi partai adalah pendidikan politik yang paling mendasar dan paling penting untuk dilaksanakan. Kaderisasi dilaksanakan secara berjenjang dan terpadu di bawah pengawasan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melaksanakan pengkaderan sebagai metode untuk merekrut anggota, demi kesinambungan perjuangan regenerasi yang tentu akan berdampak pada regenerasi kepemimpinan di suatu negara.

Tidak berhasilnya partai politik dalam melakukan pengkaderan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap partai tersebut, dan salah satu tandanya adalah meningkatnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya (golput) saat pemilu. Kaderisasi tersebut tidak hanya sebatas pada pengurus partai, namun juga dilaksanakan kepada setiap anggota partai khususnya para calon legislatif yang ditawarkan oleh partai kepada rakyat untuk mewakili di badan legislatif. Kaderisasi di PDI Perjuangan memiliki tingkatannya masing-masing yaitu, Kaderisasi tingkat Pratama, Kaderisasi tingkat madya dan Kaderisasi tingkat Utama

Tabel 4.1 Pendidikan Politik

Pendidikan Politik			
Kategori	DPC	DPD	DPP
Formal	Pratama	Madya	Utama
Non Formal	Bersih Lingkungan	Penanaman Pohon	Sekolah Kader Partai
Insidental	Road show	Konsolidasi	Konsolidasi Nasional

a. Kaderisasi Tingkat Pratama

Kaderisasi tingkat pratama merupakan pendidikan politik yang dilakukan secara formal. Kaderisasi ini diselenggarakan bagi anggota baru atau kader yang bergabung dengan PDI Perjuangan tingkat DPC. Kegiatan ini dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan yang dirancang serta diawasi langsung oleh DPD PDI Perjuangan. Kaderisasi merupakan langkah awal dalam proses kaderisasi

berjenjang di PDI Perjuangan. Tujuan diadakan kegiatan kaderisasi ini memberikan pemahaman dasar tentang ideologi partai, struktur organisasi, program kerja, serta mempersiapkan untuk menjadi kader yang lebih aktif dan lebih loyal kepada partai. Untung Sudjarno pada saat wawancara di DPC PDI Perjuangan mengatakan :

“kami sebagai sebagai anggota dan kader PDI Perjuangan dididik agar menjadi kader yang baik dan berpolitik dengan baik agar masyarakat percaya kepada kita, bagaimana masyarakat mau percaya kalau yang ada di dalam sistem saja tidak berperilaku dengan baik. Tidak munafik memang yang namanya partai itu butuh yang namanya kekuasaan, namun dalam mendapatkan kekuasaan tersebut dengan menggunakan cara yang baik dan benar sesuai dengan konstitusi.”

Penyampaian materi kepada kader yang ikuti dalam pendidikan kader pratama lebih berfokus kepada pemantapan dan pengembangan program partai, meningkatkan loyalitas kepada partai dan peningkatan kualitas kader serta kemampuan berpikir secara kritis. Namun didalam materi tersebut anggota atau kader yang mengikuti pendidikan ini juga diberikan materi pemahaman ideologi partai, yang mana ideologi tersebut merupakan ideologi pancasila, soekarno dan marhaenisme. Hal tersebut bertujuan agar kembali lagi menjadi kader yang berwawasan nasionalis dan memiliki wawasan kebangsaan serta setia kepada NKRI.

Pendidikan politik melalui kaderisasi ini menjadikan kader lebih loyal kepada partai dan memiliki jiwa nasionalis. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa PDI Perjuangan memiliki basis masa yang cukup banyak dan menjadi partai terbesar di Indonesia terlepas dari sejarah pembentukan partai dan ketua umum PDI Perjuangan. Maka pendidikan semacam ini menjadi penting bagi partai agar memiliki anggota dan kader yang setia dan loyal serta memiliki jiwa nasionalis.

Pendidikan Kader Pratama yang dilakukan di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman ideologi, kesadaran terhadap organisasi, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta meningkatkan kesadaran politik demi mencapai tujuan bersama. Selain itu, diharapkan setiap kader partai dapat menjalankan ideologi perjuangan untuk

melindungi diri dari praktik-praktik pragmatisme baik dalam politik maupun dalam aspek kehidupan lainnya.

Gambar 4.2 Kaderisasi Pratama



b. Kaderisasi Tingkat Madya

Kaderisasi madya PDI Perjuangan, atau Pendidikan Kader Madya (PKM), adalah bagian dari sistem kaderisasi internal partai yang bertujuan untuk membangun kesadaran ideologi, organisasi, dan politik pada kader. PKM juga berfungsi sebagai penanaman ideologi dan nilai-nilai partai untuk mencegah pragmatisme politik dan membentengi kader dari berbagai pengaruh negatif. Kaderisasi tingkat madya ini diselenggarakan oleh PDI Perjuangan tingkat DPD Provinsi dan diikuti oleh kader DPD PDI Perjuangan yang diawasi oleh DPP PDI Perjuangan.

Pada tahap ini, peserta program kaderisasi akan memperoleh pelatihan tentang komunikasi politik, interaksi pribadi yang terkait dengan mobilisasi massa, taktik kampanye, serta pengembangan kebijakan. Berbeda dengan fase kaderisasi awal yang lebih menekankan pada penguatan ideologi partai dan konsolidasi partai, tingkat ini lebih fokus pada aspek yang lebih luas, seperti manajemen untuk meraih kemenangan dalam pemilu. Inti dari tahap madya dalam kaderisasi adalah untuk menguasai tata kelola partai politik di level provinsi, memahami proses pembuatan kebijakan di tingkat provinsi,

kemampuan untuk melakukan lobbying, serta menguasai berbagai aspek pemilihan dan strategi kemenangan di provinsi (Yulianto, 2024).

Materi yang disampaikan pada kaderisasi madya sangat berbeda dengan kaderisasi pratama. Pada tingkat ini materi yang disampaikan lebih kompleks dan lebih berfokus pada manajemen partai dan proses berjalannya partai serta bagaimana menjadi partai yang tetap berfokus pada orientasi partai dan strategi partai dalam pemenangan pemilu. Tidak hanya itu saja, mengutip dari komentar Djarot Syaiful Hidayat (Ketua DPP bidang ideologi) pada saat pengarahan Kaderisasi Madya Jawa Barat, beliau mengatakan

“Jadi pada tingkat madya ini fokusnya lebih ke penguatan ideologis, kedisiplinan. Karena sebagai partai pelopor, PDI Perjuangan merupakan partai yang ideologis dan dikelola secara modern. Sebagai partai pelopor juga, PDI Perjuangan menekankan pada disiplin, disiplin ideologis, organisasi, dan gerakan”

Kaderisasi ini tidak hanya diikuti oleh kader saja namun juga diikuti oleh kader yang mencalonkan sebagai anggota legislatif. Maka dari itu, pendidikan kader madya ini menjadi pendidikan yang sangat penting, inti dari pendidikan ini adalah berfokus pada penguatan ideologi, kedisiplinan kader dan strategi pemenangan partai didalam pemilu.

c. Kaderisasi Tingkat Utama

Kaderisasi Utama PDI Perjuangan merupakan jenjang pendidikan politik tingkat akhir atau pendidikan politik kader yang berada di DPP PDI Perjuangan. Didalam kaderisasi utama materi yang disampaikan sudah tidak hanya mengenai ideologi partai saja, namun lebih kompleks daripada kaderisasi yang sebelumnya. Kaderisasi tingkat utama ini berfokus pada penguatan basis masa, kemampuan kepemimpinan dan bagaimana untuk menggerakkan massa. Selain itu, juga didalam kaderisasi utama ini memberikan materi sistem politik yang berjalan di Indonesia, kondisi sosial politik, ekonomi di Indonesia, konsolidasi dan sebagainya. Pak Untung Sudjarno, kader DPC PDI Perjuangan Kota Semarang mengatakan :

“Kaderisasi utama ini sudah berbeda lagi pembahasannya, disana materi yang disampaikan lebih rinci, ada materi sistem politik, jadi bagaimana perpolitikan di Indonesia berjalan, kondisi sosial ekonomi politik dan sebagainya, bagaimana cara menggerakkan

massa, strategi menjadi pemimpin yang baik dan sebagainya. Jadi itu disana lebih luas lagi pembahasannya, tapi tetap mau pendidikan politik tingkat apapun, PDI Perjuangan selalu menyampaikan ideologi partai.”

Kader utama diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ideologi partai, memiliki jiwa kepemimpinan, dan memiliki kemampuan mengorganisir massa. Selain itu, kader utama juga memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan partai serta dapat mengimplementasikan program-program kebijakan partai ditingkat pusat maupun daerah. Artinya pembahasan disini menjadi lebih luas, karena nantinya yang akan menjadi penerus kepemimpinan dan mencakup seluruh Indonesia.

Pendidikan politik yang dilakukan melalui kaderisasi partai dengan target masyarakat luas bersifat audiensial. Aktivitas ini dilakukan dengan cara mengumpulkan masa, melakukan interaksi politik, menyampaikan materi yang berkaitan dengan metode pemikiran Bung Karno, serta membahas tupoksi dalam berpolitik di dalam masyarakat, dan juga tujuan kemenangan partai dalam pemilihan umum melalui seminar, diskusi maupun kegiatan formal lainnya. Sekolah Kader Partai mempunyai tujuan guna membentuk kesadaran kader Partai yang berkarakter, ideologi, organisasi, politik, dan kesadaran lingkungan, serta pemahaman terhadap aspek-aspek sosial ekonomi kemasyarakatan, mendidik, mencerdaskan, dan menyiapkan calon pemimpin Partai, bangsa, dan negara dan menanamkan ajaran-ajaran Bung Karno.

Tabel 4.2 Pendidikan Politik Formal

Kaderisasi PDI Perjuangan				
Kategori	Orientasi	Bahan Ajar	Pelaksana	Objek
Pratama	pemahaman dasar tentang ideologi partai struktur organisasi, program kerja, serta mempersiapkan untuk menjadi kader yang lebih aktif dan lebih loyal kepada partai	Materi, Buku saku, Pemateri	DPC PDI Perjuangan	Anggota DPC PDI Perjuangan
Madya	berfokus pada penguatan ideologi, kedisiplinan kader dan strategi kemenangan partai didalam pemilu.	Materi, Buku saku, Pemateri	DPD PDI Perjuangan	Kader DPC dan DPD
Utama	penguatan basis masa, kemampuan kepemimpinan dan bagaimana untuk menggerakkan massa	Materi, Buku saku, Pemateri	DPP PDI Perjuangan	Kader PDI Perjuangan Yang Sudah mengikuti Pendidikan Politik Madya

2. Sekolah Partai

Dalam konteks kebutuhan politik partai di samping pelatihan kader, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang juga mendirikan Sekolah Partai. Sekolah Partai berfungsi untuk menyelenggarakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan guna menanamkan ideologi partai kepada kader yang akan diberi tanggung jawab sebagai pejabat politik partai. Ketika menjelang pemilu, para calon pejabat khususnya di kota Semarang mereka menggunakan slogan “Mewujudkan Semarang Hebat”. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu staff DPC PDI Perjuangan Kota Semarang saat wawancara. Sekolah Partai merupakan komponen dari proses rekrutmen terbuka untuk kepemimpinan eksekutif wilayah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, dengan penetapan rekomendasi dari DPP Partai. Ideologi partai diwujudkan dalam pelaksanaan Sekolah Partai untuk calon pemimpin daerah.

Kepentingan sekolah partai memiliki peranan yang signifikan, terutama untuk para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan bertanding dalam Pilkada. Seorang calon kepala daerah serta calon wakilnya perlu diingatkan kembali mengenai tujuan mereka dalam menjadi pemimpin daerah, meskipun mereka adalah kader yang sudah lama terlibat dalam partai. Sebagai individu yang telah lama berkiprah di dunia politik, tidak hanya teori yang perlu dikuasai, tetapi juga penerapan dan pelaksanaan kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan agar ketika dibutuhkan oleh masyarakat kader atau anggota ini sudah siap untuk terjun langsung ke masyarakat. Perencanaan sekolah partai sebagai institusi pendidikan politik yang diadakan oleh DPP PDI Perjuangan, berfungsi sebagai langkah strategis untuk mencetak kepemimpinan eksekutif di tingkat daerah, dimulai dengan proses rekomendasi dari DPP Partai untuk calon eksekutif daerah yang diusung ataupun yang mendapatkan dukungan. Setelah rekomendasi tersebut, semua calon kepala daerah harus menjalani pendidikan di sekolah partai.

Dalam AD/ART disebutkan bahwa Sekolah Partai menyelenggarakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan yang ditujukan untuk:

- a. Anggota Partai
- b. Kader Partai
- c. Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD
- d. Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah
- e. Calon pejabat politik dan calon pejabat publik lainnya.

Dalam hal ini, sekolah partai yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan bisa diikuti oleh seluruh anggota dan kader partai. Namun, ketika menjelang pemilu para calon anggota legislatif, pejabat daerah dan lainnya diwajibkan untuk mengikuti sekolah partai. Karena didalam sekolah partai, para calon peserta pemilu dari fraksi PDI Perjuangan akan dibekali ilmu dan materi-materi berkaitan dengan kepemimpinan didalam birokrasi. Hal ini disampaikan oleh Untung Sudjarno saat wawancara, beliau mengatakan :

“semua calon anggota legislatif atau peserta pemilu PDI Perjuangan diwajibkan untuk mengikuti sekolah partai. Karena mereka akan dibekali ilmu dan arahan dari partai, agar menjadi pemimpin yang selalu memntingkan masyarakat, pemimpin yang baik dan selalu setia kepada partai.”

Penjelasan diatas bahwa sekolah partai memang diadakan oleh PDI Perjuangan

yang bisa diikuti oleh semua anggota dan kader. Namun diwajibkan dan mengharuskan kader PDI Perjuangan yang menjadi calon peserta pemilu untuk ikut sekolah partai tersebut. Karena disana akan dibekali dan mendapat arahan dari partai bagi semua calon. Artinya pendidikan politik PDI Perjuangan memang sangat terorganisir. Hal ini bisa dilihat dari sistem pendidikan politik yang ada didalam partai.

Gambar 4.3 Sekolah Partai



3. Konsolidasi

Konsolidasi yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Semarang untuk para kader dan anggota partai berlangsung dalam bentuk konsultasi dan/atau rapat DPC, Pimpinan Anak Cabang (PAC), Ranting, serta Anak Ranting. Selain itu, juga diadakan pertemuan dengan melibatkan petugas partai yang bekerja di legislatif maupun eksekutif. Kegiatan konsolidasi untuk kader dan anggota partai diselenggarakan secara rutin, sekitar tiga hingga empat kali sebulan, atau dapat dilakukan dengan cara yang lebih informal sesuai kondisi masyarakat umum. Sementara itu, materi dari konsolidasi untuk masyarakat umum berfokus pada isu-isu kebijakan publik, pembangunan publik, dan pengumpulan aspirasi dari masyarakat (Dokumen Kegiatan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang).

Kegiatan ini dilaksanakan di Gor Jatidiri Semarang pada tanggal 25 agustus 2024. Hasil dari konsolidasi ini yaitu

- a. mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera
- b. mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan negara yang dihormati oleh dunia
- c. solid dalam memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Materi pendidikan yang diberikan biasanya berkaitan dengan penguatan pemahaman nilai-nilai dasar dan ideologi partai, serta konstitusi negara dan pemerintahan secara umum. Pemberian materi biasanya dilakukan oleh ketua DPC maupun pengurus DPC yang memiliki sertifikat guru kader. Guru Kader sendiri merupakan sekolah politik khusus di PDI-P yang menghasilkan kader utama yang memiliki kualifikasi mengajar kepada kader-kader lainnya. Pendidikan yang didapat dari pertemuan konsolidasi tersebut oleh tiap pengurus ranting untuk kemudian dibagikan kepada anggota pengurus lain di tingkat struktur ranting serta disampaikan juga kepada pengurus anak ranting melalui pertemuan non-formal pengurus ranting dan anak ranting.

Gambar 4.4 Konsolidasi



C. Pendidikan Non Formal

Pendidikan nonformal merupakan metode pembelajaran di luar sistem pendidikan resmi yang bisa diorganisasikan dengan cara yang sistematis dan berjenjang, contohnya seperti kursus, pelatihan, serta kelompok belajar. Tujuan dari jenis pendidikan ini adalah untuk melengkapi atau bahkan mengisi kekosongan dari pendidikan formal, sekaligus memberikan keahlian dan pengetahuan praktis yang sesuai dengan kebutuhan tertentu. Didalam PDI Perjuangan Kota Semarang pendidikan politik juga diselenggarakan secara non formal. Pendidikan politik non formal tidak hanya ditujukan kepada anggota maupun kader, tetapi juga bagi masyarakat. Hal ini dilakukan oleh PDI Perjuangan guna memberikan pemahaman bagi masyarakat dan melatih kader yang baru saja menerima pendidikan politik formal untuk turun langsung kepada masyarakat. Dalam pendidikan politik ini tidak hanya membahas mengenai politik saja, namun kondisi sosial ekonomi, budaya dan sebagainya. Berikut merupakan pendidikan non formal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan.

1. Road Show

Road show ini adalah anggota PDI Perjuangan Kota Semarang mendatangi masyarakat dengan bertanya kepada masyarakat secara langsung, bagaimana kondisi saat ini. Didalam road show ini PDI Perjuangan juga mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, misalnya kondisi ekonomi yang kurang baik yang nantinya akan dibantu oleh PDI Perjuangan Kota Semarang. Selain itu, program ini juga sebagai forum diskusi antara partai dengan masyarakat setempat dalam melaksanakan pendidikan politik.

Didalam hasil Road Show pada tahun 2022, Pak Kadar Lusman selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Semarang mengatakan bahwa PDI Perjuangan harus tegak lurus menjalankan intruksi partai dan mematuhi AD/ART partai, bagaimana caranya PDI Perjuangan tetap eksis dan bisa bersaing dengan partai lain agar PDI Perjuangan menjadi partai yang kuat dengan cara-cara yang bersih. Hal tersebut disampaikan pada saat acara road show di gedung Graha Sari, Kecamatan Gayamsari.

Kegiatan ini salah satu bentuk pendidikan politik non formal yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan Kota Semarang sebagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat. Kegiatan road show ini dengan mendatangi masyarakat di setiap daerah di Kota Semarang yang dapat diikuti oleh masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi di masyarakat kota Semarang. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik. Artinya kegiatan ini sebagai salah satu kegiatan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat dan menjadi kegiatan diskusi antara kader partai dengan masyarakat. Kader akan menanyakan bagaimana kondisinya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan kepada partai. Kegiatan ini bisa menjadikan partai dan masyarakat menjadi lebih dekat tanpa adanya batasan.

Gambar 4.5 Road show



2. Penghijauan

Kegiatan penghijauan ini dilaksanakan di Kelurahan Mangkang, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Kegiatan ini dihadiri oleh :

- a. Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang,
- b. KSB PAC Se Kota Semarang,
- c. Pengurus PAC dan Ranting Kecamatan Tugu,
- d. Pengurus PAC Kecamatan Ngaliyan

e. masyarakat Umum.

Dr. H. Hendrar Prihadi, SE, MM selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang mengatakan tujuan diadakannya kegiatan Pendidikan Politik bagi Struktural dan Kader Tentang Arti Pentingnya Penghijauan dan Kebersihan, Untuk Terciptanya Lingkungan Hidup Yang Lestari adalah sarana yang digunakan untuk melestarikan lingkungan, supaya lingkungan kembali asri dan sehat tanpa adanya pencemaran (Dokumen kegiatan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang).

Dengan diadakanya penghijauan diharapkan supaya dapat menurunkan suhu suatu tempat, banyaknya oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang akan membuat lingkungan lebih segar, teduh, nyaman, dan asri. Dengan diadakanya penghijauan sebagai sarana yang diupayakan guna pencegahan terhadap terjadinya bencana banjir dan erosi tanah. Dengan banyaknya pohon besar dan tinggi, maka terciptanya serapan-serapan untuk menampung air hujan. Kemudian air hujan tersebut mampu untuk diubah menjadi air tanah yang bisa memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk lainnya. Kita sebagai kader juga harus ikut merawat dan menjaga lingkungan agar terlihat bersih dan nyaman supaya terciptanya lingkungan hidup yang lestari.

Gambar 4.6*Penghijauan*



3. Bersih Lingkungan

Kegiatan bersih lingkungan yang diadakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Semarang ini dilaksanakan di Manyaran, Semarang Barat. Hal ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Konversi Sampah Nasional 2024. Dalam kegiatan ini, dihadiri oleh seluruh anggota dan kader DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, Pimpinan dan Anggota Fraksi, pengurus PAC dan Ranting Kecamatan Semarang Barat, dan KSB PAC Kota Semarang dan masyarakat sekitar. Kadar Lusman, SE, MM selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menyimpulkan hasil kegiatan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) DPC PDI Perjuangan Kota Semarang mengadakan kegiatan bersih-bersih sampah;
- b. Kegiatan ini melibatkan Pengurus DPC, Anggota Fraksi, Pengurus PAC, Pengurus Ranting Kecamatan Semarang Barat, dan Komandan Te Bintang Dua;
- c. Kita sebagai kader PDI Perjuangan harus bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan Sumber Daya Alam, termasuk hutan, air, udara, dan keanekaragaman hayati.

Kegiatan bersih lingkungan ini selain untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, juga sebagai bentuk kepedulian PDI Perjuangan Kota Semarang terhadap lingkungan sekitar. Dalam kegiatan bersih lingkungan ini, PDI Perjuangan Kota Semarang mengajak masyarakat kota semarang untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Tidak hanya itu saja, PDI Perjuangan Kota Semarang juga mengadakan briefing bagi kader dan masyarakat terkait pendidikan politik.

Artinya pendidikan politik ini penting agar mereka paham dengan bagaimana politik itu berjalan, tujuan dari politik dan sebagainya. Pendidikan politik juga tidak hanya membahas mengenai perpolitikan atau pemerintahan saja, namun didalam pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan khususnya Kota Semarang mengajak masyarakat untuk memahami dan melihat bagaimana kondisi sosial politik maupun ekonomi sekarang dan bagaimana sikap kita sebagai masyarakat. Selain itu, disetiap pendidikan politik, PDI Perjuangan selalu menyampaikan ajaran dan ideologi yang digunakan yaitu ideologi soekarno dan pancasila, yang mana ajaran tersebut secara tidak langsung mengajarkan kita untuk saling membantu dan saling gotong royong.

Pendidikan politik PDI Perjuangan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memiliki visi dan misi yang tegas. Tanpa adanya visi dan misi yang tegas, usaha partai akan menjadi tidak berarti. Saat ini, fokus dari pendidikan politik PDI Perjuangan hanya untuk menguatkan pemahaman masyarakat mengenai kondisi politik di sekitar mereka. Pengetahuan yang lebih mendalam tentang situasi politik yang telah disampaikan akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik. Pendidikan politik PDI Perjuangan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, mempunyai tujuan dan janji yang jelas. Tanpa tujuan dan janji yang jelas, upaya partai akan kehilangan makna. Saat ini, perhatian utama dalam pendidikan politik PDI Perjuangan adalah untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang keadaan

politik di sekeliling mereka. Pemahaman yang lebih baik mengenai keadaan politik yang telah dijelaskan akan berdampak pada tingkat keterlibatan politik. Maka dari itu, PDI Perjuangan Kota Semarang terus berupaya memberikan pemahaman terkait kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya kepada masyarakat salah satunya melalui pendidikan politik. Hal tersebut sesuai dengan AD/ART PDI Perjuangan yang ikut serta mencerdaskan bangsa dan bernegara kepada masyarakat.

Melalui pengajaran tentang politik, diharapkan warga komunitas dapat mengenali dan memahami prinsip-prinsip serta ideologi yang ada dalam sistem politik suatu partai agar mereka bisa terlibat. Secara umum, pengajaran politik adalah kegiatan yang dirancang untuk menanamkan nilai politik dengan tujuan yang jelas dan terstruktur, baik secara resmi maupun tidak resmi, secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya agar masyarakat memiliki wawasan, sikap, dan kemampuan dalam bidang politik. Pendidikan politik dapat dipandang sebagai sarana untuk menyebarkan ide-ide politik dengan tujuan akhir membangun kesadaran politik di kalangan warga negara. Warga negara yang memiliki kesadaran politik adalah individu yang memahami hak dan kewajibannya, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap tahap pembangunan bangsa.

Keberadaan pendidikan politik sangat penting, yang utama adalah untuk mengedukasi generasi muda saat ini yang akan menjadi penerus bangsa, baik sebagai pemilih yang bijak dalam pemilihan umum maupun sebagai individu yang akan terpilih untuk memimpin negara (Kartono, 2009). Pendidikan politik merupakan pengetahuan dimana kemampuan mengetahui sosok dan citra masyarakat, serta perkembangannya dan citra budayanya sendiri, sehingga mampu:

- a. orang menyadari kelebihan diri sendiri
- b. mengenali karakter bangsanya dan negaranya sendiri
- c. mempunyai percaya diri yang besar
- d. hilangkan rasa rendah diri dan bergantung terhadap negara lain.

Mereka sangat memahami karakter bangsa negaranya, nilai bangsanya, tujuan negara, falsafah hidup (hal ini tertuang dalam Pancasila) dijadikan tolak ukur dalam memperjuangkan tujuan berbangsanya, yaitu hidup secara sejahtera.

Gambar 4.7 Bersih Lingkungan



D. Hambatan

PDI Perjuangan Kota Semarang dalam melaksanakan pendidikan politik tidak selalu berjalan lancar, ada beberapa hal menjadi hambatan dalam melakukan pendidikan politik yaitu keterbatasan waktu dan kurangnya partisipasi masyarakat. Waktu yang dilaksanakan terkadang bertabrakan dengan agenda lain atau bertepatan dengan hari-hari besar. Pelaksanaan pendidikan politik memang dilaksanakan dengan waktu yang kurang pas atau waktu yang terbatas hal tersebut terkadang menjadi kendala bagi kader yang akan mengikuti pendidikan politik karena memang mereka juga punya jadwal lain. Untuk partisipasi masyarakat biasanya dalam pendidikan politik non formal, karena masyarakat yang kurang paham dengan acara atau kegiatan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, terkadang masyarakat mengira kegiatan tersebut adalah sebuah kampanye politik. Selain itu, waktu yang menjadi kendala partisipasi masyarakat untuk turut ikut serta dalam kegiatan pendidikan politik karena mereka yang bekerja, atau ada kegiatan lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, PDI Perjuangan Kota Semarang menyesuaikan waktu pelaksanaan pendidikan politik agar berjalan sebagaimana mestinya dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran yang mudah bagi masyarakat seperti melalui instagram, facebook dan melalui website. PDI Perjuangan Kota Semarang senantiasa melakukan evaluasi terhadap kadernya, bagaimana mereka melaksanakan tugasnya setelah menerima pendidikan politik dari PDI Perjuangan.

Tidak hanya bagi kader yang baru saja, namun semua kader akan di evaluasi melalui pertemuan-pertemuan.

Evaluasi tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari DPP akan mengevaluasi DPW dan DPC, bagaimana kinerjanya, program-program yang dibangun atau dibuat dilaksanakan atau tidak, jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan teguran langsung dari pimpinan pusat. Begitupun DPC akan melihat kinerja dari anak cabang dan pengurus ranting. Selain itu PDI Perjuangan juga mengevaluai anggota dan kadernya yang menjabat di pemerintahan. Di Kota Semarang sendiri setiap satu bulan sekali mengadakan pertemuan dengan PAC, pengurus ranting, dan anggota legislatif yang menjadi kader PDI Perjuangan.

BAB V

TRANSMISI IDEOLOGI PDI PERJUANGAN

A. Fokus Transmisi Ideologi

PDI Perjuangan memiliki ideologi atau landasan dasar dari Soekarno yaitu Marhaenisme. Dalam merangka wujudkan cita-cita nasional, PDI Perjuangan mempunyai prinsip bahwa demokrasi yang akan menempatkan kepemimpinan pusat partai sebagai gerakan sentral, yaitu suatu kepemimpinan yang dipimpin oleh ideologi Pancasila 1 Juni 1945, kepemimpinan yang mengandung komando satu arah dan satu tujuan yaitu masyarakat yang adil dan makmur, dan suatu kepemimpinan yang sesuai dengan kepribadian bangsa yaitu gotong royong. Ideologi marhaenisme merupakan sebuah jati diri dari sebuah ide atau gagasan, narasi dan tingkah laku politik Soekarno. Konsep marhaenisme sendiri yang interpretasi dari personifikasi rakyat proletar yang hanya memiliki sebidang tanah kemudian menggarap sendiri, alatnya punya dia sendiri dan hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarganya. Kedua, marhaenisme diambil dari teori dialektika yang dikembangkan oleh Hegel dan didukung oleh Karl Marx dan F. Engels, maka analisa marxisme menjadi kunci utama untuk masuk dan membedah lebih dalam mengenai marhaenisme Soekarno. PDI Perjuangan di anggap sebagai partai politik yang memiliki kaitan dan keterkaitan yang kuat dengan ideologi marhaenisme (Syam, 2021).

Marhaenisme dapat dikatakan ada dari alam berpikir Bung Karno yang progresif dan revolusioner. Hal ini tidak akan lepas dari latar belakang Bung Karno yang memang dari kecil sudah memiliki ketertarikan terhadap politik dan suka berorasi. Jiwa kepemimpinan dan kharismanya juga tidak bisa diragukan lagi, karena di beberapa kesempatan, Sukarno bisa memobilisasi massa dan membakar semangat juang mereka yang memiliki cita-cita, yang ingin diwujudkan oleh Bung Karno. Dengan kepribadian yang dimiliki oleh Sukarno tersebut, maka tidak membutuhkan waktu yang lama bagi seorang Sukarno untuk dapat menjadi salah satu tokoh pergerakan yang sangat penting. Pemikiran pemikiran Sukarno yang bernuansa radikal-revolusionernya banyak dipengaruhi oleh para tokoh nasional, salah satunya adalah Tjokroaminoto yang menjadi guru sekaligus mentornya saat berpolitik. Dari sosok Tjokroaminoto Bung Karno belajar mengenai fungsi politik sebagai alat guna mensejahterakan rakyat, dan dari Tjokroaminoto juga Bung Karno mempelajari mengenai pergerakan modern dan bagaimana guna dapat memanfaatkan media massa

untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan (Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiyati Aisyah dan Deni Candra, 2022).

Marhaenisme sebagai yang menjadi salah satu konsep pemikiran perjuangan bangsa dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat untuk dapat mencapai kebahagiaan tentunya tidak bisa dipisahkan dari unsur-unsur komponennya, yaitu asas-asas yang kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sistem ideologi marhaenisme. Adapun asas-asas unsur tersebut meliputi: *radikal-revolusioner*, *machtvorming*, massa-aksi, non-kooperasi, *self-help & self-reliance*. Radikal-revolusioner yaitu perubahan berdasarkan kehendak zaman yang begitu cepat.

Dalam konteks perjuangan, maka radikal revolusioner merupakan perubahan yang mendesak, ingin mengakhiri masa imperialismedan dasalah yang ada kaitanya dengan penindasan dan mempertimbangkann hak-hak masyarakat. Radikalismedalam kekuatan perjuangan suatu bangsa memang sangat penting. Radikal ditafsirkan untuk tidak diukur, dan hal yang diukur setengahnya harus dianggap serius dan tulus. Jadi Sukarno selalu menekankan mengenaipentingnya orang-orang yang radikal-revolusioner. Karena tidak ada perjuangan di negara-negara Indonesia yang mempunyai kolonialisem tanpa adanya orang-orang yang memiliki sikap radikal-revolusioner.

Didalam AD/ART PDIPerjuangan, yang benar-benar mencakup beberapa poin, yaitu di dalam Bab III Pasal 9 huruf c yang berbunyi "*mencetak kader Partai yang memiliki semangat pelopor, serta memahami dan mampu menguraikan serta menerapkan ajaran Bung Karno dalam konteks kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.*"Kemudian pada keempat Pasal 10 huruf c yang berbunyi "*menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*" Huruf d yang berbunyi "*menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai*". Huruf g yang berbunyi, mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa." Serta secara eksplisit tugas dan fungsi partai di bab VII Pasal 86 huruf a yang berbunyi "*menanamkan dan menyebarluaskan ajaran Bung*

Karno.”

Pemahaman mengenai ideologi partai di PDI Perjuangan selalu dilakukan didalam pendidikan politik. Pemahaman ideologi partai dilakukan agar anggota dan kader paham terhadap apa itu ideologi, konsep dan penerapannya didalam kehidupan sehari-hari. Pak Kadarlusman atau pak pilus mengatakan :

“PDI Perjuangan itu menganut ideologi Pancasila dengan berlandaskan pemikiran dari Soekarno, kami selalu menerapkan pemikiran tersebut dan memberikan pemahaman bagi kader dan anggota didalam pendidikan politik, karena PDI Perjuangan itu kan partainya wong cilik (partai yang merakyat). Hal tersebut lahir dari pemikiran Soekarno yaitu Marhaenisme, Marhaenisme itu kan artinya wong cilik atau rakyat biasa, maka dari itu ini penting kita berikan kepada kader agar kita bisa merakyat tanpa ada batas meskipun kita sudah menjadi anggota dewan atau menjadi pejabat pemerintah dan wajib kita memperjuangkan rakyat.” Hal yang sama juga dikatakan oleh Pak Untung salah satu kader DPC PDI Perjuangan, beliau mengatakan :

“ideologi yang ada didalam PDI Perjuangan selalu kita sampaikan kepada anggota dan kader PDI, selalu disampaikan ketika didalam pendidikan politik, agar apa, agar kita tidak lupa dengan perjuangan dari Soekarno yang mencetuskan gagasan Pancasila dan konsep Marhaen. Karena negara kita adalah negara demokrasi, Pancasila sebagai landasan negara sekaligus landasan PDI Perjuangan dan konsep Marhaen dari Soekarno itu kan berusaha memperjuangkan kepentingan masyarakat, konsep Marhaen sebagai wong cilik, menjadikan pemikiran ini memiliki konsep gotong royong bersama membangun bangsa dan negara.”

Bagi PDI Perjuangan transmisi ideologi ini penting dilakukan agar kita selalu menjadi anggota dan kader yang merakyat senantiasa memperjuangkan masyarakat kritis terhadap bangsa dan negara. Selain itu konsep ideologi dari pemikiran Soekarno yang berlandaskan Ideologi Pancasila bertujuan membangun dan mencapai cita-cita bangsa sesuai dengan isi dari UUD dan Pancasila dan bergotong royong bersatu seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun sebuah negara. Hal tersebut merupakan tujuan dari adanya transmisi ideologi didalam pendidikan politik.

PDI Perjuangan selalu memberikan pengetahuan ideologi partai, selain untuk memberikan pemahaman, ideologi ini menjadi sebuah landasan berpikir bagi masyarakat, untuk kader menjadi sebuah landasan perjuangan dan agar selalu ingat terhadap sejarah bangsa Indonesia, bagaimana negara ini dibentuk, perjuangan para

pahlawan dan sebagainya. Transmisi ideologi adalah proses penyampaian ideologi dari satu orang ke orang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Ideologi yang dimaksud mencakup ide-ide politik, agama, kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik-praktik terkaitnya. Hal itu disampaikan oleh Pak Pilus saat wawancara.

“pendidikan politik PDI Perjuangan selalu memberikan pemahaman ideologi partai yaitu Pancasila, dengan berlandaskan pemikiran dari Bung Karno yang berwawasan kebangsaan. Ini penting apalagi bagi generasi muda sekarang agar mereka paham seperti apa Pancasila itu, perjuangan pemikiran Soekarno terhadap bangsa dan negara, dan memiliki pemikiran yang kritis terhadap bangsa ini.”

Pemahaman mengenai marhaenisme untuk landasan perjuangan yang dimiliki oleh seluruh kader dan para anggota, di mana setiap individu sadar bahwa nilai-nilai marhaenisme menjadi pedoman partai untuk dapat menjadi arah gerak dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ini menjelaskan tentang pemahaman kognitif para kader dan anggota. Masing-masing kader dan para anggota pagambetul bahwa asas partai yang tertuang di dalam AD/ART merupakan Pancasila 1 Juni 1945, dengan nilai-nilai marhaenisme sebagai inti dari lima prinsip dasar dalam Pancasila 1 Juni 1945. Inti tersebut terdapat dalam prinsip marhaenisme, yang mencakup sosionasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan yang Maha Esa.

Transmisi ideologi partai kepada kader dan anggotanya agar mereka memiliki kesadaran dalam berpolitik dan pentingnya politik. Dalam hal ini anggota dan kader partai diharapkan memiliki pemahaman dan dapat menyampaikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya berpolitik. Didalam ideologi PDI Perjuangan yang menganut Marhaenisme Soekarno memiliki pelajaran bahwa dalam memerdekakan Indonesia tidak hanya melalui berperang, namun juga melalui berpolitik, seperti jalur diplomasi dan sebagainya. Belajar dari sejarah perjuangan Soekarno dalam membantu untuk memerdekakan bangsa Indonesia tidak mudah harus melalui serangkaian kejadian yang sangat rumit.

Penyampaian ideologi ini dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui beberapa cara, diantaranya melalui pendidikan politik kader, sekolah partai, konsolidasi, road show dan lainnya. Hal ini dilakukan oleh PDI Perjuangan agar para kader dan anggota memiliki pemahaman mengenai ideologi yang dianut oleh PDI Perjuangan, dan mereka nantinya akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa dari ideologi ini kita bisa belajar dan tahu bahwa pentingnya berpartisipasi dalam politik. Saat ini banyak sekali khususnya yang muda bahwa mereka kurang sadar akan pentingnya partisipasi

politik. Hal ini menjadi PR bagi partai untuk memberikan pemahaman bagi generasi muda saat ini akan pentingnya partisipasi politik. Maka dari itu, melalui transmisi ideologi ini yang disampaikan melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh partai untuk memberikan pemahaman kesadaran politik di Indonesia.

Bentuk transmisi yang diberikan oleh PDI Perjuangan kepada kader anggota maupun masyarakat juga bermacam-macam. Ada beberapa macam bentuk transmisi yang diberikan, pertama, nilai-nilai dari ajaran soekarno dan marhaenisme yang mana dari ideologi tersebut memberikan sebuah nilai yang sangat penting, mulai dari semangat perjuangan, prihatin terhadap kondisi bangsa, sampai pentingnya politik sebagai bentuk perjuangan. Nilai-nilai ideologi ini mengingatkan bahwa marhaenisme lahir dari pemikiran soekarno yang melihat rakyat jelata yang susah payah untuk menghidupi keluarganya. Maka dari itu PDI Perjuangan sering disebutkan dengan partainya *wong cilik*, karena memang lahir dari situ. Yang kedua, sikap atau perilaku yang mencontohkan segala macam perjuangan dan hak-hak masyarakat serta menentang ketidakadilan. Yang ketiga, pemahaman dasar yang diberikan ketika pendidikan kader pratama, sebagai pengingat untuk senantiasa mengingat perjuangan soekarno untuk membangun sebuah bangsa tidak hanya melalui perang angkat senjata, namun melalui jalur diplomasi politik antar negara.

B. Proses Transmisi Ideologi

Proses penyampaian ideologi PDI Perjuangan dilakukan melalui berbagai cara. Hal ini dilakukan agar kader atau anggota PDI Perjuangan paham dengan ideologi dari PDI Perjuangan. Tidak hanya itu saja, penyampaian ideologi ini menjadikan kader partai memiliki jiwa nasionalis, berbangsa dan bernegara, serta tidak lupa dengan sejarah. Hal tersebut juga tercantum didalam AD/ART PDI Perjuangan yang mana disebutkan penyampaian ideologi partai dilakukan dalam beberapa bentuk pendidikan politik yaitu didalam kaderisasi, sekolah politik dan sekolah partai, konsolidasi partai dan bentuk-bentuk pendidikan politik partai yang lainnya baik secara formal maupun non formal. Didalam pendidikan politik disebutkan bahwa materi pokok yang diberikan harus memuat ideologi partai dari gagasan dan pemikiran Soekarno, karena memang ideologi PDI Perjuangan adalah pancasila dan marhaenisme soekarno. Transmisi ideologi didalam PDI Perjuangan dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

1. Pendidikan

Melalui sistem pendidikan formal dan non-formal, ideologi dapat disampaikan kepada generasi muda. PDI Perjuangan Kota Semarang dalam menerapkan dan memberikan pemahaman ideologi politik disampaikan melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh partai, baik pendidikan politik secara formal maupun non formal. Proses transmisi ideologi dengan melalui pendidikan formal partai yaitu antara lain :

- a. Kaderisasi, kaderisasi partai juga dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan tingkatannya. Mulai dari paling dasar sampai pendidikan paling tinggi. Kaderisasi PDI Perjuangan ada 3 yaitu,
 1. Kaderisasi Pratama, merupakan pendidikan politik tingkat paling dasar yang diselenggarakan dan diikuti oleh anggota baru DPC PDI Perjuangan.
 2. Kaderisasi Madya, kaderisasi ini merupakan pendidikan politik tingkat menengah, yang dilaksanakan oleh DPD PDI Perjuangan
 3. Kaderisasi Utama, kaderisasi ini merupakan pendidikan politik jenjang akhir atau tingkat atas. Pelaksanaan kaderisasi utama diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan, biasanya diikuti oleh kader-kader yang sudah lama berada di pengurusan PDI Perjuangan dan para calon legislatif.

Ideologi partai yang dijadikan landasan utama berpolitik diterapkan di dalam materi pendidikan itu sendiri. Proses pendidikan dalam kelas ini tidak terbatas pada tingkat kabupaten, melainkan juga mencapai ditingkatan padukuhan di desa. Adanya cabang di tingkat bawah yang bertujuan guna mengaktifkan proses pengkaderan, sehingga akan membuat potensi untuk membentuk mesin partai yang sangat efektif.

2. Sekolah Partai, sekolah partai yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan bisa diikuti oleh seluruh anggota dan kader partai. Namun, ketika menjelang pemilu para calon anggota legislatif, pejabat daerah dan lainnya diwajibkan untuk mengikuti sekolah partai. Karena didalam sekolah partai, para calon peserta pemilu dari fraksi PDI Perjuangan akan dibekali ilmu dan materi-materi berkaitan dengan kepemimpinan didalam birokrasi.

3. Konsolidasi, Konsolidasi yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Semarang untuk para kader dan anggota partainya, berlangsung dalam bentuk konsultasi dan/atau rapat DPC, Pimpinan Anak Cabang (PAC), Ranting, serta Anak Ranting. Selain itu, juga diadakan pertemuan dengan melibatkan petugas partai yang bekerja di legislatif maupun eksekutif.

Uraian diatas merupakan pendidikan secara formal, berikut merupakan pendidikan dilakukan secara non formal,

1. Road Show, didalam road show ini PDI Perjuangan juga mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, misalnya kondisi ekonomi yang kurang baik yang nantinya akan dibantu oleh PDI Perjuangan Kota Semarang. Selain itu, program ini juga sebagai forum diskusi antara partai dengan masyarakat setempat dalam melaksanakan pendidikan politik.
2. Penghijauan, tujuan diadakannya kegiatan Pendidikan Politik Bagi Struktural dan Kader Tentang Arti Pentingnya Penghijauan dan Kebersihan, Untuk Terciptanya Lingkungan Hidup Yang Lestari adalah sebuah sarana guna melestarikan lingkungan, supaya lingkungan kembali asri dan sehat tanpa adanya pencemaran lingkungan. Dengan diadakanya penghijauan diharapkan dapat menurunkan suhu di suatu suatu tempat yang karena sudah berkurangnya ruang terbuka hijau, banyaknya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan akan membuat lingkungan lebih segar, teduh, nyaman, dan asri. Penghijauan juga digunakan sebagai sarana untuk pencegahan terhadap terjadinya bencana banjir dan erosi tanah.
3. Bersih Lingkungan, sebagai kader PDI Perjuangan harus bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan Sumber Daya Alam, termasuk hutan, air, udara, dan keanekaragaman hayati.
4. Media, selain melalui pendidikan politik, PDI Perjuangan juga memberikan pemahaman ideologi partai melalui media yaitu menggunakan media sosial seperti instagram, facebook dan melalui website

5. Organisasi, PDI Perjuangan juga memiliki badan-badan atau sayap partai seperti Pemuda Juang, Kader penggerak dan lain-lain. Didalam lembaga tersebut juga selalu diberikan pemahaman atau penyampaian kepada kader terutama bagi pemudanya, agar selalu menerapkan bagaimana ideologi itu berjalan dan penerapannya dalam kehidupan.

Proses transmisi ideologi juga tercantum didalam AD/ART PDI Perjuangan yang mana disebutkan penyampaian ideologi partai dilakukan dalam beberapa bentuk pendidikan politik yaitu didalam kaderisasi, sekolah politik dan sekolah partai, konsolidasi partai dan bentuk-bentuk pendidikan politik partai yang lainnya baik secara formal maupun non formal. Didalam pendidikan politik disebutkan bahwa materi pokok yang diberikan harus memuat ideologi partai dari gagasan dan pemikiran Soekarno, karena memang ideologi PDI Perjuangan adalah pancasila dan marhaenisme soekarno.

Andi sebagai anggota RAPDEM organisasi sayap PDI Perjuangan mengatakan *“Kalau soal ideologi soekarnoisme marhaenisme dan sosialisme yang menjadi ideologi PDI Perjuangan, kita biasanya ajarkan soal definisi umum itu dulu. Tapi karena memang kader-kader kita kan bervariasi tidak hanya SI, tapi ada yang SMA, bahkan ada dari tukang ojek juga dan lain-lain. Biasanya kita ceritakan perjalanan soekarno dari masih muda kemudian sampai lahirnya ideologi ini sebagai bentuk perjuangan sampai bangsa ini merdeka. Sehingga ini akan menjadi semangat perjuangan bagi kader-kader khususnya kader muda untuk melanjutkan cita-cita bangsa.”*

Artinya dalam memberikan pemahaman ideologi bagi kader tidak langsung bagaimana ideologi itu berjalan sesuai dengan tujuan partai, namun pemahaman tersebut dimulai dari sejarah terciptanya ideologi tersebut. Perjalanan awal terbentuknya ideologi pemikiran soekarno sampai ideologi sebagai perjuangan dan landasan partai dan penerapannya bagi kehidupan yang menjadi semangat perjuangan dan ikut serta dalam membangun cita-cita bangsa.

Vio Lita Angelina mengatakan *“kalau konsep ideologi PDI Perjuangan yang pasti kita memberikannya salah satunya melalui pendidikan politik yang menyediakan materi-materi terkait ideologi PDI Perjuangan, soekarnoisme, marhaenisme itu memang salah satu yang diajarkan dan sumbernya dari tingkatan yang atas seperti DPD dan DPP untuk diberikan kepada yang dibawahnya.”*

Marhenismedapat muncul dari semangat progresif dan revolusioner Bung Karno. Ini tidak dapat dipisahkan dari latar belakang Bung Karno, seorang anak yang sangat antusias terhadap politik dan senang memberikan pidato. Semangat kepemimpinan dan karisma tidak diragukan lagi juga ketika Soukarno mengatur massa beberapa kali dan dapat memicu antusiasme untuk mengikuti mimpi-minpi dari Sukarno. Karena kepribadian Sukarno tersebut, tidak butuh waktu lama bagi Sukarno untuk menjadi salah satu tokoh gerakan terpenting. Pemikiran revolusioner radikalnya sangat dipengaruhi oleh kepribadian nasional di mana Tjocroaminoto adalah guru politiknya. Melalui Tjokroaminoto, Bung Karno belajar fungsi politik sebagai alat untuk mengsejaterakan orang, dan dari Tjokroaminoto, Bung Karno juga belajar mengenai gerakan modern dan cara menggunakan media massa untuk mengekspresikan ide –ide serta gagasannya secara tertulis (Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiyati Aisyah dan Deni Candra, 2022).

Jadi, transmisi ideologi PDI Perjuangan memang sudah diatur didalam peraturan AD/ART PDI Perjuangan yang mewajibkan setiap kegiatan pendidikan politik harus memberikan materi tentang ideologi partai yang sudah jelas dan digagas oleh pemikiran soekarno, karena PDI Perjuangan sendiri lahir dari beberapa partai nasionalis yang memiliki ideologi soekarno. Hal ini sesuai dengan teori bahwa Transmisi ideologi adalah proses penyampaian ideologi dari satu orang ke orang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Ideologi yang dimaksud mencakup ide-ide politik, agama, kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik-praktik terkaitnya. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan didalam AD/ART mengenai kewajiban setiap kader didalam pendidikan politik harus mencakup materi ideologi partai baik pendidikan secara formal maupun nonformal.

C. Tujuan Transmisi Ideologi

Penyampaian ideologi atau transmisi ideologi PDI Perjuangan tidak hanya sebatas penyampaian dan pemahaman bagi anggota dan kader. Namun transmisi ideologi disampaikan agar para kader dan anggotanya dapat menerapkan dalam kehidupan. Transmisi ideologi PDI Perjuangan memiliki tujuannya sendiri.

1. Membangun Kesadaran Politik

Transmisi ideologi partai kepada kader dan anggotanya agar mereka memiliki kesadaran dalam berpolitik dan pentingnya politik. Dalam hal ini anggota dan kader partai diharapkan memiliki pemahaman dan dapat menyampaikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya berpolitik. Didalam ideologi PDI Perjuangan yang menganut Marhaenisme Soekarno memiliki pelajaran bahwa dalam memerdekakan Indonesia tidak hanya melalui berperang, namun juga melalui berpolitik, seperti jalur diplomasi dan sebagainya. Belajar dari sejarah perjuangan soekarno dalam membantu untuk memerdekakan bangsa Indonesia tidak mudah harus melalui serangkaian kejadian yang sangat rumit. Hal ini juga sudah tercantum dalam tujuan AD/ART PDI Perjuangan. Marhaenisme sebagai salah satu konsep ideologi perjuangan bangsa guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat agar mencapai kebahagiaan tentunya tidak bisa dipisahkan dari unsur-unsur penyusunnya, yaitu asas-asas yang kemudian menjadi satu kesatuan sistem ideologi marhaenisme.

Penyampaian ideologi ini dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui beberapa cara, diantaranya melalui pendidikan politik kader, sekolah partai, konsolidasi, road show dan lainnya. Hal ini dilakukan oleh PDI Perjuangan agar para kader dan anggota memiliki pemahaman mengenai ideologi yang dianut oleh PDI Perjuangan, dan mereka nantinya akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa dari ideologi ini kita bisa belajar dan tahu bahwa pentingnya berpartisipasi dalam politik. Saat ini banyak sekali khususnya yang muda bahwa mereka kurang sadar akan pentingnya partisipasi politik. Hal ini menjadi PR bagi partai untuk memberikan pemahaman bagi generasi muda saat ini akan pentingnya partisipasi politik. Maka dari itu, melalui transmisi ideologi ini yang disampaikan melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh partai untuk memberikan pemahaman kesadaran politik di Indonesia.

2. Mewujudkan Masyarakat Yang Adil dan Makmur

PDI Perjuangan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur salah satunya melalui transmisi ideologi. PDI Perjuangan merupakan partai nasionalis yang menganut ideologi marhaenisme soekarno yang mana ideologi tersebut lahir dari sejarah yang tidak mudah bagi soekarno untuk

memerdekakan bangsa Indonesia agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Karena ideologi marhaenisme ini lahir dari sebuah perjuangan rakyat biasa agar dapat mendapatkan kehidupan yang adil dan makmur. Selain itu, konsep dari ideologi marhaenisme ini yaitu gotong royong. Maka dalam penerapannya, PDI Perjuangan ingin mengimplementasikan konsep ini didalam kehidupan masyarakat, agar dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Konsep gotong royong ini karena dari sejarah marhaenisme soekarno yang mana agar dapat mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat yang makmur harus bekerja sama dan bergotong royong sesama masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. Konsep gotong royong ini dianut oleh PDI Perjuangan sampai sekarang dan menganggap bahwa PDI Perjuangan merupakan partainya *wong cilik* yang artinya PDI Perjuangan merupakan partai milik masyarakat Indonesia yang siapapun boleh masuk menjadi anggota dan kader PDI Perjuangan. Maka dari itu, salah satu tujuan transmisi ideologi ini adalah menjadikan masyarakat yang adil dan makmur menggunakan konsep gotong royong sesama masyarakat Indonesia. Hal ini juga sudah tercantum dalam tujuan AD/ART PDI Perjuangan. Marhaenisme sebagai suatu konsep ideologi perjuangan bangsa dalam merealisasikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat supaya tercapainya kebahagiaan, tentunya tidak dilepaskan dari adanya unsur-unsur penyusunnya, yaitu asas-asas yang kemudian menjadi satu kesatuan sistem ideologi marhaenisme.

Bagi PDI Perjuangan transmisi ideologi ini penting dilakukan agar kita selalu menjadi anggota dan kader yang merakyat senantiasa memperjuangkan masyarakat kritis terhadap bangsa dan negara. Selain itu konsep ideologi dari pemikiran Soekarno yang berlandaskan Ideologi Pancasila bertujuan membangun dan mencapai cita-cita bangsa sesuai dengan isi dari UUD dan Pancasila dan bergotong royong bersatu seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun sebuah negara. Hal tersebut merupakan tujuan dari adanya transmisi ideologi didalam pendidikan politik. Artinya dalam memberikan pemahaman ideologi bagi kader tidak langsung bagaimana ideologi itu berjalan sesuai dengan tujuan partai, namun pemahaman tersebut dimulai dari sejarah terciptanya ideologi tersebut. Perjalanan awal terbentuknya ideologi pemikiran soekarno sampai ideologi sebagai perjuangan dan landasan partai dan penerpannya bagi kehidupan yang

menjadi semangat perjuangan dan ikut serta dalam membangun cita-cita bangsa.

3. Mempertahankan Ajaran Soekarno

Marhaenisme dapat dikatakan ada dari semangat berpikir yang progresif dan revolusioner dari Bung Karno. Iniadak dapat lepas dari latar belakang Bung Karno yang seorang anak kecil yang sudah memiliki ketertarikan terhadap politik dan suka berorasi. Tidak ada keraguan dalam benak Bung Karno karena mempunyai jiwa kepemimpinan dan kharismanya yang tidak usah diragukan lagi, karena di beberapa peristiwa, Sukarno bisa mengkondisikan massa dan membakar semangat aksi yang menjadikanya bisa menyalurkan cita-cita mereka yang ingin diwujudkan oleh Bung Karno.

Didalam AD/ART PDI Perjuangan juga menyebutkan bahwa yaitu :

- a. Bab III Pasal 9 huruf c yang berbunyi *“mencetak kader Partai yang memiliki semangat pelopor, serta memahami dan mampu menguraikan serta menerapkan ajaran Bung Karno dalam konteks kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.”*
- b. Bagian Keempat Pasal 10 huruf c yang berbunyi *“menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”*
- c. Huruf d yang berbunyi *“menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai”.*
- d. Huruf g yang berbunyi, *“mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa.”*
- e. tugas dan fungsi partai di Bab VII Pasal 86 huruf a yang berbunyi *“menanamkan dan menyebarluaskan ajaran Bung Karno.”*

Jadi, salah satu tujuan transmisi ideologi jelas, juga sudah ada didalam

AD/ART PDI Perjuangan. Memang ajaran soekarno ini terlihat jelas memiliki tujuan yang baik, dengan konsepnya yaitu gotong royong, yang sekarang diusung oleh PDI Perjuangan. Hal tersebut menjadi landasan PDI Perjuangan untuk menjadi partai yang nasionalis dan dekat dengan masyarakat.

Transmisi ideologi PDI Perjuangan memang sudah diatur didalam peraturan AD/ART PDI Perjuangan yang mewajibkan setiap kegiatan pendidikan politik harus memberikan materi tentang ideologi partai yang sudah jelas dan digagas oleh pemikiran soekarno, karena PDI Perjuangan sendiri lahir dari beberapa partai nasionalis yang memiliki ideologi soekarno. Hal ini sesuai dengan teori bahwa Transmisi ideologi adalah proses penyampaian ideologi dari satu orang ke orang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Ideologi yang dimaksud mencakup ide-ide politik, agama, kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik-praktik terkaitnya. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan didalam AD/ART mengenai kewajiban setiap kader didalam pendidikan politik harus mencakup materi ideologi partai baik pendidikan secara formal maupun non formal.

Transmisi ideologi memang partai mewajibkan untuk selalu menyampaikan didalam setiap kegiatan, khususnya pendidikan politik baik secara formal maupun non formal yang termuat didalam materi pendidikan politik. Penyampaian ideologi harus jelas dan yang menyampaikan materi ideologi biasanya dari kader yang sudah lebih diatas tingkatannya atau kader yang menjadi seorang akademisi, namun tidak menutup kemungkinan kader yang baru bisa menjadi seorang pemateri jika mereka sudah benar-benar paham apa yang akan disampaikan, dalam konteks ini adalah penyampaian materi ideologi marhaenisme soekarno dan pancasila bagi PDI Perjuangan.

D. Evaluasi

PDI Perjuangan Kota Semarang senantiasa melakukan evaluasi terhadap kadernya, bagaimana mereka melaksanakan tugasnya setelah menerima pendidikan politik dari PDI Perjuangan. Tidak hanya bagi kader yang baru saja, namun semua kader akan di evaluasi melalui pertemuan-pertemuan. Evaluasi tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari DPP akan mengevaluasi DPW dan DPC, bagaimana kinerjanya, program-program yang dibangun atau dibuat dilaksanakan atau tidak, jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan teguran langsung dari pimpinan pusat. Begitupun DPC akan melihat kinerja dari anak cabang dan pengurus ranting. Selain

itu PDI Perjuangan juga mengevaluai anggota dan kadernya yang menjabat di pemerintahan. Di Kota Semarang sendiri setiap satu bulan sekali mengadakan pertemuan dengan PAC, pengurus ranting, dan anggota legislatif yang menjadi kader PDI Perjuangan. PDI Perjuangan Kota Semarang dalam melaksanakan pendidikan politik tidak selalu berjalan lancar, ada beberapa hal menjadi hambatan dalam melakukan pendidikan politik yaitu keterbatasan waktu dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, PDI Perjuangan Kota Semarang menyesuaikan waktu pelaksanaan pendidikan politik agar berjalan sebagaimana mestinya dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran yang mudah bagi masyarakat seperti melalui instagram, facebook dan melalui website.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik PDI Perjuangan Kota Semarang sesuai dengan peraturan yang ada didalam kongres PDI Perjuangan yang menghasilkan AD/ART PDI Perjuangan. Yang mana didalam AD/ART tersebut sudah dijelaskan bahwa pendidikan politik harus memuat materi ideologi partai yaitu ideologi pancasila dan marhaenisme seokarno. Ideologi tersebut disampaikan didalam pendidikan politik partai baik secara formal maupun non formal. Pendidikan politik juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Didalam Undang-undang tersebut memberikan definisi pendidikan politik sebagai sebuah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan dari partai politik dalam memberikan pelajaran mengenai politik bagi anggotanya dan pengurusnya adalah untuk memperkuat solidaritas politik yang berfungsi untuk menjaga dan merawat keutuhan bangsa, memberikan pengetahuan mengenai peran, tugas, hak, dan kewajiban partai politik, serta meningkatkan kemampuan anggotanya dan pengurus. Tujuan dari partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada publik adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam berinteraksi di masyarakat, serta dalam konteks berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan diadakannya pendidikan politik ini akan meningkatkan keterlibatan politik dari anggota, pengurus partai, dan masyarakat luas. Tujuan utama dari pendidikan politik ini yaitu bagaimana menjadi masyarakat yang mengerti dan paham terhadap pentingnya berpolitik dan memahami apa itu politik yang sebenarnya. Selain itu PDI Perjuangan juga mengevaluasi anggota dan kadernya yang menjabat di pemerintahan. Di Kota Semarang sendiri setiap satu bulan sekali mengadakan pertemuan dengan PAC, pengurus ranting, dan anggota legislatif yang menjadi kader PDI Perjuangan. PDI Perjuangan Kota Semarang dalam melaksanakan pendidikan politik tidak selalu berjalan lancar, ada beberapa hal menjadi hambatan dalam melakukan pendidikan politik yaitu keterbatasan waktu dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, PDI Perjuangan Kota Semarang menyesuaikan waktu

pelaksanaan pendidikan politik agar berjalan sebagaimana mestinya dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran yang mudah bagi masyarakat seperti melalui instagram, facebook dan melalui website.

Jadi, salah satu tujuan transmisi ideologi jelas, juga sudah ada didalam AD/ART PDI Perjuangan. Memang ajaran soekarno ini terlihat jelas memiliki tujuan yang baik, dengan konsepnya yaitu gotong royong, yang sekarang diusung oleh PDI Perjuangan. Hal tersebut menjadi landasan PDI Perjuangan untuk menjadi partai yang nasionalis dan dekat dengan masyarakat. Penyampaian ideologi ini dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui beberapa cara, diantaranya melalui pendidikan politik kader, sekolah partai, konsolidasi, road show dan lainnya. Hal ini dilakukan oleh PDI Perjuangan agar para kader dan anggota memiliki pemahaman mengenai ideologi yang dianut oleh PDI Perjuangan, dan mereka nantinya akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa dari ideologi ini kita bisa belajar dan tahu bahwa pentingnya berpartisipasi dalam politik.

PDI Perjuangan selalu memberikan pengetahuan ideologi partai, selain untuk memberikan pemahaman, ideologi ini menjadi sebuah landasan berpikir bagi masyarakat, untuk kader menjadi sebuah landasan perjuangan dan agar selalu ingat terhadap sejarah bangsa Indonesia, bagaimana negara ini dibentuk, perjuangan para pahlawan dan sebagainya. Transmisi ideologi adalah proses penyampaian ideologi dari satu orang ke orang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Ideologi yang dimaksud mencakup ide-ide politik, agama, kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik-praktik terkaitnya yang disampaikan didalam pendidikan politik baik secara formal maupun non formal. Memang dalam memberikan pemahaman atau pendidikan politik PDI Perjuangan dilakukan secara terstruktur mulai dari atas sampai bawah (*top down*) dan sesuai dengan AD/ART PDI Perjuangan yang ada.

jadi pendidikan politik memang benar-benar dilakukan oleh PDI Perjuangan secara berjenjang, namun pada kenyataannya transmisi ideologi yang dilakukan belum dilakukan secara serius pada prakteknya. hal ini dibuktikan dengan temuan peneliti bahwa seperti pengarsipan data, materi pendidikan politik kurang diperhatikan. pendidikan politik PDI Perjuangan memang dilakukan secara rutin dan berjenjang, namun transmisi ideologi yang diberikan masih kurang, karena hanya sebatas pengetahuan dan pembekalan umum. jadi tidak benar-benar memberikan materi secara mendalam mengenai ideologi partai itu sendiri, bukan pendidikan yang sifatnya ketat dalam memberikan pemahaman mengenai ideologi itu sendiri. artinya transmisi

ideologi dalam pendidikan politik PDI Perjuangan memang hanya sebatas pengetahuan umum mengenai ideologi partai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Eko Handoyo dan Puji Lestari. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahya : 10-15.
- Heywood, A. (2016). *Ideologi Politik* (Vol. I). Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 8-13.
- Kartono, K. (1996). *Pendidikan politik. Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju : 5-15
- Kartono, K. (2009). *PENDIDIKAN POLITIK : Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sutrisman, D. (2020). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan dan Mahasiswa*. Bandung: Guepedia Publisher.

Jurnal :

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan 1. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Alfian. (2009). *Ideologi dan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Benjamin Lee& Kim Knot. (2018). Ideological Transmision III : Political and Religius Organisation. *CREST : Center for Research and Evidance Security Threats* , 29.
- Budianto, R. (2017). Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, 5 (1), 96.
- Dewi, Radix Prima, dan Siti Nur Hidayah. 2019. “Metode Penelitian Kualitatif ‘Study Kasus.’” *Skripsi*.
- Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiyati Aisyah dan Deni Candra. (2022). Studi Analisis Konsep Ideologi Marhaenisme Soekarno Sebagai Asas Perjuangan Bangsa Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan* .
- Hasanah, Hasyim. 2017. “TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8 (1): 21-22.

- Hidayat, D. N. (2015). Pengaruh Ideologi Terhadap Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , 1-14.
- Husna, Asmaul, dan Yuhdi Fahrimal. 2021. "Pendidikan Politik: Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya" 3 (1): 85–100.
- Khusnul Catur Prasetya, dan Zamroni Ishaq. 2024. "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat." *JOSH: Journal of Sharia* 3 (01): 62–68. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.805>.
- Kususmastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2008. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). 4-7.
- Mahmudah, H. 2017. "Transmisi Ideologi Fundamentalisme Dalam Pendidikan. *TAJDID :Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*. 1 (02): 201-211.
- Pati, Krisna Y.K. Lompoliuw Agustinus B, dan Trintje Lambey. 2018. "Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado." *Jurnal SPORTIF : Jurnal Penelitian Pembelajaran* 2 (6): 24–29.
- Qin, W. (2017). Study on The Ideological Function of Ideological and Political Education. *Social Science, Education and Humanities Research*, 123, 11-17.
- Recalliandra Marella Zainenci, Sunny Ummul Firdaus, dan Jadmiko Anom Husodo. 2024. "Implementasi Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kabupaten Purworejo Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Partai Politik." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1 (2): 45–56.
- Setiawan, I. (2023). Antonio Gramsci dan Teori Hegemoni : Pemahaman Tentang Kekuasaan, Budaya dan Struktur Sosial. *Jurnal INSANI* .
- Sulistiyanto, P. (2013). Ideologi dan Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , 1-12.
- Alfian Ideologi dan Politik [Book]. - Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009. - pp. 20-21.

Arditya Prayogi, Riki Nasrullah, Singgih Setiawan, M. Adin Setyawan The Concept Conflict and The theory of Social Conflict in Karl Marx Thought [Journal] // Jurnal Sinora. - 2025. - p. 5.

Arkan Aziz Mubarak dan Sunny Umul Firdaus Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta [Journal] // Res Publica. - 2020. - p. 348.

Benjamin Lee & Kim Knot Ideological Transmision III : Political and Religius Organisation [Journal] // CREST : Center for Research and Evidance Security Threats. - 2018. - p. 29.

Budianto Rachmad Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda [Journal] // eJurnal Ilmu Pemerintahan. - 2017. - 1 : Vol. 5. - p. 96. - 2477-2458.

Eko Handoyo dan Puji Lestari Pendidikan Politik [Book]. - Yogyakarta : Penerbit Pohon Cahaya (Anggota IKAPI), 2017. - 978-602-5474-08-8.

Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiyati Aisyah dan Deni Candra Studi Analisis Konsep Ideologi Marhaenisme Soekarno Sebagai Asas Perjuangan Bangsa Indonesia [Journal] // Jurnal Kewarganegaraan. - 2022.

Firmanzah Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi [Book]. - Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

Hakim Muhammad Aziz Repositioning Pancasila Dalam Pergulatan Ideologi-Ideologi Gerakan Di Indonesia Pasca Reformasi [Journal] // Kontemplasi. - 2016. - 01 : Vol. 04.

Hamka Sosiologi Pengetahuan : Telaah Atas Pemikiran Karl Manheim [Journal] // Scolae Journal Of Pedagogy. - Palu : [s.n.], 2020. - pp. 80-81.

Heywood Andrew Ideologi Politik [Book]. - Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2016. - Vol. I : pp. 8-13.

Kartono Kartini PENDIDIKAN POLITIK : Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa [Book]. - Bandung : CV. Mandar Maju, 2009.

Kristeva Nur Sayyid Santoso Sejarah Ideologi Dunia : Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Anarkisme dan Marxisme, Konservatisme [Book]. - [s.l.] : Eye on The

Revolution Press, 2010.

Qin Wei Study on The Ideological Function of Ideological and Political Education

[Journal] // Social Science, Education and Humanities Research. - 2017. - Vol. 123. - pp. 11-17.

Recalliandra Marella Zanenci, Sunny Ummul Firdaus, dan Jadmiko Anom Husodo

Implementasi Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kabupaten Purworejo Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik [Journal] // Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia. - 2024. - p. 5.

Setiawan Iwan Antonio Gramsci dan Teori Hegemoni : Pemahaman Tentang Kekuasaan, Budaya dan Struktur Sosial [Journal] // Jurnal INSANI. - 2023.

Sulistiyanto P. Ideologi dan Politik di Indonesia [Journal] // Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. - 2013. - pp. 1-12.

Sutrisman Dudih Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan dan Mahasiswa [Book]. - Bandung : Guepedia Publisher, 2020. - p. 2.

Syam Hasnu Firdaus Ideologi dan Partai Politik [Journal] // Syntax Idea. - 2021. - 7 : Vol. 3. - p. 16.

Yan Yan Yuliana, Adityawarman, dan Agus Nurul Syam Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Upaya Mendukung Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Masyarakat di Kabupaten Pangandaran [Journal] // Repository UNIGAL. - 2022. - p. 3626.

Yulianto Faby Lukysandia Domas Proses Kaderisasi Madya Dalam Meningkatkan Budaya Anti Korupsi [Journal] // Repository Raden Intan. - 2024. - p. 49.

Yan Yan Yuliana, Adityawarman, dan Agus Nurul Syam. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Upaya Mendukung Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Masyarakat di Kabupaten Pangandaran. *Repository UNIGAL* , 3626

Yusra, Zhahara, Rufran Zulkarnain, dan Sofino Sofino. 2021. "Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19." *Journal Of Lifelong Learning* 4 (1): 15–22.

Website :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Masa Bakti 2019-2024) Laman web, <https://pdiperjuangankalsel.id/lambang-pdi-perjuangan/> (2023)

Badan Pusat Statistika Semarang, (2020), Profil Kota Semarang, <https://semarang.bps.go.id>

Badan Pusat Statistika Semarang, (2024), Jumlah Penduduk Kota Semarang, <https://semarang.bps.go.id>

Pemerintah Kota Semarang, (2018), Profil Kota Semarang, <https://semarangkota.go.id>

Peter Kasenda, Pokok Pokok Pemikiran Marhaenisme Soekarno, <https://peterkasenda.wordpress.com>

Wawancara :

Adelia Azzahra, diwawancarai oleh penulis, 25 April 2025

Andik. S, S.H, diwawancarai oleh penulis, 17 April 2025

Didik Setiawan, S.E, diwawancarai oleh penulis, 25 April 2025

Didik Sugeng, S.H, M.Hum, diwawancarai oleh penulis, 22 April 2025

Kadar Lusman, S.E, M.M, diwawancarai oleh penulis, 26 April 2025

Nur Aeni, S.Psi, diwawancarai oleh penulis, 25 April 2025

Seto Pambudi, S.Pd, diwawancarai oleh penulis, 25 April 2025

Untung Sudjarno, S.H, diwawancarai oleh penulis, 17 Februari 2025

Violita Angelina, S.Akun, diwawancarai oleh penulis, 25 April 2025

Yosi Yonardo, S.E, diwawancarai oleh penulis, 22 April 2025

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nur Laila Fitriana
2. Tempat & Tanggal Lahir : Batang, 19 Juni 2003
3. Alamat Rumah : Desa. Keputon, RT.01/RW.02. Kecamatan Blado.
Kabupaten Batang, Jawa Tengah
4. Domisili : Jl. Segaran I No. 27 B, Purwoyoso, Ngaliyan, Kota
Semarang
4. Nomor HP : 081392887587
5. E-mail : lailafitriana619@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. RA MASYITHOH Keputon
2. MI Islamiyah Keputon
3. MTs Agung Alim Blado
4. MA Sunan Kalijaga Bawang
5. UIN Walisongo Semarang

C. Riwayat Organisasi

1. PMII Rayon FISIP UIN Walisongo (2022)
2. Orda KMBS (2022)
3. Bendahara UKM Bhineka (2022)
4. TA SEMA FISIP UIN Walisongo (2022)
5. Dewan Ambalan UIN Walisongo (2023)
6. SEMA FISIP UIN Walisongo (2023)
7. PMII Komisariat UIN Walisongo (2024)
8. DEMA UIN Walisongo (2024)

LAMPIRAN

NOTULEN KEGIATAN

Hari / Tanggal : Minggu, 11 Desember 2022
Jam : 13.00 – selesai
Tempat : Gedung Graha Sari
Jl. Slamet Riyadi No. 4, Gayamsari, Semarang
Agenda : Pendidikan Politik Pemantapan Dalam Menghadapi Pemilu Th. 2024
Bagi Struktural dan Kader PAC PDI Perjuangan Kec. Gayamsari,
Kec. Semarang Selatan dan Kec. Pedurungan
Jml Undangan : 1220 orang
Hadir : 1174 orang

Dihadiri Oleh :

1. Jajaran Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang
2. Pengurus PAC Kec. Gayamsari, Kec. Semarang Selatan dan Kec. Pedurungan
3. Pengurus Ranting Se- Kec. Gayamsari, Kec. Semarang Selatan dan Kec. Pedurungan
4. Komandan Te Bintang Tiga dan Dua Dapil Semarang II dan Dapil Semarang VI
5. Komandan Te Bintang Satu Kec. Gayamsari, Kec. Semarang Selatan dan Kec. Pedurungan

Susunan Acara :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars dan Hymne PDI Perjuangan
3. Sambutan Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang
4. Acara inti “Pendidikan Politik Pemantapan Dalam Menghadapi Pemilu Th. 2024 Bagi Struktural dan Kader PAC PDI Perjuangan Kec. Gayamsari, Kec. Semarang Selatan dan Kec. Pedurungan”
5. Do’a
6. Penutup

Hasil Kegiatan :

Kadar Lusman, SE, MM selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menyimpulkan hasil kegiatan sebagai berikut :

- a. Ini adalah awal roadshow DPC PDI Perjuangan yang ke 2 bersama struktural PAC , Ranting, Komandan Te Bintang Tiga, Bintang Dua dan Bintang satu;
- b. Kita tidak boleh berdiam diri, berpangku tangan karena Pemilu tinggal 2 tahun lagi, mari berjuang bersama, bergerak bersama menangkan Semarang Tengah secara spektakuler;
- c. Kita bukan gerombolan, bukan paguyuban, kita ini Partai Politik yang didalamnya PDI Perjuangan, Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua DPD PDI Perjuangan mas Bambang Pacul dan Ketua DPC mas Hendi, untuk itu kita semua tegak lurus jalankan instruksi Partai;

- d. Perintah Ibu Ketua Umum sudah sangat jelas dan diteruskan ke DPD ke DPC bagaimana caranya PDI Perjuangan bisa hattrick menang secara spektakuler, di Dapil 2 dan Dapil 6 kemarin 8 kursi, Gayamsari dapat, Pedurungan dapat, Genuk dapat, Semarang Barat Dapat, Semarang Selatan dapat dan mudah-mudahan Komandan Te Bintang Dua jadi semua.

NOTULEN KEGIATAN

Hari / Tanggal : Sabtu, 28 Januari 2023
Jam : 07.00 WIB s.d selesai
Tempat : Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mangunharjo
Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Semarang
Agenda : Pendidikan Politik Bagi Struktural dan Kader Tentang Arti
Pentingnya Penghijauan dan Kebersihan, Untuk Terciptanya Lingkungan
Hidup Yang Lestari
Jml Undangan : 450 pcs
Hadir : 450 orang

Dihadiri Oleh :

6. Jajaran Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang
7. Komandan Te Bintang Dua
8. KSB PAC Se- Kota Semarang
9. Pengurus PAC & Ranting Se- Kecamatan Tugu
10. Pengurus PAC Kecamatan Ngaliyan
11. KSB Ranting Se- Kecamatan Ngaliyan
12. Masyarakat Umum

Susunan Acara :

7. Pembukaan
8. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
9. Do'a
10. Sambutan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang
11. Acara inti "Pendidikan Politik Bagi Struktural dan Kader Tentang Arti Pentingnya Penghijauan dan Kebersihan, Untuk Terciptanya Lingkungan Hidup Yang Lestari"
12. Penutup

Hasil Kegiatan :

Dr. H. Hendrar Prihadi, SE, MM selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang mengatakan tujuan diadakannya kegiatan Pendidikan Politik Bagi Struktural dan Kader Tentang Arti Pentingnya Penghijauan dan Kebersihan, Untuk Terciptanya Lingkungan Hidup Yang Lestari adalah merupakan sarana untuk melestarikan lingkungan, agar lingkungan kembali asri dan sehat tanpa adanya pencemaran. Dengan adanya penghijauan akan menurunkan suhu suatu tempat, banyaknya oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan akan membuat lingkungan lebih segar, teduh, nyaman, dan asri. Penghijauan juga sebagai sarana untuk pencegahan terhadap terjadinya bencana banjir dan erosi tanah. Dengan banyaknya pohon besar dan tinggi, air hujan akan diserap oleh akar tumbuhan. Kemudian air hujan tersebut

diubah menjadi air tanah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk lainnya. Kita sebagai kader harus ikut merawat dan menjaga lingkungan agar terlihat bersih dan nyaman supaya terciptanya lingkungan hidup yang lestari.

NOTULEN KEGIATAN

Hari / Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2023
Jam : 19.00 WIB – Selesai
Tempat : Stadion Jatidiri
Jl. Karangrejo Tengah, Karangrejo, Kec. Gajahmungkur
Agenda : Konsolidasi Semangat Menuju Pileg & Pilpres Nyalakan Api
Semangat Satu Barisan – Satu Komando
Jml Undangan : 4.000 pcs
Hadir : 4.046 orang

Dihadiri Oleh :

- 13. Jajaran Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang
- 14. Jajaran Pengurus PAC Partai
- 15. Jajaran Pengurus Ranting Partai
- 16. Komandan Te Bintang Dua

Susunan Acara :

- 13. Pembukaan
- 14. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars dan Hymne PDI Perjuangan
- 15. Do'a
- 16. Konsolidasi Semangat Menuju Pileg & Pilpres Nyalakan Api Semangat Satu Barisan – Satu Komando
- 17. Penutup

Hasil Kegiatan :

Dr. H. Hendrar Prihadi, SE, MM selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menyimpulkan hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik bahwa PDI Perjuangan akan mengabdikan diri untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera, tata tentrem kerta rahardja;
2. Dengan kepemimpinan nasional dari PDI Perjuangan maka kita kembali menjalankan tugas sejarah mewujudkan Indonesia yang semakin maju, negara yang dihormati dunia, Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian;
3. PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri, dapat tetap kokoh berdiri dengan tegak, solid bergerak terus memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara kita;

PDI Perjuangan telah melahirkan kader-kader terbaik di seluruh Indonesia; Bupati berprestasi, Walikota berprestasi, Gubernur berprestasi, Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta DPRD terbaik.

NOTULEN KEGIATAN

Hari / Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2023
Jam : 19.00 WIB – Selesai
Tempat : Stadion Jatidiri
Jl. Karangrejo Tengah, Karangrejo, Kec. Gajahmungkur
Agenda : Konsolidasi Semangat Menuju Pileg & Pilpres Nyalakan Api
Semangat Satu Barisan – Satu Komando
Jml Undangan : 4.000 pcs
Hadir : 4.046 orang

Dihadiri Oleh :

17. Jajaran Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang
18. Jajaran Pengurus PAC Partai
19. Jajaran Pengurus Ranting Partai
20. Komandan Te Bintang Dua

Susunan Acara :

18. Pembukaan
19. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars dan Hymne PDI Perjuangan
20. Do'a
21. Konsolidasi Semangat Menuju Pileg & Pilpres Nyalakan Api Semangat Satu Barisan – Satu Komando
22. Penutup

Hasil Kegiatan :

Dr. H. Hendrar Prihadi, SE, MM selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menyimpulkan hasil kegiatan sebagai berikut :

4. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik bahwa PDI Perjuangan akan mengabdikan diri untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera, tata tentrem kerta rahardja;
5. Dengan kepemimpinan nasional dari PDI Perjuangan maka kita kembali menjalankan tugas sejarah mewujudkan Indonesia yang semakin maju, negara yang dihormati dunia, Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian;
6. PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri, dapat tetap kokoh berdiri dengan tegak, solid bergerak terus memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara kita;

PDI Perjuangan telah melahirkan kader-kader terbaik di seluruh Indonesia; Bupati berprestasi, Walikota berprestasi, Gubernur berprestasi, Pimpinan dan Anggota DPR RI. serta DPRD terbaik.

NOTULEN KEGIATAN

Hari / Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2023
Jam : 19.00 WIB – Selesai
Tempat : Stadion Jatidiri
Jl. Karangrejo Tengah, Karangrejo, Kec. Gajahmungkur
Agenda : Konsolidasi Semangat Menuju Pileg & Pilpres Nyalakan Api
Semangat Satu Barisan – Satu Komando
Jml Undangan : 4.000 pcs
Hadir : 4.046 orang

Dihadiri Oleh :

- 21. Jajaran Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang
- 22. Jajaran Pengurus PAC Partai
- 23. Jajaran Pengurus Ranting Partai
- 24. Komandan Te Bintang Dua

Susunan Acara :

- 23. Pembukaan
- 24. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars dan Hymne PDI Perjuangan
- 25. Do'a
- 26. Konsolidasi Semangat Menuju Pileg & Pilpres Nyalakan Api Semangat Satu Barisan – Satu Komando
- 27. Penutup

Hasil Kegiatan :

Dr. H. Hendrar Prihadi, SE, MM selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menyimpulkan hasil kegiatan sebagai berikut :

- 7. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik bahwa PDI Perjuangan akan mengabdikan diri untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera, tata tentrem kerta rahardja;
- 8. Dengan kepemimpinan nasional dari PDI Perjuangan maka kita kembali menjalankan tugas sejarah mewujudkan Indonesia yang semakin maju, negara yang dihormati dunia, Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian;
- 9. PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri, dapat tetap kokoh berdiri dengan tegak, solid bergerak terus memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara kita;

PDI Perjuangan telah melahirkan kader-kader terbaik di seluruh Indonesia; Bupati berprestasi, Walikota berprestasi, Gubernur berprestasi, Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta DPRD terbaik.

Dokumentasi Wawancara





Lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 25/04-BKPTS-DPC/DPP/12/2021, Tanggal 02 September 2021

**PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI
DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SEMARANG
MASA BAKTI 2019-2024**

1. KETUA BIDANG INTERNAL	: HENDRAR PRHADI, S.E., M.M.
2. WAKIL KETUA BIDANG KEHORMATAN PARTAI	: Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos
3. WAKIL KETUA BIDANG PEMENANGAN PEMILU	: PAULUS SUDARYANTO, S.E.
4. WAKIL KETUA BIDANG IDEOLOGI DAN KADERISASI	: I GEDE ANANTA WIJAYA PUTRA, S.T., M.M.
5. WAKIL KETUA BIDANG KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI	: DYAH RATNA HARIMURTI, S.Sos
BIDANG PEMERINTAHAN	
6. WAKIL KETUA BIDANG POLITIK	: FAJAR ADI PAMUNGKAS, S.H.
7. WAKIL KETUA BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PERLUNDUNG-UNDANGAN	: FAJAR RINAWAN SITORUS, S.H.
8. WAKIL KETUA BIDANG PEREKONOMIAN	: MICHAEL, S.Kom
9. WAKIL KETUA BIDANG KEBUDAYAAN	: MARTINUS DWI SEPTIANTO, S.E.
BIDANG KERAKYATAN	
10. WAKIL KETUA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KESEHATAN, PEREMPUAN DAN ANAK	: LELY PURWANDARI
11. WAKIL KETUA BIDANG INDUSTRI, TENAGA KERJA, JAMINAN SOSIAL, KOPERASI DAN UKM	: ENDANG RETNAWATI, S.E.
12. WAKIL KETUA BIDANG EKONOMI KREATIF, EKONOMI DIGITAL, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	: CATHERINE ANGGRAENY, S.E., Ak., CA, ACPA
13. WAKIL KETUA BIDANG KEAGAMAAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	: H. SUPRIYADI, S.Sos
14. WAKIL KETUA BIDANG PANGAN, PERTANIAN, KEMUTAHAN, LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	: R. YUWANTO
15. SEKRETARIS	: KADARLUSMAN
16. WAKIL SEKRETARIS BIDANG INTERNAL	: WISDA PRIDATOE
17. WAKIL SEKRETARIS BIDANG PROGRAM	: MARGONO
18. BENDAHARA	: M. RUKIYANTO A.B., S.H., M.A.
19. WAKIL BENDAHARA	: KRISTIANI, S.Sos

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
MASA BAKTI 2019-2024**

Ketua Umum,

Megawati Soekarno-Putri
MEGAWATI SOEKARNO-PUTRI

Sekretaris Jenderal,

Hasto Kristiyanto
HASTO KRISTYANTO

ANGGARAN RUMAH TANGGA PDI PERJUANGAN

175

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sekolah Partai diatur dengan Peraturan Partai.

Pasal 86

Materi Kaderisasi

- (1) Materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pokok atau utama terdiri dari:
- Indonesia Menggugat Tahun 1930;
 - Mencapai Indonesia Merdeka Tahun 1933;
 - Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945;
 - Membangun Dunia kembali 1960;
 - Nawaksara tahun 1966; dan
 - Pidato Ketua Umum pada Pembukaan Kongres III Tahun 2010 Bali dan pidato-pidato Ketua Umum lainnya.
- (2) Materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pendukung terdiri dari:
- Kapitalisme Bangsa sendiri Tahun 1932;
 - Amanat Presiden Soekarno Tahun 1959;
 - Amanat Presiden Soekarno tahun 1960;
 - Deklarasi Ekonomi Tahun 1963; dan
 - Marhaenisme adalah Teori Perjuangan Tahun 1965.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan kader Partai diatur dalam Silabus Pendidikan dan Pelatihan Kader Partai yang ditetapkan dalam Peraturan Partai.

Lampiran: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Nomor 25/04-BKPTS-DPC/DPP/14/2021, Tanggal 02 September 2021

**PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI
DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SEMARANG
MASA BAKTI 2019-2024**

1. KETUA	HENDRAR PRIHADI, S.E., M.M.
BIDANG INTERNAL	
2. WAKIL KETUA BIDANG KEHORMATAN PARTAI	I. H. HEVEARITA GUNARYANTI
3. WAKIL KETUA BIDANG PEMENANGAN PEMILU	RAHAYU, M. Sos
4. WAKIL KETUA BIDANG IDEOLOGI DAN KADERISASI	PAULUS SUDARYANTO, S.E.
5. WAKIL KETUA BIDANG KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI	IGEDE ANANTA WIJAYA PUTRA, S.T., M.M.
	DIYAH RATNA HARIMURTI, S. Sos
BIDANG PEMERINTAHAN	
6. WAKIL KETUA BIDANG POLITIK	FAJAR ADI PAMUNGKAS, S.H.
7. WAKIL KETUA BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PERUNDANG-UNDANGAN	FAJAR RINAWAN SITURUS, S.H.
8. WAKIL KETUA BIDANG PEREKONOMIAN	MICHAEL, S. Kom
9. WAKIL KETUA BIDANG KEBUDAYAAN	MARTINUS DWI SEPTIANTO, S.E.
BIDANG KERAKYATAN	
10. WAKIL KETUA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KESEHATAN, PEREMPUAN DAN ANAK	LELY PURWANDARI
11. WAKIL KETUA BIDANG INDUSTRI, TENAGA KERJA, JAMINAN SOSIAL, KOPERASI DAN UMKM	ENDANG RETNAWATI, S.E.
12. WAKIL KETUA BIDANG EKONOMI KREATIF, EKONOMI DIGITAL, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	CATHERINE ANGGRAENY, S.E., Ak., CA., ACPA
13. WAKIL KETUA BIDANG KEAGAMAAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	H. SUPRIYADI, S. Sos
14. WAKIL KETUA BIDANG PANGAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	R. YUNWANTO
15. SEKRETARIS	KADARLUSMAN
16. WAKIL SEKRETARIS BIDANG INTERNAL	WISDA PRIDATOE
17. WAKIL SEKRETARIS BIDANG PROGRAM	MARGONO
18. BENDAHARA	M. RUKYANTO A.B., S.H., M.A.
19. WAKIL BENDAHARA	KRISTIANI, S. Sos

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
MASA BAKTI 2019-2024**

Ketua Umum.

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI


Sekretaris Jenderal.

HASTO KRISTİYANTO

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sekolah Partai diatur dengan Peraturan Partai.

Pasal 86

Materi Kaderisasi

- (1) Materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pokok atau utama terdiri dari:
- Indonesia Menggugat Tahun 1930;
 - Mencapai Indonesia Merdeka Tahun 1933;
 - Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945;
 - Membangun Dunia kembali 1960;
 - Nawaksara tahun 1966; dan
 - Pidato Ketua Umum pada Pembukaan Kongres III Tahun 2010 Bali dan pidato-pidato Ketua Umum lainnya.
- (2) Materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pendukung terdiri dari:
- Kapitalisme Bangsa sendiri Tahun 1932;
 - Amanat Presiden Soekarno Tahun 1959;
 - Amanat Presiden Soekarno tahun 1960;
 - Deklarasi Ekonomi Tahun 1963; dan
 - Marhaenisme adalah Teori Perjuangan Tahun 1965.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan kader Partai diatur dalam Silabus Pendidikan dan Pelatihan Kader Partai yang ditetapkan dalam Peraturan Partai.



PDI PERJUANGAN

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
MASA BAKTI 2019 – 2024

BAGIAN KEDUA SISTEM KADERISASI

Pasal 84

Kaderisasi Partai

- (1) DPC Partai melaksanakan pendidikan Kader Pratama dan melaporkannya kepada DPD Partai.
- (2) DPD Partai melaksanakan pendidikan Kader Madya dan melaporkannya kepada DPP Partai.
- (3) DPP Partai melaksanakan pendidikan Kader Utama.
- (4) DPP Partai melakukan seleksi terhadap Kader Utama untuk ditunjuk menjadi Kader Pendidik sebagai pelaksana pendidikan kaderisasi di provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 85

Sekolah Partai

- (1) Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai didirikan hanya di tingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP Partai.
- (2) Sekolah Partai menyelenggarakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan yang ditujukan untuk:
 - a. Anggota Partai;
 - b. Kader Partai;
 - c. Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - d. Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - e. Calon pejabat politik dan calon pejabat publik lainnya.
- (3) Sekolah Kader Partai menyelenggarakan pendidikan kader lanjutan yang ditujukan kepada Kader Utama Partai.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sekolah Partai diatur dengan Peraturan Partai.

Pasal 86

Materi Kaderisasi

- (1) Materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pokok atau utama terdiri dari:
 - a. Indonesia Menggugat Tahun 1930;
 - b. Mencapai Indonesia Merdeka Tahun 1933;
 - c. Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945;
 - d. Membangun Dunia kembali 1960;
 - e. Nawaksara tahun 1966; dan
 - f. Pidato Ketua Umum pada Pembukaan Kongres III Tahun 2010 Bali dan pidato-pidato Ketua Umum lainnya.
- (2) Materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pendukung terdiri dari:
 - a. Kapitalisme Bangsa sendiri Tahun 1932;
 - b. Amanat Presiden Soekarno Tahun 1959;
 - c. Amanat Presiden Soekarno tahun 1960;
 - d. Deklarasi Ekonomi Tahun 1963; dan
 - e. Marhaenisme adalah Teori Perjuangan Tahun 1965.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan kader Partai diatur dalam Silabus Pendidikan dan Pelatihan Kader Partai yang ditetapkan dalam Peraturan Partai.

BAB IV
PENDIDIKAN POLITIK

Bagian Pertama
Bentuk Pendidikan Politik

Pasal 83

- (1) Pendidikan politik Partai dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penanaman dan penyebaran ajaran Bung Karno;
 - b. pendalaman pemahaman terhadap Pancasila, UUD NKRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - d. pendidikan kaderisasi anggota Partai secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk kegiatan pendidikan politik partai dilaksanakan dalam kegiatan yang bersifat formal dan informal.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Juang Partai diatur dengan Peraturan Partai.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	31
Gambar 4.1.....	47
Gambar 4.2.....	57
Gambar 4.3.....	62
Gambar 4.4.....	63
Gambar 4.5.....	65
Gambar 4.6.....	67
Gambar 4.7	70